



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய அரசு உடைய அரசு இறைமையுடையது

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKPD

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

LKPD D.I. Yogyakarta TA 2025 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan LKPD

LKPD D.I. Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan LKPD D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ပိယိကိက္ခယာဇကုဿဇကုဗျူဟိယဗဟုဗဟုဗဟုဗဟု

1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ပိတောက်တို့အဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့ဖြူရောင်စင်စင်

10. PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
17. Peraturan Daerah (Perda) D.I. Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
18. Perda D.I. Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
19. Perda D.I. Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 14);
20. Perda D.I. Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 5);
21. Peraturan Gubernur (Pergub) D.I. Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ပိတောက်တို့အဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့ဖြူဖွယ်စွာအတူတူ

22. Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
23. Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 46);
24. Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
25. Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
26. Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 27);
27. Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43);
28. Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 18);
29. Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Pergub D.I. Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 37).



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

1.3 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Pemda DIY menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY meliputi urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan urusan keistimewaan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - f. Sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c. Pangan
 - d. Pertanahan
 - e. Lingkungan Hidup
 - f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - i. Perhubungan
 - j. Komunikasi dan Informatika
 - k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - l. Penanaman Modal
 - m. Kepemudaan dan Olahraga
 - n. Statistik
 - o. Persandian
 - p. Kebudayaan
 - q. Perpustakaan
 - r. Kearsipan
3. Urusan Pemerintahan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

- b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - f. Perdagangan
 - g. Perindustrian
 - h. Transmigrasi
4. Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta Fungsi Penunjang
- a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Perencanaan
 - d. Keuangan
 - e. Kepegawaian
 - f. Pendidikan dan Pelatihan
 - g. Penelitian dan Pengembangan
 - h. Pengelolaan Penghubung
 - i. Inspektorat Daerah
 - j. Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Otonomi Khusus)
- a. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - b. Kebudayaan
 - c. Tata Ruang
 - d. Pertanahan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY tahun 2025 mengacu pada Perda D.I. Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Entitas akuntansi pada Pemda DIY tahun 2025 sebanyak 31 Pengguna Anggaran (PA). Konsolidasi LKPD Pemda DIY dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) yang berfungsi sebagai entitas pelaporan. Adapun rincian entitas akuntansi Pemda DIY adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora)
2. Dinas Kesehatan (Dinkes)
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM)
4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) (Dispertaru)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦝꦺꦩꦸꦫꦺꦤ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦠ

5. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
7. Dinas Sosial (Dinsos)
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2)
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS)
11. Dinas Perhubungan (Dishub)
12. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM)
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
15. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) (Disbud)
16. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD)
17. Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan)
18. Dinas Pariwisata (Dispar)
19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
22. Sekretariat Daerah (Setda)
23. Sekretariat DPRD (Setwan)
24. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)
25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA)
26. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
27. Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat)
28. Badan Penghubung Daerah (Banhubda)
29. Inspektorat
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
31. *Paniradya Kaistimewan*

Setiap entitas akuntansi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola dalam bentuk laporan keuangan. Entitas akuntansi pada PA mempunyai kewajiban untuk mengkonsolidasikan semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

(KPA) di bawahnya. Selanjutnya BPKA akan melakukan konsolidasi semua laporan keuangan entitas akuntansi pada PA dan PPKD.

1.4 Sistematika Penulisan CaLK

Sistematika penulisan CaLK adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan LKPD
- 1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi
- 1.4. Sistematika Penulisan CaLK

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Kondisi Ekonomi Daerah
 - 2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2020-2024
 - 2.1.2. Struktur Pengeluaran dalam PDRB
 - 2.1.3. PDRB per Kapita
 - 2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.5. Inflasi
 - 2.1.6. Ketenagakerjaan
 - 2.1.7. Kemiskinan
 - 2.1.8. Ketimpangan Regional
 - 2.1.9. Ketimpangan Pendapatan
- 2.2. Kerangka Ekonomi Daerah
- 2.3. Kebijakan Keuangan, Strategi, dan Prioritas APBD
 - 2.3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - 2.3.2. Perkembangan IPM DIY Tahun 2020-2025
 - 2.3.3. Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 2.3.4. Kebijakan Belanja Daerah
 - 2.3.5. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2. Hambatan dan Kendala Terkait Pengelolaan Pendapatan dan Belanja

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦧꦶꦲꦶꦤ꧀ꦠꦏꦸꦮꦺꦤ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦿꦲꦏꦂꦠ

- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan LKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian dan Penjelasan LRA
 - 5.1.1. Pendapatan Daerah
 - 5.1.2. Belanja Daerah
 - Surplus (Defisit)
 - 5.1.3. Pembiayaan Daerah
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- 5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan SAL
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
 - 5.2.3. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3. Rincian dan Penjelasan Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.4.1. Pendapatan - LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi
 - 5.4.4. Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.5. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.6. Surplus/Defisit - LO
- 5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5. Kenaikan Penurunan Kas
 - 5.5.6. Saldo Akhir Kas



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦧꦶꦱꦺꦤ꧀ꦭꦺꦁꦠꦺꦤꦩꦸꦥꦺꦩꦠꦺꦤ꧀ꦠꦏꦸꦁꦏꦺꦤꦁ

- 5.6. Rincian dan Penjelasan LPE
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2. Surplus/Defisit - LO
 - 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan
 - 5.6.4. Ekuitas Akhir

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

Bab VII Penutup



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦠꦺꦩꦶꦤ꧀ꦠꦸꦭꦸꦁꦠꦶꦲꦸꦒꦶꦏꦂꦠ

BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD**

2.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Sepanjang tahun 2025, perekonomian DIY secara kumulatif tumbuh 5,49% dibandingkan tahun 2024 (*c-to-c*). Sementara secara triwulanan (*q-to-q*), ekonomi DIY pada triwulan IV tahun 2025 juga meningkat 3,45% dibandingkan triwulan III tahun 2025. Secara spasial, kinerja perekonomian DIY tercatat sebagai yang tertinggi di wilayah Jawa. Pertumbuhan tahunan DIY sebesar 5,94% melampaui pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa yang sebesar 5,80% (*y-on-y*), serta berada di atas capaian nasional yang tumbuh 5,39% (*y-on-y*).

Meskipun beberapa indikator ekonomi mengalami perbaikan, potensi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menghadapi tantangan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan. Tantangan peningkatan pertumbuhan berasal dari dinamika dan disrupsi di tingkat nasional dan internasional. Salah satu kondisi yang berpotensi menghambat pertumbuhan adalah amanat efisiensi untuk mengurangi beberapa jenis belanja seperti belanja perjalanan dinas dan makan minum baik di tingkat kementerian dan lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tingkat internasional, perang dagang yang dipicu oleh kebijakan proteksionis Pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan meningkatkan tarif impor. Kebijakan itu mendapatkan respon retaliasi dari beberapa negara. Sementara itu negara-negara pengimpor bagi AS melakukan langkah negosiasi untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2021-2025

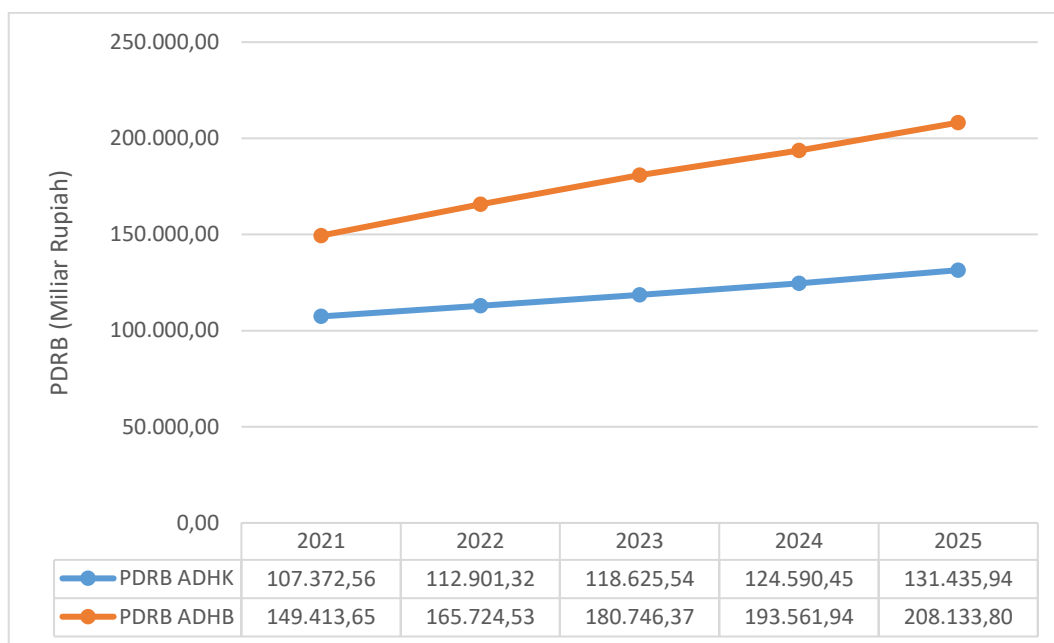
Perekonomian DIY selama periode 2021 sampai 2025 menunjukkan perkembangan ekspansif. Pada tahun 2021, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah Rp107,37 triliun dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp149,41 triliun. Tren PDRB ADHK dan ADHB terus meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Pada akhir periode PDRB ADHK adalah Rp131,44 triliun dan PDRB ADHB adalah Rp208,13 triliun.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கருவாடக வடகருவாடக வடகருவாடக வடகருவாடக வடகருவாடக

Gambar 2. 1
PDRB ADHB dan ADHK DIY 2021 – 2025



Sumber : BPS Provinsi DIY 2025

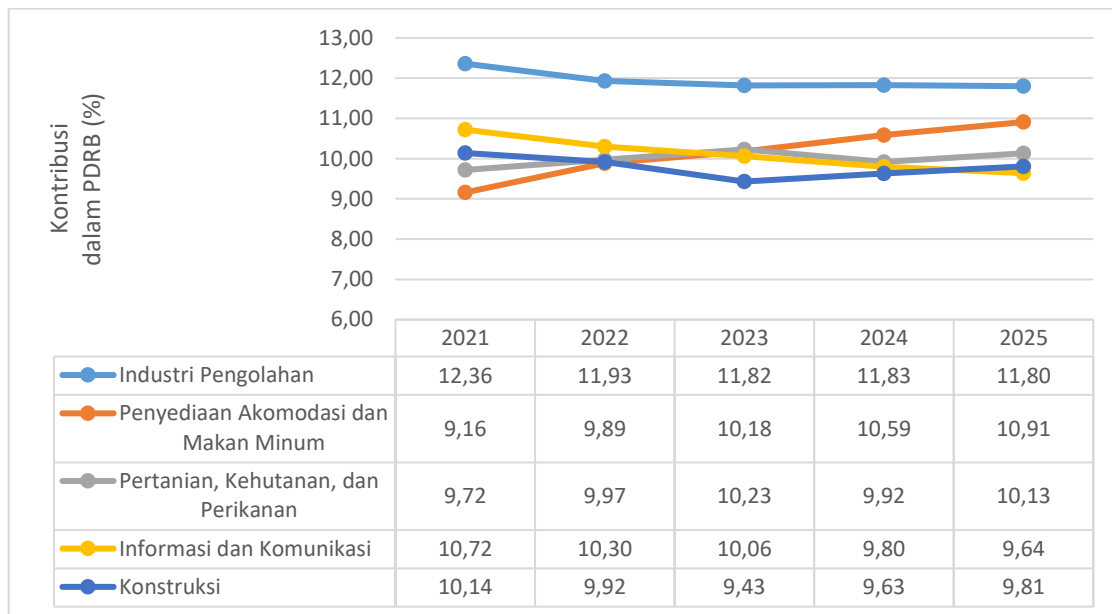
Selama lima tahun terakhir (2021-2025), struktur perekonomian DIY didominasi oleh lima kategori utama yaitu industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum; pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi; serta informasi dan komunikasi. Pada tahun 2025 kategori industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PDRB menurut lapangan usaha di DIY dengan kontribusi sebesar 11,80%. Posisi berikutnya ditempati oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,91%, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan berada pada urutan ketiga sebesar 10,13%. Selanjutnya kategori konstruksi serta informasi dan komunikasi masing-masing memberikan kontribusi sebesar 9,81% dan 9,64%. Dari lima kontributor utama tersebut, hanya penyediaan akomodasi dan makan minum saja yang menunjukkan tren peningkatan kontribusi secara konsisten sejak tahun 2021. Sebaliknya kontribusi industri pengolahan serta informasi dan komunikasi cenderung mengalami penurunan. Sementara itu peranan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan serta konstruksi menunjukkan pola yang relatif berfluktuasi selama periode tersebut.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

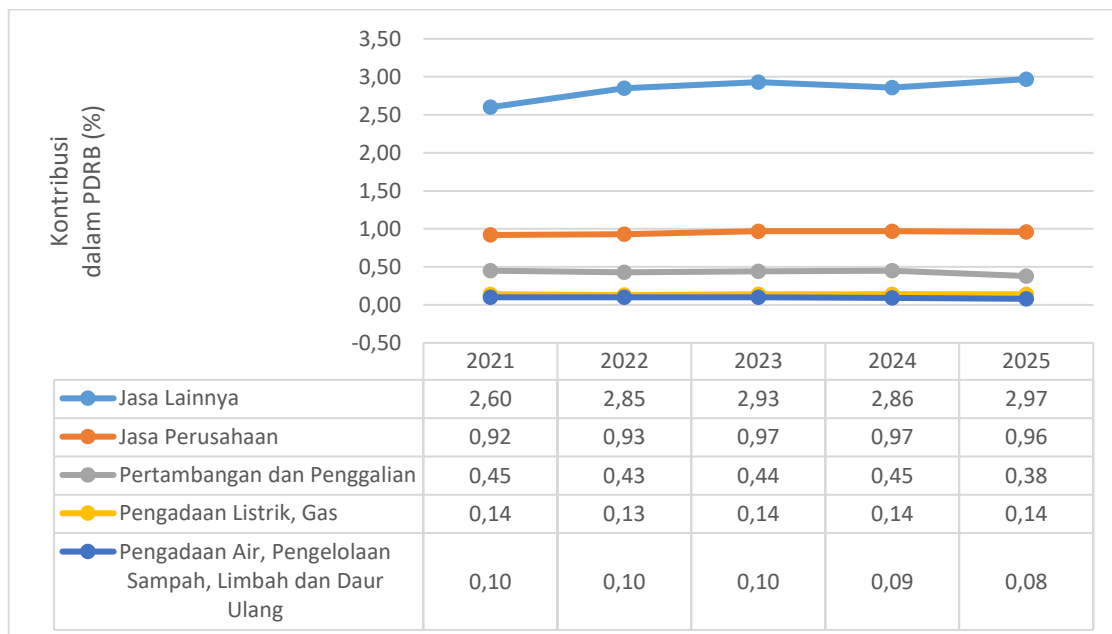
Di liris kagiyatan kagiyatan kagiyatan kagiyatan kagiyatan kagiyatan

Gambar 2. 2
Kontribusi Lima Sektor Terbesar Terhadap PDRB ADHK DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 – 2025
 (%)



Sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 2. 3
Kontribusi Lima Lapangan Usaha Terendah terhadap PDRB ADHK DIY Tahun 2021 - 2025 (%)



Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan * Triwulan IV



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யாகர்தா

2.1.2 Struktur Pengeluaran Dalam PDRB

Dalam struktur PDRB menurut pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian DIY. Kontribusi komponen PKRT terhadap perekonomian masih sangat dominan yakni mencapai 61,67%. Pada triwulan IV tahun 2025, komponen PKRT tumbuh sebesar 4,89% (y-on-y) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 4,29%. Akselerasi pertumbuhan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas masyarakat dan kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan rumah tangga. Peningkatan konsumsi rumah tangga mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian serta menjadi indikasi membaiknya pendapatan yang selanjutnya memperkuat daya beli masyarakat DIY.

Komponen PMTB menjadi kontributor ekonomi terbesar kedua pada triwulan IV tahun 2025 dengan pangsa 37,44% terhadap PDRB DIY. Meski tetap tumbuh tinggi sebesar 9,36% dan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran dengan andil mencapai 2,67%, kinerjanya melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 10,42%. Kendati demikian, aktivitas investasi masih tetap terjaga seiring berlanjutnya sejumlah proyek infrastruktur fisik, serta program revitalisasi sekolah, revitalisasi pasar, dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Keberlanjutan proyek-proyek tersebut menjaga momentum investasi sebagai penggerak utama perekonomian DIY hingga saat ini.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) merupakan kontributor ekonomi terbesar ketiga dalam perekonomian DIY dengan sumbangan sebesar 16,91% terhadap total pengeluaran. Kebijakan efisiensi anggaran yang masih diterapkan pemerintah berdampak pada penurunan belanja barang dan jasa yang bersumber dari APBD. Meskipun demikian, komponen PKP tepat mencatat pertumbuhan sebesar 1,47% pada triwulan IV tahun 2025.

Tabel 2.1
PDRB Triwulanan DIY Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, 2024-2025

Komponen	ADHB (Miliar Rupiah)			ADHK (Miliar Rupiah)		
	TW IV 2024	TW III 2025	TW IV 2025	TW IV 2024	TW III 2025	TW IV 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	30.808	31.662	33.191	16.992	17.214	17.822
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.612	1.686	1.818	881	904	966
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.734	6.785	9.102	4.630	3.512	4.698



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi yang berbudaya, berkeadilan, berkeadilan, berkeadilan, berkeadilan

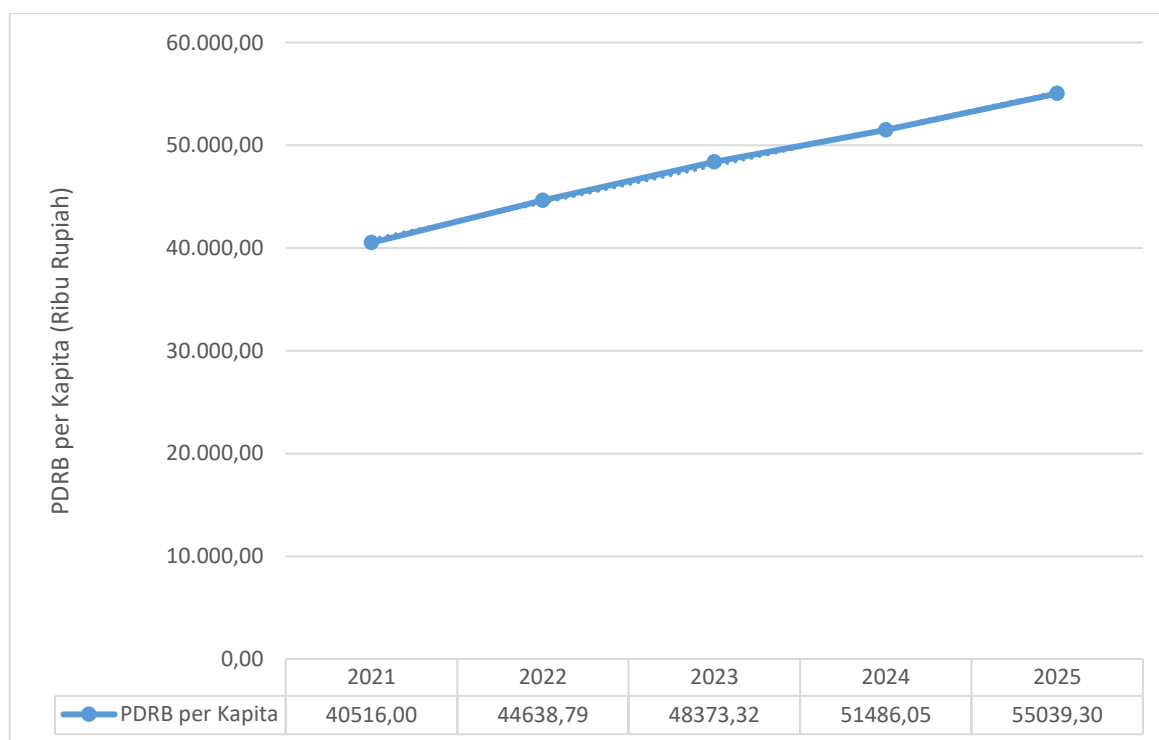
Komponen	ADHB (Miliar Rupiah)			ADHK (Miliar Rupiah)		
	TW IV 2024	TW III 2025	TW IV 2025	TW IV 2024	TW III 2025	TW IV 2025
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	17.915	19.564	20.148	9.128	9.714	9.982
5. Perubahan Inventori	89	-6	89	58	-4	62
6. Ekspor	26.642	26.101	25.078	14.404	14.278	13.863
7. Impor	36.048	34.069	35.604	14.154	12.909	13.555
PDRB	49.752	51.723	53.822	31.939	32.709	33.838

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2025

2.1.3 PDRB per Kapita

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan rata-rata yang diprosi dengan PDRB ADHB per kapita meningkat dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan grafik berikut ini.

Gambar 2. 4
PDRB ADHB per Kapita DIY Tahun 2021 – 2025 (Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi DIY

Nilai PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021 PDRB per kapita tercatat sebesar Rp40,52 juta dan secara nominal terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp55,04 juta pada tahun 2025.

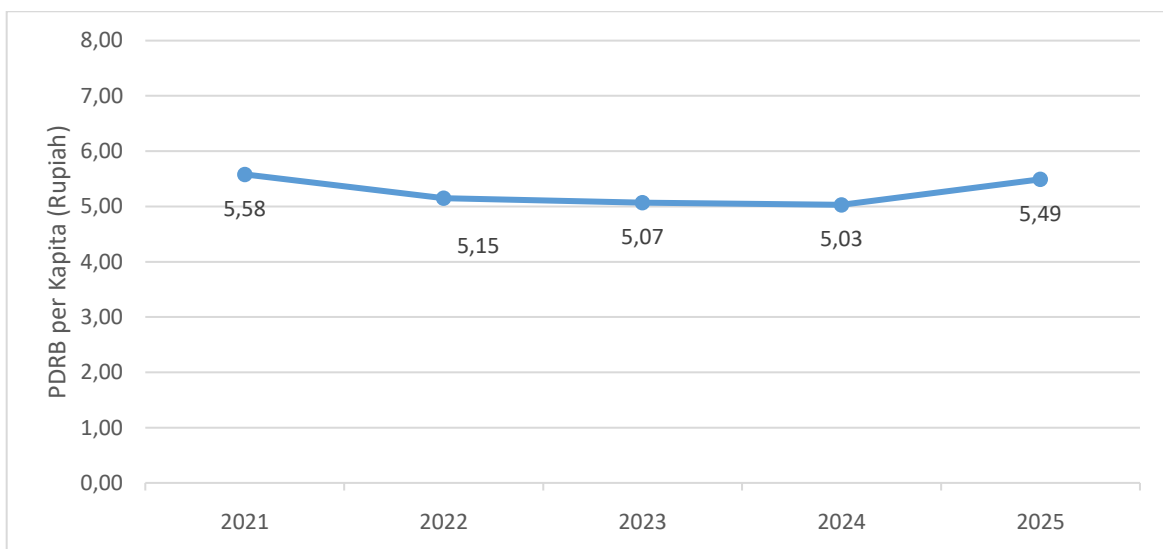


PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
பெரிய கருவாகு வாகு வாகு வாகு வாகு வாகு வாகு

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Setelah berkontraksi di tahun 2020, perekonomian senantiasa mengalami ekspansi dengan pertumbuhan ekonomi DIY positif selama periode 2021-2025. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 5,58%, setelah itu pertumbuhan ekonomi melambat. Di tahun 2025, pertumbuhan ekonomi DIY adalah 5,49%.

Gambar 2. 5
Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2021 - 2025 (%)



Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan * Proyeksi

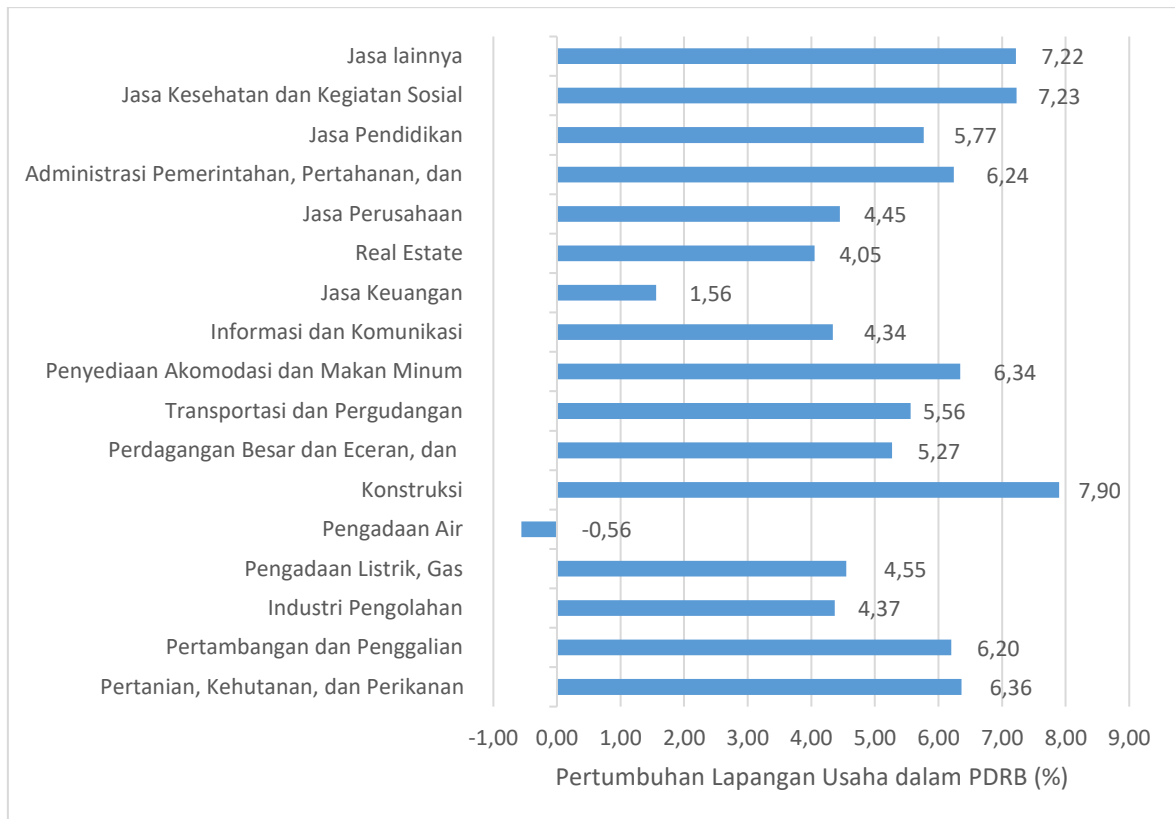
Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 utamanya didukung oleh pertumbuhan pada kategori konstruksi 7,90%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 7,23%, dan jasa lainnya 7,22%.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Gambar 2. 6
Pertumbuhan Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2025 (%)



Sumber : BPS Provinsi DIY

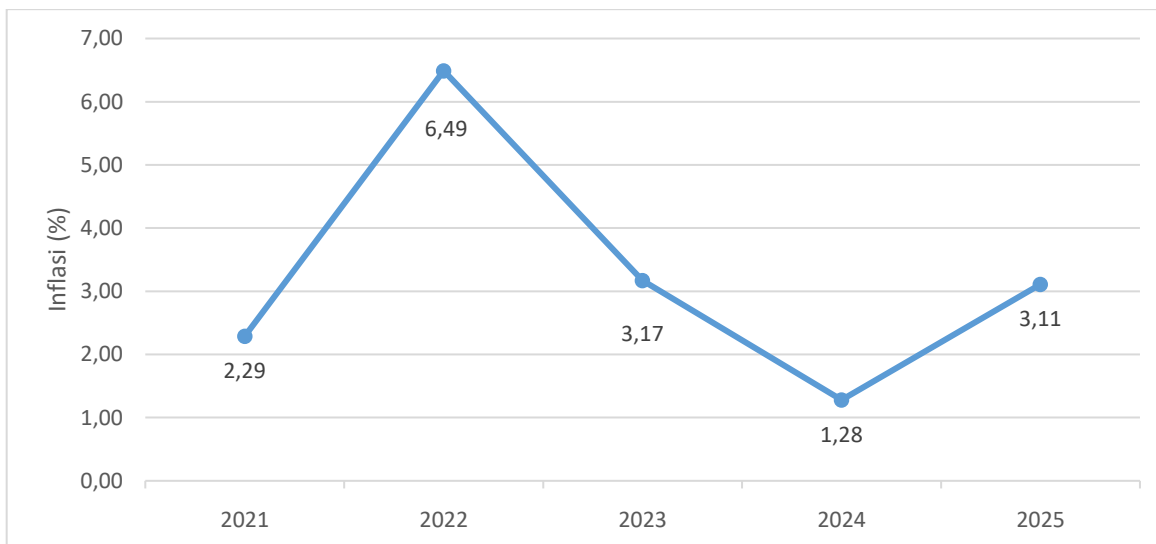
2.1.5 Inflasi

Tingkat inflasi DIY ditunjukkan oleh perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta. Selama tahun 2021-2025 perkembangan tingkat inflasi menunjukkan dinamika. Inflasi meningkat dari tahun 2021-2022 dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,49%. Selanjutnya inflasi menurun di tahun 2023-2024 namun kemudian meningkat lagi di tahun 2025.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 2. 7
Tingkat Inflasi IHK DIY Tahun 2021 – 2025 (%)



Sumber : BPS Provinsi DIY

2.1.6 Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja tahun 2021-2025 menunjukkan dinamika dari tahun ke tahun. Jumlah angkatan kerja meningkat dari tahun 2021 menuju tahun 2022 dan kemudian menurun kembali di tahun 2023. Di tahun 2024 dan 2025 jumlah angkatan kerja kembali meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran terbuka menunjukkan tren menurun selama tahun 2021-2024 dan sedikit meningkat di tahun 2025. Dinamika indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2021 sampai tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2
Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2021 – 2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Angkatan Kerja (orang)	2.334.960	2.336.080	2.221.690	2.261.440	2.278.814
Jumlah Penganggur Terbuka (orang)	106.430	94.950	81.980	78.670	78.743
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,56	4,06	3,69	3,48	3,46

Sumber: BPS Provinsi DIY

2.1.7 Kemiskinan

Dalam periode tahun 2021-2025 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 11,91%. Tingkat kemiskinan di tahun 2022 - 2024 mengalami penurunan setiap tahunnya dan di tahun 2025 tingkat kemiskinan turun menjadi 10,08%.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi

Tabel 2. 3
Kemiskinan di DIY Tahun 2021 - 2025 (September)

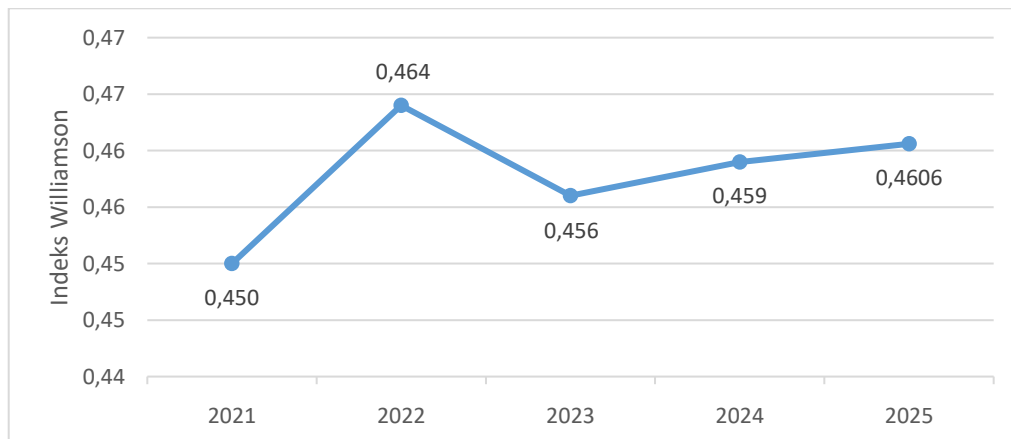
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	474,49	463,63	448,47	430,47	422,79
Tingkat Kemiskinan (%)	11,91	11,49	11,04	10,40	10,08

Sumber: BPS Provinsi DIY

2.1.8 Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah yang diukur menggunakan Indeks Williamson (IW) menunjukkan fluktuasi. Nilai IW DIY tahun 2021-2022 mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di DIY semakin tidak merata. Pada tahun 2022-2023 nilai IW sempat mengalami penurunan, namun kemudian meningkat lagi di tahun 2023-2025 dengan nilai IW DIY di tahun 2025 sebesar 0,4606.

Gambar 2. 8
Indeks Williamson DIY Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan

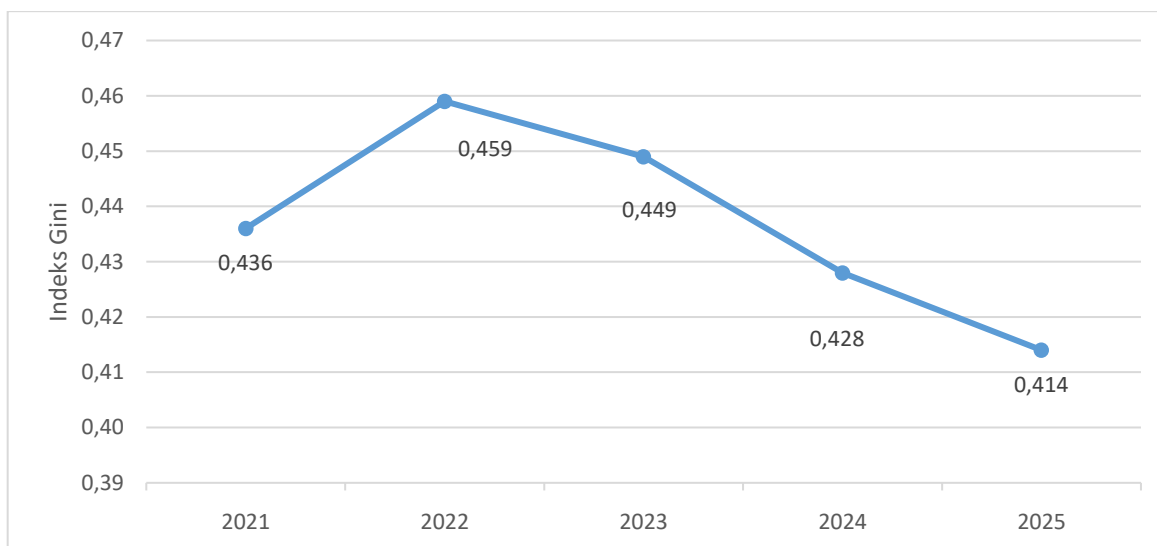
2.1.9 Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Pada tahun 2022 Rasio Gini mengalami peningkatan menjadi 0,459 dari tahun sebelumnya 0,436 dan setelah itu cenderung mengalami hingga tahun 2025. Pada tahun 2025, Rasio Gini DIY sebesar 0,414.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦫꦺꦴꦩꦶꦠꦺꦤ꧀ꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

Gambar 2. 9
Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2021 - 2025



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

2.2 Kerangka Ekonomi Daerah

Sepanjang tahun 2025, perekonomian DIY secara kumulatif tumbuh 5,49% dibandingkan tahun 2024 (c-to-c). Sementara secara triwulanan (q-to-q), ekonomi DIY pada triwulan IV tahun 2025 juga meningkat 3,45% dibandingkan triwulan III-2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya akselerasi kegiatan ekonomi menjelang akhir tahun, yang umumnya dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pariwisata, realisasi belanja pemerintah, serta naiknya konsumsi rumah tangga selama periode Libur Natal dan Tahun Baru.

Beberapa perkembangan indikator sektor ekonomi dan indikator ekonomi makro sampai dengan triwulan IV-2025 juga menunjukkan dinamika, antara lain meliputi:

1. Perkembangan ekonomi DIY pada triwulan IV tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai impor barang dan jasa masih lebih besar dibandingkan nilai ekspor. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat DIY terhadap barang dan jasa belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produksi dalam daerah, sehingga masih bergantung pada pasokan dari luar provinsi maupun luar negeri akibat keterbatasan kapasitas dan sumber daya produksi. Berdasarkan total PDRB DIY, pada triwulan IV tahun 2025 nilai tambah ekspor barang dan jasa tercatat sebesar Rp25,08 triliun, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp26,10 triliun. Di sisi lain, nilai tambah impor pada periode



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாறுவாஉருவாஉருவாபெரிவாபெரிவாபெரிவா

yang sama mencapai Rp35,60 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp34,07 triliun.

2. Sepanjang triwulan IV tahun 2025, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di DIY menunjukkan pergerakan yang fluktuatif, berada pada rentang 55,00% hingga 66,3%. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan triwulan III-2025 yang hanya berada pada kisaran 48,27% sampai dengan 58,48%. Meskipun mengalami peningkatan secara triwulanan, kondisi okupansi ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pelaku industri perhotelan.

2.3 Kebijakan Keuangan, Strategi dan Prioritas APBD

2.3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan merupakan bagian integral dari pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tema pembangunan disusun dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan RPJMD, isu-isu strategis yang aktual dan tema pembangunan nasional. Memperhatikan hal-hal tersebut dan selaras dengan tema RKP tahun 2025 yang tidak mengalami perubahan sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206 dan hasil evaluasi capaian pembangunan s.d. triwulan I tahun 2025 dengan hasil yang diproyeksikan tercapai di tahun 2025, maka tema Perubahan RKPD DIY Tahun 2025 masih tetap sama dengan tema RKPD tahun 2025 yaitu;

“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.”

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Sektor Unggulan

Sektor unggulan dimaksudkan bahwa pengembangan aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata, pertanian, dan koperasi UMKM didorong untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi utamanya pada kawasan selatan.

2. Kreatif dan Inovatif

Kemampuan berpikir didorong untuk mencetuskan ide, gagasan, cara, atau produk sebagai solusi atas permasalahan yang ada serta mampu memberikan nilai tambah dengan cara yang baru ataupun berbeda.

3. Ekonomi Inklusif



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கருவாடக வளமுள்ள புவியியல் மாகாணம்

Peningkatan kesejahteraan dari pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran.

Terdapat penyesuaian-penyesuaian terhadap target kinerja dan anggaran program/kegiatan/subkegiatan dikarenakan adanya efisiensi belanja sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Dengan adanya efisiensi tersebut Pemerintah Daerah DIY tetap berusaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 diantaranya melalui penambahan alokasi belanja terutama untuk pemeliharaan gedung, perbaikan jalan, irigasi, dan pemeliharaan peralatan.

Berdasarkan tema tersebut, disusun enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *good-governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram.

Prioritas pembangunan di atas didukung ketercapaiannya melalui program prioritas daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dukungan program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Penyelarasan Prioritas Daerah dengan Tema dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran
1.	<i>“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.”</i>	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan eksterm	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan
2.		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak
3.		Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan
4.		Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2.1.1) Meningkatkan kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju
5.		Penguatan <i>Good Governance</i> pada berbagai tingkatan	3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>
6.		Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang 4.1.2) Menurunnya risiko bencana

2.3.2 Perkembangan IPM DIY Tahun 2020–2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM). IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah sehingga berguna untuk melihat



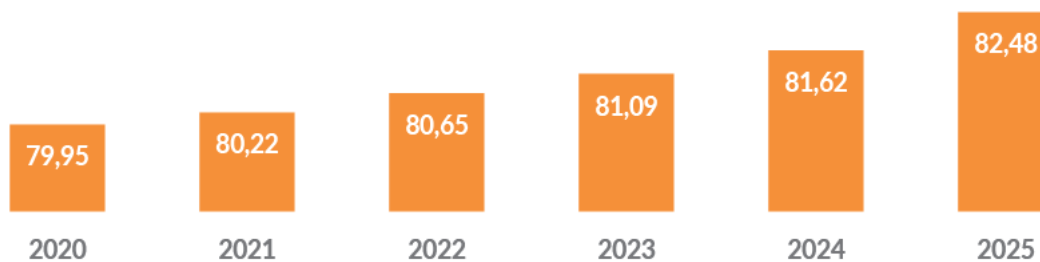
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கருவா உருவா உருவா கருவா கருவா கருவா கருவா கருவா

perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup serta menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan kehidupan yang layak (*decent standard of living*). Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Pengukuran dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan hidup layak.

Pembangunan manusia di DIY terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2021, tingkat pembangunan manusia di DIY telah berada pada kategori “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$). Dalam periode tahun 2020–2025, IPM DIY rata-rata tumbuh sebesar 0,63% per tahun, meningkat dari 79,95 pada tahun 2020 menjadi 82,48 pada 2025. Dengan capaian tersebut, DIY menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia.

Gambar 2. 10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY 2020 – 2025



Sumber: BPS Provinsi DIY

Pada tahun 2025, DIY kembali menempati peringkat kedua setelah DKI Jakarta sebagai provinsi dengan IPM tertinggi secara nasional. Terdapat dua provinsi yang mengalami perubahan status pembangunan manusia, yaitu Kepulauan Riau (“tinggi” menjadi “sangat tinggi”) dan Papua Barat Daya (“sedang” menjadi “tinggi”). Dengan perubahan tersebut, jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$) menjadi tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, DIY, dan Kepulauan Riau. Sementara itu, jumlah provinsi berstatus pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) sebanyak 30 provinsi, berstatus “sedang” ($60 \leq IPM < 70$) sebanyak empat provinsi, dan berstatus “rendah” ($IPM < 60$) sebanyak satu provinsi.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIY

2.3.3.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mengalami perubahan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perkembangan perekonomian nasional dan regional dan politik dalam negeri maupun luar negeri. Inpres tersebut berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari pendapatan transfer. Adapun perkembangan perekonomian nasional dan regional serta politik dalam negeri maupun luar negeri berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perkembangan perekonomian nasional dan regional serta politik dalam negeri maupun luar negeri berpengaruh terhadap daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor baru dan harga kendaraan bermotor baru. Kedua hal tersebut berpengaruh secara langsung pada PAD khususnya Pajak Daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Adanya Surat Edaran dari Kemendagri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB.

Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemda DIY mengacu Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang berdampak pada sebagian pendapatan transfer yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta. Struktur Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemda DIY adalah sebagai berikut.

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan disalurkan DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan. DBH dialokasikan kepada



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யாகர்டா

daerah penghasil, pengolah, dan non penghasil yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil.

DBH yang ditentukan penggunaannya yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diatur dengan PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

Pendanaan dari DBH CHT meliputi program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

DBH dapat disalurkan ke daerah dalam bentuk tunai dan non tunai. Berdasarkan PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH/DAU yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas TDF, DBH dapat disalurkan secara nontunai dengan mekanisme diantaranya Surat Berharga Negara (SBN), *Treasury Deposit Facility* (TDF), rekening yang dikelola pemerintah, dan lainnya. TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia.

Penyaluran DBH melalui mekanisme TDF berdasarkan perkiraan saldo kas daerah. Apabila saldo kas diperkirakan rendah maka DBH disalurkan tunai, namun apabila saldo kas diperkirakan tinggi maka DBH disalurkan dalam bentuk TDF. Batas tinggi ataupun rendahnya saldo kas ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

2. Dana Alokasi Umum

DAU mendasarkan pada PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pengaturan DAU berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 diantaranya berupa penetapan pagu yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan layanan publik, *redesign* formula DAU dengan menggunakan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan, penggunaannya ditetapkan sebagai DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sesuai dengan penilaian kinerja di daerah serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாறுவாஉருவாஉருவாபெரிமாறுவாஉருவா

pemerintahan. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, digunakan sesuai dengan prioritas dan kewenangan masing-masing pemda. DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri dari DAU Dukungan Penggajian Formasi PPPK, DAU Dukungan Bidang Pendidikan, DAU Dukungan Bidang Kesehatan, dan DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum. Adapun jenis DAU dukungan bidang yang dialokasikan ke pemerintah daerah ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat.

Alokasi anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya mengalami perubahan yang mengacu pada KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Dana Alokasi Khusus

DAK dibagi menjadi DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Fokus DAK berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah untuk:

- a) mencapai prioritas nasional;
- b) mempercepat pembangunan daerah;
- c) mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau
- e) mendukung operasionalisasi layanan publik.

a. DAK Fisik

DAK Fisik bertujuan membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional, dan percepatan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Dasar kebijakan DAK Fisik adalah PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Alokasi anggaran DAK Fisik mengalami perubahan yang mengacu pada Surat KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b. DAK Nonfisik

DAK Nonfisik merupakan bagian dari dana transfer khusus yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پي پي ايچ يو پي اچ يو پي اچ يو پي اچ يو پي اچ يو پي اچ يو پي اچ يو پي اچ يو پي اچ يو

yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional. Dasar kebijakan DAK Nonfisik adalah PMK Nomor 204/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Alokasi DAK Nonfisik juga dilakukan penyesuaian terhadap sisa DAK Nonfisik pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada akhir tahun 2024 yang diperhitungkan ke dalam penyaluran pada TA 2025. Prinsip DAK Nonfisik yaitu:

- 1) Membantu dan melengkapi kekurangan pendanaan bagi kegiatan khusus operasional dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar publik berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selaras dengan program prioritas nasional dan menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah.
- 2) Dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

4. Dana Keistimewaan

Dalam rangka mendukung implementasi urusan keistimewaan, Pemda DIY mendapatkan alokasi dana keistimewaan dari pemerintah pusat. Alokasi Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta diatur melalui PMK Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alokasi anggaran Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta mengalami perubahan yang mengacu pada KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan penyesuaian terhadap sisa Dana Keistimewaan DIY pada RKUD pada akhir tahun 2024 yang diperhitungkan ke dalam penyaluran pada TA 2025.

2.3.3.2 Strategi Peningkatan Pendapatan

1. Peningkatan PAD

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah maka dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan target pendapatan daerah diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemungut dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas pajak dan retribusi daerah;
- c. Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pemungutan opsen pajak daerah;
- d. Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- e. Penerapan sistem informasi berbasis teknologi dalam penatausahaan pendapatan daerah;
- f. Optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital (QRIS, EDC, *Mobile Banking*);
- g. Meningkatkan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui *ecommerce*, *e-wallet*, *website*, dan jaringan minimarket;
- h. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil dalam rangka pengembangan sinergitas pelaksanaan tugas pemungutan PAD;
- i. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan pajak daerah dengan cara meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak, meningkatkan pengawasan penerimaan pajak melalui pendataan wajib pajak, operasi bersama, serta pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah;
- j. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling), Samsat Mobile Lima Tahunan (Samoli), pengembangan Samsat Payment Point (Samsat Desa, Temaran, Gojak, Bajak sawah, SiJebol, dsb) dan E-Posti serta penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak daerah;
- k. Pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan retribusi daerah melalui *e-Ticketing* Museum Sonobudoyo;
- l. Memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui pesan *Whatsapp*;
- m. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan Kepolisian Daerah dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan PAD;
- n. Penyebarluasan informasi pendapatan daerah melalui berbagai media, baik media sosial, media cetak dan media elektronik;
- o. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கனம் மாநில அரசின் தலைநகரம்

- p. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
 - q. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD; serta
 - r. Optimalisasi Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.
2. Peningkatan Dana Transfer serta Lain-lain Pendapatan yang Sah
- Strategi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah. Agar DBH Pajak/DBH Bukan Pajak, DAU, DAK, maupun Dana Keistimewaan DIY bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian DAU dan DAK;
 - c. Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu;
 - d. Pelaporan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) dan DAK secara tepat waktu; dan
 - e. Peningkatan kinerja pemda agar dapat memperoleh insentif fiskal.

2.3.4 Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2025 disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, di antaranya pemenuhan *mandatory spending*, penggunaan DAU dan DBH diarahkan untuk penggajian formasi PPPK, bidang pendidikan serta peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, penggunaan DAK sesuai petunjuk teknis masing-masing kementerian/lembaga teknis, penggunaan DBH CHT diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah, serta memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat.

Penyesuaian dilakukan melalui perubahan alokasi dan penggunaan belanja. Beberapa penyesuaian alokasi dan penggunaan belanja yang dilakukan Pemda DIY, yaitu:

1. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, sub kegiatan yang bersumber dari alokasi TKD sebagai tindak lanjut kebijakan dari pusat, yaitu:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யாகர்டா

- a. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
 - c. Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan;
 - d. Inpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;
 - e. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 - f. KMK RI Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 - g. KMK RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - h. SE Mendagri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - i. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-24/PK/PK.2/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan DBH TA 2025 yang Telah Ditentukan Penggunaannya; dan
 - j. Surat Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan Nomor B/100.1.5.1/1491/PANI tanggal 27 Februari 2025 tentang Pemberitahuan Hasil Efisiensi.
2. Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan pegawai.
 3. Adanya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

4. Adanya penyesuaian belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota terhadap target penerimaan pajak daerah dan memperhitungkan kelebihan penerimaan pajak daerah pada TA 2024.
5. Adanya penyesuaian SiLPA berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.3.4.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci sebagai berikut:

1. Belanja pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Belanja barang dan jasa berupa pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
3. Belanja subsidi berupa alokasi anggaran yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang digunakan oleh BUMN, BUMD dan/atau BUMS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terjangkau oleh masyarakat.
4. Belanja hibah digunakan untuk mendukung fungsi pencapaian sasaran program dan kegiatan pemda, maka pemda dapat melakukan pemberian hibah kepada pemerintah pusat, instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa [TMMD]), dan instansi semi pemerintah (seperti Palang Merah Indonesia [PMI], Komite Olahraga Nasional Indonesia [KONI], Praja Muda Karana [Pramuka], Korps Pegawai Republik Indonesia [KORPRI], dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga [PKK]), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sepanjang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
5. Belanja bantuan sosial digunakan dalam rangka melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய நகரம் பெரிய நகரம் பெரிய நகரம் பெரிய நகரம் பெரிய நகரம்

dan selektif sesuai kemampuan keuangan daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

2.3.4.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya sesuai dengan kriteria yang telah diatur. Belanja modal meliputi:

1. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemda dan dalam kondisi siap dipakai;
2. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, investasi kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemda dan dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemda serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemda dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemda dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemda, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.3.4.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

2.3.4.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemda ke pemda lainnya dan/atau dari pemda kepada pemerintah desa. Belanja transfer meliputi:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃராக் டிஸ்திமேவா யோக்யாகர்டா

1. Belanja Bagi hasil

Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota yang penganggarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan merupakan belanja yang dianggarkan untuk diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak mengganggu terlaksananya urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Belanja daerah diarahkan pada program, kegiatan dan subkegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah tersebut adalah penurunan tingkat kemiskinan, pengembangan kehidupan ekonomi yang layak, peningkatan kualitas SDM Yogyakarta, penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), penguatan *good governance* pada berbagai tingkatan, dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Optimalisasi Belanja

Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வாள்குழுவாழ்வாள்குழுவினரதுபொதுமன்றம்

untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.

Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

6. Tepat Waktu

Menetapkan APBD TA 2025 secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan APBD TA 2025 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

2.3.5 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai BUMD dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan SiLPA tahun lalu.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யாகர்தா

dari target, dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp7.303.299.000,00 atau 96,03% dari target.

Kinerja keuangan TA 2025 dari sisi belanja dianggarkan sebesar Rp5.112.741.612.241,00 dapat direalisasikan sebesar Rp4.730.606.122.785,52 atau 92,53% dibandingkan dengan target belanja dengan rincian realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.257.370.556.718,18 atau 94,28% dari target belanja, realisasi Belanja Modal sebesar Rp606.066.257.104,00 atau 83,28% dari target belanja, realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.405.377.000,00 atau 8,63% dari target belanja, dan realisasi Belanja Transfer sebesar Rp863.763.931.963,34 atau 97,01% dari target belanja.

Kinerja keuangan penerimaan pembiayaan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp277.154.229.284,00 dan realisasi sebesar Rp280.267.729.284,44 atau 101,12% dengan rincian realisasi SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp437.696.229.284,44 atau 100% dari target dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp71.500.000,00. Untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp160.542.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp157.500.000.000,00 atau 98,11% untuk Penyertaan Modal Kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp155.000.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00.

Berdasarkan kinerja keuangan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas, maka pada TA 2025 terdapat SILPA sebesar Rp419.112.174.823,51 dan secara rinci realisasi belanja Pemda D.I. Yogyakarta Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	PENDAPATAN DAERAH	10.269.950.418,00	11.552.372.634,99	1.282.422.216,99	112,49
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.269.950.418,00	11.552.372.634,99	1.282.422.216,99	112,49
	Retribusi Daerah	7.998.853.950,00	8.216.741.364,00	217.887.414,00	102,72
	Lain-lain PAD yang Sah	2.271.096.468,00	3.335.631.270,99	1.064.534.802,99	146,87
	BELANJA DAERAH	1.706.225.097.621,00	1.629.187.972.173,00	(77.037.125.448,00)	95,48
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.025.868.042.254,00	973.714.082.909,00	(52.153.959.345,00)	94,92
	Program Pengelolaan Pendidikan	573.750.202.367,00	550.916.903.689,00	(22.833.298.678,00)	96,02
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	37.053.900,00	36.438.900,00	(615.000,00)	98,34
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	49.980.000,00	49.584.000,00	(396.000,00)	99,21
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.528.342.300,00	2.373.692.280,00	(154.650.020,00)	93,88



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦺꦤ꧀ꦢꦫꦺꦗꦚꦏꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				
	PENDAPATAN DAERAH	2.121.704.000,00	2.838.850.338,00	717.146.338,00	133,80
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.121.704.000,00	2.838.850.338,00	717.146.338,00	133,80
	Retribusi Daerah	2.121.704.000,00	2.837.350.250,00	715.646.250,00	133,73
	Lain-lain PAD yang Sah	-	1.500.088,00	1.500.088,00	-
	BELANJA DAERAH	382.392.299.961,00	360.165.888.064,00	(22.226.411.897,00)	94,19
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	58.988.169.087,00	50.610.004.135,00	(8.378.164.952,00)	85,80
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16.861.972.145,00	16.495.342.089,00	(366.630.056,00)	97,83
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.274.262.000,00	11.198.869.871,00	(75.392.129,00)	99,33
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	400.000.000,00	397.919.389,00	(2.080.611,00)	99,48
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	235.600.000,00	235.029.366,00	(570.634,00)	99,76
	Program Penataan Bangunan Gedung	7.536.547.010,00	711.854.589,00	(6.824.692.421,00)	9,45
	Program Penyelenggaraan Jalan	137.099.065.391,00	131.881.175.539,00	(5.217.889.852,00)	96,19
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	121.081.760.978,00	120.565.414.485,00	(516.346.493,00)	99,57
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	13.896.384.000,00	13.259.354.194,00	(637.029.806,00)	95,42
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	534.250.700,00	515.824.723,00	(18.425.977,00)	96,55
	Program Pengembangan Perumahan	129.940.000,00	127.651.828,00	(2.288.172,00)	98,24
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	3.047.100.000,00	2.960.439.313,00	(86.660.687,00)	97,16
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	10.334.502.650,00	10.309.424.671,00	(25.077.979,00)	99,76
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	69.940.000,00	69.474.048,00	(465.952,00)	99,33
	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	771.683.000,00	698.544.733,00	(73.138.267,00)	90,52
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	86.423.000,00	85.267.033,00	(1.155.967,00)	98,66
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	44.700.000,00	44.298.058,00	(401.942,00)	99,10
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	PENDAPATAN DAERAH	30.178.000,00	34.696.000,00	4.518.000,00	114,97
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.178.000,00	34.696.000,00	4.518.000,00	114,97
	Lain-lain PAD yang Sah	30.178.000,00	34.696.000,00	4.518.000,00	114,97
	BELANJA DAERAH	28.523.332.225,00	26.929.010.423,00	(1.537.214.217,00)	94,41
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.232.689.345,00	14.703.683.425,00	(1.529.005.920,00)	90,58



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கருவாடக கருவாடக கருவாடக கருவாடக கருவாடக

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.513.728.080,00	1.506.039.783,00	(7.688.297,00)	99,49
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	284.997.000,00	284.477.000,00	(520.000,00)	99,82
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	10.491.917.800,00	10.434.810.215,00	(57.107.585,00)	99,46
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	BELANJA DAERAH	18.982.338.665,00	16.319.483.297,00	(2.662.855.368,00)	85,97
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.956.282.555,00	13.398.149.771,00	(2.558.132.784,00)	83,97
	Program Penanggulangan Bencana	2.518.867.410,00	2.421.215.226,00	(97.652.184,00)	96,12
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	37.743.000,00	37.743.000,00	0,00	100,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	469.445.700,00	462.375.300,00	(7.070.400,00)	98,49
7	DINAS SOSIAL				
	PENDAPATAN DAERAH	604.200.000,00	604.200.000,00	0,00	100,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	604.200.000,00	604.200.000,00	0,00	100,00
	Retribusi Daerah	604.200.000,00	604.200.000,00	0,00	100,00
	BELANJA DAERAH	115.246.481.035,00	108.226.622.842,00	(7.019.858.193,00)	93,91
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	59.962.723.011,00	54.460.950.871,00	(5.501.772.140,00)	90,82
	Program Pemberdayaan Sosial	2.167.125.200,00	1.853.885.105,00	(313.240.095,00)	85,55
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	5.440.000,00	5.423.010,00	(16.990,00)	99,69
	Program Rehabilitasi Sosial	46.375.364.500,00	45.364.303.225,00	(1.011.061.275,00)	97,82
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.394.452.300,00	1.387.234.340,00	(7.217.960,00)	99,48
	Program Penanganan Bencana	1.287.356.000,00	1.235.674.710,00	(51.681.290,00)	95,99
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	370.611.200,00	328.340.145,00	(42.271.055,00)	88,59
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	2.672.528.150,00	2.585.530.756,00	(86.997.394,00)	96,74
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	1.010.880.674,00	1.005.280.680,00	(5.599.994,00)	99,45
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK				



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	BELANJA DAERAH	19.858.404.017,00	17.980.453.458,00	(1.877.950.559,00)	90,54
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.304.628.817,00	11.268.252.965,00	(1.036.375.852,00)	91,58
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	425.258.000,00	421.358.000,00	(3.900.000,00)	99,08
	Program Perlindungan Perempuan	4.042.918.100,00	3.311.858.431,00	(731.059.669,00)	81,92
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	263.522.800,00	262.872.800,00	(650.000,00)	99,75
	Program Perlindungan Khusus Anak	249.404.900,00	245.381.800,00	(4.023.100,00)	98,39
	Program Pengendalian Penduduk	55.536.300,00	55.536.300,00	-	100,00
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	201.700.000,00	201.380.000,00	(320.000,00)	99,84
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	35.711.300,00	35.661.300,00	(50.000,00)	99,86
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	2.276.973.800,00	2.175.401.862,00	(101.571.938,00)	95,54
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
	PENDAPATAN DAERAH	7.951.249.406,00	5.498.274.993,60	(2.452.974.412,40)	69,15
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.951.249.406,00	5.498.274.993,60	(2.452.974.412,40)	69,15
	Retribusi Daerah	6.596.023.156,00	3.990.997.118,60	(2.605.026.037,40)	60,51
	Lain-lain PAD yang Sah	1.355.226.250,00	1.507.277.875,00	152.051.625,00	111,22
	BELANJA DAERAH	72.518.661.743,00	65.730.348.108,45	(6.788.313.634,55)	90,64
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	170.000.000,00	167.968.696,00	(2.031.304,00)	98,81
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	50.984.052.611,00	46.459.679.435,45	(4.524.373.175,55)	91,13
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	90.100.000,00	89.795.925,00	(304.075,00)	99,66
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.180.981.400,00	1.168.191.810,00	(12.789.590,00)	-
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	8.290.000,00	7.971.465,00	(318.535,00)	96,16
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	161.833.000,00	155.009.970,00	(6.823.030,00)	95,78
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	109.183.500,00	108.819.264,00	(364.236,00)	99,67



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கருவாடக வகை கருவாடக கருவாடக கருவாடக கருவாடக

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	163.898.550,00	163.474.376,00	(424.174,00)	99,74
	Program Pengelolaan Persampahan	13.285.029.100,00	11.347.411.346,00	(1.937.617.754,00)	85,42
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	154.624.050,00	147.008.639,00	(7.615.411,00)	95,07
	Program Pengelolaan Hutan	5.331.421.882,00	5.052.375.607,00	(279.046.275,00)	94,77
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	722.149.650,00	706.684.751,00	(15.464.899,00)	97,86
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	157.098.000,00	155.956.824,00	(1.141.176,00)	99,27
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	BELANJA DAERAH	19.038.018.889,00	18.396.399.406,00	(641.619.483,00)	96,63
	Program Pendaftaran Penduduk	79.855.200,00	74.877.506,00	(4.977.694,00)	93,77
	Program Pencatatan Sipil	61.175.700,00	59.298.087,00	(1.877.613,00)	96,93
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	87.295.900,00	85.261.407,00	(2.034.493,00)	97,67
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	50.074.500,00	48.409.935,00	(1.664.565,00)	96,68
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.780.256.972,00	9.269.175.215,00	(511.081.757,00)	94,77
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	41.457.750,00	39.681.500,00	(1.776.250,00)	95,72
	Program Kesejahteraan Rakyat	3.662.268.550,00	3.649.896.875,00	(12.371.675,00)	99,66
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	5.275.634.317,00	5.169.798.881,00	(105.835.436,00)	97,99
11	DINAS PERHUBUNGAN				
	PENDAPATAN DAERAH	2.628.892.730,00	3.604.105.026,00	975.212.296,00	137,10
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.628.892.730,00	3.604.105.026,00	975.212.296,00	137,10
	Retribusi Daerah	2.579.778.230,00	3.108.942.290,00	529.164.060,00	120,51
	Lain-lain PAD yang Sah	49.114.500,00	495.162.736,00	446.048.236,00	1.008,18
	BELANJA DAERAH	136.337.313.834,00	133.346.473.969,00	(2.990.839.865,00)	97,81
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	18.758.593.797,00	18.444.655.190,00	(313.938.607,00)	98,33
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22.623.918.664,00	21.020.068.519,00	(1.603.850.145,00)	92,91
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	94.954.801.373,00	93.881.750.260,00	(1.073.051.113,00)	98,87
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கருவா கருவா கருவா கருவா கருவா கருவா கருவா

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	PENDAPATAN DAERAH	184.850.000,00	283.099.200,00	98.249.200,00	153,15
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	184.850.000,00	283.099.200,00	98.249.200,00	153,15
	Retribusi Daerah	184.850.000,00	282.120.000,00	97.270.000,00	152,62
	Lain-lain PAD yang Sah	-	979.200,00	979.200,00	-
	BELANJA DAERAH	40.941.779.182,00	39.991.167.412,00	(950.611.770,00)	97,68
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.785.113.057,00	11.965.869.364,00	(819.243.693,00)	93,59
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.954.284.100,00	2.926.887.774,00	(27.396.326,00)	99,07
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	250.577.100,00	247.356.167,00	(3.220.933,00)	98,71
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	779.405.900,00	771.527.730,00	(7.878.170,00)	98,99
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	24.172.399.025,00	24.079.526.377,00	(92.872.648,00)	99,62
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
	PENDAPATAN DAERAH	492.690.000,00	995.634.490,00	502.944.490,00	202,08
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	492.690.000,00	995.634.490,00	502.944.490,00	202,08
	Retribusi Daerah	42.690.000,00	56.705.000,00	14.015.000,00	132,83
	Lain-lain PAD yang Sah	450.000.000,00	938.929.490,00	488.929.490,00	208,65
	BELANJA DAERAH	48.081.319.072,00	46.011.303.392,00	(2.070.015.680,00)	95,69
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	385.392.000,00	366.537.552,00	(18.854.448,00)	95,11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.918.028.609,00	9.132.251.106,00	(785.777.503,00)	92,08
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	10.000.000,00	9.600.000,00	(400.000,00)	96,00
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	100,00
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	170.585.000,00	168.385.000,00	(2.200.000,00)	98,71
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	559.752.000,00	558.572.000,00	(1.180.000,00)	99,79
	Program Pengembangan Umkm	278.775.500,00	276.702.700,00	(2.072.800,00)	99,26
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	36.714.985.963,00	35.455.455.034,00	(1.259.530.929,00)	96,57
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	PENDAPATAN DAERAH	252.480.000,00	155.100.000,00	(97.380.000,00)	61,43
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	252.480.000,00	155.100.000,00	(97.380.000,00)	61,43
	Retribusi Daerah	252.480.000,00	155.100.000,00	(97.380.000,00)	61,43



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கல்யாண கல்யாண கல்யாண கல்யாண கல்யாண

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	-
	BELANJA DAERAH	12.081.190.581,00	11.211.786.538,00	(869.404.043,00)	92,80
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.944.674.107,00	10.090.869.567,00	(853.804.540,00)	92,20
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4.425.000,00	3.920.000,00	(505.000,00)	88,59
	Program Promosi Penanaman Modal	29.310.000,00	29.009.999,00	(300.001,00)	98,98
	Program Pelayanan Penanaman Modal	485.341.000,00	475.378.162,00	(9.962.838,00)	97,95
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	138.770.000,00	137.872.959,00	(897.041,00)	99,35
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	66.611.900,00	66.223.327,00	(388.573,00)	99,42
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	412.058.574,00	408.512.524,00	(3.546.050,00)	99,14
15	DINAS KEBUDAYAAN				
	PENDAPATAN DAERAH	4.000.300.000,00	5.221.492.118,00	1.221.192.118,00	130,53
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.000.300.000,00	5.221.492.118,00	1.221.192.118,00	130,53
	Retribusi Daerah	3.979.700.000,00	4.877.205.000,00	897.505.000,00	122,55
	Lain-lain PAD yang Sah	20.600.000,00	344.287.118,00	323.687.118,00	1.671,30
	BELANJA DAERAH	317.171.579.835,00	312.783.193.053,00	(4.388.386.782,00)	98,62
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.508.764.460,00	30.429.004.145,00	(3.079.760.315,00)	90,81
	Program Pengelolaan Permuseuman	2.000.000.000,00	1.980.976.000,00	(19.024.000,00)	99,05
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	279.862.815.375,00	278.603.516.464,00	(1.259.298.911,00)	99,55
	Program Pengembangan Kebudayaan	1.800.000.000,00	1.769.696.444,00	(30.303.556,00)	98,32
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH				
	PENDAPATAN DAERAH	810.800.000,00	914.839.601,00	104.039.601,00	112,83
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	810.800.000,00	914.839.601,00	104.039.601,00	112,83
	Retribusi Daerah	810.800.000,00	914.767.500,00	103.967.500,00	112,82
	Lain-lain PAD yang Sah	-	72.101,00	72.101,00	-
	BELANJA DAERAH	26.126.045.445,00	25.022.566.369,00	(1.103.479.076,00)	95,78
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	3.200.445.510,00	3.179.991.838,00	(20.453.672,00)	99,36
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.948.779.635,00	18.940.754.835,00	(1.008.024.800,00)	94,95
	Program Pembinaan Perpustakaan	2.232.410.350,00	2.165.259.547,00	(67.150.803,00)	96,99
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	71.178.700,00	71.154.772,00	(23.928,00)	99,97
	Program Pengelolaan Arsip	673.231.250,00	665.405.377,00	(7.825.873,00)	98,84
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	PENDAPATAN DAERAH	1.174.819.600,00	1.186.103.500,00	11.283.900,00	100,96



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Wilayah Istimewa yang berbudaya, maju dan sejahtera

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.174.819.600,00	1.186.103.500,00	11.283.900,00	100,96
	Retribusi Daerah	1.165.747.600,00	1.175.233.500,00	9.485.900,00	100,81
	Lain-lain PAD yang Sah	9.072.000,00	10.870.000,00	1.798.000,00	119,82
	BELANJA DAERAH	36.514.480.565,00	33.684.880.278,00	(2.829.600.287,00)	92,25
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	330.498.100,00	327.057.830,00	(3.440.270,00)	98,96
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	2.217.230.700,00	2.125.983.152,00	(91.247.548,00)	95,88
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.350.041.865,00	23.535.252.565,00	(1.814.789.300,00)	92,84
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	18.980.000,00	17.985.198,00	(994.802,00)	94,76
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	486.239.600,00	477.672.209,00	(8.567.391,00)	98,24
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	7.319.451.500,00	6.421.585.077,00	(897.866.423,00)	87,73
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	110.588.000,00	99.787.850,00	(10.800.150,00)	90,23
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	681.450.800,00	679.556.397,00	(1.894.403,00)	99,72
18	DINAS PARIWISATA				
	PENDAPATAN DAERAH	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
	Retribusi Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	-
	BELANJA DAERAH	25.883.976.784,00	24.943.796.426,00	(940.180.358,00)	96,37
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	589.456.750,00	585.115.305,00	(4.341.445,00)	99,26
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	10.116.625.050,00	9.936.209.790,00	(180.415.260,00)	98,22
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.981.309.834,00	12.258.482.203,00	(722.827.631,00)	94,43
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	432.631.050,00	418.492.382,00	(14.138.668,00)	96,73
	Program Pemasaran Pariwisata	501.869.700,00	497.733.292,00	(4.136.408,00)	99,18
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	193.771.550,00	190.230.724,00	(3.540.826,00)	98,17
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.068.312.850,00	1.057.532.730,00	(10.780.120,00)	98,99
19	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
	PENDAPATAN DAERAH	1.913.920.332,00	2.270.804.126,00	356.883.794,00	118,65
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.913.920.332,00	2.270.804.126,00	356.883.794,00	118,65
	Retribusi Daerah	1.913.920.332,00	2.253.669.026,00	339.748.694,00	117,75
	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	17.135.100,00	17.135.100,00	-



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦤꦠꦺꦢꦤ꧀ꦢꦲꦫꦺꦢꦺꦴꦭꦶꦩꦠꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	BELANJA DAERAH	68.280.150.663,00	60.699.253.121,00	(7.580.897.542,00)	88,90
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	1.166.779.000,00	1.130.505.651,00	(36.273.349,00)	96,89
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	422.450.000,00	422.243.900,00	(206.100,00)	99,95
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	22.630.000,00	22.569.999,00	(60.001,00)	99,73
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	227.866.300,00	227.321.000,00	(545.300,00)	99,76
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	124.245.000,00	124.244.300,00	(700,00)	100,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	1.901.831.000,00	1.830.956.936,00	(70.874.064,00)	96,27
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	53.683.571.399,00	46.751.335.138,00	(6.932.236.261,00)	87,09
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.080.049.564,00	5.850.014.798,00	(230.034.766,00)	96,22
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	200.048.000,00	198.338.754,00	(1.709.246,00)	99,15
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.412.646.500,00	1.388.377.882,00	(24.268.618,00)	98,28
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	245.862.900,00	244.093.850,00	(1.769.050,00)	99,28
	Program Penyuluhan Pertanian	2.792.171.000,00	2.509.250.913,00	(282.920.087,00)	89,87
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	PENDAPATAN DAERAH	320.400.000,00	310.858.335,00	(9.541.665,00)	97,02
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	320.400.000,00	310.858.335,00	(9.541.665,00)	97,02
	Retribusi Daerah	320.400.000,00	310.858.335,00	(9.541.665,00)	97,02
	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	-
	BELANJA DAERAH	35.092.105.367,00	32.919.613.390,00	(2.172.491.767,00)	93,81
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	1.184.927.800,00	1.131.301.864,00	(53.625.936,00)	95,47
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	7.289.423.000,00	7.073.342.129,00	(216.080.871,00)	97,04
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	25.800.000,00	25.108.248,00	(691.752,00)	97,32
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.278.089.600,00	1.277.487.006,00	(602.594,00)	99,95
	Program Pengembangan Ekspor	106.682.600,00	97.976.574,00	(8.706.026,00)	91,84
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	235.043.600,00	230.795.744,00	(4.247.856,00)	98,19
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	305.491.400,00	303.980.185,00	(1.511.215,00)	99,51



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Kerinci

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.706.322.817,00	18.956.848.382,00	(1.749.474.435,00)	91,55
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.800.560.050,00	3.666.445.616,00	(134.114.434,00)	96,47
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	5.740.000,00	5.739.790,00	0,00	-
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	53.936.500,00	53.848.752,00	(87.748,00)	99,84
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	100.088.000,00	96.739.100,00	(3.348.900,00)	96,65
21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
	PENDAPATAN DAERAH	2.075.269.000,00	1.901.426.000,00	(173.843.000,00)	91,62
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.075.269.000,00	1.901.426.000,00	(173.843.000,00)	91,62
	Retribusi Daerah	1.681.169.000,00	1.527.638.000,00	(153.531.000,00)	90,87
	Lain-lain PAD yang Sah	394.100.000,00	373.788.000,00	(20.312.000,00)	94,85
	BELANJA DAERAH	44.136.964.202,00	41.868.303.317,00	(2.268.660.885,00)	94,86
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.402.725.678,00	33.441.086.274,00	(1.961.639.404,00)	94,46
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	62.718.500,00	57.462.926,00	(5.255.574,00)	91,62
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.710.895.724,00	1.592.716.455,00	(118.179.269,00)	-
	Program Penempatan Tenaga Kerja	508.313.000,00	489.229.610,00	(19.083.390,00)	96,25
	Program Hubungan Industrial	505.351.800,00	504.127.021,00	(1.224.779,00)	99,76
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1.018.428.700,00	929.436.017,00	(88.992.683,00)	91,26
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	4.584.729.800,00	4.525.031.871,00	(59.697.929,00)	98,70
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	228.903.000,00	214.799.143,00	(14.103.857,00)	93,84
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	114.898.000,00	114.414.000,00	(484.000,00)	-
22	SEKRETARIAT DAERAH				
	PENDAPATAN DAERAH	452.080.000,00	511.220.241,00	59.140.241,00	113,08
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	452.080.000,00	511.220.241,00	59.140.241,00	113,08
	Retribusi Daerah	284.080.000,00	284.080.000,00	0,00	100,00
	Lain-lain PAD yang Sah	168.000.000,00	227.140.241,00	59.140.241,00	135,20
	BELANJA DAERAH	98.246.827.498,00	91.368.899.057,00	(6.877.928.441,00)	93,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	976.971.000,00	971.004.134,00	(5.966.866,00)	99,39
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	409.361.900,00	393.615.514,00	(15.746.386,00)	96,15



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	2.509.809.400,00	2.437.295.610,00	(72.513.790,00)	97,11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	82.469.060.728,00	76.213.448.362,00	(6.255.612.366,00)	92,41
	Program Kesejahteraan Rakyat	4.208.534.500,00	3.901.590.648,00	(306.943.852,00)	92,71
	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	733.405.350,00	714.087.698,00	(19.317.652,00)	97,37
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	1.278.350.600,00	1.241.651.695,00	(36.698.905,00)	97,13
	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	2.424.114.020,00	2.394.693.588,00	(29.420.432,00)	98,79
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	546.628.000,00	543.223.800,00	(3.404.200,00)	99,38
	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1.078.141.000,00	1.059.506.064,00	(18.634.936,00)	98,27
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.612.451.000,00	1.498.781.944,00	(113.669.056,00)	92,95
23	SEKRETARIAT DPRD				
	BELANJA DAERAH	329.345.097.773,00	228.481.153.926,00	(100.863.943.847,00)	69,37
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	266.552.610.971,00	176.473.149.183,00	(90.079.461.788,00)	66,21
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	62.792.486.802,00	52.008.004.743,00	(10.784.482.059,00)	82,83
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH				
	BELANJA DAERAH	21.413.891.578,00	20.051.233.682,60	(1.362.657.895,40)	93,64
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.490.863.793,00	17.254.609.887,60	(1.236.253.905,40)	93,31
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	222.096.250,00	220.332.892,00	(1.763.358,00)	99,21
	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.788.918.035,00	1.674.967.058,00	(113.950.977,00)	93,63
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	709.550.600,00	704.933.225,00	(4.617.375,00)	-
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	202.462.900,00	196.390.620,00	(6.072.280,00)	97,00
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET				
	PENDAPATAN DAERAH	4.746.373.274.671,00	4.769.759.835.427,20	23.386.560.756,20	100,49
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.704.380.170.749,00	1.740.156.874.266,20	35.776.703.517,20	102,10
	Pajak Daerah	1.521.266.024.486,00	1.541.673.476.325,25	20.407.451.839,25	101,34
	Retribusi Daerah	1.026.953.883,00	1.062.539.730,00	35.585.847,00	103,47
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	126.006.483.045,00	127.241.046.476,91	1.234.563.431,91	100,98
	Lain-lain PAD yang Sah	56.080.709.335,00	70.179.811.734,04	14.099.102.399,04	125,14
	PENDAPATAN TRANSFER	3.034.387.603.922,00	3.022.299.662.161,00	(12.087.941.761,00)	99,60



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Wilayah Istimewa yang berbudaya, maju dan sejahtera

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.033.406.677.291,00	3.021.318.735.530,00	(12.087.941.761,00)	99,60
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	980.926.631,00	980.926.631,00	0,00	100,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.605.500.000,00	7.303.299.000,00	(302.201.000,00)	96,03
	Pendapatan Hibah	7.605.500.000,00	7.303.299.000,00	(302.201.000,00)	96,03
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	-
	BELANJA DAERAH	1.031.569.863.711,00	956.961.359.821,34	(74.608.503.889,66)	92,77
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	90.090.056.989,00	79.527.864.624,00	(10.562.192.365,00)	88,28
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	932.373.835.072,00	869.134.657.747,34	(63.239.177.324,66)	93,22
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.709.701.900,00	3.382.299.400,00	(327.402.500,00)	91,17
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.396.269.750,00	4.916.538.050,00	(479.731.700,00)	91,11
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
	PENDAPATAN DAERAH	256.020.000,00	258.520.000,00	2.500.000,00	100,98
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.020.000,00	258.520.000,00	2.500.000,00	100,98
	Retribusi Daerah	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00
	Lain-lain PAD yang Sah	245.820.000,00	248.320.000,00	2.500.000,00	101,02
	BELANJA DAERAH	25.255.406.590,00	23.450.314.863,00	(1.805.091.727,00)	92,85
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	604.886.200,00	581.571.441,00	(23.314.759,00)	96,15
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.943.728.990,00	20.486.210.859,00	(1.457.518.131,00)	93,36
	Program Kepegawaian Daerah	2.706.791.400,00	2.382.532.563,00	(324.258.837,00)	88,02
27	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	PENDAPATAN DAERAH	6.984.420.000,00	6.775.043.600,00	(209.376.400,00)	97,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.984.420.000,00	6.775.043.600,00	(209.376.400,00)	97,00
	Retribusi Daerah	244.010.000,00	272.245.000,00	28.235.000,00	111,57
	Lain-lain PAD yang Sah	6.740.410.000,00	6.502.798.600,00	(237.611.400,00)	96,47
	BELANJA DAERAH	25.049.267.955,00	21.986.369.228,00	(3.062.898.727,00)	87,77
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	830.709.650,00	764.199.777,00	(66.509.873,00)	91,99
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.118.726.405,00	14.451.134.521,00	(667.591.884,00)	95,58
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.099.831.900,00	6.771.034.930,00	(2.328.796.970,00)	74,41
28	BADAN PENGHUBUNG DAERAH				
	PENDAPATAN DAERAH	614.585.000,00	586.290.000,00	(28.295.000,00)	95,40



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கருவாட்டைக் கொண்ட அரசாங்கம்

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	614.585.000,00	586.290.000,00	(28.295.000,00)	95,40
	Retribusi Daerah	605.585.000,00	577.290.000,00	(28.295.000,00)	95,33
	Lain-lain PAD yang Sah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
	BELANJA DAERAH	11.618.461.827,00	10.723.427.331,00	(895.034.496,00)	92,30
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	3.516.758.699,00	3.499.245.463,00	(17.513.236,00)	99,50
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.919.645.728,00	7.050.504.554,00	(869.141.174,00)	89,03
	Program Pelayanan Penghubung	182.057.400,00	173.677.314,00	(8.380.086,00)	95,40
29	INSPEKTORAT				
	BELANJA DAERAH	28.143.885.298,00	26.273.427.909,00	(1.870.457.389,00)	93,35
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.022.689.648,00	20.021.393.944,00	(1.001.295.704,00)	95,24
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.967.910.500,00	6.103.347.460,00	(864.563.040,00)	87,59
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	153.285.150,00	148.686.505,00	(4.598.645,00)	97,00
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	BELANJA DAERAH	28.069.221.488,00	26.671.603.961,00	(1.397.617.527,00)	95,02
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	2.017.121.000,00	1.747.565.653,00	(269.555.347,00)	86,64
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.112.299.238,00	9.171.326.948,00	(940.972.290,00)	90,69
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.428.641.100,00	2.265.220.439,00	(163.420.661,00)	93,27
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	11.091.739.500,00	11.087.008.406,00	(4.731.094,00)	99,96
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	123.672.400,00	122.202.143,00	(1.470.257,00)	98,81
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	481.486.900,00	474.297.541,00	(7.189.359,00)	98,51
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.814.261.350,00	1.803.982.831,00	(10.278.519,00)	99,43
31	PANIRADYA KAISTIMEWAN				
	BELANJA DAERAH	25.254.519.465,00	24.392.118.065,00	(862.401.400,00)	96,59
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.361.524.965,00	8.827.455.677,00	(534.069.288,00)	94,30
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan	15.892.994.500,00	15.564.662.388,00	(328.332.112,00)	97,93



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan				
	JUMLAH PENDAPATAN	4.835.587.382.957,00	4.867.310.874.710,59	29.958.756.849,04	100,66
	JUMLAH BELANJA	5.112.741.612.241,00	4.730.506.066.437,52	(382.178.438.008,48)	92,52
	SURPLUS/(DEFISIT)	(277.154.229.284,00)	136.804.808.273,07	412.137.194.857,52	(49,36)
	Penerimaan Pembiayaan	437.696.229.284,00	437.767.729.284,44	71.500.000,44	100,02
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	437.696.229.284,00	437.696.229.284,44	0,44	100,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	71.500.000,00	71.500.000,00	-
	Pengeluaran Pembiayaan	160.542.000.000,00	157.500.000.000,00	(3.042.000.000,00)	98,11
	Penyertaan Modal Daerah	155.542.000.000,00	155.000.000.000,00	(542.000.000,00)	99,65
	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	50,00
	PEMBIAYAAN NETTO	277.154.229.284,00	280.267.729.284,44	3.113.500.000,44	101,12
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	417.072.537.557,51	417.072.537.557,51	-

3.2 Hambatan dan Kendala Terkait Pengelolaan Pendapatan dan Belanja

Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2025 telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala yang muncul, baik dari sisi perencanaan, penatausahaan, maupun dalam pelaksanaannya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan regulasi terkait dengan perubahan tarif baik Retribusi Daerah maupun Lain-Lain PAD membutuhkan waktu yang relatif lama dan birokrasi yang lebih panjang sehingga berpengaruh terhadap perencanaan pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.
2. Kenaikan harga kendaraan bermotor baru, khususnya roda empat yang melebihi daya beli masyarakat, mengakibatkan masyarakat lebih memilih kendaraan bermotor roda dua dibandingkan roda empat, serta peminat kendaraan listrik yang bertambah sehingga berpengaruh pada penerimaan bea balik nama kendaraan.
3. Banyaknya kendaraan non-AB (luar daerah) di wilayah DIY memberikan dampak kepadatan lalu lintas dan kerusakan jalan namun tidak memberikan kontribusi terhadap PAD.
4. Kurangnya publikasi atas jasa layanan pemda yang berpotensi untuk meningkatkan retribusi daerah.

Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan koordinasi dengan Kemendagri dan instansi terkait.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யாகர்தா

- 2) Menyelenggarakan kerjasama dengan dealer otomotif roda empat dalam kegiatan Pemda DIY, kerjasama tersebut berbentuk pameran otomotif roda empat dan pemberian insentif fiskal dan pembebasan sanksi administrasi untuk periode tertentu.
- 3) Kolaborasi dengan kepolisian dan dinas terkait dalam membuat regulasi dengan mengeluarkan SE Penerbitan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen (STBPPN) yang hanya dapat digunakan untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor di DIY.
- 4) Meningkatkan publikasi atas layanan pendapatan daerah yang diberikan termasuk mengoptimalkan publikasi melalui media sosial.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja antara lain sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan proses lelang mengakibatkan tidak tercapainya target serapan anggaran dan output.
- 2) Kriteria kesiapan (*readiness criteria*) yang belum terpenuhi menjadi hambatan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Perubahan kebijakan pemerintah selama pelaksanaan APBD menjadi kendala percepatan realisasi.
- 4) Perubahan prioritas dalam masa pelaksanaan APBD yang belum dapat diantisipasi dalam proses perencanaan berakibat perlu dilakukan penyesuaian belanja dalam proses pelaksanaan anggaran.
- 5) Keadaan dimana SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian belanja.
- 6) Kebijakan efisiensi pemerintah pusat memicu adanya penurunan TKD. Hal ini mengakibatkan penundaan atau dihentikan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan.
- 7) Belum optimalnya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) oleh pengelola keuangan OPD karena keterbatasan pemahaman SDM pengelola keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan belanja telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Kesadaran perlunya lelang dini dapat mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan meminimalisir permasalahan yang mungkin timbul pada saat proses pengadaan barang dan jasa sehingga resiko tidak tercapainya target serapan anggaran dan pencapaian output dapat diminimalkan.
- 2) Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk menghasilkan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang terintegrasi.
- 3) Sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan APBD diperkuat melalui penerapan sistem aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD-RI) untuk penyusunan dokumen



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறுவாஉருவாஉருவாஹிதாறுவாஹிதாறுவா

- perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan selaras.
- 4) Optimalisasi belanja dilakukan melalui pemanfaatan e-katalog, toko daring, dan KKPD guna mempercepat proses transaksi secara transparan dan akuntabel.
 - 5) Pembayaran kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan secara bertahap sesuai progres fisik pekerjaan untuk mencegah penumpukan pembayaran di akhir tahun anggaran.
 - 6) Penguatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sistem digital seperti SIPD-RI agar pelaksanaan anggaran lebih efektif.
 - 7) Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilaksanakan secara berkala, disertai penerapan *reward* dan *punishment* bagi perangkat daerah untuk meningkatkan disiplin dan kinerja.
 - 8) Pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pendampingan hukum dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan dan mencegah terjadinya penyimpangan.
 - 9) Pemda berupaya meningkatkan kinerja penyerapan anggaran agar memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat sebagai bentuk penghargaan atas realisasi APBD yang tepat waktu.
 - 10) Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan di tingkat SKPD dan mendorong BPD DIY untuk meningkatkan pelayanan agar memudahkan akses penggunaan KKPD oleh pengelola keuangan SKPD.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாதுவாஉருவாஉருவாதுபெரிதாதுவாஉருவாஉருவாது

Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kasda.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh rekening Kasda atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan diakui pada saat:
 - a) Diterima oleh BUD di rekening Kasda.
 - b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD.
 - c) Diterima oleh entitas lain di luar Pemda DIY atas nama BUD.
 - d) Pengakuan pendapatan pengelolaan BLUD dalam LRA mendasarkan pada SP2D Nihil yang telah disahkan oleh BUD atas realisasi pendapatan pengelolaan BLUD pada periode berjalan.
 - e) Pengakuan pendapatan transfer BOS dilakukan saat pengesahan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) oleh BUD yang berasal dari Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Khusus di DIY.
 - f) Pengakuan Pendapatan Hibah yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam penanganan pandemi *Covid-19* dilakukan saat Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) disahkan oleh BUD.
- 3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK.

b. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kasda atau rekening BLUD atau rekening BOS atau rekening Sumbangan Masyarakat Dalam Penanganan Pandemi *Covid-19* yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யாகர்தா

- 2) Belanja diakui pada saat:
 - a) Terjadinya pengeluaran dari rekening Kasda untuk seluruh transaksi baik di SKPD maupun SKPKD setelah dilakukan pengesahan secara definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi.
 - b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.
 - c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - d) Untuk pengeluaran belanja yang sumber dananya dari BOS maka pengakuan belanja dilakukan saat surat pengesahan Belanja BOS dan surat pengesahan Belanja Hibah disahkan oleh BUD.
 - e) Untuk pengeluaran belanja yang sumber dananya dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, maka pengakuan belanja dilakukan saat SP2B disahkan oleh BUD.
- 3) Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas dari RKUD dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
- 4) Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dan sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran, sedangkan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam CaLK.

c. Transfer

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan DBH.
- 2) Transfer masuk diakui pada saat diterima di rekening Kasda dan transfer keluar diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari rekening Kasda.
- 3) Transfer masuk diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan penerimaan kas di rekening Kasda dan transfer keluar diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas dari rekening Kasda.
- 4) Transfer disajikan berdasarkan jenis transfer masuk dan jenis transfer keluar dalam LRA dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam CaLK.

d. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦧꦼꦩꦠꦺꦫꦏꦸꦫꦁꦤꦿꦏꦼꦩꦠꦺꦫꦏꦸꦫꦁꦠꦶꦩꦼꦮꦂꦠꦚꦏꦺꦴꦩꦩꦠꦸꦱꦏꦸꦫꦁꦠꦚꦏꦺꦴꦩꦩꦠꦸꦱꦏꦸꦫꦁ

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

- 2) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kasda. antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemda, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 3) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening Kasda. antara lain untuk pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- 4) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kasda dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari rekening Kasda.
- 5) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
- 6) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam LRA dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam CaLK.

e. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemda yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 3) Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis Pendapatan-LO dalam LO dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam CaLK.

f. Beban



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦢꦤ꧀ꦢꦫꦺꦢꦤ꧀ꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦠ

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui pada saat:
 - a) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemda tanpa diikuti keluarnya kas dari Kasda. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
 - b) Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- 3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
- 4) Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam LO dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam CaLK.

g. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan laporan arus kas. Kas tersebut meliputi Kas di Kasda Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Lainnya.
- 2) Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemda ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.
- 3) Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara/rekening Kasda dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/rekening Kasda.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யாகர்டா

- 4) Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Piutang

- 1) Piutang adalah hak Pemda untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda.
- 2) Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah.
 - b) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas.
 - c) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- 3) Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya dan Biaya Dibayar Dimuka.
- 4) Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer Antar Daerah.
- 5) Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.
- 6) Piutang diakui pada saat munculnya hak Pemda yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
- 7) Pengukuran piutang sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dengan SKPD/SKRD/SK Pembebanan/SKTJM/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersamakan atau disajikan sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan (Biaya Dibayar Dimuka).



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கருவாடக வகை கருவாடக வகை கருவாடக வகை கருவாடக வகை

- 8) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*/NRV). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 9) Penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
- 10) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Pajak:

Tabel 4. 1
Kualitas Piutang Pajak

Kualitas Piutang Pajak	Uraian
Lancar	a. Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Wajib pajak kooperatif, dan/atau d. Wajib pajak likuid, dan/atau Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
Kurang Lancar	a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
Diragukan	a. Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau d. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas
Macet	a. Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau e. Wajib pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

b) Kualitas Piutang Retribusi:

Tabel 4. 2
Kualitas Piutang Retribusi

Kualitas Piutang Retribusi	Uraian
Lancar	a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, dan/atau



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கருவாடக வகை கருவாடக வகை கருவாடக வகை கருவாடக வகை

	b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	a. Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	a. Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	a. Umur piutang lebih 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

c) Kualitas Piutang Lainnya:

Tabel 4.3
Kualitas Piutang Lainnya

Kualitas Piutang Lainnya	Uraian
Lancar	Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

11) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang
1.	Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
2.	Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
3.	Diragukan	50% (lima puluh persen)
4.	Macet	100% (seratus persen)

12) Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

i. Persediaan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦏꦤ꧀ꦢꦂꦒꦂꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemda, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengakuan persediaan dicatat pada saat direalisasikan obyek belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Bahan
 - b) Belanja Suku Cadang
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
 - d) Belanja Obat-Obatan
 - e) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
 - f) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
 - g) Belanja Natura dan Pakan
 - h) Belanja Persediaan Penelitian
 - i) Belanja Persediaan Dalam Proses
 - j) Belanja Komponen
 - k) Belanja Pipa
 - l) Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas
- 3) Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dan dibuat berita acara opname persediaan. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan. Selisih persediaan yang disebabkan karena persediaan usang, daluwarsa atau rusak diperlakukan sebagai beban, sedangkan selisih persediaan yang disebabkan hilang dan kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang maka diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan yang sudah rusak dan daluwarsa dapat dimusnahkan dan selanjutnya dihapuskan dengan persetujuan Pengelola Barang.
- 4) Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset yaitu beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi dan dicatat maksimal setiap semester.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

- 5) Persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode FIFO (*First In First Out*).
- 6) Persediaan diukur sebagai berikut:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - d) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara dikembangkan.
 - e) Harga jual yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tentang penetapan tarif harga jual untuk produk/ hewan/ tanaman yang dijual kepada masyarakat.
- 7) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.
- 8) Persediaan yang dititipkan pada pihak ketiga seperti persediaan untuk tujuan strategis yang meliputi persediaan cadangan energi, cadangan pangan dan cadangan lainnya dinilai berdasarkan berita acara penitipan persediaan dan didukung dengan berita acara opname persediaan akhir periode pelaporan. perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terdapat selisih kurang antara berita acara penitipan persediaan dengan berita acara opname persediaan maka dicatat sebagai Piutang Lainnya.

j. Investasi

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemda dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.
- 3) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas di mana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- 4) Investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan meliputi Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.
- 5) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறுவாஉருவாஉருவாஊறுபாறுபாறுபாறுபாறு

atau ditarik kembali antara lain meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemda, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan investasi nonpermanen lainnya.

- 6) Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali antara lain Penyertaan Modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemda dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 8) Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan.
- 9) Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal dalam bentuk BMD diakui setelah ada BAST barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan Pihak BUMD sebagaimana diatur dalam Perda tentang penyertaan modal terkait. Tata cara dan teknis pelaksanaan penyertaan modal dalam bentuk BMD dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang pedoman pengelolaan BMN/D.
- 10) Pengukuran Investasi untuk beberapa jenis investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- 11) Penilaian investasi Pemda dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas dan metode nilai bersih yang direalisasikan.
 - a) Penilaian Investasi menggunakan metode biaya apabila kepemilikan investasi pemda kurang dari 20% dan investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
 - b) Penilaian investasi menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Wilayah Istimewa Yogyakarta

pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c) Penilaian investasi dengan metode nilai bersih yang direalisasikan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 12) Investasi Nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV), yaitu harga perolehan dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
- 13) Mekanisme pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dikelola sendiri/langsung, *executing agency* dan *chanelling agency* dengan penjelasan sebagai berikut.
- a) Dana bergulir dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemda melalui SKPD Teknis yang ditunjuk mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir.
 - b) Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.
 - c) Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.

- 14) Kualitas dana bergulir adalah perkiraan atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan atau upaya tagih Pemda kepada debitor.
- 15) Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemda dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut.

Tabel 4. 5
Kualitas Dana Bergulir

Kualitas Dana Bergulir	Keterangan
Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir kooperatif.
Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur dana bergulir 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
Macet	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Penerima dana bergulir mengalami kesulitan, bangkrut dan/atau meninggal dunia, dan/atau e. Penerima dana bergulir mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

- 16) Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola dengan *executing agency* dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut.

Tabel 4. 6
Kualitas Dana Bergulir

Kualitas Dana Bergulir	Keterangan
-------------------------------	-------------------



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

Tabel 4. 8
Besaran Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Kualitas Dana Bergulir	Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih
Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
Diragukan	50% (lima puluh persen)
Macet	100% (seratus persen)

- 19) Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan.
- 20) Penilaian investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode pelaporan.
- 21) Pengakuan hasil investasi.
- Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
 - Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh rekening Kasda baik dalam LRA maupun dalam LO.
 - Untuk investasi yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas maka pengakuan Pendapatan/Rugi Investasi dicatat sebagai berikut:
 - Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian laba/rugi Pemda sesuai dengan persentase kepemilikan (berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Berjalan) yang menambah/mengurangi nilai Investasi di sisi debit dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di sisi kredit.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறுவாஉருவாஉருவாஊறுவாஊறுவாஊறுவா

- Pada saat bagian laba dibayarkan kepada Pemda tahun berikutnya maka dicatat sebesar kas yang diterima di sisi debit dan mengurangi investasi di sisi kredit.
 - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dicatat sebesar realisasi kas yang diterima oleh rekening Kasda.
- 22) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam LO.
- 23) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

k. Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemda atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/ nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.
- 3) Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 5) Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:
 - a) Berwujud.
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPD.
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh SKPD.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிகாஹுடாஉகாடாஉகாஹுஹுயலாஹுஹுயலாஹு

- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- g) Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan yaitu:

Tabel 4. 9
Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Batas Minimal Kapitalisasi
Tanah	Tidak ada
Peralatan dan Mesin	Rp500.000,00 / unit
Gedung dan Bangunan	Rp10.000.000,00 / unit
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tidak ada
Aset Tetap Lainnya	Tidak ada

- 6) Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomtabel.
- 7) Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - a) Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat maka aset tetap tersebut dicatat sebagai persediaan sampai dengan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.
 - b) Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) apabila Belanja Modal tersebut telah dianggarkan keseluruhan aktivitas yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, konstruksi dan penunjang namun sampai dengan akhir TA baru terealisasi dokumen perencanaannya saja.
- 8) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 9) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறுபாடு கருவாடகாபுரிபுலபாறுபாறுபாறுபாறு

- 10) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 11) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya persiapan tempat.
 - b) Biaya pengiriman awal, biaya simpan dan bongkar muat.
 - c) Biaya pemasangan.
 - d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
 - e) Biaya konstruksi.
- 12) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- 13) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO.
- 14) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
- 15) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- 16) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கல்வியை கல்வியை கல்வி செய்து விட்டு விட்டால் அந்த கல்வி

- 17) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 18) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri.
- 19) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 20) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- 21) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.
- 22) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeologicalsites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
 - a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

I. Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) KDP adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறுவாஉருவாஉருவாஊறுபாறுபாறுபாறுபாறு

jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

- 2) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai KDP jika memenuhi kriteria:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.
- 4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 5) DED yang merupakan bagian dari Belanja Modal dan sudah terealisasi sedangkan konstruksi aset tetap belum terealisasi maka DED dicatat dalam KDP. Sedangkan jika DED dihasilkan dari Belanja Jasa Konsultasi, dan konstruksinya dari Belanja Modal namun belum terealisasi maka DED dicatat dalam KDP.
- 6) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi penyelesaian KDP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila aset telah selesai dibangun, berita acara penyelesaian pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, berita acara penyelesaian pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - c) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah namun berita acara penyelesaian pekerjaan belum diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறுபாடு கல்வி கல்வி கல்வி கல்வி கல்வி கல்வி கல்வி

- d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset, dalam hal ini Pengguna Anggaran membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapusbukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, maka diakui sebagai KDP.
- g) Apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan seperti biaya perencanaan maka biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.
- h) Apabila dalam konstruksi aset tetap, biaya penunjang untuk kegiatan pengadaan (lelang) sudah dilaksanakan, namun proses pengadaan (lelang) gagal maka biaya penunjang tersebut diakui sebagai beban tahun anggaran berjalan dan disajikan dalam LO.
- i) KDP dicatat dengan biaya perolehan.
- j) KDP dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut dihapuskan dari neraca sesuai ketentuan yang berlaku dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Sebelum dilakukan usulan penghapusan atas KDP yang tidak bisa dilanjutkan pembangunan konstruksinya, perlu dilakukan kajian atas KDP oleh SKPD yang mengusulkan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦏ꧀ꦢꦫꦫꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦿꦠꦫ

m. Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu TA. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:
 - a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d) Sumber dana cadangan; dan
 - e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam perda.
- 3) Dana cadangan diakui pada saat penerbitan SP2D LS dan terjadi pemindahan dana dari rekening Kasda ke rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
- 4) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- 5) Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal Dana Cadangan ditambah dengan pendapatan jasa giro rekening Dana Cadangan.

n. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya merupakan aset Pemda yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya, dan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF).



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

- 3) Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
- a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara Pemda dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui saat Pemda menerima angsuran dari pegawai.
 - b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat diterbitkan SKP/SKTJM/dokumen yang dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar pengadilan). Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan setelah adanya perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSP.
 - e) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian kerjasama BGS antara Pemda dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh Pemda kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
 - f) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemda disertai dengan kewajiban Pemda untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemda ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
 - g) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வாசுரம் கருவாசுரம் கருவாசுரம் கருவாசுரம் கருவாசுரம்

- f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- g) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu.

o. Aset Tak Berwujud

- 1) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
- 2) Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).
- 3) ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) adalah umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Umur manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB. ATB dengan umur manfaat terbatas tersebut meliputi lisensi dan *franchise*, hak cipta dan paten.
- 4) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) yaitu ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reuiu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. ATB yang dikategorikan memiliki umur manfaat tak terbatas meliputi *software* dan kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang.
- 5) Aset Tak Berwujud diklasifikasikan menjadi *Goodwill*, Lisensi dan *frenchise*, Hak Cipta, Paten, *Software*, Kajian, ATB Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya, ATB Dalam Pengerjaan, dan ATB Lainnya.
- 6) Pengakuan ATB.
 - a) ATB yang diperoleh secara internal yang tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறுவாஉகழவாஉகழவாஊழிதலவதலவாஊழிதலவா

menghasilkan ATB maka seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

b) ATB yang diperoleh secara internal yang dapat dibedakan menjadi tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka:

- Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
- Pengeluaran-pengeluaran dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB diakui apabila memenuhi kriteria:
 - Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 - Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang;
 - Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
 - Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
- Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
 - Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
 - Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
 - Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
 - Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

c) ATB yang dibiayai oleh instansi lain di luar Pemda maka ATB diakui sebagai aset pihak yang memberikan dana penelitian dan pengembangan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யாஃர்டா

- d) *Software* diakui sebagai ATB adalah *software* yang dibangun sendiri dengan cara dikontrakkan kepada pihak ketiga.
 - e) *Software* program yang dibeli tersendiri dan penggunaannya tidak terkait dengan *hardware* tertentu harus dikapitalisasi sebagai ATB, namun apabila *software* yang dibeli tersebut merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
 - f) Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya dan ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.
 - g) ATB Dalam Pengerjaan diakui apabila sampai dengan tanggal pelaporan ATB belum selesai sebesar pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.
- 7) Pengukuran Aset Tak Berwujud
- a) ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, maka harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யாகர்தா

- Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
 - b) ATB yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
 - c) ATB yang diperoleh dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.
 - d) ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian hibah.
 - e) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkan ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.
 - f) ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
- 8) Secara umum sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Sebagian besar pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun apabila terdapat



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிந்திணை நகரம் நகரம் நகரம் நகரம் நகரம் நகரம் நகரம் நகரம்

sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji ATB dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa ATB mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 12) Penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan Pemda disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtanganan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦫꦺꦴꦩꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦸꦫꦠ

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non-operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada LRA. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

p. Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemda. Kewajiban Pemda dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
 - a) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang meliputi utang kepada pemerintah pusat, utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan utang kepada masyarakat.
- 3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய காசா கால கால கால கால கால கால கால கால

- a) Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari Kasda untuk pembayaran tertentu yang harus dipungut potongan Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan pajak.
- b) Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
- c) Utang Pinjaman Jangka Pendek diakui pada saat Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak.
- d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.
- e) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemda terkait kas yang telah diterima Pemda dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemda.
- f) Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemda terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemda.
- g) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain utang jamkessos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.
- h) Utang kepada Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di Kasda sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
- i) Utang kepada LKB diakui pada saat dana diterima di Kasda sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
- j) Utang kepada LKBB diakui pada saat dana diterima di Kasda sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
- k) Utang kepada Masyarakat dalam bentuk obligasi diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- 4) Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:
 - a) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.
 - b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦸꦥꦺꦤ꧀ꦢꦺꦴꦭꦂꦶꦢꦏꦸꦫꦩꦤ꧀ꦤꦶꦮꦫꦺꦴꦤꦏꦿꦏꦸꦭꦲꦭꦶꦏꦸꦏꦺꦴꦁꦁꦏꦺꦴꦁꦲꦏꦸꦩꦶꦁꦏꦺꦴꦁꦲꦏꦸꦩꦶꦁ

- c) Utang Pinjaman Jangka Pendek diukur sebesar pinjaman yang diterima di Kasda.
- d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
- e) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
- f) Utang Belanja diukur sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.
- g) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD.
- h) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah kabupaten/kota diukur sebesar nilai transfer yang tercantum dalam SK tentang kekurangan transfer bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota.
- i) Utang kepada Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemda. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- j) Utang kepada LKB diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemda. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- k) Utang kepada LKBB diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemda. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- l) Utang kepada masyarakat dalam bentuk obligasi diukur sebesar nilai nominal/pasar, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Wilayah Kerucun Kerucun Kerucun Kerucun Kerucun Kerucun Kerucun

- 5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang Pemda. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus.
- 6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada LO dan diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
 - b) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai buku maka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam LO pada Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam CaLK.

q. Koreksi Kesalahan

- 1) Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK. Koreksi kesalahan meliputi koreksi atas kesalahan yang sifatnya tidak berulang dan koreksi kesalahan berulang.
- 2) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi dua jenis yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கருவாடக வகை கருவாடக கருவாடக கருவாடக கருவாடக

- 3) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
- 4) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya maka perlakuan akuntansi ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan
Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 - b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan
 - Koreksi kesalahan yang menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain Lain-LRA dalam hal mengurangi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.
 - Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun aset yang bersangkutan.
 - Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan adanya pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
 - Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun SAL.
 - Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
 - Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun SAL.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH Istimewa Yogyakarta

பேரரசாங்கம் அரசாங்கம் அரசாங்கம் அரசாங்கம் அரசாங்கம்

- Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan.
 - Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
 - Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- 5) Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya antara lain penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak dan Piutang Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan seringkali penerimaan klaim berbeda dengan nilai piutang yang dicatat. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

r. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dalam CaLK. Para pengguna laporan keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Di lèngkahakèng lèngkahakèng lèngkahakèng lèngkahakèng lèngkahakèng

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

s. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

t. Operasi Tidak Dilanjutkan

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.

Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாதுவாஉருவாஉருவாதுபெரிதாதுவாஉருவாஉருவாது

jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

u. Laporan Keuangan Konsolidasian

- 1) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LPE, Laporan Arus Kas (LAK), dan CaLK. Laporan keuangan konsolidasian tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali LAK disajikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 3) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 4) Konsolidasi di tingkat Pemda dilaksanakan oleh entitas pelaporan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain akun Piutang dan Hutang antar entitas akuntansi serta RK PPKD dan RK SKPD. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam CaLK.
- 5) Konsolidasi di tingkat SKPD bagi SKPD yang mempunyai beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dilaksanakan oleh Unit Kerja (Induk) dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi (KPA/KPB).
- 6) Konsolidasi untuk SKPD atau Unit Kerja yang ditetapkan sebagai BLUD dilakukan dengan cara menggabungkan semua realisasi pendapatan dan belanja BLUD dengan belanja yang dibiayai dari rekening Kasda (APBD). Konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja BLUD dilakukan berdasarkan SP2D pengesahan/nihil yang ditetapkan secara periodik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.

v. Properti Investasi



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய அளவு கருவாடக அளவுகள் குறிப்பாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன

- 1) Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
- 3) Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
- 4) Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 5) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

- 6) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan yang mengatur Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemda

a. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

- 1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- 2) Pengeluaran Belanja Modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, harus dikapitalisasi.
- 3) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah harus dilakukan kapitalisasi.
- 4) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கருவா உருவா உருவா கருவா கருவா கருவா கருவா கருவா

- a) Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual yang meliputi:
 - Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan.
 - Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
- b) Pengeluaran belanja rehabilitasi/renovasi/restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki.
 - Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
- c) Pengeluaran yang digunakan untuk:
 - Pengadaan tanah
 - Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
 - Pembelian/pembuatan Aset Tetap Lainnya
- 5) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:
 - a) Pembelian peralatan dan mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - b) Pembuatan peralatan, mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - d) Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
 - e) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

- f) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama serta biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
- g) Rehabilitasi/renovasi/restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- h) Rehabilitasi/renovasi/restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- i) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan dan biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
- j) Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- k) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
- l) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦫꦺꦴꦩꦶꦠꦺꦤ꧀ꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦠ

bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.

- m) Pembelian Aset Tetap lainnya meliputi harga kontrak/ beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - n) Pembuatan/pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - o) Pembuatan/pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan belanja yang terkait dengan pembuatan/pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- 6) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:
- a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
 - b) Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- 7) Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap.
- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan.
- 8) Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
- a) Pengadaan/pembelian tanah.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

- b) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan.
- c) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.

b. Pedoman Pencatatan BMD

- 1) Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.
- 2) Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
- 3) Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan BMD yang akan diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- 5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- 6) BMD yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

c. Pedoman Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola dan Pengguna. Penyusutan ditetapkan atas aset tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olah raga, alat musik/band dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
- 2) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கருவாடக கருவாடக கருவாடக கருவாடக கருவாடக

- b) Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap triwulan selama masa manfaat.
- 3) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai sisa.
- 4) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- 5) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
- 6) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- 7) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 8) Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 9) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-pos LRA

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Anggaran **Realisasi**

5.1.1 Pendapatan Daerah **Rp4.835.587.382.957,00** **Rp4.869.450.568.324,59**

Pendapatan Pemda DIY TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.835.587.382.957,00 direalisasikan sebesar Rp4.869.450.568.324,59 atau 100,70%. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.155.619.602.936,49 atau 19,18% dibanding realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 yaitu sebesar Rp6.025.070.171.261,08. Pendapatan Daerah terdiri dari kelompok PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah		1.793.594.279.035,00	1.839.847.607.163,59	102,58	2.481.506.565.559,08
1	Pajak Daerah	1.521.266.024.486,00	1.541.673.476.325,25	101,34	2.157.532.293.945,00
2	Retribusi Daerah	72.579.914.151,00	79.022.419.102,85	108,88	79.460.801.542,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	126.006.483.045,00	127.241.046.476,91	100,98	120.935.677.671,93
4	Lain-lain PAD yang Sah	73.741.857.353,00	91.910.665.258,58	124,64	123.577.792.400,15
Pendapatan Transfer		3.034.387.603.922,00	3.022.299.662.161,00	99,60	3.535.479.452.702,00
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.033.406.677.291,00	3.021.318.735.530,00	99,60	3.534.495.647.472,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	980.926.631,00	980.926.631,00	100,00	983.805.230,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		7.605.500.000,00	7.303.299.000,00	96,03	8.084.153.000,00
	Pendapatan Hibah	7.605.500.000,00	7.303.299.000,00	96,03	8.084.153.000,00
Jumlah		4.835.587.382.957,00	4.869.450.568.324,59	100,70	6.025.070.171.261,08

Anggaran **Realisasi**

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah **Rp1.793.594.279.035,00** **Rp1.839.847.607.163,59**

PAD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.793.594.279.035,00 dan di realisasikan sebesar Rp1.839.847.607.163,59 atau 102,58%. Realisasi PAD TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp641.658.958.395,49 atau 25,86% dibanding realisasi PAD TA 2024 yaitu sebesar



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Wilayah Istimewa yang berkeadilan dan berkeadilan

Rp2.481.506.565.559,08. PAD yang mengalami penurunan terbesar dibandingkan dengan target dan realisasi TA 2024 adalah Pajak Daerah. Hal tersebut merupakan efek dari diterapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur adanya opsen PKB dan BBNKB yang disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota hingga 66% dari pajak terutang.

Secara umum, upaya yang ditempuh dalam merealisasikan target penerimaan PAD sehingga realisasinya bisa melampaui anggaran antara lain:

1. Melakukan penyesuaian terhadap regulasi sesuai dengan kebutuhan;
2. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan institusi terkait;
3. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pendapatan;
4. Penyebarluasan informasi pendapatan daerah melalui berbagai media, baik media sosial, media cetak, maupun media elektronik;
5. Mengembangkan teknologi sebagai media untuk mempermudah penerimaan pendapatan;
6. Menyelenggarakan berbagai program stimulus untuk peningkatan PAD;
7. Optimalisasi BUMD melalui berbagai upaya antara lain pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD;

Rincian anggaran dan realisasi PAD adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	1.521.266.024.486,00	1.541.673.476.325,25	101,34	2.157.532.293.945,00
2	Retribusi Daerah	72.579.914.151,00	79.022.419.102,85	108,88	79.460.801.542,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	126.006.483.045,00	127.241.046.476,91	100,98	120.935.677.671,93
4	Lain-lain PAD yang Sah	73.741.857.353,00	91.910.665.258,58	124,64	123.577.792.400,15
	Jumlah	1.793.594.279.035,00	1.839.847.607.163,59	102,58	2.481.506.565.559,08

Anggaran

Realisasi

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Rp1.521.266.024.486,00

Rp1.541.673.476.325,25

Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.521.266.024.486,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.541.673.476.325,25 atau 101,34%. Realisasi Pajak Daerah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp615.858.817.619,75 atau 28,54% jika dibandingkan dengan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

realisasi Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp2.157.532.293.945,00. Penyebab utama penurunan pajak tersebut merupakan imbas dari diterapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mulai berlaku efektif 5 Januari 2025, beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur adanya opsen PKB dan BBNKB yang disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota hingga 66% dari pajak terutang. Rincian anggaran dan realisasi pajak daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PKB	653.605.528.300,00	666.057.670.000,00	101,91	1.041.662.985.900,00
2	BBNKB	183.794.999.400,00	201.880.407.600,00	109,84	453.957.069.400,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	377.603.830.093,00	377.603.830.093,00	100,00	372.113.724.291,00
4	Pajak Air Permukaan	887.041.634,00	922.269.636,00	103,97	806.104.996,00
5	Pajak Rokok	303.605.728.809,00	294.042.213.023,00	96,85	288.962.709.258,00
6	Pajak Alat Berat	30.000.000,00	58.256.600,00	194,19	29.700.100,00
7	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	1.738.896.250,00	1.108.829.373,25	63,77	0,00
Jumlah		1.521.266.024.486,00	1.541.673.476.325,25	101,34	2.157.532.293.945,00

A. Pajak Kendaraan Bermotor

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp653.605.528.300,00 dan direalisasikan sebesar Rp666.057.670.000,00 atau 101,91%. Realisasi pada TA 2024 adalah sebesar Rp1.041.662.985.900,00. Dengan demikian terjadi penurunan realisasi PKB TA 2025 dibandingkan TA 2024 sebesar Rp375.605.315.900,00.

B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp183.794.999.400,00 dan direalisasikan sebesar Rp201.880.407.600,00 atau 109,84%. Realisasi pendapatan BBNKB melebihi target karena ada kendaraan roda empat dan kendaraan besar (bus) yang melakukan pembayaran di akhir tahun. Realisasi pada TA 2024 adalah sebesar Rp453.957.069.400,00. Dengan demikian terjadi penurunan realisasi BBNKB TA 2025 dibandingkan TA 2024 sebesar Rp252.076.661.800,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாறுவாஉகயவாஉகயவாபெரிமாறுவாஉகயவா

C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Mekanisme penentuan besaran anggaran PBBKB didasarkan pada Pergub DIY Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tata Cara Bagi Hasil Daerah. Pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp377.603.830.093,00 dan direalisasikan sebesar Rp377.603.830.093,00 atau 100%. Realisasi pada TA 2024 adalah sebesar Rp372.113.724.291,00. Dengan demikian terjadi kenaikan realisasi PBBKB TA 2025 dibandingkan TA 2024 sebesar Rp5.490.105.802,00.

D. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp887.041.634,00 dan direalisasikan sebesar Rp922.269.636,00 atau 103,97%. Realisasi pada TA 2024 adalah sebesar Rp806.104.996,00. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp116.164.640,00 pada TA 2025 dibandingkan TA 2024.

E. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan yang dikenakan atas cukai rokok. Pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp303.605.728.809,00 dan direalisasikan sebesar Rp294.042.213.023,00 atau 96,85%. Realisasi pada TA 2024 sebesar Rp288.962.709.258,00. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp5.079.503.765,00 pada TA 2025 dibandingkan TA 2024. Realisasi pendapatan Pajak Rokok pada TA 2025 tidak sesuai dengan target karena penganggaran ditetapkan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-134/PK.5/2024 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2025, sedangkan realisasi berdasarkan:

1. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-53/PK.5/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan Desember TA 2024 dan TW I TA 2025 Tahap I untuk 30 Propinsi.
2. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-76/PK.5/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan TW II TA 2025 Tahap I.
3. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-122/PK.5/2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan TW III TA 2025.
4. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-175/PK.5/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan TW IV TA 2025 Tahap I.

F. Pajak Alat Berat

Pajak Alat Berat adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp58.256.600,00 atau 194,19%.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

Realisasi pendapatan Pajak Alat Berat melebihi target karena ada objek pajak baru yang terdata dari hasil pendataan dan yang membayarkan pajaknya. Realisasi Pajak Alat Berat pada TA 2024 adalah sebesar Rp29.700.100,00. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp28.556.500,00 pada TA 2025 dibandingkan TA 2024.

G. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Opsen Pajak MBLB adalah opsen yang dikenakan oleh atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen Pajak MBLB mulai diterapkan pada tahun 2025 sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.738.896.250,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.108.829.373,25 atau 63,77%. Realisasi pendapatan Opsen Pajak MBLB tidak sesuai dengan target karena penganggaran sesuai dengan:

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 005/2594 tentang Estimasi Opsen Pajak MBLB TA 2025.
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 900/4037 tentang Estimasi Opsen Pajak MBLB TA 2025.

Berbagai upaya yang dilakukan sebagai langkah optimalisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2025 antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan institusi terkait, antara lain dengan Kemendagri RI dan Kementerian Keuangan RI pada tataran kebijakan, dengan Kepolisian Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY termasuk dengan daerah perbatasan dalam operasional pemungutan dan pelayanan PAD;
2. Melaksanakan kolaborasi kegiatan guna optimalisasi penerimaan PKB dan Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB, serta Opsen MBLB yang diwujudkan dalam bentuk sinergi pendanaan dengan pemerintah kabupaten dan kota;
3. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pemungut dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas pajak;
4. Mengembangkan inovasi pembayaran PKB tanpa tatap muka melalui anjungan E-POSTI QRISTIMEWA, Qris, GoPay, *e-banking*, dan *e-commerce*;
5. Layanan pengingat jatuh tempo PKB melalui *Whatsapp Blast*;
6. Layanan cek pajak;
7. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak melalui program *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling, dan layanan malam;



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta

- 8. Penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak daerah, pembayaran pajak lima tahunan melalui Bus Samsat Keliling dan purna ditempat;
- 9. Menyelenggarakan program bebas denda dan *cashback* sebagai stimulus pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- 10. Melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak baru;
- 11. Penyebarluasan informasi pendapatan daerah melalui berbagai media, baik media sosial, media cetak, maupun media elektronik.

Anggaran

Realisasi

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Rp72.579.914.151,00

Rp79.022.419.102,85

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dianggarkan sebesar Rp72.579.914.151,00 dan direalisasikan sebesar Rp79.022.419.102,85 atau 108,88%. Realisasi Retribusi Daerah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp438.382.439,15 atau 0,55% dibanding realisasi Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp79.460.801.542,00. Retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perzinaan Tertentu. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah per obyek dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 4
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	40.063.926.016,00	45.722.829.575,25	114,12	47.595.121.875,00
2	Retribusi Jasa Usaha	32.263.988.135,00	33.144.969.527,60	102,73	31.701.069.667,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	252.000.000,00	154.620.000,00	61,36	164.610.000,00
Jumlah		72.579.914.151,00	79.022.419.102,85	108,88	79.460.801.542,00

A. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum TA 2025 dianggarkan sebesar Rp40.063.926.016,00 dan direalisasikan sebesar Rp45.722.829.575,25 atau 114,12%. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 5
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	37.531.326.000,00	41.448.532.195,25	110,44	42.295.818.116,00
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan	2.532.600.016,00	4.274.297.380,00	168,77	5.299.303.759,00
Jumlah		40.063.926.016,00	45.722.829.575,25	114,12	47.595.121.875,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦤꦼꦢꦤꦼꦢꦤꦼꦠꦶꦩꦼꦮꦏꦿꦏꦠ

Penjelasan lebih lanjut mengenai Retribusi Jasa Umum TA 2025 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan total anggaran sebesar Rp37.531.326.000,00 dan total realisasi sebesar Rp41.448.532.195,25 atau 110,44%. Realisasi ini turun sebesar Rp847.285.920,75 dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp42.295.818.116,00.

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp37.267.107.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp41.273.754.195,25 atau 110,75%. Pelaksanaannya terdapat pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (BLKK), Rumah Sakit Jiwa Grhasia, dan Rumah Sakit Paru Respira. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLKK melebihi anggaran karena penggalakan promosi melalui kegiatan yang lebih banyak melibatkan masyarakat sehingga lebih banyak yang mengenal dan menggunakan layanan Laboratorium BLKK. Selain itu pada tahun 2025 juga terdapat program pemeriksaan laboratorium HPV DNA dan higiene sanitasi. Pemeriksaan higiene sanitasi merupakan syarat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang dibutuhkan untuk legalitas usaha khususnya di bidang pangan dan lingkungan. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia melebihi anggaran berasal dari klaim Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang tinggi, yang berasal dari tagihan tahun lalu dan terbayarkan di tahun ini. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Paru Respira mampu melampaui anggaran sebagai hasil dari optimalisasi pendapatan yang dilakukan RS Respira, salah satunya menyelenggarakan acara dan juga mengikuti acara yang melibatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dengan tujuan semakin mengenalkan RS Respira dan bahwa RS Respira tidak hanya menerima pasien dengan penyakit paru-paru, tetapi juga menerima pasien penyakit dalam, pasien anak, pasien yang memerlukan rehabilitasi medik, dan pasien yang memerlukan tindakan bedah dengan dukungan instalasi pendukung radiologi, laboratorium dan farmasi serta fasilitas pendukung lain yang lengkap. Upaya-upaya tersebut dilakukan supaya terjadi peningkatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, sehingga meningkatkan klaim BPJS baik obat maupun rawat inap dan rawat jalan.
- 2) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dianggarkan sebesar Rp264.219.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp174.778.000,00 atau 66,15%. Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3). Realisasi kurang dari target karena dari



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

puskesmas memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis pada perusahaan-perusahaan yang biasanya bekerja sama dengan Balai K3.

b. Retribusi Pelayanan Kebersihan

Retribusi Pelayanan Kebersihan dianggarkan sebesar Rp2.532.600.016,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.274.297.380,00 atau 168,77%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp1.025.006.379,00 dari realisasi TA 2024 sebesar Rp5.299.303.759,00. Retribusi Pelayanan Kebersihan dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Dinas PUP ESDM) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

1) Dinas PUP ESDM dianggarkan sebesar Rp1.553.008.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.936.504.000,00 atau sebesar 124,69%. Sumber pendapatan tersebut berasal dari pelayanan pembuangan dan pengolahan lumpur tinja. Realisasi melebihi anggaran karena beberapa faktor, yaitu:

- a. Adanya penambahan jumlah armada truk tangki tinja sebanyak 500 truk/bulan dibandingkan dengan triwulan 3.
- b. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Madurejo milik Pemerintah Kabupaten Sleman belum beroperasi secara optimal, sehingga potensi truk tangki tinja untuk cakupan wilayah Kabupaten Sleman dan sekitarnya yang tidak bisa terlayani oleh IPLT Madurejo, dibuang dan diolah ke IPLT Sewon milik Pemerintah Daerah DIY.
- c. Adanya pemeliharaan unit IPLT Sewon yang meningkatkan kinerja alat pengolahan.
- d. Sistem pembayaran melalui QRIS merupakan langkah inovatif dan memberikan kemudahan bagi pelanggan. Sistem pembayaran non-tunai ini juga memberikan efisiensi yang lebih tinggi dalam berbagai aspek operasional pembayaran pembuangan lumpur tinja.

2) DLHK dianggarkan sebesar Rp979.592.016,00 dan realisasi sebesar Rp2.337.793.380,00 atau 238,65%. Posisi kuota evakuasi sampah ke TPA Regional Piyungan sudah ditetapkan di awal melalui berita acara penetapan kuota evakuasi sampah ke TPA Regional Piyungan nomor B/600.4.15/5421/D5 tanggal 2 Juli 2025 bersama dengan targetnya. Namun kondisi penanganan sampah di kabupaten/kota mengalami ketidakmampuan dalam mengolah timbunan sampah yang ada sehingga ada tambahan permohonan tambahan kuota evakuasi sampah dari tiga kabupaten/kota. Kota Yogyakarta mengajukan permohonan tambahan kuota evakuasi sampah sebanyak empat kali dan Kabupaten Sleman serta Bantul masing-masing satu kali. Hal ini yang menyebabkan realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan pada DLHK melebihi target cukup tinggi.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

B. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dianggarkan sebesar Rp32.263.988.135,00 dan direalisasikan sebesar Rp33.144.969.527,60 atau 102,73%. Retribusi Jasa Usaha TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.443.899.860,60 atau 4,55% dibanding TA 2024 yaitu sebesar Rp31.701.069.667,00.

Rincian anggaran dan realisasi dari masing-masing rincian obyek Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 5. 6
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	2.042.814.000,00	2.905.140.946,00	142,21	1.899.454.200,00
2	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.569.276.230,00	1.778.675.290,00	113,34	1.310.852.362,00
3	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.421.663.000,00	2.896.265.000,00	119,59	2.853.408.500,00
4	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	157.696.600,00	164.340.800,00	104,21	150.641.400,00
5	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	6.434.721.000,00	8.004.134.500,00	124,38	8.524.013.200,00
6	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	13.926.451.922,00	10.676.382.706,60	76,66	10.591.273.954,00
7	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.711.365.383,00	6.720.030.285,00	117,66	6.371.426.051,00
Jumlah		32.263.988.135,00	33.144.969.527,60	102,73	31.701.069.667,00

Secara umum realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Kendati demikian, terdapat satu rincian obyek Retribusi Jasa Usaha yang tidak mampu mencapai target yaitu Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. Dengan target anggaran sebesar Rp13.926.451.922,00 hanya terealisasi sebesar Rp10.676.382.706,60 atau 76,66%.

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dilaksanakan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, DPUP ESDM, DLHK, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kendala yang paling besar dihadapi oleh DLHK. Dengan target pendapatan Rp5.553.432.640,00 hanya dapat terealisasi Rp1.586.310.238,60 atau 28,56%. Kondisi tersebut disebabkan belum optimalnya realisasi pendapatan dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atas penjualan minyak kayu putih. Rendahnya realisasi pendapatan tersebut dipengaruhi oleh masih sedikitnya volume penjualan minyak kayu putih. Sampai dengan akhir periode pelaporan, ketersediaan stok minyak kayu putih tercatat sebanyak 34.705 liter, yang terdiri atas produksi tahun 2024 sebesar 14.697 liter dan produksi tahun 2025 sebesar 20.008 liter. Namun demikian, volume



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp126.006.483.045,00	Rp127.241.046.476,91

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa deviden pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp126.006.483.045,00 dan realisasi sebesar Rp127.241.046.476,91 atau 100,98%. Anggaran pendapatan deviden ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rincian anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 7
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN	213.286.482,00	0,00	0,00	0,00
	- PT Asuransi Bangun Askrida	213.286.482,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	123.074.128.133,00	124.521.978.046,91	101,18	115.608.956.981,93
	- BUKP	2.000.000.000,00	3.447.849.913,91	172,39	4.580.240.352,93
	- PT Bank BPD DIY	121.074.128.133,00	121.074.128.133,00	100,00	111.028.716.629,00
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.719.068.430,00	2.719.068.430,00	100,00	5.326.720.690,00
	- PT AMI	2.719.068.430,00	2.719.068.430,00	100,00	857.255.892,00
	- PT Taru Martani	0,00	0,00	0,00	4.469.464.798,00
	- Perumda Air Bersih Tirtatama	0,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025:

- 1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN yaitu PT. Asuransi Bangun Askrida (ASKRIDA) dianggarkan sebesar Rp213.286.482,00 dan realisasi sebesar Rp0,00. PT. ASKRIDA merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang asuransi umum yang pemilik sahamnya adalah berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Belum disetorkannya deviden oleh PT. ASKRIDA disebabkan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யகர்டா

adanya arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menahan pembayaran deviden sementara waktu guna menyehatkan kondisi keuangan perusahaan. PT. ASKRIDA tidak membagikan deviden sejak tahun 2024.

- 2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga keuangan) dianggarkan sebesar Rp123.074.128.133,00 dan realisasi sebesar Rp124.521.978.046,91 atau 101,18%. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga keuangan) yaitu:
 - a) PT. Bank BPD DIY dianggarkan sebesar Rp121.074.128.133,00 dan terealisasi Rp121.074.128.133,00 atau sebesar 100,00%. Realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank BPD DIY TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.045.411.504,00 atau 9,05% dibanding dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp111.028.716.629,00. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian pada tahun buku 2024 sudah membaik dan mendorong peningkatan kinerja perbankan. Sesuai dengan hasil RUPS sesuai Akta Notaris Nomor 12 tanggal 11 Maret 2025 Laba Setelah Pajak Rp317.338.139.350,00 sesuai AD ART dibagi untuk deviden sebesar 70,59% dan cadangan 29,41%. Sesuai dengan proporsi penyertaan modal sebesar 54,05% maka deviden untuk Pemda DIY sebesar Rp121.074.128.133,00.
 - b) Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.447.849.913,91 atau 172,39%. Realisasi penerimaan deviden BUKP melebihi target anggaran dikarenakan penetapan anggaran awal dilakukan secara konservatif (*low projection*), mengingat adanya ketidakpastian mengenai status kelembagaan BUKP. Ketidakjelasan payung hukum atau status kelembagaan BUKP membuat penyusunan anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Selain itu, penetapan target deviden dengan metode konservatif karena secara statistik jumlah BUKP yang mengalami kerugian semakin banyak karena pembebanan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang besar akibat semakin meningkatnya kredit yang tidak lancar. Dalam realisasinya ternyata terdapat BUKP yang kinerjanya membaik dan memperoleh laba. Deviden BUKP yang dibagikan kepada Pemda DIY dihitung dari masing-masing BUKP yang memperoleh laba karena BUKP berdiri sendiri-sendiri tidak terkonsolidasi. Sedangkan kerugian yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan BUKP Kombinasi merupakan kerugian BUKP secara keseluruhan.
- 3) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) dianggarkan sebesar Rp2.719.068.430,00 dan realisasi sebesar



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta

Rp2.719.068.430,00 atau 100%. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) yaitu:

- a) PT. Anindya Mitra Internasional dianggarkan sebesar Rp2.719.068.430,00 dan realisasi sebesar Rp2.719.068.430,00 atau 100%. Nilai tersebut naik cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp857.255.892,00. Sesuai dengan hasil RUPS sesuai Akta Notaris Nomor 23 tanggal 19 Maret 2025 laba setelah pajak Rp6.397.808.071,00, deviden yang dibagi untuk Pemda DIY sebesar 42,50% dengan nilai sebesar Rp2.719.068.430,00.
- b) PT. Tarumartani dianggarkan sebesar Rp0,00, dan realisasi sebesar Rp0,00. Pada tahun 2025 PT Taru Martani belum dapat memberikan deviden pada Pemda DIY atas kinerja Tahun Buku 2024 karena pada tahun tersebut PT Taru Martani mengalami kerugian yang disebabkan oleh permasalahan investasi yang tidak sesuai prosedur.
- 4) Pengelolaan aset yang dipisahkan pada Pemda DIY juga dilakukan pada Perumda Air Bersih Tirtatama. Perumda Air Bersih Tirtatama beroperasi sejak Januari 2021 dan sampai dengan Tahun 2025 masih mengalami defisit operasional sehingga belum dapat memberikan deviden atas penyertaan modal Pemda DIY pada Perumda Air Bersih Tirtatama.

Anggaran

Realisasi

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp73.741.857.353,00 Rp91.910.665.258,58

Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dianggarkan sebesar Rp73.741.857.353,00 dan realisasi sebesar Rp91.910.665.258,58 atau 124,64%. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp31.667.127.141,57 atau 25,63% dibandingkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp123.577.792.400,15. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 5. 8
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah**

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	1.624.425.625,00	2.719.973.024,00	167,44	3.117.851.516,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	12.454.687.611,00	13.488.621.540,00	108,30	15.056.973.908,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	8.735.556.250,00	8.544.569.375,00	97,81	3.235.409.000,00
4	Jasa Giro	8.000.000.000,00	4.875.380.592,00	60,94	7.953.419.673,00
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.800.000,00	0,00	11.540.000,00
6	pendapatan bunga	10.000.000.000,00	17.267.339.787,00	172,67	16.371.213.210,00
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Wilayah Kutha Wacana Kutha Ngayogyakarta Samudra

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	83.588.308,99	0,00	1.561.478,00
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	311.808.099,00	597.284.704,39	191,56	735.407.168,00
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	24.422.124.500,00	28.938.474.579,00	118,49	61.431.097.950,00
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	45.374.513,00	0,00	36.788.726,00
12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	50.000.000,00	348.191.800,00	696,38	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	3.618.243.529,65	0,00	5.932.008.055,92
14	Pendapatan BLUD	8.095.077.268,00	10.872.674.505,55	134,31	9.373.809.715,23
15	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)	0,00	24.453.000,00	0,00	0,00
16	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	48.178.000,00	480.696.000,00	997,75	319.812.000,00
Jumlah		73.741.857.353,00	91.910.665.258,58	124,64	123.577.792.400,15

Penjelasan dari rekening Lain-lain PAD yang memiliki deviasi tinggi adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp1.624.425.625,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.719.973.024,00 atau 167,44%. Dengan demikian, mengalami penurunan sebesar Rp397.878.492,00 atau 12,76% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3.117.851.516,00. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
 - a) Penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemda DIY kepada mantan pimpinan DPRD DIY sesuai SK Penghapusan Nomor 38/SEKDA/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 sebesar Rp110.600.000,00.
 - b) Penjualan satu unit kendaraan bermotor dinas operasional roda empat dan tujuh unit kendaraan bermotor dinas operasional roda dua (Paket A) sesuai SK Penghapusan Nomor 57/SEKDA/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 sebesar Rp208.914.200,00.
 - c) Penjualan satu unit kendaraan bermotor dinas operasional roda empat dan lima unit kendaraan bermotor dinas operasional roda dua (Paket B) sesuai SK Penghapusan Nomor 57/SEKDA/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 sebesar Rp59.176.400,00.
 - d) Penjualan dua unit kendaraan bermotor dinas operasional roda empat dan delapan unit kendaraan bermotor dinas operasional roda dua (Paket C) sesuai SK Penghapusan Nomor 57/SEKDA/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 sebesar Rp99.354.200,00.
 - e) Pemusnahan dan penghapusan barang persediaan berbahan kertas serta Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan dan buku pelajaran TA 2025 sesuai SK Penghapusan Nomor 50/SEKDA/IX/2025 tanggal 18 September 2025 sebesar Rp43.363.500,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய செய்தி கட்டிய கட்டிய கட்டிய கட்டிய கட்டிய கட்டிய கட்டிய கட்டிய

- f) Penjualan sembilan unit kendaraan bermotor dinas operasional roda dua (Paket D) sesuai SK Penghapusan Nomor 57/SEKDA/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 sebesar Rp32.464.100,00.
 - g) Penghapusan Peralatan dan Mesin serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada perangkat daerah di lingkungan Pemda DIY TA 2025 sesuai SK Penghapusan Nomor 60/SEKDA/X/2025 sebesar Rp50.000.000,00.
 - h) Penjualan Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada OPD, SMA, SMK, dan Balai Pendidikan Menengah di lingkungan Pemda DIY sesuai SK Penghapusan Nomor 21/SEKDA/III/ 2025 sebesar Rp200.000.000,00
 - i) Penjualan Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada OPD, SMA, SMK, dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemda DIY sesuai SK Penghapusan Nomor 42/SEKDA/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 sebesar Rp204.600.000,00.
- 2) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
- a) Penjualan Gedung dan Bangunan serta Jalan dan Jaringan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY sesuai SK Penghapusan Nomor 20/SEKDA/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 sebesar Rp370.000.000,00.
 - b) Penjualan sisa bongkaran material bangunan sesuai SK Penghapusan Nomor:
 - a. 32/SEKDA/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 sebesar Rp58.200.000,00,
 - b. 35/SEKDA/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 sebesar Rp22.750.000,00,
 - c. 73/SEKDA/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 sebesar Rp41.500.000,00,
 - d. 59/SEKDA/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 sebesar Rp338.100.000,00.
 - c) Penjualan bangunan rumah tinggal dan bangunan lainnya hasil pembebasan lahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan JJLS pada segmen Garongan-Congot sebesar Rp35.000.000.
 - d) Penjualan Jembatan Srandakan I (Jembatan Srandakan Lama) sesuai SK Penghapusan Nomor 54/SEKDA/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 sebesar Rp625.625.625,00.
- 3) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
- a) Penjualan 17 ekor hewan ternak kambing/domba pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan (BP2TDK) DPKP DIY sesuai SK Penghapusan Nomor 55/SEKDA/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 sebesar Rp15.200.000,00.
 - b) Penjualan sembilan ekor hewan ternak sapi pada BP2TDK DPKP DIY sesuai SK Penghapusan Nomor 55/SEKDA/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 sebesar Rp197.999.999,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யாகர்டா

- c) Penjualan hasil penebangan pohon sebesar Rp7.125.000,00.
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, DPUP ESDM, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Dinas Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, DPKP, BPKA, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Penghubung Daerah. Realisasi tertinggi terdapat pada BPKA yaitu berupa Hasil Sewa BMD yang dianggarkan sebesar Rp11.672.351.111,00 dan direalisasikan sebesar Rp11.741.459.111,00 atau 100,59%, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Hasil Sewa BMD sebesar Rp4.734.374.000,00 merupakan pembayaran atas sewa tanah dan bangunan milik Pemda DIY yang disewa oleh PT. Formula Land, PT. Surya Abhinaya Sentosa, PT. Avo Innovation Technology, PT. Yudhistira Mahadana Sampurna, Yayasan Yogyakarta Angga Binangun, Forum Komunikasi Ekonomi Kreatif, KPN Sumber Rejeki, Pemkab Bantul, Komunitas Gayam, dan Penyewa Rumah Dinas.
 - 2) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp7.007.085.111,00 merupakan pembayaran pembagian keuntungan dan pembayaran kontribusi tetap dari PT. Setia Mataram Tritunggal untuk KSP Hotel Malioboro.
3. Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.875.380.592,00 atau 60,94%. Realisasi menurun sebesar Rp3.078.039.081,00 atau 38,70% dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp7.953.419.673,00. Jasa Giro pada TA 2025 terdiri dari Jasa Giro pada Kas Daerah (kasda) dan Jasa Giro pada Kas di Bendahara. Jasa Giro pada Kasda sebesar Rp4.252.416.688,00 merupakan pendapatan yang diterima dari penempatan kasda di BPD DIY selama TA 2025. Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp622.963.904,00 merupakan pendapatan yang diterima dari penempatan kas yang ada di rekening bendahara dan PPTK selama TA 2025. Penurunan Pendapatan Jasa Giro pada TA 2025 dikarenakan adanya penurunan *rate* jasa giro BPD DIY dari yang sebelumnya 2,5% menjadi 1,5%.
4. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tidak dianggarkan namun terdapat pendapatan yang dicatat sebesar Rp4.800.000,00 dari Agustina Totowigati untuk pelunasan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) a.n UD Sidoarum.
5. Pendapatan Bunga tercatat di SKPD BPKA yaitu sebesar Rp17.265.125.656,00 berasal dari penempatan rekening deposito pada PT. Bank BPD DIY. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi bank persepsi atau bank pembangunan daerah. Pengoptimalan *idle cash* timbul akibat adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Inpres



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Kemendagri nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025. Pendapatan Bunga sebesar Rp2.214.131,00 merupakan remunerasi atas saldo *Treasury Deposit Facility* (TDF).

6. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp1.000.000,00 merupakan penerimaan setoran pengembalian kerugian daerah atas nama Sudjono dari PD. Pertambangan.
7. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dianggarkan sebesar Rp0,00 namun terdapat realisasi sebesar Rp83.588.308,99. Realisasi terbesar terdapat pada DLHK, dengan realisasi sebesar Rp77.539.500,00. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain pada DLHK merupakan pengganti nilai Investasi Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IPKH) oleh PLN untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Nglipar, Bagian daerah Hutan (BDH) Karangmojo seluas 2,99 ha berdasarkan SK MenLHK Nomor: SK.696/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/20. IPKH tersebut berlaku sepanjang 25 tahun sampai dengan tanggal 27 September 2046.
8. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan denda yang diakui oleh Pemda DIY atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari berbagai macam sektor dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Dinas PUPESDM sebesar Rp58.328.191,00 terdiri dari:
 - a. keterlambatan pekerjaan penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah TA 2024,
 - b. keterlambatan pekerjaan konstruksi pengeboran eksplor air TA 2024,
 - c. keterlambatan pekerjaan jalan Demakijo-Kebonagung TA 2025
 - 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan: keterlambatan pekerjaan jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan bulan Januari-Oktober 2025 sebesar Rp16.611.000,00.
 - 3) Bapperida DIY: keterlambatan belanja modal peralatan studio audio sebesar Rp9.003.490,00
 - 4) Bakesbangpol: keterlambatan pekerjaan rehabilitasi atap sebesar Rp4.809.054,00.
 - 5) Badan Kepegawaian Daerah: keterlambatan pengadaan mebel interior sebesar Rp14.000.000,00.
 - 6) Dinas Perhubungan: keterlambatan pekerjaan studi evaluasi ruas jalan dan simpang DIY sebesar Rp2.303.721,00.
 - 7) Dinas Kesehatan sebesar Rp144.689.707 terdiri dari:
 - a. keterlambatan pekerjaan jasa konsultasi dokumen ANDALALIN dan AMDAL,
 - b. pengadaan pelayanan kesehatan pot sputum,
 - c. keterlambatan pengadaan pot sputum pelayanan kesehatan dan bahan kimia,



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறுவாஉகழவாஉகழவாஊழலவாஊழலவா

- d. keterlambatan pekerjaan belanja alat kesehatan dan alat kedokteran, dan
- e. keterlambatan belanja modal bangunan gedung rehab medik sebesar
- 8) Dinas Kebudayaan sebesar Rp27.375.814,00 terdiri dari:
 - a. keterlambatan penyelesaian cetak buku dokumentasi tari Bali,
 - b. keterlambatan pekerjaan atas penataan fasad Malioboro,
 - c. keterlambatan pekerjaan rehab gedung dan instalasi AC.
- 9) Dinas Koperasi sebesar Rp265.491.980,00 terdiri dari:
 - a. keterlambatan pekerjaan penyelesaian PKL Ketandan Utama,
 - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan eks Hotel Mutiara.
- 10) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup: keterlambatan pekerjaan belanja bahan kimia dan keterlambatan pekerjaan video dokumen sebesar Rp823.162,00.
- 11) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga: keterlambatan belanja modal alat praktik kejuruan dan rehab ruangan sekolah sebesar Rp15.769.723,00.
- 12) Denda keterlambatan Optimalisasi Tanah Desa untuk pertanian Desa Margoluwih sebesar Rp17.234.570,00.
- 13) Denda keterlambatan pengadaan barang Kalurahan Margokaton sebesar Rp6.381.387,39.
- 14) Denda keterlambatan pengadaan peralatan praktik kejuruan KK Kuliner SMKN Ma'arif 2 Sleman oleh PT Empat Pilar Suvarna sebagai rekanan Dikpora sebesar Rp2.563.400,00.
- 15) Denda keterlambatan KLB CV Cipta Buana sebesar Rp5.641.676,00.
- 16) Denda keterlambatan Oswald Multikreasi sebagai rekanan dari Dinas Kesehatan sebesar Rp4.189.200,00.
- 17) Denda keterlambatan pembangunan Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH) Kalurahan Bendung, Semin, Gunungkidul sebesar Rp1.006.825,00.
- 18) Temuan Inspektorat Daerah DIY atas keterlambatan pembangunan Rest Area BKK Desa Mandiri Budaya Kalurahan Katongan sebesar Rp1.061.804,00.
9. Pendapatan Denda Retribusi Daerah tidak dianggarkan namun terdapat realisasi, yaitu pada SKPD Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan, Sekretariat Daerah, dan BPKA. Realisasi tertinggi terdapat di BPKA yaitu berupa Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas sewa rumah dinas sebesar Rp12.756.707,00 dan biaya penggantian cetak STNK hilang sebesar Rp30.429.000,00.
10. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tercatat di BPKA DIY, merupakan pendapatan yang didapatkan dari wanprestasi pekerjaan yang telah dijamin pelaksanaannya dengan rincian:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

- 1) Wanprestasi Penjualan BMD berupa Gedung dan bangunan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY sebesar Rp50.000.000,00.
 - 2) Wanprestasi Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan an. Maskur sebesar Rp15.000.000,00.
 - 3) Wanprestasi belanja pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas PUPESDM sebesar Rp283.191.800,00.
11. Pendapatan dari Pengembalian merupakan akun untuk menampung setoran kelebihan pembayaran belanja TA sebelumnya. Setoran tersebut antara lain berupa tindak lanjut dari pemeriksaan Inspektorat, tindak lanjut dari pemeriksaan BPK, pengembalian BKK Dana Keistimewaan TA sebelumnya, serta pengembalian kelebihan belanja pegawai TA sebelumnya.
12. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) berupa peyeteran atas lelang barang bukti yang telah Inkracht Atas nama Roji Suyanta bin Ponco Sutoyo tanggal 26 Juni 2025.
13. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah terdapat di 2 (dua) SKPD, yaitu satuan polisi pamong praja dan Dinas Perhubungan. Pada Dinas Perhubungan merupakan Denda pelanggaran standar pelayanan minimal angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sejumlah Rp446.000.000,00 sesuai dengan Pergub Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja.

Anggaran

Realisasi

5.1.1.2 Pendapatan Transfer **Rp3.034.387.603.922,00** **Rp3.022.299.662.161,00**

Anggaran Pendapatan Transfer TA 2025 sebesar Rp3.034.387.603.922,00 direalisasikan sebesar Rp3.022.299.662.161,00 atau 99,60%. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp513.179.790.541,00 atau sebesar 14,52% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp3.535.479.452.702,00. Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Anggaran dan realisasi masing-masing kelompok Pendapatan Transfer dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5. 9
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.033.406.677.291,00	3.021.318.735.530,00	99,60	3.534.495.647.472,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	980.926.631,00	980.926.631,00	100,00	983.805.230,00
Jumlah		3.034.387.603.922,00	3.022.299.662.161,00	99,60	3.535.479.452.702,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp3.033.406.677.291,00	Rp3.021.318.735.530,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp3.033.406.677.291,00 direalisasikan sebesar Rp3.021.318.735.530,00 atau 99,60%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp513.176.911.942,00 atau 14,52% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.534.495.647.472,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Keistimewaan, Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 10
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
A	Dana Keistimewaan	976.134.243.366,00	976.134.243.366,00	100,00	1.396.157.452.432,00
B	Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan	2.048.820.040.925,00	2.036.732.099.164,00	99,41	2.126.248.278.040,00
1	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	2.126.248.278.040,00
2	DBH	113.776.675.000,00	104.458.851.600,00	91,81	0,00
3	DAU	1.346.039.895.000,00	1.345.942.438.538,00	99,99	0,00
4	DAK	589.003.470.925,00	586.330.809.026,00	99,55	0,00
C	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	8.452.393.000,00	8.452.393.000,00	100,00	12.089.917.000,00
	Insentif Fiskal	8.452.393.000,00	8.452.393.000,00	100,00	12.089.917.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.033.406.677.291,00	3.021.318.735.530,00	99,60	3.534.495.647.472,00

A. Dana Keistimewaan

Pada TA 2025 dianggarkan Rp976.134.243.366,00 dan direalisasikan Rp976.134.243.366 atau 100%.

B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)

Pada TA 2024, DBH, DAU, DAK Fisik dan non Fisik merupakan rincian obyek dari rekening obyek Dana Perimbangan. Namun pada TA 2025, sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025 rekening Dana Perimbangan dinonaktifkan. Sebagai gantinya, pada TA 2025, dimunculkan rekening obyek baru, yaitu DBH, DAU, dan DAK. Dengan kata lain, rekening DBH, DAU, dan DAK yang semula berada di level rincian obyek di bawah Dana Perimbangan, naik menjadi level obyek.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாறுவாஉருவாஉருவாபெரிமாறுவாஉருவா

a. Dana Perimbangan

Pada TA 2024 terdapat realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp2.126.248.278.040,00. Sedangkan pada TA 2025 tidak terdapat anggaran maupun realisasi karena rekening ini sudah dinonaktifkan.

b. Dana Bagi Hasil

DBH TA 2025 dianggarkan sebesar Rp113.776.675.000,00 direalisasikan sebesar Rp104.458.851.600,00 atau 91,81%. DBH didasarkan pada realisasi penerimaan negara (pajak dan sumber daya alam). Jika realisasi penerimaan negara tidak mencapai target yang diproyeksikan dalam APBN, jumlah DBH yang disalurkan ke daerah juga akan disesuaikan, sehingga DBH yang disalurkan ke RKUD tidak sebesar 100%.

c. Dana Alokasi Umum

DAU TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.346.039.895.000,00 direalisasikan sebesar Rp1.345.942.438.538,00 atau 99,99%. Sesuai dengan KMK Nomor 43/mk/pk/2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil TA 2025 atas daerah yang masih terdapat sisa DAK Nonfisik di RKUD sampai dengan TA 2024, Pemda DIY masih memiliki sisa DAK Nonfisik - Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK dan Dana Fasilitasi Pananaman Modal sejumlah Rp97.456.462,00 sehingga DAU dipotong sejumlah sisa dana tersebut.

d. Dana Alokasi Khusus

DAK TA 2025 dianggarkan sebesar Rp589.003.470.925,00 direalisasikan sebesar Rp586.330.809.026,00 atau 99,54%. DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik, dimana realisasi penyaluran DAK Fisik didasarkan pada jumlah nilai kontrak kegiatan yang telah disetujui oleh pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan realisasi DAK Fisik tidak mencapai 100%.

C. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya. Pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp8.452.393.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp8.452.393.000,00 atau 100%. Besaran Insentif Fiskal yang diterima Pemda DIY sesuai dengan alokasi yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாறுவாஉகழவாஉகழவாபெரிமாறுவாஉகழவா

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp980.926.631,00	Rp980.926.631,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp980.926.631,00 dan realisasi sebesar Rp980.926.631,00 atau 100%. Penerimaan BKK TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.878.599,00 atau 0,29% dibandingkan dengan realisasi BKK TA 2024 yaitu sebesar Rp983.805.230,00. BKK tersebut berasal dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta dengan peruntukan *sharing* biaya pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan Nomor 12/PK/Bt/2020 dan Nomor 30/PK.KDH/a/2020 dan Nomor 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat. Realisasi penerimaan BKK sesuai berita acara kontribusi (*sharing*) biaya pengelolaan air limbah (IPAL) terpusat TA 2025 sebesar Rp980.926.631,00 terdiri dari Bantuan Keuangan dari Pemkab Bantul sebesar Rp121.360.717,00, Pemkab Sleman sebesar Rp140.717.534,00, dan Pemkot Yogyakarta sebesar Rp718.848.380,00.

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp7.605.500.000,00	Rp7.303.299.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp7.605.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp7.303.299.000,00 atau 96,03%. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp780.854.000,00 atau 9,66% dibandingkan dengan TA 2024 yaitu sebesar Rp8.084.153.000,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada TA 2025 berasal dari Pendapatan Hibah.

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	Rp7.605.500.000,00	Rp7.303.299.000,00

Pendapatan hibah TA 2025 direalisasikan pada sub rincian obyek Pendapatan Hibah dari Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri dengan total anggaran Rp7.605.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.303.299.000,00 atau 96,03%. Pendapatan tersebut diperoleh dari *dealer* otomotif, *main dealer*, dan Jasa Raharja. Hibah *dealer* otomotif dianggarkan sebesar Rp3.332.252.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.033.651.000,00, hibah *main dealer* dianggarkan sebesar Rp25.500.000,00 dengan realisasi Rp21.900.000,00, Jasa Raharja dianggarkan Rp4.247.748.000,00 dan realisasi Rp4.247.748.000,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta

Anggaran

Realisasi

5.1.2 Belanja Daerah **Rp5.112.741.612.241,00** **Rp4.730.606.122.785,52**

Anggaran Belanja TA 2025 ditetapkan sebesar Rp5.112.741.612.241,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.730.606.122.785,52 atau 92,53%. Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp949.888.965.511,60 atau 16,72% dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2024 yaitu sebesar Rp5.680.495.088.297,12. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Anggaran dan realisasi Belanja Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 11
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	3.455.048.853.310,00	3.257.370.556.718,18	94,28	3.589.908.402.394,35
2	Belanja Modal	727.828.251.159,00	606.066.257.104,00	83,27	659.153.310.940,95
3	Belanja Tidak Terduga	39.476.792.633,00	3.405.377.000,00	8,63	20.000.000,00
4	Belanja Transfer	890.387.715.139,00	863.763.931.963,34	97,01	1.431.413.374.961,82
Jumlah		5.112.741.612.241,00	4.730.606.122.785,52	92,53	5.680.495.088.297,12

Anggaran

Realisasi

5.1.2.1 Belanja Operasi **Rp3.455.048.853.310,00** **Rp3.257.370.556.718,18**

Belanja Operasi Pemda DIY TA 2025 dianggarkan sebesar Rp3.455.048.853.310,00 dan realisasi sebesar Rp3.257.370.556.718,18 atau 94,28%. Realisasi Belanja Operasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp332.537.845.676,17 atau 9,26% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2024 yaitu sebesar Rp3.589.908.402.394,35. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2025 dapat dirinci sebagai berikut.

Anggaran

Realisasi

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai **Rp1.759.709.437.784,00** **Rp1.647.593.991.609,00**

Belanja pegawai pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.759.709.437.784,00 dan realisasi sebesar Rp1.647.593.991.609,00 atau 93,63%. Realisasi belanja pegawai TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.188.973.851,00 atau 0,25% dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA 2024 yaitu sebesar Rp1.651.782.965.460,00.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, dan pegawai ASN. Penganggaran belanja pegawai memperhitungkan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

raya, pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK), pemenuhan kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya, serta kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sesuai dengan obyek belanjanya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 12
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Sesuai Dengan Obyek Belanja

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	958.694.914.290,00	849.832.901.716,00	88,64	853.936.873.843,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	740.747.567.538,00	738.318.613.137,00	99,67	436.810.570.412,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	298.375.431.905,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	44.925.399.860,00	44.200.930.070,00	98,39	42.122.865.113,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	242.589.771,00	238.353.685,00	98,25	236.039.583,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.959.685.000,00	2.959.685.000,00	100,00	3.317.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	12.139.281.325,00	12.043.508.001,00	99,21	16.984.184.604,00
Jumlah		1.759.709.437.784,00	1.647.593.991.609,00	93,63	1.651.782.965.460,00

Pada Tabel 5.12 dapat dijelaskan bahwa di dalam realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 sebesar Rp738.318.613.137,00 termasuk realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 sebesar Rp287.746.061.994,00. Terdapat pergeseran mata anggaran pada TA 2025 sesuai amanat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu Rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang pada TA 2024 berada di level obyek dinonaktifkan kemudian digeser ke level rincian obyek menjadi rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada TA 2025.

Anggaran

Realisasi

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp1.160.729.944.545,00 Rp1.078.988.412.794,18

Belanja Barang dan Jasa pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.160.729.944.545,00 dan realisasi sebesar Rp1.078.988.412.794,18 atau 92,96%. Realisasi belanja barang dan jasa TA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

2025 mengalami penurunan sebesar Rp76.907.687.646,17 atau 6,65% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 yaitu sebesar Rp1.155.896.100.440,35. Belanja Barang dan Jasa TA 2025 hanya terserap sebesar 92,95% disebabkan karena beberapa hal antara lain sisa lelang pengadaan, efisiensi, selisih harga barang dengan harga yang terdapat pada DPA, dan belanja yang menyesuaikan kebutuhan. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 13
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai dengan Obyek Belanja

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	180.165.696.976,00	168.307.195.519,00	93,42	193.006.568.211,00
2	Belanja Jasa	575.094.998.529,00	542.943.253.009,00	94,41	589.092.392.295,00
3	Belanja Pemeliharaan	85.897.724.443,00	80.985.270.793,05	94,28	73.391.080.865,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	59.693.889.180,00	48.798.859.976,00	81,75	106.762.631.310,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	79.483.150.000,00	78.982.020.000,00	99,37	40.516.123.400,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOSP	114.156.524.705,00	113.235.204.572,00	99,19	111.276.973.731,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	66.237.960.712,00	45.736.608.925,13	69,05	41.850.330.628,35
Jumlah		1.160.729.944.545,00	1.078.988.412.794,18	92,96	1.155.896.100.440,35

Deviasi terbesar dari Belanja Barang dan Jasa terdapat pada Belanja Barang dan Jasa BLUD karena anggaran belanja barang dan jasa termasuk SILPA BLUD tahun 2024 yang tidak digunakan.

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
5.1.2.1.3 Belanja Subsidi	Rp96.029.746.301,00	Rp95.355.621.534,00

Belanja Subsidi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp96.029.746.301,00 dan realisasi sebesar Rp95.355.621.534,00 atau 99,30%. Realisasi Belanja Subsidi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp19.986.731.004,00 atau 26,52% dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi TA 2024 sebesar Rp75.368.890.530,00.

Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi. Belanja Subsidi Pemda DIY dianggarkan dan direalisasikan di DPUP ESDM dan Dinas Perhubungan.

1) Pada DPUP ESDM dianggarkan sebesar Rp8.852.807.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp8.852.807.000,00 atau sebesar 100%. Realisasi tersebut naik Rp3.511.207.000,00 dari realisasi TA 2024 yaitu sebesar Rp5.341.600.000,00. Belanja subsidi diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY berupa bantuan biaya operasional dalam mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat di DIY dengan berpedoman pada Pergub DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Rp248.397.894.807,00 atau 38,01% dibanding Belanja Hibah TA 2024 yaitu sebesar Rp653.554.770.630,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah per obyek tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5. 14
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	286.258.363.680,00	284.963.848.943,00	99,55	535.710.382.975,00
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	10.810.025.000,00	10.810.025.000,00	100,00	10.493.725.000,00
3	Belanja Hibah Dana BOSP	110.539.630.000,00	109.383.001.880,00	98,95	107.350.662.655,00
Jumlah		407.608.018.680,00	405.156.875.823,00	99,40	653.554.770.630,00

Belanja Hibah dapat pula diklasifikasikan menjadi Belanja Hibah Uang dan Belanja Hibah Barang, dengan rincian tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 15
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang dan Belanja Hibah Barang

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah Uang					
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	56.512.826.000,00	55.793.876.862,00	98,73	75.199.043.486,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	203.399.000.000,00	203.399.000.000,00	100,00	1.600.000.000,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.695.000.000,00	1.695.000.000,00	100,00	271.183.122.576,00
4	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	10.810.025.000,00	10.810.025.000,00	100,00	10.493.725.000,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	110.539.630.000,00	109.383.001.880,00	98,95	107.350.662.655,00
Jumlah Belanja Hibah Uang		382.956.481.000,00	381.080.903.742,00	99,51	465.826.553.717,00
Belanja Hibah Barang					
1	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan	8.766.328.000,00	8.719.039.623,00	99,46	45.538.138.490,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦤꦏꦼꦢꦸꦫꦤ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦶꦪꦏꦿꦠꦫꦠ

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Peraturan Perundang-Undangan				
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.974.389.528,00	1.895.923.797,00	96,03	17.421.098.980,00
3	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.910.820.152,00	13.461.008.661,00	96,77	122.616.459.443,00
4	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	2.152.520.000,00
Jumlah Belanja Hibah Barang		24.651.537.680,00	24.075.972.081,00	97,67	187.728.216.913,00
Total Belanja Hibah		407.608.018.680,00	405.156.875.823,00	99,40	653.554.770.630,00

A. Belanja Hibah Uang

Belanja hibah dalam bentuk uang TA 2025 dianggarkan sebesar Rp382.956.481.000,00 realisasi sebesar Rp381.080.903.742,00 atau 99,51%. Realisasi Belanja Hibah dalam bentuk uang tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp84.745.649.975,00 atau 18,19% dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp465.826.553.717,00. Belanja Hibah dalam bentuk uang pada TA 2025 dianggarkan pada sembilan SKPD dengan rincian dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 16
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang pada SKPD

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	163.444.248.000,00	161.572.364.880,00	98,85	1.871.883.120,00
2	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
3	Dinas Sosial	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	0,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	915.000.000,00	915.000.000,00	100,00	0,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.675.000.000,00	2.675.000.000,00	100,00	0,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	863.208.000,00	859.513.862,00	99,57	3.694.138,00
7	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	203.179.000.000,00	203.179.000.000,00	100,00	0,00
8	Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	0,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.810.025.000,00	10.810.025.000,00	100,00	0,00
Jumlah		382.956.481.000,00	381.080.903.742,00	99,51	1.875.577.258,00

Penjelasan Belanja Hibah dalam bentuk uang TA 2025 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Ngayogyakarta

1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Hibah dalam bentuk uang yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp163.444.248.000,00 dan realisasi sebesar Rp161.572.364.880,00 atau 98,85% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 17
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
A	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	52.424.618.000,00	51.709.363.000,00	98,64	715.255.000,00
1	Kwarda DIY	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
2	KORMI DIY	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100,00	0,00
3	Insan Muda Cerdas Yogyakarta	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
4	Hibah NPC DIY	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
5	Hibah KONI DIY	14.545.000.000,00	14.545.000.000,00	100,00	0,00
6	SMA/SMK Swasta (BOSDA)	29.879.618.000,00	29.164.363.000,00	97,61	715.255.000,00
B	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	480.000.000,00	480.000.000,00	100,00	0,00
1	Dewan Pendidikan DIY	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00
2	Lembaga Orang Tua Asuh (L-OTA) DIY	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	0,00
3	PGRI DIY	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
4	Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PP PAUD) DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
C	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	110.539.630.000,00	109.383.001.880,00	98,95	1.156.628.120,00
1	SMA/SMK SWASTA (BOSNAS)	110.539.630.000,00	109.383.001.880,00	98,95	1.156.628.120,00
Jumlah		163.444.248.000,00	161.572.364.880,00	98,85	1.871.883.120,00

2) Dinas Kesehatan

Hibah berupa uang yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100% merupakan hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI) DIY untuk kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

3) Hibah Oleh Dinas Sosial

Hibah berupa uang yang dikelola oleh Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp170.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp170.000.000,00 atau 100% dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Ngayogyakarta

Tabel 5. 18
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Dinas Sosial

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
A	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
1	Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA) DIY	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
B	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
1	Yayasan Panti Asuhan Anak Balita Gotong Royong	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
C	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
1	Karang Taruna DIY	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
2	LKKS BK3S DIY	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	0,00

4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

Hibah berupa uang yang dikelola oleh DP3AP2 dianggarkan sebesar Rp915.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp915.500.000,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 19
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang pada DP3AP2

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	915.000.000,00	915.000.000,00	100,00	0,00
	P2TPAKK REKSO DYAH UTAMI	715.000.000,00	715.000.000,00	100,00	0,00
	Kelompok Desa PRIMA Srikandi Pesisir	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
	Kelompok Desa PRIMA Puspita	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
	Kelompok Desa PRIMA Sekar Maju	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
	Kelompok Desa PRIMA Sekar Kusuma	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
	Kelompok Desa PRIMA Mulyo Asri	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
	Kelompok Desa PRIMA Wanodya Kencana	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
	Kelompok Desa PRIMA Cantik Manis	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
	Kelompok Desa PRIMA "Nimas", Nglindur, Girisubo, Gunungkidul	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
	Kelompok Desa PRIMA "Bunga Mekar", Logandeng, Playen, Gunungkidul	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
	Kelompok Desa PRIMA "Nyawiji Makarti", Karangawen, Girisubo, Gunungkidul	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		915.000.000,00	915.000.000,00	100,00	0,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Ngayogyakarta

5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hibah berupa uang yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggarkan sebesar Rp2.675.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.675.000.000,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 20

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.675.000.000,00	2.675.000.000,00	100,00	0,00
1	LPMK: 1. Banyuroto Nanggulan Kulon Progo, 2. Giripanggung Tepus Gunungkidul, 3. Demangan Gondokusuman Yogyakarta, 4. Selomartani Kalasan Sleman, 5. Srimartani Piyungan Bantul	375.000.000,00	375.000.000,00	100,00	0,00
2	LPMK: 1. Banjarsari Samigaluh Kulon Progo, 2. Kelor Karangmojo Gunungkidul, 3. Wirobrajan Wirobrajan Yogyakarta, 4. Pondokrejo Tempel Sleman, 5. Wukirsari Imogiri Bantul	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
3	LPMK: 1. Tuksono Sentolo Kulon Progo, 2. Nglegi Patuk Gunungkidul, 3. Mantrijeron Mantrijeron Yogyakarta, 4. Sindumartani Ngemplak Sleman, 5. Argodadi Sedayu Bantul	375.000.000,00	375.000.000,00	100,00	0,00
4	LPMK: 1. Gotakan Panjatan Kulon Progo, 2. Candirejo Semin Gunungkidul, 3. Prenggan Kotagede Yogyakarta, 4. Margoluwih Seyegan Sleman, 5. Bawuran Pleret Bantul	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
5	TIM PENGGERAK PKK DIY	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	0,00
6	DPD LPM DIY	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	2.675.000.000,00	2.675.000.000,00	100,00	0,00

6) Dinas Komunikasi dan Informatika

Hibah berupa uang yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan anggaran sebesar Rp863.208.000,00 dan realisasi sebesar Rp859.513.862,00 atau 99,57%. Rincian anggaran dan realisasi dari masing-masing penerima hibah tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. 21

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang pada Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	863.208.000,00	859.513.862,00	99,57	3.694.138,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID)	813.208.000,00	809.513.862,00	99,55	3.694.138,00
2	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		863.208.000,00	859.513.862,00	99,57	3.694.138,00

7) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

Hibah berupa uang TA 2025 yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dianggarkan sebesar Rp203.179.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp203.179.000.000,00 atau 100%. Hibah tersebut diberikan dalam rangka kegiatan penguatan lembaga pelestari budaya. Penerima hibah uang pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 5. 22
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	203.179.000.000,00	203.179.000.000,00	100,00	0,00
1	Kraton Kasultanan Yogyakarta	169.179.000.000,00	169.179.000.000,00	100,00	0,00
2	Pura Pakualaman Yogyakarta	34.000.000.000,00	34.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		203.179.000.000,00	203.179.000.000,00	100,00	0,00

8) Biro Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah

Hibah dalam bentuk uang oleh Sekretariat Daerah TA 2025 dianggarkan pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp700.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp700.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 23
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang pada Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
1	BAZNAS DIY	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
2	MUI DIY	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
1	PW Muhammadiyah DIY	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
2	PW NU DIY	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
1	Kevikepan DIY	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
2	Persatuan Gereja-gereja Kristen DIY	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
3	PHDI DIY	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
4	Walubi DIY	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	0,00

9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Belanja Hibah uang TA 2025 yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp10.810.025.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp10.810.025.000,00 atau 100%. Belanja Hibah tersebut merupakan Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik dengan rincian seperti dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 24
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	10.810.025.000,00	10.810.025.000,00	100,00	0,00
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.071.070.000,00	1.071.070.000,00	100,00	0,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.002.235.000,00	3.002.235.000,00	100,00	0,00
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1.586.150.000,00	1.586.150.000,00	100,00	0,00
4	Partai Golongan Karya	1.114.040.000,00	1.114.040.000,00	100,00	0,00
5	Partai Keadilan Sejahtera	1.451.555.000,00	1.451.555.000,00	100,00	0,00
6	Partai Kebangkitan Bangsa	1.288.040.000,00	1.288.040.000,00	100,00	0,00
7	Partai Nasional Demokrat	652.010.000,00	652.010.000,00	100,00	0,00
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	338.955.000,00	338.955.000,00	100,00	0,00
9	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	305.970.000,00	305.970.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	10.810.025.000,00	10.810.025.000,00	100,00	0,00

B. Belanja Hibah Barang

Belanja Hibah dalam bentuk barang TA 2025 dianggarkan sebesar Rp24.651.537.680,00 dan realisasi sebesar Rp24.075.972.081,00 atau 97,67%. Hibah barang TA 2025 dianggarkan pada sepuluh SKPD sesuai dengan SK Gubernur DIY Nomor 383 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Barang tercantum dalam tabel sebagai berikut.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦤꦠꦤ꧀ꦢꦭꦲꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦫꦶꦁꦏꦂꦠ

Tabel 5. 25
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang pada SKPD

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	8.780.178.000,00	8.668.544.873,00	98,73	111.633.127,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.416.187.100,00	8.079.136.472,00	96,00	337.050.628,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	2.042.750.000,00	2.012.517.300,00	98,52	30.232.700,00
4	Dinas Sosial	183.000.000,00	180.802.406,00	98,80	2.197.594,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	829.764.000,00	820.289.554,00	98,86	9.474.446,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	368.110.852,00	349.003.500,00	94,81	19.107.352,00
7	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	1.960.539.528,00	1.946.418.547,00	99,28	14.120.981,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	459.950.000,00	451.145.660,00	98,09	8.804.340,00
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.296.058.200,00	1.255.074.899,00	96,84	40.983.301,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	315.000.000,00	313.038.870,00	99,38	1.961.130,00
Jumlah		24.651.537.680,00	24.075.972.081,00	97,67	575.565.599,00

Penjelasan hibah dalam bentuk barang TA 2025 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Hibah dalam bentuk barang TA 2025 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp8.780.178.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp8.668.544.873,00 atau 98,73%. Daftar penerima hibah barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 5. 26
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
A	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.559.828.000,00	8.518.394.893,00	99,52	41.433.107,00
	SMKN/ SMKS se-DIY	8.559.828.000,00	8.518.394.893,00	99,52	41.433.107,00
B	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	220.350.000,00	150.149.980,00	68,14	70.200.020,00
	Pengusaha muda	220.350.000,00	150.149.980,00	68,14	70.200.020,00
Jumlah		8.780.178.000,00	8.668.544.873,00	98,73	111.633.127,00

Hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan (SMKN/ SMKS se-DIY) berupa alat praktik dan peraga, sedangkan hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar (pengusaha muda) berupa laptop.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦿꦶꦠꦩꦼꦢꦸꦏ꧀ꦩꦠꦶꦠꦶꦠꦺꦤ꧀ꦮꦯꦶꦏꦂꦠ

2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Hibah dalam bentuk barang TA 2025 pada DPUP ESDM dianggarkan sebesar Rp8.416.187.100,00 dan direalisasikan sebesar Rp8.079.136.472,00 atau 96%. Hibah barang yang direalisasikan berupa konstruksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman dan pengeboran eksplorasi air tanah dan pembuatan sumur resapan konservasi di beberapa titik. Daftar penerima hibah barang pada DPUP ESDM tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 5. 27
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang pada DPUP ESDM**

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.416.187.100,00	8.079.136.472,00	96,00	337.050.628,00
1	- LPMK Sentolo, Sentolo, Kulon Progo -LPMK Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo	401.744.000,00	400.779.965,20	99,76	964.034,80
2	- LPMK Jatiayu, Karangmojo, Gunungkidul	401.744.000,00	401.112.366,20	99,84	631.633,80
3	- LPMK Kalurahan Kalirejo, Kokap, Kulon Progo	3.086.290.000,00	3.085.988.532,00	99,99	301.468,00
4	- LPMK Potorono, Banguntapan, Bantul - LPMK Sitimulyo, Piyungan, Bantul - LPMK Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	988.664.000,00	911.582.104,20	92,20	77.081.895,80
5	- LPMK Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman	206.104.000,00	204.555.940,20	99,25	1.548.059,80
6	- LPMK Kalurahan Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman - LPMK Kalurahan Pandowoharjo, Sleman, Sleman	401.744.000,00	396.648.672,20	98,73	5.095.327,80
7	LPMK Kal Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul	596.225.960,00	502.891.376,00	84,35	93.334.584,00
8	LPMK Kal Terong, Dlingo, Bantul	607.680.500,00	580.234.769,00	95,48	27.445.731,00
9	LPMK Kal Muntuk, Dlingo, Bantul	585.264.840,00	554.967.373,00	94,82	30.297.467,00
10	LPMK Kal Banjarsari, Samigaluh, Kulon Progo	570.580.400,00	542.516.186,00	95,08	28.064.214,00
11	LPMK Kal Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo	570.145.400,00	497.859.188,00	87,32	72.286.212,00
Jumlah		8.416.187.100,00	8.079.136.472,00	96,00	337.050.628,00

3) Satuan Polisi Pamong Praja

Hibah dalam bentuk barang TA 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja dianggarkan sebesar Rp2.042.750.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.012.517.300,00 atau 98,52%. Hibah tersebut berupa rompi bagi anggota Jaga Warga. Berdasarkan Pergub DIY Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga, yang dimaksud dengan kelompok jaga warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan/Kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat Padukuhan/Rukun Warga/Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4) Dinas Sosial

Hibah dalam bentuk barang TA 2025 pada Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp183.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp180.802.406,00 atau 98,80%. Hibah diberikan berupa perlengkapan pendukung kegiatan KUBE Lestari Budaya.

5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Hibah dalam bentuk barang TA 2025 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dianggarkan sebesar Rp829.764.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp820.289.554,00 atau 98,86%. Daftar penerima hibah barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 5. 28
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	829.764.000,00	820.289.554,00	98,86	9.474.446,00
1	LPMK Kalirejo, Kokap, Kulon Progo	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
2	LPMK Sinduharjo, Ngaglik, Sleman	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
3	LPMK Maguwoharjo, Depok, Sleman	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
4	LPMK Harjobinangun, Pakem, Sleman	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
5	LPMK Purwomartani, Kalasan, Sleman	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
6	LPMK Terong, Dlingo, Bantul	20.700.000,00	19.980.000,00	96,52	720.000,00
7	LPMK Guwosari, Pajangan, Bantul	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
8	LPMK Triwidadi, Pajangan, Bantul	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
9	LPMK Bantul, Bantul, Bantul	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
10	LPMK Argorejo, Sedayu, Bantul	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
11	LPMK Petir, Rongkop, Gunungkidul	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
12	LPMK Girisuko, Panggang, Gunungkidul	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
13	LPMK Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
14	LPMK Banyusoco, Playen, Gunungkidul	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
15	LPMK Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
16	LPMK Sumberarum, Moyudan, Sleman	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
17	LPMK Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
18	LPMK Mangunan, Dlingo, Bantul	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
19	LPMK Muntuk, Dlingo, Bantul	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
20	LPMK Selomartani, Kalasan, Sleman	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
21	LPMK Sitimulyo, Piyungan, Bantul	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
22	LPMK Wedomartani, Ngemplak, Sleman	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
23	LPMK Banguntapan, Banguntapan, Bantul	6.900.000,00	6.660.000,00	96,52	240.000,00
24	Kelompok Karya Mandiri	18.632.000,00	18.500.370,00	99,29	131.630,00
25	Kelompok Perdiman	18.632.000,00	18.500.370,00	99,29	131.630,00
26	Kelompok Mitra Jaya	77.500.000,00	77.093.200,00	99,48	406.800,00
27	Kelompok Putra Mandiri	77.500.000,00	77.093.200,00	99,48	406.800,00
28	Kelompok Redjo Mulyo	77.500.000,00	77.100.403,00	99,48	399.597,00
29	Kelompok Srikandi	77.500.000,00	77.100.403,00	99,48	399.597,00
30	Kelompok Citra Cahaya	77.500.000,00	77.100.402,00	99,48	399.598,00
31	Kelompok Muntuk Maju Jaya	77.500.000,00	77.100.402,00	99,48	399.598,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦂꦒꦼꦂꦠꦶꦩꦼꦮꦏꦸꦏꦏꦸꦫꦏꦠ

Tabel 5. 30
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
A	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	206.500.000,00	200.644.730,00	97,16	5.855.270,00
1	Paguyuban Pengusaha Malioboro Jl. Ahmad Yani (PPMAY)	206.500.000,00	200.644.730,00	97,16	5.855.270,00
B	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.754.039.528,00	1.745.773.817,00	99,53	8.265.711,00
1	Turonggo budoyo, Medaricilik Caturharjo, Sleman	34.550.999,00	34.550.999,00	100,00	0,00
2	Lestari Budaya Karangasem, Karangasem Palbapang Bantul	34.550.999,00	34.550.999,00	100,00	0,00
3	Sanggar Panglipur Laras, Gebangwetan, Melikan Rongkop, GK	140.619.288,00	140.619.288,00	100,00	0,00
4	Komunitas Gayam 16, Mantrigawen Lor No.9 Yogyakarta	140.619.288,00	140.619.288,00	100,00	0,00
5	Langen Budaya Kidul Loji, Prawirodirjan Gondomanan, Kota Yk	140.619.288,00	140.619.288,00	100,00	0,00
6	Sanggar Seni Puspito Anom, Sentolo Lor, Sentolo KP	140.619.288,00	140.619.288,00	100,00	0,00
7	Paguyuban kesenian Kethoprak Tresno Budoyo Desa Ngentak Budoyo, Ngentakrejo, Lendah KP	140.619.288,00	140.619.288,00	100,00	0,00
8	Perkumpulan Budi Abadi (Hoo Hap Hwee), Bintaran Wetan no.19 Kota Yogyakarta	140.619.288,00	140.619.288,00	100,00	0,00
9	Sanggar Budaya Karawitan Bangun Laras, Semanu Gunungkidul	140.619.288,00	140.619.288,00	100,00	0,00
10	Karawitan Langen Budaya, Candibinangun Pakem Sleman	140.619.288,00	140.619.288,00	100,00	0,00
11	Sanggar Seni Kendalisodo, Gedangrejo, Karangmojo GK	140.619.288,00	140.619.288,00	100,00	0,00
12	SD Ngalang 2, Ngalang Gedangsari GK	140.619.288,00	140.619.288,00	100,00	0,00
13	Karawitan Gamelan Suko Laras, Kepuh Wetan, Banguntapan Bantul	147.974.500,00	140.620.499,00	95,03	7.354.001,00
14	Kesenian Angguk Sri Tanjung, Sandang, Tanjungharjo, Nanggulan, KP	12.449.000,00	12.449.000,00	100,00	0,00
15	Bregodo Kyai Mojo, Sumuran, Palbapan Bantul	49.817.150,00	49.817.150,00	100,00	0,00
16	Paguyuban Seni dan Budaya Kundho Kencana Taji,Rajek wetan, Tirtoadi, Mlati, Sleman	16.445.000,00	16.445.000,00	100,00	0,00
17	Perkumpulan Budi Abadi (Hoo Hap Hwee), Bintaran Wetan no.19 Kota Yogyakarta	3.461.000,00	3.436.000,00	99,28	25.000,00
18	Perkumpulan Budi Abadi (Hoo Hap Hwee), Bintaran Wetan no.19 Kota Yogyakarta	30.461.000,00	30.320.000,00	99,54	141.000,00
19	Perkumpulan Budi Abadi (Hoo Hap Hwee), Bintaran Wetan no.19 Kota Yogyakarta	18.137.000,00	17.391.290,00	95,89	745.710,00
Jumlah		1.960.539.528,00	1.946.418.547,00	99,28	14.120.981,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யாகர்டா

Anggaran Belanja Hibah Barang pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) pada masing-masing penerima hibah sesuai dengan SK Gubernur DIY Nomor 383 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025. Penerima hibah barang atas nama Perkumpulan Budi Abadi (Hoo Hap Hwee), dengan alamat Bintaran Wetan no.19 Kota Yogyakarta tersaji sebanyak 3 tiga kali dalam Tabel 5.29 di atas karena menerima tiga macam barang yang berbeda yaitu pakaian pernikahan Tionghoa senilai Rp3.436.000,00, peralatan kesenian Peking Sai senilai Rp30.320.000,00, dan Wayang Pootehi senilai Rp17.391.290,00.

8) Dinas Kelautan dan Perikanan

Hibah dalam bentuk barang TA 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp459.950.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp451.145.660,00 atau 98,09%. Daftar penerima hibah barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 5. 31
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	459.950.000,00	451.145.660,00	98,09	8.804.340,00
1	Upaya Mina IV	70.000.000,00	69.234.030,00	98,91	765.970,00
2	Mina Tirtohargo	70.000.000,00	69.631.410,00	99,47	368.590,00
3	Pandan Arum	70.000.000,00	69.478.785,00	99,26	521.215,00
4	Dadi Mulyo	70.000.000,00	69.282.315,00	98,97	717.685,00
5	Mino Martani	70.000.000,00	69.295.635,00	98,99	704.365,00
6	Sumber Rejeki	70.000.000,00	69.792.360,00	99,70	207.640,00
7	Mina Barokah	39.950.000,00	34.431.125,00	86,19	5.518.875,00
	Jumlah	459.950.000,00	451.145.660,00	98,09	8.804.340,00

9) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Hibah dalam bentuk barang TA 2025 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan sebesar Rp1.296.058.200,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.255.074.899,00 atau 96,84%. Daftar penerima hibah barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tercantum dalam tabel berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெர்தாஹா காவலா காவலா காவலா காவலா காவலா காவலா

Tabel 5. 32
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.296.058.200,00	1.255.074.899,00	96,84	40.983.301,00
1	KT. Maju Makmur	53.600.000,00	50.400.660,00	94,03	3.199.340,00
2	KT. Ngudi Makmur	53.600.000,00	50.400.660,00	94,03	3.199.340,00
3	KT. Ngudi Rahayu	53.600.000,00	50.400.660,00	94,03	3.199.340,00
4	KT. Kenanga	19.700.000,00	19.029.000,00	96,59	671.000,00
5	KT. Tani Subur	19.700.000,00	19.029.000,00	96,59	671.000,00
6	KT. Ngudi Mulya	6.180.000,00	5.610.000,00	90,78	570.000,00
7	KT. Ngudi Mulya	25.506.000,00	23.437.000,00	91,89	2.069.000,00
8	KT. Makaryo Utomo	11.000.000,00	10.989.000,00	99,90	11.000,00
9	KT. Sari Mulyo	27.012.000,00	26.640.000,00	98,62	372.000,00
10	KT. Wono Rejo	20.709.200,00	20.424.000,00	98,62	285.200,00
11	KT. Kenanga	4.875.000,00	4.870.125,00	99,90	4.875,00
12	KT. Makaryo Utomo	4.875.000,00	4.870.125,00	99,90	4.875,00
13	KT. Sari Mulyo	9.000.000,00	8.991.000,00	99,90	9.000,00
14	KT. Tani Subur	4.875.000,00	4.870.125,00	99,90	4.875,00
15	KT. Wono Rejo	7.125.000,00	7.117.875,00	99,90	7.125,00
16	KT. Harapan Mulya	9.000.000,00	5.772.000,00	64,13	3.228.000,00
17	KT. Ngudi Makmur	9.000.000,00	5.772.000,00	64,13	3.228.000,00
18	KT Pomahan	9.000.000,00	5.772.000,00	64,13	3.228.000,00
19	KT. Sumber Rejeki	9.000.000,00	5.772.000,00	64,13	3.228.000,00
20	Ketos Jaya	28.000.000,00	27.520.072,00	98,29	479.928,00
21	Ngudi Rejeki	28.000.000,00	27.520.072,00	98,29	479.928,00
22	KT. Bumi Mukti	189.720.000,00	188.027.393,00	99,11	1.692.607,00
23	KWT. Nusa Indah	13.000.000,00	12.742.800,00	98,02	257.200,00
24	KWT. Safa Marwa	13.000.000,00	12.742.800,00	98,02	257.200,00
25	KWT. Kenanga 08	13.000.000,00	12.742.800,00	98,02	257.200,00
26	KWT. Melati	13.000.000,00	12.742.800,00	98,02	257.200,00
27	KWT. Mawar	13.000.000,00	12.742.800,00	98,02	257.200,00
28	KWT. Lanjarsari	13.000.000,00	12.742.800,00	98,02	257.200,00
29	KWT. Wijisari	13.000.000,00	12.742.800,00	98,02	257.200,00
30	KWT. Sidosari	13.000.000,00	12.742.800,00	98,02	257.200,00
31	KWT. Subur Makmur	13.000.000,00	12.742.800,00	98,02	257.200,00
32	KWT. Sekar Jagat	13.000.000,00	12.742.800,00	98,02	257.200,00
33	KWT. Pertiwi Makmur	13.000.000,00	12.742.800,00	98,02	257.200,00
34	KWT. Sumber Lestari	13.000.000,00	12.742.800,00	98,02	257.200,00
35	KT Ben Peni	10.000.000,00	9.938.968,00	99,39	61.032,00
36	KWT Karya Manunggal	10.000.000,00	9.943.953,00	99,44	56.047,00
37	KWT Matahari	10.000.000,00	9.909.312,00	99,09	90.688,00
38	KT Patchan Hijau	10.000.000,00	9.950.989,00	99,51	49.011,00
39	KWT Ngudi Lestari	50.000.000,00	49.994.450,00	99,99	5.550,00
40	Gapoktan Tani Manunggal	50.000.000,00	49.994.450,00	99,99	5.550,00
41	Kelompok Lumbung Pangan Baru Maju	50.000.000,00	49.994.450,00	99,99	5.550,00
42	KWT Berkah	50.000.000,00	49.994.450,00	99,99	5.550,00
43	KWT Maju	50.000.000,00	49.994.450,00	99,99	5.550,00
44	Koperasi Saroni Makmur	22.551.550,00	21.669.465,39	96,09	882.084,61
45	Koperasi Semesta	15.013.650,00	14.407.589,74	95,96	606.060,26
46	Koperasi UPP Kaliurang	11.075.800,00	10.643.354,87	96,10	432.445,13
47	KT. Margo Dadi I	17.000.000,00	16.997.985,00	99,99	2.015,00
48	KT. Ngudi Mulyo	17.000.000,00	16.997.985,00	99,99	2.015,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
49	KT. Hargo Mulyo	17.000.000,00	16.997.985,00	99,99	2.015,00
50	KT. Pamor	17.000.000,00	16.997.985,00	99,99	2.015,00
51	KT. Puspa Merapi	7.980.000,00	7.622.370,00	95,52	357.630,00
52	KT. Sumber Rejeki	2.660.000,00	2.540.790,00	95,52	119.210,00
53	KT. Giri Lestari	5.320.000,00	5.081.580,00	95,52	238.420,00
54	KT. Turgo Adi	15.960.000,00	15.244.740,00	95,52	715.260,00
55	KT. Ngiket	5.320.000,00	5.081.580,00	95,52	238.420,00
56	KT. Pangestu Karya	13.300.000,00	12.703.950,00	95,52	596.050,00
57	KT. Lestari	15.960.000,00	15.244.740,00	95,52	715.260,00
58	Gapoktan Makaryo Nyoto	47.880.000,00	45.734.220,00	95,52	2.145.780,00
59	Gapoktan Sejahtera	7.980.000,00	7.622.370,00	95,52	357.630,00
60	KT. Sedyo Makmur	7.980.000,00	7.622.370,00	95,52	357.630,00
Jumlah		1.296.058.200,00	1.255.074.899,00	96,84	40.983.301,00

10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Hibah dalam bentuk barang TA 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dianggarkan sebesar Rp315.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp313.038.870,00 atau 99,38%. Barang yang dihibahkan berupa sarana produksi. Daftar penerima hibah barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 33
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	315.000.000,00	313.038.870,00	99,38	1.961.130,00
1	Kelompok IKM KUB SUMBER REJEKI	50.000.000,00	49.983.300,00	99,97	16.700,00
2	Kelompok IKM TIWI MANUNGGAL	50.000.000,00	49.161.900,00	98,32	838.100,00
3	Kelompok IKM KUB NYAWIJI MULYO	50.000.000,00	49.583.700,00	99,17	416.300,00
4	Kelompok IKM KUB MENOREH POLITAN	50.000.000,00	49.905.600,00	99,81	94.400,00
5	Kelompok IKM JATISANI	50.000.000,00	49.938.900,00	99,88	61.100,00
6	Kelompok IKM Logam Sekarsuli	65.000.000,00	64.465.470,00	99,18	534.530,00
Jumlah		315.000.000,00	313.038.870,00	99,38	1.961.130,00

Anggaran

Realisasi

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Rp30.971.706.000,00 Rp30.275.654.958,00

Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dianggarkan sebesar Rp30.971.706.000,00 realisasi sebesar Rp30.275.654.958,00 atau 97,75%. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial per obyek tersaji dalam tabel berikut.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Tabel 5. 34
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial per Obyek

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.110.200.000,00	2.103.054.765,00	99,66	48.206.910.934,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	15.765.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	28.800.000.000,00	28.111.500.000,00	97,61	5.023.192.400,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	61.506.000,00	61.100.193,00	99,34	59.807.000,00
Jumlah		30.971.706.000,00	30.275.654.958,00	97,75	53.305.675.334,00

Belanja Bantuan Sosial TA 2025 terdiri dari Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang. Anggaran dan realisasi dari masing-masing kelompok Belanja Bantuan Sosial tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 5. 35
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang dan Barang

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang	868.306.000,00	867.754.958,00	99,94	551.042,00
2	Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang	30.103.400.000,00	29.407.900.000,00	97,69	695.500.000,00
Jumlah		30.971.706.000,00	30.275.654.958,00	97,75	696.051.042,00

Belanja Bantuan Sosial pada TA 2025 dianggarkan pada DPUP ESDM dan Dinas Sosial.

1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan Rp827.800.000,00 dan direalisasikan Rp827.654.765,00 atau 99,98%. Penerima bantuan sosial tersebut adalah masyarakat di Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo sebanyak enam BNBA.

2) Dinas Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan Rp30.143.906.000,00 dan direalisasikan Rp29.448.000.193,00 atau 97,69%.

Tabel 5. 36
Rincian Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
A	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.282.400.000,00	1.275.400.000,00	99,45	7.000.000,00
1	PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia	463.400.000,00	463.400.000,00	100,00	0,00
2	PT. Cahaya Mulia Persada Nusa	572.600.000,00	572.600.000,00	100,00	0,00
3	PT. Mitra Adi Jaya	246.400.000,00	239.400.000,00	97,16	7.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦺꦝꦸꦢꦸꦭꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦶꦪꦏꦸꦫꦠ

No	Uraian	Tahun 2025			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
B	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	28.800.000.000,00	28.111.500.000,00	97,61	688.500.000,00
	Perorangan Lanjut Usia	28.800.000.000,00	28.111.500.000,00	97,61	688.500.000,00
C	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00
1	LKS kpd PA Darma Putra, Kracaan, Semin, Gunung kidul	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
2	LKS kpd PA Darma Putra, Kracaan, Semin, Gunung Kidul	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
3	LKS kpd PA Darma Putra, Kracaan, Semin, Gunungkidul	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
4	LKSA kpd LKSA Sang Timur. Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5	LKSA Sang Timur, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
6	LKSA, bansos kpd LKSA Sang Timur, Jatisarono, Nanggulan, KP	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
D	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	40.506.000,00	40.100.193,00	99,00	405.807,00
1	LKSA Amanah Al Maaun - Jl Imogiri Timur Km 12 Bendungan, trimulyo, Jetis, Bantul	13.502.000,00	13.366.731,00	99,00	135.269,00
2	Panti Asuhan Yatim Putra Islam a.n Nur - Bantul Karang RT 04 Ringinharjo, Bantul	13.502.000,00	13.366.731,00	99,00	135.269,00
3	Panti Asuhan Bina Putra - Jl. Pramuka No. 3 Bantul	13.502.000,00	13.366.731,00	99,00	135.269,00
Jumlah		30.143.906.000,00	29.448.000.193,00	97,69	695.905.807,00

Penjelasan dari masing-masing kelompok belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- A. Belanja bantuan sosial uang kepada individu berupa penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
- B. Belanja bantuan sosial uang kepada kelompok masyarakat berupa penyaluran Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU). Penerimaannya adalah perorangan, namun sesuai dengan DPA dikelompokkan sesuai Kapanewon karena jumlah penerima yang mencapai ribuan orang.
- C. Belanja bantuan sosial uang kepada lembaga non pemerintahan diberikan kepada satu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Di dalam Tabel 5.36, kedua lembaga tersebut disajikan tiga kali karena masing-masing



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாறுவாஉகுவாஉகுவாபெரிமாறுவாஉகுவா

memperoleh tiga pemanfaatan bantuan yaitu berupa bantuan penyediaan permakanan, penyediaan sandang, dan penyediaan perbekalan kesehatan.

- D. Belanja bantuan sosial barang kepada lembaga non pemerintahan berupa bantuan penyediaan kebutuhan sehari-hari (bahan makanan) kepada LKSA sebanyak satu LKSA dan panti asuhan sebanyak dua panti di kabupaten Bantul dengan dana yang berasal dari Dana Keistimewaan (DAIS) pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya.

Anggaran

Realisasi

5.1.2.2 Belanja Modal

Rp727.828.251.159,00

Rp606.066.257.104,00

Anggaran Belanja Modal pada TA 2025 adalah sebesar Rp727.828.251.159,00 dengan realisasi sebesar Rp606.066.257.104,00 atau 83,27%. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp53.087.053.836,95 atau 8,05% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2024 yaitu sebesar Rp659.153.310.940,95. Besaran nilai anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2025 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 37
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Sesuai dengan Jenis Belanja

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	122.858.100,00	61,43	35.792.256.125,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.596.510.665,00	165.720.594.811,00	92,79	204.099.193.397,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	305.299.668.188,00	198.928.668.595,00	65,16	220.538.449.546,95
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	234.565.348.183,00	232.553.303.352,00	99,14	182.299.322.051,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.886.724.123,00	8.463.832.246,00	95,24	11.562.606.421,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	280.000.000,00	277.000.000,00	98,93	4.861.483.400,00
Jumlah		727.828.251.159,00	606.066.257.104,00	83,27	659.153.310.940,95

Anggaran

Realisasi

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Rp200.000.000,00

Rp122.858.100,00

Belanja Modal Tanah pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp122.858.100,00 atau 61,43%. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp35.669.398.025,00 atau 99,66% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yaitu sebesar Rp35.792.256.125,00. Belanja Modal Tanah berasal dari Dana Keistimewaan dan dilaksanakan oleh Bidang Bina Marga DPUP ESDM pada kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan berupa ganti rugi tanam tumbuh pembebasan lahan pembangunan jalan baru Kretek-Girijati di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul. Di



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

dalam kegiatan ini terdapat penyusunan dokumen *appraisal* dengan pihak ketiga guna menilai tanam tumbuh yang dapat diidentifikasi dan dinilai. Pekerjaan penyusunan dokumen *appraisal* berkontrak mulai tanggal 6 November 2025 s.d 11 November 2025. Saat inspeksi lapangan dilaksanakan bersama *stakeholder* terkait dan pihak yang terdampak, diperoleh hasil jika bidang yang dapat teridentifikasi berjumlah empat bidang. Hal ini berbeda dengan surat permohonan dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DIY nomor BM0302-Bb7/494 tanggal 3 Juli 2025 yang menyatakan bahwa terdapat delapan bidang. Hal ini dikarenakan karena empat bidang lainnya sudah tidak dapat diidentifikasi. Dari keempat pemilik tanam tumbuh yang dapat diidentifikasi, terdapat satu pemilik tanam tumbuh atas nama Edy Purwanta menolak untuk menerima ganti rugi tersebut dengan alasan masih ingin mempertahankan hak miliknya tersebut. Sehingga total bidang yang dapat direalisasikan hanya tiga bidang dari 8 delapan bidang yang semula diusulkan.

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp178.596.510.665,00	Rp165.720.594.811,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp178.596.510.665,00 dan realisasi sebesar Rp165.720.594.811,00 atau 92,79%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp38.378.598.586,00 atau 18,80% dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 yaitu sebesar Rp204.099.193.397,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 per obyek dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 38
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Obyek

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	6.706.480.000,00	6.492.163.689,00	96,80	17.362.490.078,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	3.437.160.000,00	2.321.608.640,00	67,54	11.235.494.133,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	74.339.000,00	72.931.462,00	98,11	90.806.637,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	150.960.000,00	146.471.940,00	97,03	517.409.993,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.533.137.698,00	20.805.800.044,00	84,81	30.932.932.502,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.815.578.397,00	4.489.878.531,00	93,24	4.082.139.606,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.421.157.800,00	9.661.927.588,00	77,79	13.872.405.224,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	42.865.181.510,00	41.706.051.598,00	97,30	29.028.523.167,00
9	Belanja Modal Komputer	28.706.486.149,00	28.073.303.152,00	97,79	41.736.193.587,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	77.931.000,00	76.287.000,00	97,89	69.247.924,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	91.100.000,00	90.356.900,00	99,18	74.869.500,00
12	Belanja Modal Alat Peraga	44.270.000,00	44.160.000,00	99,75	957.375,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	3.042.768.450,00	3.032.373.904,00	99,66	9.010.332.244,00
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	79.890.800,00	77.607.169,00	97,14	208.438.315,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	44.436.616.583,00	44.417.022.742,00	99,96	43.130.067.186,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.113.453.278,00	4.212.650.452,00	59,22	2.746.885.926,00
Jumlah		178.596.510.665,00	165.720.594.811,00	92,79	204.099.193.397,00

Anggaran

Realisasi

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp305.299.668.188,00 Rp198.928.668.595,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp305.299.668.188,00 dan realisasi sebesar Rp198.928.668.595,00 atau 65,16%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.609.780.951,95 atau 9,8% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 yaitu sebesar Rp220.538.449.546,95. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 berdasarkan obyek adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 39
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Obyek Belanja

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	300.616.717.380,00	194.982.419.620,00	64,86	209.937.496.081,95
2	Belanja Modal Monumen	208.165.000,00	206.886.100,00	99,39	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	49.054.000,00
4	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.371.890.808,00	2.337.625.006,00	98,56	9.562.757.683,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.102.895.000,00	1.401.737.869,00	66,66	989.141.782,00
Jumlah		305.299.668.188,00	198.928.668.595,00	65,16	220.538.449.546,95

Belanja modal Gedung dan Bangunan yang serapannya jauh dibawah target terdapat pada obyek Belanja Modal Bangunan Gedung, yaitu untuk Pembangunan Gedung DPRD DIY, dengan anggaran sebesar Rp197.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp109.687.339.757,00 atau 55,68%. Hal ini disebabkan pembayaran termin II tidak dapat dilaksanakan karena belum mencapai target fisik 55% sesuai kontrak. Selain itu, serapan yang rendah juga terdapat pada obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD. Hal ini disebabkan anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD di Balai Pelatihan Kesehatan termasuk SILPA BLUD 2024 yang tidak digunakan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Wilayah Istimewa

Anggaran

Realisasi

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Rp234.565.348.183,00

Rp232.553.303.352,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp234.565.348.183,00 dan realisasi sebesar Rp232.553.303.352,00 atau 99,14%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp50.253.981.301,00 atau 27,57% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 yaitu sebesar Rp182.299.322.051,00. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 berdasarkan obyek adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 40
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per Obyek Belanja

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	222.172.242.844,00	220.481.273.807,00	99,24	168.837.751.171,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	9.014.474.250,00	8.791.407.670,00	97,53	10.538.068.831,00
3	Belanja Modal Instalasi	77.868.000,00	75.865.100,00	97,43	673.098.952,00
4	Belanja Modal Jaringan	3.300.763.089,00	3.204.756.775,00	97,09	1.897.287.027,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	353.116.070,00
	Jumlah	234.565.348.183,00	232.553.303.352,00	99,14	182.299.322.051,00

Anggaran

Realisasi

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rp8.886.724.123,00

Rp8.463.832.246,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp8.886.724.123,00 dan realisasi sebesar Rp8.463.832.246,00 atau 95,24%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.098.774.175,00 atau 26,80% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 yaitu sebesar Rp11.562.606.421,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 41
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Obyek Belanja

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	348.989.948,00	311.824.390,00	89,35	359.469.099,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.794.435.000,00	1.750.680.606,00	97,56	2.462.838.616,00
3	Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	0,00	990.000.000,00
4	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	6.743.299.175,00	6.401.327.250,00	94,93	7.735.298.706,00
Jumlah		8.886.724.123,00	8.463.832.246,00	95,24	11.562.606.421,00

Anggaran **Realisasi**

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya Rp280.000.000,00 Rp277.000.000,00

Belanja Modal Aset Lainnya pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp280.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp277.000.000,00 atau 98,93%. Belanja modal aset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp4.584.483.400,00 dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp4.861.483.400,00 atau 94,30%. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 berdasarkan obyek adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 42
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	97.500.000,00	97,50	4.787.483.400,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	180.000.000,00	179.500.000,00	99,72	74.000.000,00
Jumlah		280.000.000,00	277.000.000,00	98,93	4.861.483.400,00

Anggaran **Realisasi**

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga Rp39.476.792.633,00 Rp3.405.377.000,00

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah serta potensi risiko terjadinya keadaan darurat dan mendesak. Belanja Tidak Terduga TA 2025 dianggarkan sebesar Rp39.476.792.633,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.405.377.000,00 atau 8,63%. Realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.385.377.000,00 atau 16926,89% dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp20.000.000,00.

Anggaran **Realisasi**

5.1.2.3.1 Belanja Tidak Terduga Rp39.476.792.633,00 Rp3.405.377.000,00

Belanja Tidak Terduga TA 2025 direalisasikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan digunakan untuk belanja yang tidak direncanakan bagi penanganan darurat bencana sosial di DIY dan bantuan jatah hidup bagi mahasiswa terdampak bencana Hidrometeorologi di Provinsi



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemda DIY melalui Dinas Sosial telah memberikan bantuan jatah hidup bagi mahasiswa terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terjadi pada kurun waktu 26 - 28 November 2025 sebesar Rp2.332.800.000,00. Bantuan tersebut diberikan kepada 1.296 mahasiswa dengan nilai Rp1.800.000,00 per mahasiswa untuk jatah hidup selama enam bulan, yang diberikan melalui rekening di BPD DIY. Sampai dengan 1 April 2026, masih terdapat 263 mahasiswa penerima bantuan yang belum melakukan aktivasi rekening, sehingga dana bantuan yang diberikan masih mengendap dalam rekening tersebut.

Anggaran **Realisasi**

5.1.2.4 Belanja Transfer **Rp890.387.715.139,00** **Rp863.763.931.963,34**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemda kepada pemda lainnya dan/atau dari pemda kepada pemerintah desa. Belanja Transfer TA 2025 dianggarkan sebesar Rp890.387.715.139,00 dan realisasi sebesar Rp863.763.931.963,34 atau 97,01%, dengan rincian sebagai berikut.

Anggaran **Realisasi**

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil **Rp547.966.592.107,00** **Rp541.272.131.059,00**

Belanja Bagi Hasil TA 2025 dianggarkan sebesar Rp547.966.592.107,00 dan realisasi sebesar Rp541.272.131.059,00 atau 98,78%. Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp329.087.275.450,00 atau 37,81% dibandingkan realisasi TA 2024 yaitu sebesar Rp870.359.406.509,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada TA 2025 terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 5. 43
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
A	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	465.270.147.223,00	459.498.612.174,00	98,76	719.748.610.040,00
1	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Bantul	126.367.040.453,00	124.738.816.027,00	98,71	200.933.285.798,00
2	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	89.732.856.260,00	88.355.814.141,00	98,47	126.121.177.020,00
3	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	74.202.064.582,00	73.242.093.437,00	98,71	108.139.200.272,00
4	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Sleman	174.968.185.928,00	173.161.888.569,00	98,97	284.554.946.950,00
B	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	82.696.444.884,00	81.773.518.885,00	98,88	150.610.796.469,00
1	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta	82.696.444.884,00	81.773.518.885,00	98,88	150.610.796.469,00
	Jumlah	547.966.592.107,00	541.272.131.059,00	98,78	870.359.406.509,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦺꦴꦩꦶꦠꦺꦤ꧀ꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦠ

Anggaran

Realisasi

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan Rp342.421.123.032,00 Rp322.491.800.904,34

Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp342.421.123.032,00 dan realisasi sebesar Rp322.491.800.904,34 atau 94,17%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp238.562.167.548,48 atau 42,52% dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp561.053.968.452,82. Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari tiga jenis belanja, yaitu Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi, Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Rincian Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 44
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan**

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	197.905.896.382,00	180.781.170.273,84	91,34	428.964.512.711,77
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	141.515.226.650,00	138.710.630.630,50	98,01	132.089.455.741,05
Jumlah		342.421.123.032,00	322.491.800.904,34	94,18	561.053.968.452,82

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan dialokasikan seluruhnya untuk penanggulangan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Masing-masing provinsi menerima alokasi dana yang sama, yakni sebesar Rp1.000.000.000,00. Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mempercepat proses pemulihan infrastruktur serta meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah di wilayah masing-masing.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 dianggarkan sebesar Rp197.905.896.382,00 dan direalisasikan sebesar Rp180.781.170.273,84 atau 91,35%. BKK tersebut terdiri dari BKK yang dialokasikan melalui Dana Keistimewaan yang disalurkan dalam tiga tahap kepada Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Selain dana keistimewaan, terdapat alokasi khusus untuk tambahan penghasilan karangkopek yang disalurkan ke Kabupaten Bantul (Kalurahan Jagalan dan Trimurti) serta Kabupaten Kulon Progo. Tambahan penghasilan karangkopek diberikan bagi lurah dan pamong kalurahan sebagai pengganti pelungguh dan/ atau pengare-arem sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk penghargaan serta dukungan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Ngayogyakarta Ngayogyakarta Ngayogyakarta Ngayogyakarta

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
5.1.3 Pembiayaan Daerah	Rp277.154.229.284,00	Rp280.267.729.284,44

Pembiayaan Daerah merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Daerah TA 2025 dianggarkan sebesar Rp277.154.229.284,00 dan direalisasikan sebesar Rp280.267.729.284,44 atau sebesar 101,12%, terdiri atas:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp437.696.229.284,00	Rp437.767.729.284,44

Penerimaan Pembiayaan Pemda DIY TA 2025 dianggarkan sebesar Rp437.696.229.284,00 direalisasikan sebesar Rp437.767.729.284,44 atau 100,02%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp142.146.582.963,96 atau 48,08% dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2024 yaitu sebesar Rp295.621.146.320,48. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp437.767.729.284,44 dapat dirinci seperti tabel berikut.

Tabel 5. 47
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	437.696.229.284,00	437.696.229.284,44	100,00	295.260.470.320,48
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	71.500.000,00	0,00	360.676.000,00
JUMLAH		437.696.229.284,00	437.767.729.284,44	100,02	295.621.146.320,48

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp437.696.229.284,00	Rp437.696.229.284,44

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran yang terjadi pada periode sebelumnya, yaitu TA 2024. Dana ini kemudian dianggarkan kembali sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran berjalan untuk menutup defisit anggaran. Pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp437.696.229.284,00 dan direalisasikan sebesar Rp437.696.229.284,00 atau 100%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp142.435.758.963,96 dari realisasi TA 2024 sebesar Rp295.260.470.320,48.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya terdiri dari:

- 1) Pelampauan Penerimaan PAD sebesar Rp142.955.873.464,00.
- 2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp2.733.888.090,00.
- 3) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp227.913.000,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பேரரசு முகாமல் குடியரசு முகாமல் குடியரசு முகாமல் குடியரசு முகாமல் குடியரசு முகாமல்

4) Penghematan Belanja sebesar Rp291.778.554.730,44.

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp0,00	Rp71.500.000,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp71.500.000,00 berupa penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat yang diberikan melalui DPKP. Realisasi tersebut turun sebesar Rp289.176.000,00 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp360.676.000,00.

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp160.542.000.000,00	Rp157.500.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain untuk pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp160.542.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp157.500.000.000,00 atau 98,11%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp45.000.000.000,00 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp202.500.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 terdiri dari penyertaan modal daerah dan pemberian pinjaman daerah.

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah	Rp155.542.000.000,00	Rp155.000.000.000,00

Penyertaan modal daerah berupa penyertaan modal pada BUMD dianggarkan sebesar Rp155.542.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp155.000.000.000,00 atau 99,65%. Penyertaan modal ini merupakan Penyertaan Modal Pemda DIY kepada PT. Bank BPD DIY dalam rangka memenuhi modal dasar yang dimiliki oleh Pemda DIY dan untuk menjaga proporsi kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 51% sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
5.1.3.2.2 Pemberian Pinjaman Daerah	Rp5.000.000.000,00	Rp2.500.000.000,00

Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 50%. Pemberian Pinjaman Daerah ini dianggarkan dalam dua sub rincian obyek, yaitu Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD dengan anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 dan realisasi Rp0,00 serta Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat melalui lembaga keuangan non-bank Badan Usaha Kredit Pedesaan atau BUKP dengan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

anggaran Rp2.500.000.000,00 dan realisasi Rp2.500.000.000,00. Pencatatan dana bergulir dalam kelompok Pemberian Pinjaman Daerah telah sesuai dengan Bagan Akun Standar LRA. Meskipun berdasarkan PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi dan ditegaskan pula dalam Pergub DIY Nomor 27 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dana bergulir (dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat) merupakan salah satu contoh Investasi Nonpermanen.

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp0,00	Rp419.112.174.823,51

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2025 adalah sebesar Rp419.112.174.823,51 mengalami penurunan sebesar Rp18.584.054.460,93 atau 4,25% dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024 yaitu sebesar Rp437.696.229.284,44. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja dan transfer (Surplus/Defisit) ditambah dengan pembiayaan neto TA 2025, dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5. 48
Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	4.835.587.382.957,00	4.869.450.568.324,59	100,70	6.025.070.171.261,08
2	Belanja dan Transfer	5.112.741.612.241,00	4.730.606.122.785,52	92,53	5.680.495.088.297,12
3	Surplus/Defisit	(277.154.229.284,00)	138.844.445.539,07	-	344.575.082.963,96
4	Pembiayaan Netto	277.154.229.284,00	280.267.729.284,44	101,12	93.121.146.320,48
5	SILPA	0,00	419.112.174.823,51	0,00	437.696.229.284,44

Rincian SILPA terdapat dalam tabel berikut.

**Tabel 5. 49
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	Kas di Kasda	385.633.412.458,69
2	Kas di Bendahara Penerimaan	51.572.265,00
3	Kas BLUD	32.144.302.209,82
4	Kas Bos	1.282.887.890,00
6	SILPA	419.112.174.823,51

Kas di BLUD sebesar Rp32.144.302.209,82 merupakan Sisa Anggaran Lebih tahun berjalan yang berada di rekening BLUD sampai dengan 31 Desember 2025. Rincian SILPA dari masing-masing BLUD dijelaskan dalam **Lampiran I**.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்டா

Kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.282.887.890,00 merupakan sisa penyaluran BOS yang berada di rekening sekolah SMA/SMK/SLB Negeri terdiri dari Sisa Dana BOS Reguler sebesar Rp804.171.088,00, dan Sisa Dana BOS Kinerja sebesar Rp478.716.802,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 50
Kas Dana BOS Reguler dan Kinerja Tahun 2025

Uraian	Saldo Awal (SILPA Tahun Lampau)	Penerimaan Dana BOS 2025 (Rp)	Realisasi Belanja BOS 2025 (Rp)	Sisa Dana BOS (Rp)
BOS Reguler				
SMA Negeri	221.882.851,00	68.761.565.277,00	68.718.961.257,00	264.486.871,00
SMK Negeri	193.427.973,00	85.726.296.627,00	85.403.271.523,00	516.453.077,00
SLB Negeri	23.321.966,00	5.166.518.174,00	5.166.609.000,00	23.231.140,00
Total BOS Reguler	438.632.790,00	159.654.380.078,00	159.288.841.780,00	804.171.088,00
BOS Kinerja				
SMA Negeri	209.735.320,00	3.013.250.000,00	2.884.116.334,00	338.868.986,00
SMK Negeri	24.944.266,00	1.548.500.000,00	1.446.499.450,00	126.944.816,00
SLB Negeri	0	447.000.000,00	434.097.000,00	12.903.000,00
Total BOS Kinerja	234.679.586,00	5.008.750.000,00	4.764.712.784,00	478.716.802,00
Total	673.312.376,00	164.663.130.078,00	164.053.554.564,00	1.282.887.890,00

5.2 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. SAL adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Penjelasan rincian Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut.

	<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp437.696.229.284,44	Rp295.260.470.320,48

SAL awal TA 2025 sebesar Rp437.696.229.284,44 mengalami kenaikan sebesar Rp142.435.758.963,96 atau 48,24% dibandingkan dengan SAL awal TA 2024 yaitu sebesar Rp295.260.470.320,48. SAL awal TA 2025 merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan APBD TA 2025.

	<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
5.2.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp419.112.174.823,51	Rp437.696.229.284,44

SiLPA TA 2025 sebesar Rp419.112.174.823,51 berasal dari:

Tabel 5. 51
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan	4.869.450.568.324,59
2	Belanja dan Transfer	4.730.606.122.785,52



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Surplus (Defisit)	138.844.445.539,07
3	Penerimaan Pembiayaan	437.767.729.284,44
4	Pengeluaran Pembiayaan	157.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	280.267.729.284,44
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	419.112.174.823,51

Tahun 2025

Tahun 2024

5.2.3 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp419.112.174.823,51 Rp437.696.229.284,44

SAL akhir TA 2025 sebesar Rp419.112.174.823,51 mengalami penurunan sebesar Rp18.584.054.460,93 atau 4,25% dibandingkan dengan SAL akhir TA 2024 yaitu sebesar Rp437.696.229.284,44.

5.3 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca

Tahun 2025

Tahun 2024

5.3.1 Aset Rp14.697.004.758.313,30 Rp14.116.381.217.103,10

5.3.1.1 Aset Lancar Rp519.783.837.104,52 Rp542.797.010.020,00

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas Rp419.112.174.823,51 Rp437.696.229.284,44

A. Kas di Kas Daerah Rp385.633.412.458,69 Rp401.871.389.579,29

Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Dalam rangka pengelolaan kas, Pemda DIY menyimpan dana dalam bentuk giro. Saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2025 sebesar Rp385.633.412.458,69 dibandingkan dengan saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2024 sebesar Rp401.871.389.579,29 mengalami penurunan sebesar Rp16.237.977.120,60 atau 4,04%. Hal ini terjadi karena adanya penurunan pendapatan baik PAD, Pendapatan Transfer maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta adanya kebijakan efisiensi belanja daerah.

Saldo Kas di Kasda sebesar Rp385.633.412.458,69 merupakan saldo Giro per 31 Desember 2025 dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kasda pada Bank BPD DIY Nomor 001.111.000059.

B. Kas di Bendahara Penerimaan Rp51.572.265,00 Rp37.854.231,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.572.265,00 merupakan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kasda, baik yang diterima Bendahara Penerima secara tunai maupun melalui QRIS.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.572.265,00 dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.854.231,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.718.034,00 atau 36,24%.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 52
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	12.962.500,00	7.756.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.569.625,00	11.368.000,00
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	27.084.000,00	1.350.000,00
4	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	100,00	0,00
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.956.040,00	14.116.231,00
6	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	480.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	0,00	2.784.000,00
	Jumlah	51.572.265,00	37.854.231,00

1. Dinas Perhubungan

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp12.962.500,00 merupakan Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Parkir di Luar Badan Jalan pada Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran yang disetorkan ke Kasda pada tanggal 2 Januari 2026.

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp6.569.625,00 merupakan pendapatan hasil kerja sama pemanfaatan BMD pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan berupa Setoran Pengelolaan Hutan Lindung Mangunan tanggal 31 Desember 2025 pukul 13.00 s.d. 24.00 WIB yang disetorkan ke Kasda pada tanggal 2 Januari 2026.

3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp27.084.000,00 merupakan Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Balai Pemuda dan Olah Raga yang disetorkan ke Kasda pada tanggal 2 Januari 2026.

4. Dinas Kebudayaan

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp100,00 merupakan uji coba pembayaran melalui QRIS Dinamis MBS oleh BPD DIY yang masuk ke Kasda pada tanggal 2 Januari 2026.

5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.956.040,00 berasal dari penjualan produk UMKM di Galeri Pasar Kotagede YIA dari tanggal 30 Desember 2025 siang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 malam, namun baru bisa disetorkan ke Kasda pada tanggal 2 Januari 2026.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

Hal ini dikarenakan dari pihak pengelola (Galeri PKG) masih melakukan penghitungan omset penjualan untuk distribusikan pada pos-pos yang telah ditetapkan, baru kemudian didapatkan sisa omset yang merupakan pendapatan daerah.

C. Kas di BLUD Rp 32.144.302.209,82 Rp35.113.673.098,15

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp32.144.302.209,82 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada empat BLUD pada Dinas Kesehatan dan 23 BLUD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp32.144.302.209,82 dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.113.673.098,15 mengalami penurunan sebesar Rp2.969.370.888,33 atau 8,46%.

Rincian Kas di BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 53
Rincian Kas di BLUD

No	Nama BLUD	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo Giro per Desember 2025 (Rp)	Jasa Giro Desember 2025 (Rp)	Uang tunai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	RS Jiwa Grhasia	BPD DIY	041.111.000043	6.593.604.249,73	457.062,00	1.748.900,00	6.595.810.211,73
		BTN	00341-01-30-000027-7	0,00	719.762.773,75	0,00	719.762.773,75
2	RS Paru Respira	BPD DIY	001.111.001427	8.236.200.330,72	8.389.894,00	276.884,00	8.244.867.108,72
3	Balai Pelatihan Kesehatan	BPD DIY	040.111.000050	3.058.624.901,00	3.737.437,00	0,00	3.062.362.338,00
4	Balai Laboratorium Kesehatan	BPD DIY	060.111.000004	9.075.873.475,62	11.089.556,00	1.455.000,00	9.088.418.031,62
5	Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT)	BPD DIY	001.111.001065	3.280.441.229,00	3.470.937,00	0,00	3.283.912.166,00
6	SMKN 6 Yogyakarta	BPD DIY	001.111.001803	424.935.780,00	496.899,00	0,00	425.432.679,00
7	SMKN 5 Yogyakarta	BPD DIY	001.111.001964	15.015.807,00	18.388,00	0,00	15.034.195,00
8	SMKN 2 Yogyakarta	BPD DIY	001.111.002020	128.057.894,00	144.697,00	0,00	128.202.591,00
9	SMKN 3 Wonosari GK	BPD DIY	002.111.001064	16.225.939,00	10.411,00	0,00	16.236.350,00
10	SMKN 2 Wonosari GK	BPD DIY	002.111.001144	169.358.778,00	158.648,00	0,00	169.517.426,00
11	SMKN 1 Saptosari GK	BPD DIY	002.111.001146	5.411.553,00	6.764,00	0,00	5.418.317,00
12	SMKN 1 Sewon Bantul	BPD DIY	004.111.001764	77.974.868,00	62.468,00	0,00	78.037.336,00
13	SMKN 2 Pengasih KP	BPD DIY	003.111.001203	10.078.300,00	12.597,00	0,00	10.090.897,00
14	SMKN 2 Depok Sleman	BPD DIY	042.111.000390	51.927.867,00	0,00	0,00	51.927.867,00
15	SMKN 1 Kalasan Sleman	BPD DIY	040.111.000307	4.216.735,00	0,00	0,00	4.216.735,00
16	SMKN 1 Cangkringan Sleman	BPD DIY	041.111.000436	23.180.484,00	19.317,00	0,00	23.199.801,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கருவாடக வகை கருவாடக கருவாடக கருவாடக கருவாடக

No	Nama BLUD	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo Giro per Desember 2025 (Rp)	Jasa Giro Desember 2025 (Rp)	Uang tunai (Rp)	Jumlah (Rp)
17	SMKN 3 Yogyakarta	BPD DIY	001.111.002086	16.404.814,00	5.692,00	0,00	16.410.506,00
18	SMKN 4 Yogyakarta	BPD DIY	001.111.002083	48.141.264,00	48.657,00	0,00	48.189.921,00
19	SMKN 1 Pandak Bantul	BPD DIY	004.111.002020	59.402,00	18,00	0,00	59.420,00
20	SMKN 1 Pundong Bantul	BPD DIY	004.111.002016	22.430.754,00	13.269,00	0,00	22.444.023,00
21	SMKN 2 Kasihan Bantul	BPD DIY	033.111.000012	108.665.642,00	125.832,00	0,00	108.791.474,00
22	SMKN 1 Wonosari GK	BPD DIY	002.111.001174	4.474.824,00	5.593,00	0,00	4.480.417,00
23	SMKN 1 Gedangsari GK	BPD DIY	017.111.000012	7.652.712,00	8.815,00	0,00	7.661.527,00
24	SMKN 1 Nanggulan - KP	BPD DIY	022.111.000126	8.005.712,00	9.083,00	0,00	8.014.795,00
25	SMKN 1 Seyegan-Sleman	BPD DIY	052.111.000009	4.906.315,00	482,00	0,00	4.906.797,00
26	SMKN 1 Godean - Sleman	BPD DIY	043.111.000536	1,00	0,00	0,00	1,00
27	SMKN 2 Godean - Sleman	BPD DIY	043.111.000538	895.886,00	619,00	0,00	896.505,00
Jumlah				31.392.765.517,07	748.055.908,75	3.480.784,00	32.144.302.209,82

D. Kas Dana BOS Rp1.282.887.890,00 Rp673.312.376,00

Saldo Kas Dana BOS pada tahun 2025 merupakan sisa Dana BOS yang berada di rekening SMA/SMK/SLB Negeri sebesar Rp1.282.887.890,00 terdiri dari sisa Dana BOS Reguler sebesar Rp804.163.438,00, dan sisa Dana BOS Kinerja sebesar Rp478.724.452,00.

Saldo Kas Dana BOS pada tahun 2025 sebesar Rp1.282.887.890,00 mengalami kenaikan sebesar 90,53% dibandingkan saldo Kas Dana BOS pada tahun 2024 sebesar Rp673.312.376,00.

Rincian Kas Dana BOS adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 54
Sisa Dana BOS Reguler dan Kinerja Tahun 2025 di SMA/SMK/SLB Negeri

URAIAN	SISA BOS 2024 (Rp)	PENERIMAAN DANA BOS 2025 (Rp)	REALISASI BELANJA BOS 2025 (Rp)	SISA DANA BOS 2025 (Rp)
BOS REGULER				
SMA NEGERI	221.882.851,00	68.761.565.277,00	68.718.968.907,00	264.479.221,00
SMK NEGERI	193.427.973,00	85.726.296.627,00	85.403.271.523,00	516.453.077,00
SLB NEGERI	23.321.966,00	5.166.518.174,00	5.166.609.000,00	23.231.140,00
	438.632.790,00	159.654.380.078,00	159.288.849.430,00	804.163.438,00
BOS KINERJA				
SMA NEGERI	209.735.320,00	3.013.250.000,00	2.884.108.684,00	338.876.636,00
SMK NEGERI	24.944.266,00	1.548.500.000,00	1.446.499.450,00	126.944.816,00
SLB NEGERI	-	447.000.000,00	434.097.000,00	12.903.000,00
	234.679.586,00	5.008.750.000,00	4.764.705.134,00	478.724.452,00
TOTAL	673.312.376,00	164.663.130.078,00	164.053.554.564,00	1.282.887.890,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Ngayogyakarta

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah Rp37.046.300,00 Rp116.492.000,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp37.046.300,00, merupakan Piutang Pajak Daerah pada BPKA. Piutang Pajak Daerah terdiri dari :

- Piutang PKB sebesar Rp34.991.300,00 dalam kondisi macet, terdapat pada KPPD Kota Yogyakarta sebesar Rp29.432.300,00 dan KPPD Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp5.559.000,00.
- Piutang BBNKB sebesar Rp2.055.000,00 dalam kondisi macet, terdapat pada KPPD Kota Yogyakarta.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, Piutang Pajak diakui ketika wajib pajak datang untuk mendaftar ulang dan ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)..

Saldo Piutang Pajak Daerah pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp79.445.700,00 dibandingkan tahun 2024 karena adanya penghapusan piutang pajak daerah sesuai Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Penghapusan piutang pajak daerah terdapat pada KPPD Kabupaten Sleman sebesar Rp57.111.700,00, dan KPPD Kabupaten Bantul sebesar Rp22.334.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 55
Rincian Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Pokok)**

Jenis Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	KPPD Sleman (Rp)	KPPD Bantul (Rp)	Total (Rp)
Piutang PKB	2 – 5 Tahun	Diragukan	1.714.500,00	378.000,00	2.092.500,00
	Lebih dari 5 Tahun	Macet	27.236.200,00	18.534.000,00	45.770.200,00
Jumlah			28.950.700,00	18.912.000,00	47.862.700,00
Piutang BBNKB	Lebih dari 5 Tahun	Macet	28.161.000,00	3.422.000,00	31.583.000,00
Jumlah			28.161.000,00	3.422.000,00	31.583.000,00
Jumlah			57.111.700,00	22.334.000,00	79.445.700,00

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah Rp2.652.731.042,00 Rp5.250.000,00

Saldo Piutang Retribusi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.647.481.042,00 atau 50.428,21 % dibanding tahun 2024 karena terdapat reklas saldo Piutang Pendapatan BLUD RS Jiwa Grhasia dan RS Paru Respira dari akun Piutang Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun mutasi Piutang Retribusi Daerah berupa piutang pasien, dan piutang klaim jamkes adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 56
Mutasi Piutang Retribusi Daerah

No.	SKPD	Saldo Awal	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir
		31/12/2024 (Rp)			31/12/2025 (Rp)
1	Dinas Pariwisata				
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00
2	Dinas Kesehatan (RS Jiwa Grhasia)				
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis (Piutang Pasien)	0,00	686.306.915,00	952.904,00	685.354.011,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis (Piutang Klaim Jamkes)	0,00	2.628.839.183,00	1.251.380.000,00	1.377.459.183,00
	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya (Piutang sewa)	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3	Dinas Kesehatan (RS Paru Respira)				
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis (Piutang Klaim Jamkes)	0,00	2.557.530.356,00	2.108.486.148,00	449.044.208,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BLPT)				
	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	126.388.640,00	0,00	126.388.640,00
5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (SMKN 1 Sewon)				
	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	6.035.000,00	0,00	6.035.000,00
	Jumlah	5.250.000,00			2.652.731.042,00

Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.652.731.042,00 terdapat pada Dinas Pariwisata sebesar Rp5.250.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp2.515.057.402,00 dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp132.423.640,00 dengan uraian sebagai berikut :

- Piutang Retribusi pada Dinas Pariwisata sebesar Rp5.250.000,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang merupakan piutang dari PT Karya Bhakti Jaya Mandiri kepada Dinas Pariwisata atas Perjanjian Sewa Menyewa Ruang untuk wartel di *Tourist Information Centre* yang sejak tahun 2007 tidak terbayar, umur piutang dari tahun 2007 sampai



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யாகர்டா

dengan tahun 2025 (lebih dari lima tahun) sehingga termasuk kategori piutang macet dengan penyisihan sebesar 100%.

- Piutang Retribusi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.515.057.402,00 terdapat pada RS Jiwa Grhasia sebesar Rp2.066.013.194,00 dan RS Paru Respira sebesar Rp449.044.208,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 57
Rincian Piutang Retribusi Dinas Kesehatan

No.	Satuan Kerja	Jenis Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang
1	RS Jiwa Grhasia	Piutang Pasien Umum	1.492.544,00	Lancar
			5.378.754,00	Kurang Lancar
			1.427.356,00	Diragukan
			677.055.357,00	Macet
		Jumlah	685.354.011,00	
		Piutang Jamkes, dan BPJS	1.343.040.209,00	Lancar
			34.418.974,00	Macet
		Jumlah	1.377.459.183,00	
		Piutang Lainnya (Sewa)	3.200.000,00	Lancar
		Jumlah	2.066.013.194,00	
2	RS Paru Respira	Piutang Klaim Jamkes	449.044.208,00	Lancar
		Total	2.515.057.402,00	

Pada RS Jiwa Grhasia, dari saldo Piutang Pasien Umum per 31 Desember 2025 dengan kualitas macet sebesar Rp677.055.357,00, dan telah diajukan usulan penghapusan bersyarat ke PPKD untuk diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) sebesar Rp316.554.850,87.

- Piutang Retribusi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp132.423.640,00 merupakan Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
 1. Piutang penjualan hasil kuliner SMKN 1 Sewon kepada Hotel Satoria sebesar Rp5.435.000,00 dan kepada Hotel Ibis sebesar Rp600.000,00. Hasil penjualan dibayar pada tanggal 22 Januari 2026.
 2. Piutang jasa layanan UPJ Mesin, UPJ Otomotif, dan UPJ Sifur sebesar Rp126.388.640,00 pada BLPT.

5.3.1.1.4 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan **Rp343.335.172,18 Rp185.156.692,98**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdapat pada BPKA yang merupakan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUKP. Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 sebesar Rp343.335.172,18 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp158.178.479,20 atau 85,43% dibanding tahun 2024. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

Rp343.335.172,18 merupakan piutang dividen pada BUKP Wates, BUKP Kokap dan BUKP Lendah dengan uraian sebagai berikut :

- a. Piutang Dividen sebesar Rp185.156.692,98 adalah piutang dividen atas penyertaan modal pada BUKP Wates tahun 2022 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2025, dengan rincian bagian laba Pemda DIY sebesar Rp170.992.410,00, dana pembinaan sebesar Rp8.093.875,50 dan jasa produksi sebesar Rp6.070.406,62. Hal ini sesuai dengan SK Gubernur DIY Nomor 267/KEP/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Pembagian Laba Bersih BUKP DIY Tahun Buku 2022, yang antara lain berisi tentang ketentuan dividen yang harus disetor oleh masing-masing BUKP, termasuk didalamnya BUKP Wates.

Belum dibayarnya dividen tersebut dikarenakan adanya penyalahgunaan kas oleh Kepala dan Pemegang Kas BUKP yang diketahui berdasarkan cash opname per tanggal 15 Maret 2024, sehingga BUKP Wates kesulitan dalam pemenuhan likuiditas. Kemudian pada tahun 2024, berdasarkan laporan keuangannya, BUKP Wates mengalami kerugian.

- b. Piutang dividen BUKP Kokap merupakan bagian laba tahun 2024 yang harus disetor pada tahun 2025, namun sampai dengan 31 Desember 2025 dividen tersebut belum disetor. Berdasarkan LK *Unaudited* BUKP Kokap diketahui bahwa pada tahun 2025, BUKP Kokap melaporkan rugi sebesar Rp11.889.320,29, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 masih melaporkan laba masing-masing sebesar Rp234.778.078,00 dan Rp85.632.967,00. Terdapat tagihan lainnya tahun 2024 dan 2023 yang merupakan tagihan atas transaksi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh mantan karyawan BUKP. Nilai tagihan lainnya pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp999.346.000,00 dan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp842.352.000,00.
- c. Piutang dividen BUKP Lendah merupakan bagian laba tahun 2024 yang harus disetor pada tahun 2025, namun sampai dengan 31 Desember 2025 dividen tersebut belum disetor. Berdasarkan LK *Unaudited* BUKP Lendah diketahui bahwa pada tahun 2025, BUKP Lendah melaporkan rugi sebesar Rp253.566.066,10. BUKP Lendah belum dapat membayar dividen karena terjadi penarikan dana simpanan besar-besaran, sehingga berimbas pada likuiditas BUKP. Selanjutnya Kepala BUKP Lendah telah bersurat kepada Kepala BPKA DIY memohon penangguhan pembayaran, dan telah disetujui oleh Kepala BPKA DIY.

Dividen BUKP Kokap dan BUKP Lendah ditetapkan dengan SK Gubernur DIY Nomor 275 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Pembagian Laba Bersih BUKP DIY Tahun Buku 2024, yang antara lain berisi tentang ketentuan dividen yang harus disetor oleh masing-masing BUKP, termasuk didalamnya BUKP Kokap dan BUKP Lendah, Sesuai SK tersebut jumlah total yang harus disetorkan kepada Pemda DIY adalah sebesar Rp3.606.028.393,20, dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Ngayogyakarta

dilakukan pembayaran sebesar Rp3.447.849.913,89, sehingga masih terdapat selisih Rp158.178.479,31 yang belum dibayar dari BUKP Kokap sebesar Rp43.368.636,22 dan BUKP Lendah sebesar Rp114.809.842,98.

5.3.1.1.5 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp2.674.860.972,55 Rp6.921.462.567,55

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.674.860.972,55 meliputi Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.050.000,00 Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp209.348.281,55, Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp9.865.850,00, Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp2.218.331.482,00, Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM) sebesar Rp118.774.000,00, dan Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp116.491.359,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 58
Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah**

No.	SKPD	Saldo Awal 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir 31/12/2025 (Rp)
1	BPKA				
	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	210.348.281,55	0,00	1.000.000,00	209.348.281,55
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	28.957.850,00	0,00	19.092.000,00	9.865.850,00
	Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir	2.220.131.482,00	0,00	1.800.000,00	2.218.331.482,00
	Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM)	136.774.000,00	0,00	18.000.000,00	118.774.000,00
	Jumlah	2.598.261.613,55	0,00	39.892.000,00	2.558.369.613,55
2	DINKES				
	RS Grhasia - Piutang Pendapatan BLUD (Piutang Diklat)	2.171.370.461,00	88.211.000,00	2.171.370.461,00	88.211.000,00
	RS RESPIRA - Piutang Pendapatan BLUD	2.123.550.134,00	0,00	2.123.550.134,00	0,00
	Jumlah	4.294.920.595,00	88.211.000,00	4.294.920.595,00	88.211.000,00
3	DIKPORA				
	BLPT - Piutang Pendapatan BLUD	28.280.359,00	0,00	0,00	28.280.359,00
	Jumlah	28.280.359,00	0,00	0,00	28.280.359,00
	Total	6.921.462.567,55	88.211.000,00	4.334.812.595,00	2.674.860.972,55



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

A. Piutang Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.050.000,00 merupakan piutang pada BPKA berupa Piutang Pendapatan Sewa Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2014 dan dalam kondisi macet.

B. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp209.348.281,55 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada BPKA yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2025 dengan kondisi macet. Piutang tersebut adalah piutang Tuntutan Ganti Rugi terhadap anggota DPRD yang terjadi sejak tahun 2013. Adapun penurunan saldo Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.000.000,00 merupakan pembayaran piutang tahun 1998 atas nama Sudjono dh. PD Pertambangan Mangan, pada tanggal 15 November 2025.

C. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp9.865.850,00 merupakan Piutang Pendapatan Denda PKB pada BPKA yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Wajib Pajak, dengan umur piutang lebih dari lima tahun dan dalam kondisi macet.

Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp19.092.000,00 dibandingkan tahun 2024 karena adanya penghapusan sesuai Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Penghapusan Piutang Pendapatan Denda Pajak terdapat pada KPPD Kabupaten Sleman sebesar Rp7.407.400,00 dan KPPD Kabupaten Bantul sebesar Rp11.684.600,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 59
Rincian Penghapusan Piutang Denda Pajak Daerah

Jenis Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	KPPD Sleman (Rp)	KPPD Bantul (Rp)	Total (Rp)
Piutang PKB	2 – 5 Tahun	Diragukan	945.300,00	184.400,00	1.129.700,00
	Lebih dari 5 Tahun	Macet	5.190.900,00	10.893.200,00	16.084.100,00
Jumlah			6.136.200,00	11.077.600,00	17.213.800,00
Piutang BBNKB	Lebih dari 5 Tahun	Macet	1.271.200,00	607.000,00	1.878.200,00
Jumlah			1.271.200,00	607.000,00	1.878.200,00
Jumlah			7.407.400,00	11.684.600,00	19.092.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Wilayah Istimewa yang berkeadilan sosial dan keadilan ekonomi

D. Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir

Saldo Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir sebesar Rp118.774.000,00 merupakan denda dari dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang terdiri dari Dana Penguatan Modal Pemasaran Hasil Pertanian (DPM PHP) tahun 2012 sebesar Rp16.500.000,00, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2013 sebesar Rp7.500.000,00, dan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP) tahun 2011 sebesar Rp87.250.000,00 serta pada Dinas Perikanan dan Kelautan berupa Dana Penguatan Modal (DPM) tahun 2013 sebesar Rp7.524.000,00.

Rincian Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir sebagai berikut.

**Tabel 5. 60
Rincian Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir**

Jenis Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Nilai (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Keterangan
Piutang DPM PHP 2012	Lebih dari 5 Tahun	Macet	16.500.000,00	16.500.000,00	Piutang 20 Desember 2012
Piutang LDPM	Lebih dari 5 Tahun	Macet	7.500.000,00	7.500.000,00	Piutang 20 Desember 2013
Piutang DPM LUEP	Lebih dari 5 Tahun	Macet	87.250.000,00	87.250.000,00	Piutang 20 Desember 2011
Piutang DPM 2013 (KELAUTAN)	Lebih dari 5 Tahun	Macet	7.524.000,00	7.524.000,00	Piutang 20 Desember 2013
Jumlah			118.774.000,00	118.774.000,00	

E. Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir.

Saldo Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp2.218.331.482,00 merupakan bunga dari dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari DPM PHP tahun 2012 sebesar Rp9.900.000,00, LDPM tahun 2013 sebesar Rp4.125.000,00, dan DPM LUEP tahun 2011 sebesar Rp52.950.000,00, pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp2.140.856.482,00 serta pada Dinas Perikanan dan Kelautan berupa DPM tahun 2013 sebesar Rp10.500.000,00.

F. Piutang Pendapatan BLUD

Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp116.491.359,00 terdiri dari Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp28.280.359,00 dalam kategori macet dan Piutang BLUD RS Jiwa Grhasia (Dinas Kesehatan) sebesar Rp88.211.000,00 yang merupakan Piutang Diklat, dengan kategori piutang sebagai berikut :

**Tabel 5. 61
Piutang Diklat RS Jiwa Grhasia**

Uraian	Tahun	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Keterangan
Piutang Diklat	2021 - 2025	73.251.000,00	366.255,00	Lancar
		13.104.000,00	1.310.400,00	Kurang Lancar



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Uraian	Tahun	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Keterangan
		1.088.000,00	544.000,00	Diragukan
		768.000,00	768.000,00	Macet
		88.211.000,00	2.988.655,00	

5.3.1.1.6 Piutang Lainnya Rp2.160.755.535,00 Rp2.562.560.482,50

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.160.755.535,00 merupakan cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan PT Taru Martani dalam menyimpan cadangan beras dengan tujuan untuk tujuan strategis. Jumlah cadangan beras yang diedarkan sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 193.356,20 kg. Hasil *stock opname* pada tanggal 31 Desember 2025 terdapat beras sebanyak 109.518,00 kg sehingga total beras yang dititipkan kepada PT Taru Martani sebanyak 302.874,20 kg.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2025, sedangkan selisih antara total cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dengan Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2025 dicatat sebagai Piutang Lain-lain. Penilaian Piutang Lain-Lain menggunakan harga pembelian terakhir dikalikan dengan volume kekurangan persediaan, sehingga nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.160.755.535,00 (193.356,20 kg x Rp11.175,00).

5.3.1.1.7 Penyisihan Piutang Pendapatan Rp3.373.338.809,26 Rp3.638.698.901,89

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.373.338.809,26 merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp37.046.300, Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp728.138.212,41, Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp18.515.669,30 dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp2.589.638.627,55 dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Penyisihan Piutang Pajak Daerah Rp37.046.300,00 Rp115.445.750,00

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada BPKA sebesar Rp37.046.300,00 terdiri dari Penyisihan Piutang PKB sebesar Rp34.991.300,00 dan Penyisihan Piutang BBNKB sebesar Rp2.055.000,00, merupakan piutang macet dengan umur piutang lebih dari 5 tahun.

B. Penyisihan Piutang Retribusi Rp728.138.212,41 Rp5.250.000,00

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp728.138.212,41 merupakan Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan (piutang sewa) pada Dinas Pariwisata, Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan (piutang sewa) dan Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis (piutang pasien umum dan piutang Jaminan Kesehatan (Jamkes)) pada Dinas Kesehatan dan Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Rincian penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 62
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi

SKPD	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
Dinas Pariwisata	5.250.000,00	Piutang sewa	Lebih dari 12 bulan	Macet	5.250.000,00
Dinas Kesehatan -RS Grhasia	3.200.000,00	Piutang sewa	0 - 1 bulan	Lancar	16.000,00
	1.492.544,00	Piutang pasien umum	0 - 1 bulan	Lancar	7.462,72
	1.343.040.209,00	Piutang Jamkes	0 - 1 bulan	Lancar	6.715.201,05
	5.378.754,00	Piutang pasien umum	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	537.875,40
	1.427.356,00	Piutang pasien umum	3 -12 bulan	Diragukan	713.678,00
	677.055.357,00	Piutang pasien umum	Lebih dari 12 bulan	Macet	677.055.357,00
	34.418.974,00	Piutang Jamkes	Lebih dari 12 bulan	Macet	34.418.974,00
Dinas Kesehatan -RS Respira	449.044.208,00	Piutang Jamkes	0 - 1 bulan	Lancar	2.245.221,04
	2.515.057.402,00				721.709.769,21
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	126.988.640,00	Piutang Penjualan Hasil Produksi	0 - 1 bulan	Lancar	634.943,20
	5.435.000,00		1 - 3 bulan	Kurang Lancar	543.500,00
	132.423.640,00				1.178.443,20
Total	2.652.731.042,00				728.138.212,41

C. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan **Rp18.515.669,30** **Rp18.515.669,29**

Saldo Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BPKA sebesar Rp18.515.669,30 merupakan penyisihan dari piutang piutang deviden pada BUKP Wates tahun 2024 sebesar Rp185.156.692,98 yang termasuk kategori piutang kurang lancar dengan umur satu tahun.

D. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah **Rp2.589.638.627,55** **Rp3.499.487.482,60**

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.589.638.627,55 terdiri dari:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Kerinci Kerinci Kerinci Kerinci Kerinci Kerinci Kerinci Kerinci

Tabel 5. 63
Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No.	Satuan Kerja	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
1	RS Jiwa Grhasia	73.251.000,00	Lancar	366.255,00
		13.104.000,00	Kurang Lancar	1.310.400,00
		1.088.000,00	Diragukan	544.000,00
		768.000,00	Macet	768.000,00
		Jumlah	88.211.000,00	
2	BLPT	28.280.359,00	Macet	28.280.359,00
3	BPKA			
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	209.348.281,55	Macet	209.348.281,55
	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.050.000,00	Macet	2.050.000,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	9.865.850,00	Macet	9.865.850,00
	Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM)	118.774.000,00	Macet	118.774.000,00
	Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir	2.218.331.482,00	Macet	2.218.331.482,00
	Jumlah	2.558.369.613,55		2.558.369.613,55
	Total	2.674.860.972,55		2.589.638.627,55

5.3.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka

Rp672.099.798,22

Rp419.305.475,69

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp672.099.798,22 terdiri dari Beban Dibayar Dimuka pembayaran asuransi sebesar Rp271.192.199,50 dan pembayaran sewa sebesar Rp400.907.598,72 dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban Dibayar Dimuka pembayaran asuransi per 31 Desember 2025 sebesar Rp271.192.199,50 merupakan pembayaran premi asuransi tahun 2025 pada BPKA sebesar Rp490.025.509,00 dikurangi dengan beban asuransi BMD sebesar Rp218.833.309,50 dengan uraian sebagai berikut.
 - a. Premi asuransi kebakaran dan gempa bumi yang dibayarkan kepada PT Asuransi Sinar Mas sebesar Rp289.755.509,00 dengan masa pertanggungansan mulai 21 Juli 2025 sampai dengan 21 Juli 2026. Premi asuransi kebakaran dan gempa bumi tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 telah diakui menjadi beban asuransi BMD sebesar Rp129.397.665,66 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp160.357.843,34 dengan masa manfaat mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 21 Juli 2026.
 - b. Premi asuransi kendaraan dinas yang dibayarkan kepada PT Asuransi Sinar Mas sebesar Rp200.270.000,00 dengan masa pertanggungansan mulai 21 Juli 2025 sampai dengan 21 Juli 2026. Premi asuransi kendaraan dinas tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 telah diakui menjadi beban asuransi BMD sebesar Rp89.435.643,84 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp110.834.356,16 dengan masa manfaat mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 21 Juli 2026.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پيمريتا دايراه ايسميوا يوجياكارتا

Tabel 5. 64
Rincian Beban Dibayar Dimuka (Asuransi)

No.	Nama Asuransi	Periode Pertanggungangan	Total Premi (Rp)	Periode Beban Jasa Dibayar Dimuka	Beban Jasa dibayar dimuka (Rp)
1	PT Asuransi Sinar Mas	21/07/2025 s.d. 21/07/2026	289.755.509,00	01-01-2026 s.d. 21-07-2026	160.357.843,34
2	PT Asuransi Sinar Mas	21/07/2025 s.d. 21/07/2026	200.270.000,00	01-01-2026 s.d. 21-07-2026	110.834.356,16
Jumlah			490.025.509,00		271.192.199,50

2. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp268.049.085,51 merupakan pembayaran sewa yang terdapat pada BPKA sebesar Rp75.946.903,84, Dinas Kesehatan sebesar Rp86.212.775,99, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp51.513.379,41 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp54.376.026,27 dengan rincian sebagai berikut.

a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Beban Dibayar Dimuka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp75.946.903,84 merupakan beban dibayar dimuka untuk sewa ruang Pemdes untuk SAMSAT Desa pada KPPD Kulon Progo sebesar Rp1.232.876,71, KPPD Bantul sebesar Rp25.398.958,63 dan sewa ruang untuk SAMSAT di Galeria sebesar Rp49.315.068,49 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 65
Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka

Pihak yang Disewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Beban Sewa Dibayar Dimuka	Nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka (Rp)
Pemerintah Kelurahan Palihan Kapanewon Temon Kab. Kulon Progo	01/04/2025 s.d 31/03/2026	5.000.000,00	01/01/2026 s.d. 31/03/2026	1.232.876,71
Pemerintah Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kab. Bantul	01/12/2025 s.d 30/11/2026	16.000.000,00	01/01/2026 s.d. 30/11/2026	14.641.095,89
Pemerintah Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kab. Bantul	28/11/2025 s.d. 27/11/2026	11.862.900,00	01/01/2026 s.d. 27/11/2026	10.757.862,74
PT Sawokembar Galeria	01/05/2025 s.d. 30/04/2026	150.000.000,00	01/01/2026 s.d. 30/04/2026	49.315.068,49
Jumlah		182.862.900,00		75.946.903,84

b. Dinas Kesehatan

Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Kesehatan sebesar Rp86.212.775,99 terdiri dari :

- 1) Pembayaran sewa tanah untuk tower antena repiter pada Dinas Kesehatan sebesar Rp30.000.000,00, untuk jangka waktu lima tahun mulai 1 Januari 2026 - 31 Desember 2030. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.000.000,00.
- 2) Pembayaran sewa tanah magersari milik Sultan Ground pada RS Grhasia sebesar Rp93.500.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 20 Agustus 2018 - 20 Agustus 2028.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦺꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦪꦲꦏꦂꦠ

2028. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp24.641.625,62.

- 3) Pembayaran sewa tanah magersari pada RS Grhasia sebesar Rp16.000.000,00 untuk jangka waktu mulai 17 Mei 2025 - 17 Mei 2026. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.989.071,03.
- 4) Pembayaran sewa tanah warga Palbapang pada RS Respira sebesar Rp45.500.000,00 untuk jangka waktu dua tahun mulai 15 Februari 2025 - 15 Februari 2027. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.582.079,34.

c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp184.371.892,62 merupakan Beban Dibayar Dimuka atas pembayaran sewa tanah Kas Desa di kalurahan oleh sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Sleman, Bantul dan Gunung Kidul, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 66
Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka

No	Unit Kerja	Pihak Yang Disewa	Periode Sewa	Nilai Sewa/Tahun (Rp)	Periode Beban sewa Dibayar Dimuka	Nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka (Rp)
1	SMKN 1 Tanjungsari (Baldik GK)	Tanah Kas Desa Kalurahan Kemadang	04/07/2025 s.d 04/07/2026	52.822.000,00	01/01/2026 s.d 03/07/2026	26.628.076,71
2	SMA Negeri 1 Ngaglik (Baldik Sleman)	Tanah Kas Desa Kalurahan Donoharjo	03/01/2025 s.d 02/01/2026	5.000.000,00	01/01/2026 s.d 02/01/2026	27.397,26
3	SMA Negeri 1 Ngemplak (Baldik Sleman)	Tanah Kas Desa Kalurahan Bimomartani	30/11/2025 s.d 30/11/2026	5.326.662,00	01/01/2026 s.d 29/11/2026	4.859.666,98
4	SMK Negeri 1 Tempel (Baldik Sleman)	Tanah Kas Desa Kalurahan Margorejo	02/08/2025 s.d 02/08/2026	32.847.930,00	01/01/2026 s.d 01/08/2026	19.168.792,03
5	SMK N 1 Saptosari (Baldik GK)	Tanah Kas Desa Desa Kepek	30/03/2025 s.d 30/03/2026	33.750.000,00	01/01/2026 s.d 29/03/2026	8.136.986,30
6	SMKN 1 Pajangan (Balai Dikmen Bantul)	Tanah Kas Desa Kalurahan Sendangsari	19/03/2025 s.d 19/03/2026	66.852.844,00	01/01/2026 s.d 18/03/2026	14.103.202,71
7	SMKN 1 Pleret (Balai Dikmen Bantul)	Tanah Kas Desa Kalurahan Wonokromo	09/12/2025 s.d 08/12/2026	52.412.500,00	01/01/2026 s.d 08/12/2026	49.109.794,52
8	SMAN 3 Bantul (Balai Dikmen Bantul)	Tanah Kas Desa Kalurahan Pendowoharjo	01/10/2025 s.d 01/10/2026	23.400.000,00	01/01/2026 s.d 30/09/2026	17.501.917,81



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas segala perbuatan yang dilakukan
dengan mengikuti Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No	Unit Kerja	Pihak Yang Disewa	Periode Sewa	Nilai Sewa/Tahun (Rp)	Periode Beban sewa Dibayar Dimuka	Nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka (Rp)
9	SMKN 1 Bantul (Balai Dikmen Bantul)	Tanah Kas Desa Kalurahan Sabdodadi	31//08/2025 s.d 31/08/2026	15.918.121,00	01/01/2026 s.d 30/08/2026	10.553.932,28
10	SMKN 1 Gedangsari (Balai Dikmen GK)	Tanah Kas Desa Kalurahan Hargomulyo	01/12/2025 s.d 01/12/2026	37.464.000,00	01/01/2026 s.d 30/11/2026	34.282.126,03
JUMLAH						184.371.892,62

d. Dinas Perhubungan

Pada Dinas Perhubungan terdapat pembayaran sewa tanah lapangan parkir telukan Maguwoharjo (Balai Pengelolaan Terminal dan Perpakiran) sebesar Rp185.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 9 Desember 2018 – 9 Desember 2028. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp54.376.026,27.

5.3.1.1.9 Persediaan Rp95.504.172.270,32 Rp98.529.252.418,73

Saldo Persediaan sebesar Rp95.504.172.270,32 terdiri dari persediaan barang pakai habis yang berada di 31 SKPD dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 67
Rincian Persediaan pada SKPD**

No.	SKPD	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	49.511.994.895,28	45.627.878.308,85
2	Dinas Kesehatan	17.924.207.389,34	25.783.860.850,39
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	30.917.067,00	11.619.350,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	4.317.968.296,55	6.820.566.546,54
5	Satuan Polisi Pamong Praja	7.286.918,95	5.853.780,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.678.465.794,02	2.178.191.335,43
7	Dinas Sosial	858.732.245,44	704.240.065,19
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	165.277.930,00	143.131.600,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.700.216.077,12	2.557.499.069,70
10	Dinas Perhubungan	1.469.253.981,58	1.421.013.027,26
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	149.453.160,69	184.736.258,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	556.605.779,75	731.566.828,50
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.821.624,42	1.906.446,00
14	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	711.969.159,58	1.602.414.087,13
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	111.662.971,01	90.004.132,06
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	754.537.541,22	802.255.061,12
17	Dinas Pariwisata	71.801.358,82	44.732.334,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.318.733.451,66	3.527.414.808,94
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.651.562.916,44	1.770.760.183,23
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	527.471.875,61	538.523.058,32
21	Sekretariat Daerah	856.034.823,21	710.811.103,88
22	Sekretariat DPRD	283.959.687,00	126.293.899,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	376.983.402,64	378.645.792,20



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta

No.	SKPD	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	2.636.894.934,13	2.324.372.674,67
25	Badan Kepegawaian Daerah	70.519.514,50	63.316.627,39
26	Badan Pendidikan dan Pelatihan	41.097.780,00	63.821.340,00
27	Badan Penghubung Daerah	151.531.753,15	113.744.652,28
28	Inspektorat	171.201.727,00	129.799.514,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.629.544,23	13.336.182,65
30	Paniradya Kaistimewan	186.531.742,00	56.943.502,00
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	175.846.927,98	0,00
	Jumlah	95.504.172.270,32	98.529.252.418,73

Persediaan berdasarkan Rincian Objek adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 68
Rincian Objek Persediaan

No.	Uraian	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
	Barang Pakai Habis	97.930.643.144,93	98.523.524.918,73
1	Bahan	35.166.183.249,25	38.135.850.779,96
2	Suku Cadang	2.588.671.942,70	2.641.810.649,74
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	39.475.987.291,72	37.575.094.028,54
4	Obat-Obatan	4.207.246.383,61	6.654.422.798,73
5	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	8.320.617.534,33	9.822.346.649,86
6	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	4.649.502.687,82	2.574.175.331,90
7	Natura dan Pakan	277.358.940,89	421.499.390,00
8	Persediaan Dalam Proses	696.758.290,00	698.325.290,00
	Barang Tak Pakai Habis	121.845.950,00	5.727.500,00
1	Komponen	121.845.950,00	1.605.000,00
2	Pipa	0,00	4.122.500,00
	Barang Bekas Dipakai		
1	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00
	Jumlah	95.504.172.270,32	98.529.252.418,73

Selain saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp95.504.172.270,32 terdapat persediaan yang telah rusak sebesar Rp3.062.085.305,25 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 69
Rincian Persediaan Rusak

No.	Uraian	Nilai (Rp)
	BARANG PAKAI HABIS	
1	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	103.158.847,72
	Alat Tulis Kantor	10.172.000,00
	Kertas dan Cover	13.524.000,00
	Bahan Cetak	71.716.892,72
	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	7.745.955,00
2	OBAT-OBATAN	2.958.926.457,53
	Jumlah	3.062.085.305,25

Adapun rincian persediaan rusak pada SKPD adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாறுவாஉருவாஉருவாபெரிமாறுவாஉருவாஉருவா

Tabel 5. 70
Rincian Persediaan Rusak pada SKPD

No.	SKPD	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	Obat-obatan	Total
1	Dinas Kesehatan	0,00	2.958.926.457,53	2.958.926.457,53
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.435.300,00	0,00	6.435.300,00
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3.087.000,00	0,00	3.087.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	88.833.892,72	0,00	88.833.892,72
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.802.655,00	0,00	4.802.655,00
	Jumlah	103.158.847,72	2.958.926.457,53	3.062.085.305,25

Terhadap persediaan rusak sebesar Rp3.062.085.305,25 tersebut telah dilakukan reklasifikasi ke catatan persediaan rusak berat/usang sebesar Rp2.982.776.962,53, diusulkan penghapusan sebesar Rp7.745.955,00 dan telah diterbitkan SK Penghapusan sebesar Rp71.562.387,72.

Berdasarkan catatan persediaan manual petugas Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan atas hibah obat, vaksin, dan BMHP dari Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa:

- Obat, vaksin dan BMHP yang telah didistribusikan sebesar Rp28.562.492.149,06. BAST atas persediaan ini baru diterima pada bulan Februari - Maret 2026, sehingga petugas Instalasi Farmasi harus mengidentifikasi periode penerimaan dan pendistribusiannya dan selanjutnya akan disesuaikan dalam laporan keuangan; dan
- Terdapat sisa/stock obat, vaksin dan BMHP senilai Rp15.737.753.437,17. BAST atas persediaan ini belum diterima oleh Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Pemda DIY, sehingga belum dapat disesuaikan dalam laporan keuangan.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp95.504.172.270,32 termasuk di dalamnya persediaan untuk strategis berupa persediaan cadangan pangan beras yang dititipkan kepada pihak ketiga yaitu pada gudang PT Taru Martani senilai Rp1.223.863.650,00.

Sesuai dengan perjanjian antara Kepala DPKP dengan PT Taru Martani, atas penitipan cadangan beras pada Gudang PT Taru Martani, PT Taru Martani mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang minimal sebanyak 25% dari total cadangan beras yang dititipkan. Total cadangan beras yang dititipkan sebanyak 302.874,20 kg, cadangan beras yang beredar sebanyak 193.356,20 kg dan hasil stock opname di gudang terdapat beras sebanyak 109.518 kg. Persediaan sebesar 109.518 kg merupakan persediaan cadangan beras sesuai hasil stock opname pada tiga Usaha Dagang (UD) mitra PT Tarumartani yaitu UD Barokah, UD Subur Makmur dan UD Elma Jaya per 31 Desember 2025.

Dalam Kebijakan Akuntansi, Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan, sedangkan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

**Tabel 5. 71
Rincian Dana Bergulir**

Uraian Dana Bergulir	Nilai Perolehan (Rp)	Klasifikasi		Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Dana bergulir kepada Koperasi					
Dinas Koperasi dan UKM	2.643.251.964,00	Macet	100%	2.643.251.964,00	0,00
Jumlah	2.643.251.964,00			2.643.251.964,00	0,00
Dana bergulir kepada Masyarakat					
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.795.150.000,00	Macet	100%	1.795.150.000,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	133.500.000,00	Macet	100%	133.500.000,00	0,00
BUKP	10.000.000.000,00	Lancar	0,5%	50.000.000,00	9.950.000.000,00
	790.000.000,00	Macet	100%	790.000.000,00	0,00
Jumlah	12.718.650.000,00			2.748.650.000,00	9.950.000.000,00
Total	15.361.901.964,00			5.411.901.964,00	9.950.000.000,00

Pengelompokan Saldo Dana Bergulir berdasarkan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 72
Kelompok Umur Dana Bergulir**

No.	Kelompok	Nilai (Rp)	Diragukan Tertagih (Rp)	NPV (Rp)
1	Umur kurang dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo	10.000.000.000,00	50.000.000,00	9.950.000.000,00
2	Lebih dari 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	5.361.901.964,00	5.361.901.964,00	0,00
	Jumlah	15.361.901.964,00	5.411.901.964,00	9.950.000.000,00

Sesuai perhitungan berdasarkan kelompok umur, saldo perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.411.901.964,00 sehingga saldo NRV Dana Bergulir per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp9.950.000.000,00.

Pengelolaan Dana Bergulir yang disajikan pada Investasi Non Permanen Provinsi DIY mengacu pada Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir antara lain diatur sebagai berikut:

- Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi dan BUKP yang berada di bawah pembinaan SKPD teknis.
- SKPD Teknis menyusun usulan anggaran dana bergulir, berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Teknis yang diajukan kepada PPKD.
- Dana Bergulir dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
- Dana Bergulir yang telah diterima melalui rekening kelompok/koperasi/BUKP harus dipergunakan sesuai dengan proposal.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

- Dana Bergulir dilaksanakan dengan perjanjian antara Kepala SKPD Teknis dengan Ketua atau Kepala Kelompok/Koperasi/BUKP.
- Pengembalian dikenakan bunga untuk kelompok/koperasi/BUKP sebesar tiga persen per tahun dan disalurkan kepada anggota maksimum sebesar enam persen per tahun.
- Kelompok/koperasi/BUKP wajib mengembalikan pokok dan bunga dana bergulir ke rekening penerimaan melalui BPD (rekening Kas) Provinsi DIY dan menyerahkan bukti setor ke Kelompok Kerja Teknis.
- Jangka waktu pengembalian dana bergulir sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dalam perjanjian.
- Kelompok/koperasi/BUKP yang belum dapat mengembalikan lunas dana yang diterima sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian kelompok/koperasi/BUKP yang bersangkutan, dikenakan denda satu per mil untuk setiap hari keterlambatan dari sisa tunggakan sejak tanggal jatuh tempo.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen Rp2.699.992.098.547,86 Rp2.395.861.594.535,51

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.699.992.098.547,86 mengalami kenaikan sebesar Rp304.130.504.012,35 atau 12,69% dibanding saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.395.861.594.535,51.

Saldo Penyertaan Modal tahun 2025 sebesar Rp2.699.992.098.547,86 diperoleh dari perhitungan berdasarkan penyesuaian terhadap ekuitas BUMD berdasarkan Laporan Keuangan BUMD tahun 2024 *Audited* milik BUKP serta berdasarkan Laporan Keuangan BUMD tahun 2025 *Audited* milik PT Bank BPD DIY, PT Anindya Mitra Internasional, PT Taru Martani, Perumda Air Bersih Tirtatama DIY dan BUKP. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2025 *Audited* diketahui bahwa Perumda Air Bersih Tirtatama DIY mengalami kerugian sebesar Rp2.693.431.806,09. Adapun rincian Perhitungan Penyertaan Modal tahun 2025 disajikan pada **Lampiran III**.

Perhitungan nilai penyertaan modal pada BPD DIY, PT Anindya Mitra Internasional, PD. Taru Martani dan BUKP menggunakan metode ekuitas sedangkan perhitungan penyertaan modal pada PT Askrida menggunakan harga perolehan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.404.079.392.600,45. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Bank BPD DIY per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Wilayah Kerucun Rukun dan Kerukunan Masyarakat Berkeadilan

Saldo Awal per 31 Desember 2024 Audited	Rp	2.124.318.765.845,64
Penyesuaian perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2024 <i>Audited</i>	Rp	-
Ekuitas bagian Pemda DIY per 31-12-2025	Rp	2.124.318.765.845,64
Tambahan modal	Rp	155.000.000.000,00
Deviden tahun 2024 yang disetor ke Pemda DIY tahun 2025	Rp	(121.074.128.133,00)
Laba tahun 2025		Rp338.331.848.504,00
Laba tahun 2025 bagian Pemda DIY		53,840%
Penyesuaian nilai ekuitas BUMD	Rp	182.157.867.234,55
	Rp	63.676.707.087,36
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2025	Rp	2.404.079.392.600,45

- b. Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT Anindya Mitra Internasional (AMI) Yogyakarta per 31 Desember 2025 sebesar Rp46.333.231.366,35. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT AMI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2024 Audited	Rp	43.384.353.348,78
Penyesuaian perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2024 <i>Audited</i>	Rp	-
Ekuitas bagian Pemda DIY per 31-12-2025	Rp	43.384.353.348,78
Tambahan modal	Rp	-
Deviden tahun 2024 yang disetor ke Pemda DIY tahun 2025	Rp	(2.719.068.430,00)
Laba tahun 2025		Rp7.649.434.411,00
Laba tahun 2025 bagian Pemda DIY		99,970%
Penyesuaian nilai ekuitas BUMD	Rp	7.647.139.580,68
	Rp	(1.979.193.133,11)
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2025	Rp	46.333.231.366,35

- c. Penyertaan Modal pada PT Taru Martani Yogyakarta sebesar Rp55.769.149.985,25. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT Taru Martani per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2024 Audited	Rp	45.322.454.221,31
Penyesuaian perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2024 <i>Audited</i>	Rp	-
Ekuitas bagian Pemda DIY per 31-12-2025	Rp	45.322.454.221,31
Tambahan modal	Rp	-
Deviden tahun 2024 yang disetor ke Pemda DIY tahun 2025	Rp	-
Laba tahun 2025		Rp10.447.740.539,00
Laba tahun 2025 bagian Pemda DIY		99,990%
	Rp	10.446.695.764,95



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

5.3.1.3 Aset Tetap Rp10.399.363.093.782,70 Rp10.037.933.360.631,90

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.399.363.093.782,70 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp16.212.598.470.216,90 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp5.813.235.376.434,28 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah Rp4.836.880.489.552,12 Rp4.660.989.682.245,12

Saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp4.836.880.489.552,12 diklasifikasikan sebagai berikut.

**Tabel 5. 73
Rincian Objek Tanah**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	56.138.897.190,00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	377.535.406.596,00
3	Tanah untuk Bangunan Industri	2.178.896.000,00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.365.916.000.031,12
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	59.221.200.000,00
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	27.238.178.200,00
7	Tanah Basah	4.878.262.000,00
8	Tanah Kering	200.310.000,00
9	Tanah Perkebunan	1.349.500.000,00
10	Tanah Pertanian	38.708.749.000,00
11	Tanah Lapangan Olahraga	32.516.450.000,00
12	Tanah Lapangan Parkir	141.553.591.945,00
13	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	11.757.927.892,00
14	Tanah Lapangan Terbang	7.420.190.375,00
15	Tanah untuk Jalan	2.402.443.353.439,00
16	Tanah untuk Bangunan Air	30.501.757.091,00
17	Tanah untuk Bangunan Instalasi	41.680.943.758,00
18	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	192.028.051.639,00
19	Tanah untuk Makam	123.483.000,00
20	Tanah Kampung	43.489.341.396,00
	Jumlah	4.836.880.489.552,12

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 74
Rincian Tanah pada SKPD**

No.	SKPD	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	428.606.990.472,12	428.491.102.972,12
2	Dinas Kesehatan	131.863.507.850,00	131.863.507.850,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	2.397.511.308.682,00	2.259.641.415.953,00
4	Dinas Pertanian dan Tata Ruang	85.954.418.175,00	85.954.418.175,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	133.500.000,00	133.500.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.975.357.000,00	2.975.357.000,00
7	Dinas Sosial	6.501.947.490,00	6.501.947.490,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦺꦴꦩꦠꦶꦩꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

No.	SKPD	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.551.800.680,00	4.551.800.680,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.646.810.000,00	1.646.810.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	84.500.414.730,00	42.819.470.972,00
11	Dinas Perhubungan	61.240.048.920,00	61.240.048.920,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.504.000.000,00	14.504.000.000,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	243.748.467.456,00	243.748.467.456,00
14	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	326.660.158.184,00	326.660.158.184,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.756.000.000,00	1.756.000.000,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	43.345.213.774,00	43.345.213.774,00
17	Dinas Pariwisata	25.855.658.900,00	63.635.490.540,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	115.352.107.899,00	122.199.307.899,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.409.962.000,00	29.409.962.000,00
20	Sekretariat Daerah	175.261.009.010,00	175.261.009.010,00
21	Badan Penghubung Daerah	12.984.000.000,00	12.984.000.000,00
22	Inspektorat	1.217.500.000,00	1.217.500.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	598.451.276.690,00	595.379.993.370,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00
25	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.669.200.000,00	4.669.200.000,00
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37.779.831.640,00	0,00
	Jumlah	4.836.880.489.552,12	4.660.989.682.245,12

Rincian mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 75
Rincian Mutasi Tanah

Saldo awal per 31 Desember 2024	4.660.989.682.245,12
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2025	122.858.100,00
Hibah	188.626.117.328,00
Reklas dari Aset Lain-Lain (Aset yang tidak digunakan) pada DPU dan ESDM	901.988.500,00
Jumlah	189.650.963.928,00
Pengurangan:	
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset yang tidak digunakan) pada BPKA	6.904.886.680,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset yang tidak digunakan) pada DPU dan ESDM	8.069.941,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada DPKP	6.847.200.000,00
Jumlah	13.760.156.621,00
Saldo akhir per 31 Desember 2025	4.836.880.489.552,12

Penjelasan:

- Penambahan aset Tanah dari hibah sebesar Rp188.626.117.328,00, dapat dirinci sebagai berikut

Tabel 5. 76
Rincian Penambahan Aset Tanah dari Hibah

SKPD	Hibah	Nilai (Rp)
DIKPORA	Hibah dari Komite Sekolah SMAN 1 Patuk	80.000.000,00
	Hibah dari Kanwil Depdikbud	35.887.500,00
BPKA	Hibah dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI	9.976.170.000,00
	Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum	178.534.059.828,00
	Jumlah	188.626.117.328,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யாகர்டா

- Reklas dari Aset Lain-Lain (Aset yang tidak digunakan) sebesar Rp901.988.500,00 terdapat pada DPUP ESDM. Semula direncanakan akan dihibahkan ke Kementerian PU karena berstatus sebagai jalan nasional tetapi karena statusnya berubah menjadi jalan provinsi maka direklas kembali ke Tanah untuk jalan.
- Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset yang tidak digunakan) sebesar Rp6.904.886.680,00 terdapat pada BPKA berupa tanah areal Geopark Nglanggeran, tanah di Lava Bantal, dan ruas Jalan Jonggrangan Goa Kiskendo yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul dan Sleman.
- Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset yang tidak digunakan) sebesar Rp8.069.941,00 terdapat pada DPU dan ESDM karena tidak digunakan untuk operasional pemerintah dan akan diserahkan ke Kementerian PU.
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya- Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp6.847.200.000,00 terdapat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan karena akan disewakan,

5.3.1.3.2 Peralatan Mesin **Rp2.415.383.849.133,75 Rp2.272.476.209.148,43**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.415.383.849.133,75 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 77
Rincian Objek Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Alat Besar	140.740.368.315,05
2	Alat Angkutan	235.083.202.265,13
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	141.610.195.115,36
4	Alat Pertanian	19.141.410.087,02
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	603.978.876.899,92
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	167.636.881.855,98
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	92.829.899.805,18
8	Alat Laboratorium	324.822.693.037,97
9	Alat Persenjataan	18.664.000.275,86
10	Komputer	528.731.510.497,06
11	Alat Eksplorasi	1.217.602.879,00
12	Alat Pengeboran	206.084.950,00
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	433.256.924,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	10.705.000,00
15	Alat Keselamatan Kerja	4.562.238.644,20
16	Alat Peraga	1.176.097.475,00
17	Peralatan Proses/Produksi	5.379.914.995,94
18	Rambu-rambu	123.557.263.353,04
19	Peralatan Olahraga	5.601.646.758,04
	Jumlah	2.415.383.849.133,75

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெர்தாநகரா திஸ்திமுவா யுக்யாகர்தா

Tabel 5. 78
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada SKPD

No.	SKPD	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.032.167.277.234,31	920.824.936.073,25
2	Dinas Kesehatan	193.761.521.175,02	175.436.724.699,98
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	70.431.352.137,58	64.072.198.951,04
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	12.062.965.915,36	11.999.565.791,36
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.168.586.245,99	3.735.347.046,99
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.194.346.871,00	15.383.271.979,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.226.268.261,07	42.227.397.209,67
8	Dinas Sosial	31.204.585.279,77	30.322.981.853,77
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	38.618.431.960,98	39.837.907.838,98
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	9.214.944.376,00	8.712.987.221,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	58.929.050.328,34	60.192.383.679,34
12	Dinas Perhubungan	177.891.990.044,27	166.551.817.127,94
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	116.202.137.716,02	111.053.378.604,02
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	50.682.884.363,25	50.437.028.286,25
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.404.736.900,95	5.447.189.900,95
16	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	99.293.952.139,78	97.419.048.229,76
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	64.018.851.353,71	63.422.898.111,71
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	23.583.477.694,72	24.067.513.661,28
19	Dinas Pariwisata	4.884.771.144,01	7.735.768.334,08
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	54.217.896.131,83	54.749.884.144,83
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	62.831.500.212,50	60.521.081.276,00
22	Sekretariat Daerah	54.558.077.664,04	59.560.245.527,54
23	Badan Penghubung Daerah	7.698.365.923,00	7.680.674.923,00
24	Sekretariat DPRD	22.950.952.225,27	25.531.606.036,09
25	Inspektorat	12.802.138.372,90	12.349.922.913,28
26	Paniradya Kaistimewan	11.642.803.449,98	11.855.467.796,96
27	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	11.146.492.167,30	11.106.219.595,96
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	101.356.033.103,30	100.192.407.845,40
29	Badan Kepegawaian Daerah	21.012.590.018,00	19.040.311.723,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	11.259.013.766,00	11.008.042.766,00
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.965.854.957,50	0,00
Jumlah		2.415.383.849.133,75	2.272.476.209.148,43

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 79
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo awal per 31 Desember 2024	2.272.476.209.148,43
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2025	165.720.594.811,00
Reklas dari Persediaan	706.375.932,50
Reklas dari Gedung Bangunan	170.990.700,00
Reklas dari Jalan, Jaringan, Irigasi	222.704.989,00
Reklas dari Aset Tetap Lainnya	1.626.180.256,00
Reklas dari Aset Tetap Lainnya - ATR	186.083.743,00
Reklas dari KDP	9.200.441.104,84
Reklas dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga	87.461.860,00
Reklas dari Aset Lain-Lain	920.136.030,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦤꦼꦢꦺꦫꦒꦺꦴꦠꦺꦴꦩꦤ꧀ꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦪꦏꦂꦠ

Reklas dari Ekstrakom	428.302.228,25
Reklas dari Beban Barjas	15.526.176.818,44
Hibah	25.873.161.058,75
Verifikasi (Aset Belum Tercatat)	3.724.695.587,62
	224.393.305.119,40
Pengurangan:	
Reklas ke Persediaan	312.843.705,56
Reklas ke Gedung Bangunan	1.309.647.042,00
Reklas ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.982.185,00
Reklas ke KDP	5.632.115.134,00
Reklas ke Aset Tetap Lainnya-ATR	1.443.774.082,00
Reklas ke Aset Tetap Lainnya	91.515.745,33
Reklas ke Extracomtable	1.112.346.111,73
Reklas ke Aset Lain-Lain	57.741.718.096,04
Penghapusan	137.363.315,00
Reklas ke beban barjas	13.642.359.717,42
	81.485.665.134,08
Saldo akhir per 31 Desember 2025	2.415.383.849.133,75

Penambahan dari hibah sebesar Rp25.873.161.058,75 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 80
Rincian Hibah Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	296.408.750,00	Hibah dari Masyarakat
		1.430.819.140,00	Hibah dari Komite Sekolah
		5.674.622.278,21	Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan	198.000.000,00	Hibah dari BPD DIY
		11.600.000,00	Hibah dari UGM
		3.850.000,00	Hibah dari Universitas Alma Ata Yogyakarta
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.500.000,00	Hibah dari BPD DIY
		25.019.678,00	Hibah dari Masyarakat
		911.766.041,00	Hibah dari Kementerian Tenaga Kerja
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	661.840.000,00	Hibah dari Kementerian Pertanian
		47.350.000,00	Hibah dari Masyarakat
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.979.954,00	Hibah dari BPD DIY
6	Sekretariat DPRD	17.250.000,00	Hibah dari RRI
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.482.379.514,54	Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum
		245.568.000,00	Hibah dari Komisi Pemberantasan Korupsi
8	Dinas Perhubungan	10.521.207.703,00	Hibah dari Kementerian Perhubungan
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	314.000.000,00	Hibah dari Masyarakat
	JUMLAH	25.873.161.058,75	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு

Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp57.741.718.096,04 diantaranya sebesar Rp208.077.128,00 terdapat pada BPBD, karena peralatan mesin tersebut pada tahun 2024 telah diserahkan ke RS Swasta sebesar Rp143.077.128,00 yang terdiri dari alat kedokteran sebesar Rp11.400.000,00 dan alat laboratorium sebesar Rp131.677.128,00 dan kepada BPBD Kabupaten Kota berupa *Solid Material Handling Equipment* sebesar Rp65.000.000,00 tetapi belum ada BAST dari Pengelola Barang dan masih tercatat di Peralatan Mesin.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan Rp3.626.093.634.974,18 Rp3.485.996.151.283,92

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.626.093.634.974,18 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 81
Rincian Objek Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung	3.549.256.068.592,11
2	Monumen	14.235.395.686,00
3	Bangunan Menara	739.982.000,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	61.862.188.696,07
	Jumlah	3.626.093.634.974,18

Saldo rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 82
Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada SKPD

No.	SKPD	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.278.300.512.117,83	1.213.685.536.215,41
2	Dinas Kesehatan	184.193.589.514,70	151.722.986.722,54
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	68.909.542.405,34	58.391.204.209,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4.149.372.322,05	4.149.372.322,05
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.770.463.316,00	800.449.016,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.382.009.848,00	8.774.070.367,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.154.961.350,00	9.154.961.350,00
8	Dinas Sosial	112.979.804.831,28	110.431.970.308,28
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	43.115.830.557,00	43.081.969.221,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	26.532.840.863,00	23.881.801.813,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75.301.970.020,66	59.615.553.909,66
12	Dinas Perhubungan	74.894.391.614,46	78.883.206.060,46
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.293.990.281,00	5.293.990.281,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	183.169.630.956,68	177.685.561.770,68
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.458.247.391,00	3.161.304.474,00
16	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	128.400.979.689,00	125.281.192.868,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	138.238.120.529,00	138.238.120.529,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	94.120.036.090,32	93.513.149.990,32
19	Dinas Pariwisata	47.204.860.251,00	74.325.845.984,93
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	123.484.887.689,48	123.459.891.069,48
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.466.796.454,40	32.235.489.199,06
22	Sekretariat Daerah	49.868.542.626,00	47.282.302.251,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

No.	SKPD	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
23	Badan Penghubung Daerah	12.153.589.798,00	12.126.659.798,00
24	Sekretariat DPRD	576.741.303.378,00	576.741.303.378,00
25	Inspektorat	24.620.496.207,00	24.620.496.207,00
26	Paniradya Kaistimewan	9.465.353.491,65	9.321.673.874,65
27	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	4.989.171.200,00	4.989.171.200,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	198.551.114.559,93	178.069.740.402,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	72.775.634.511,00	71.930.012.261,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	25.214.514.811,40	25.147.164.231,40
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.191.076.299,00	0,00
	Jumlah	3.626.093.634.974,18	3.485.996.151.283,92

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 83
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo awal per 31 Desember 2024	3.485.996.151.283,92
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2025	198.928.668.595,00
Reklas dari Persediaan	37.290.000,00
Reklas dari Peralatan dan Mesin	2.166.889.724,00
Reklas dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.449.462.419,00
Reklas dari KDP	50.048.302.887,16
Reklas dari Aset Tetap Lainnya	1.549.223.859,00
Reklas dari Extracom	904.931.379,87
Hibah	72.662.758.580,88
Reklas dari Beban Barjas	645.292.058,00
Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan	1.418.864.701,00
Penilaian dari Rp1 sesuai SK Gub No. 260 Tahun 2025	376.800.000,00
	332.188.484.203,91
Pengurangan:	
Reklas ke Peralatan Mesin	282.799.859,99
Reklas ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.061.138.256,66
Reklas ke KDP	162.390.868.222,00
Reklas ke AT Lainnya--ATR	341.249.837,00
Reklas ke Aset Lain-Lain -usul penghapusan	25.726.795.376,00
Reklas ke Ekstrakom	284.734.053,00
Koreksi berkurang karena temuan Inspektorat	3.414.909,00
	192.091.000.513,65
Saldo akhir per 31 Desember 2025	3.626.093.634.974,18

Penambahan dari hibah sebesar Rp72.662.758.580,88 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 84
Rincian Hibah Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.431.824.802,00	Hibah dari Kementerian Koperasi dan UKM
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	124.020.046,00	Hibah dari BPD DIY
3	Sekretariat Daerah	2.011.737.000,00	Hibah dari BPD DIY
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	954.491.000,00	Hibah dari Komisi Pemberantasan Korupsi



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦝꦠꦶꦱ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦠꦤ꧀

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		17.947.721.160,34	Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum
		51.426.048,00	Hibah dari Kabupaten Kulon Progo
5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	48.141.538.524,54	Hibah dari Komite Sekolah
	JUMLAH	72.662.758.580,88	

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp4.863.165.075.295,22 Rp4.792.597.995.746,42

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.863.165.075.295,22 dapat dirinci sebagai berikut

Tabel 5. 85
Rincian Objek Jalan, Jaringan dan Irigasi

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	3.577.639.521.246,99
2	Bangunan Air	756.244.028.454,00
3	Instalasi	349.059.139.421,57
4	Jaringan	180.222.386.172,66
	Jumlah	4.863.165.075.295,22

Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut

Tabel 5. 86
Rincian Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi pada SKPD

No.	SKPD	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	35.683.795.999,54	33.566.744.257,05
2	Dinas Kesehatan	7.465.823.200,34	7.562.728.200,34
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	4.303.212.268.896,63	4.330.334.046.948,51
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.993.544.000,00	3.993.544.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	124.137.328,00	52.759.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	429.834.000,00	429.834.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.792.186.700,00	6.792.186.700,00
8	Dinas Sosial	3.741.617.252,66	3.741.617.252,66
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.243.893.344,00	1.983.490.200,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	91.775.000,00	91.775.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	128.796.585.250,34	35.294.999.730,34
12	Dinas Perhubungan	9.714.360.666,00	9.765.449.869,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.055.366.189,00	13.055.366.189,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.201.580.942,99	4.344.526.077,99
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	172.868.000,00	172.868.000,00
16	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	13.959.516.943,00	12.336.965.466,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.044.573.591,00	7.044.573.591,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	241.477.054.250,04	238.164.349.625,04
19	Dinas Pariwisata	12.579.079.400,00	12.581.738.400,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.688.646.007,00	12.639.890.007,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.281.780.773,60	7.233.382.089,94
22	Sekretariat Daerah	23.883.765.427,08	23.873.636.677,08
23	Badan Penghubung Daerah	80.600.000,00	80.600.000,00
24	Sekretariat DPRD	736.629.559,00	736.629.559,00
25	Inspektorat	3.534.355.475,00	3.534.355.475,00
26	Paniradya Kaistimewan	69.750.000,00	69.750.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

No.	SKPD	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	36.567.500,00	36.567.500,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	16.016.338.850,00	20.686.509.539,47
29	Badan Kepegawaian Daerah	835.782.413,00	835.782.413,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.561.329.979,00	1.561.329.979,00
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	659.668.358,00	0,00
	Jumlah	4.863.165.075.295,22	4.792.597.995.746,42

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 87
Rincian Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo awal per 31 Desember 2024	4.792.597.995.746,42
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2025	232.553.303.352,00
Reklas dari Peralatan dan Mesin	61.982.185,00
Reklas dari Gedung Bangunan	3.172.947.416,65
Reklas dari KDP	184.030.714.441,00
Reklas dari AT Lainnya-ATR	141.318.596.186,00
Reklas dari Aset Lain-Lain	6.947.789.886,00
Hibah	164.420.696.456,62
Kapitalisasi beban pemeliharaan	486.244.382,00
	732.992.274.305,27
Pengurangan:	
Reklas ke Peralatan Mesin	222.704.989,00
Reklas ke Gedung dan Bangunan	3.449.462.419,00
Reklas ke KDP	227.826.859.206,00
Reklas ke Aset Tetap Lainnya	2.115.840,00
Reklas ke Aset Lain-Lain-Usulan Penghapusan	430.228.996.992,47
Reklas ke Beban Jasa Tagihan Listrik	695.055.310,00
	662.425.194.756,47
Saldo akhir per 31 Desember 2025	4.863.165.075.295,22

Penambahan dari hibah sebesar Rp164.420.696.456,62 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 88
Rincian Hibah Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	820.214.546,50	Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		9.900.000,00	Hibah dari Komite Sekolah
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	51.500.000,00	Hibah dari BPD DIY
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	34.000.000,00	Hibah dari Masyarakat



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	163.505.081.910,12	Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum
	JUMLAH	164.420.696.456,62	

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya Rp226.905.949.120,66 Rp227.838.874.197,64

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp226.905.949.120,66 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 89
Rincian Objek Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	135.400.394.326,97
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	33.347.631.776,23
3	Hewan	1.836.630.574,99
4	Biota Perairan	15.000,00
5	Tanaman	973.543.282,47
6	Barang Koleksi Non Budaya	389.940,00
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	55.347.344.220,00
	Jumlah	226.905.949.120,66

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut

Tabel 5. 90
Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD

No.	SKPD	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	134.063.311.260,98	133.438.951.157,24
2	Dinas Kesehatan	401.580.146,00	401.580.146,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	39.515.812.855,00	40.103.778.916,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	49.650.000,00	49.650.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.612.000,00	24.612.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	221.073.780,00	221.073.780,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	419.145.000,00	419.145.000,00
8	Dinas Sosial	621.035.882,00	630.777.882,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	33.850.500,00	41.369.050,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	40.170.400,00	40.170.400,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.581.845.101,00	4.581.845.101,00
12	Dinas Perhubungan	4.260.000,00	4.260.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	864.327.389,00	864.327.389,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.998.391.664,00	4.304.903.940,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.407.700,00	14.407.700,00
16	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	5.738.058.880,00	5.738.058.880,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	15.129.626.849,20	15.051.109.809,20
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	35.051.000,00	35.051.000,00
19	Dinas Pariwisata	34.774.000,00	44.121.695,01
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.940.220.588,46	2.583.812.515,18
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.596.419.250,00	1.911.167.050,00
22	Sekretariat Daerah	12.192.496.117,00	11.964.784.406,00
23	Badan Penghubung Daerah	1.086.848.650,00	1.110.903.650,00
24	Sekretariat DPRD	863.264.952,01	855.691.352,01
25	Inspektorat	35.345.461,00	35.345.461,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

No.	SKPD	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
26	Paniradya Kaistimewan	595.734.300,00	224.508.200,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	83.983.840,00	83.983.840,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	243.560.204,01	2.311.964.727,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	428.680.433,00	57.454.333,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.048.410.918,00	690.064.818,00
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
Jumlah		226.905.949.120,66	227.838.874.197,64

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 91
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo awal per 31 Desember 2024	227.838.874.197,64
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2025	8.463.832.246,00
Hibah	174.977.970.713,00
Reklas dari Persediaan	106.609.000,00
Reklas dari Peralatan Mesin	678.047.147,33
Reklas dari Gedung Bangunan	341.249.837,00
Reklas dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.115.840,00
Reklas dari Aset Lain-Lain	9.875.752.136,00
Koreksi Nilai Aset atas Barang Bercorak Kesenian yang bernilai nol (tindak lanjut temuan BPK atas LK Tahun 2024) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	764.018.584,00
Hasil Verifikasi- gamelan belum tercatat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.798.930.500,00
Reklas dari Ekstracom	26.273.328,00
	197.034.799.331,33
Pengurangan:	
Reklas ke Persediaan	54.103.226,00
Reklas ke Peralatan Mesin	1.810.054.999,00
Reklas ke Gedung Bangunan	1.549.223.859,00
Reklas ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.163.147.322,00
Reklasifikasi ke ATB Lainnya	20.317.688,00
Reklas ke Aset Lain-Lain	17.894.954.792,31
Reklas ke Properti Investasi Gedung dan Bangunan	2.798.250,00
Reklas ke beban barjas BOS	329.479.600,00
Reklas ke Ekstracom	75.000,00
Reklas ke KDP	34.143.569.672,00
	197.967.724.408,31
Saldo akhir per 31 Desember 2025	226.905.949.120,66

Penambahan dari hibah sebesar Rp174.977.970.713,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 92
Rincian Hibah Aset Tetap Lainnya

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.050.000,00	Hibah dari Masyarakat
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	34.143.569.672,00	Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		99.923.952,00	Hibah dari Badan Pengawas Pemilihan Umum
		140.649.819.089,00	Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum
3	Sekretariat Daerah	83.608.000,00	Hibah dari BPD DIY
	JUMLAH	174.977.970.713,00	

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp226.905.949.120,66 termasuk di dalamnya Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp55.347.344.220,00, yang terdiri dari aset tetap yang digunakan SKPD tetapi milik SKPD lain di lingkungan Pemda DIY sebesar Rp51.073.691.246,00 dan aset tetap yang digunakan oleh SKPD tetapi milik instansi di luar Pemda DIY sebesar Rp4.273.652.974,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 93
Rincian Data Aset Tetap Dalam Renovasi

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	32.988.005.332,00	Gedung Kantor di Maguwo Sleman Yogyakarta gedung milik APBN
			55.754.115,00
			Ruang Rapat Balai PSDA
			4.689.336,00
			Gedung Kantor di Sidomulyo, Sleman, Yogyakarta Gedung Milik Negara
			7.906.995,00
			Garasi Balai PSDA
			14.980.854,00
			Jalan Ngalang - Nguwot - Gading
			23.052.924.674,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.058.886.600,00	Jembatan dekat kantor Balai Pengelolaan Sampah
			79.842.400,00
			Bronjong
			1.243.181.500,00
3	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	11.631.843.636,00	Jalan masuk ke tempat pembuangan sampah
			2.372.135.700,00
			Pembangunan talud pengaman dan pembuatan kolam lindi dengan geomembran
			363.727.000,00
			Rehabilitasi Gedung Woro, Gadri, Bangsal, Wilis, PareaNo.m
			7.607.600.102,00
			Rehabilitasi Masjid Sulthoni Komplek Kepatihan
			1.410.445.512,00
Rehabilitasi Bale Tanjung Komplek Kepatihan			
2.270.469.200,00			
			Gedung Sekda
			223.300.152,00
			Rehabilitasi Bale Kenyo
			5.752.823,00
			Rehabilitasi Ndalem Ageng
			32.334.536,00
			Rehabilitasi Gedhong dan Gandok Wiyotoprojo
15.917.223,00			
Rehabilitasi Gedhong Indische			
			2.440.890,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan	
			Penambahan Alat Bantu (Pengaman) Toilet Wiyoto Projo	7.500.000,00
			Rehabilitasi Bale Pacar	3.924.745,00
			Rehabilitasi Bale Cepoko	52.158.453,00
4	Dinas Komunikasi dan Informasi	826.567.388,00	Media center ruang wartawan milik Biro Umum	826.567.388,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	339.677.000,00	SLB BINA SIWI	339.677.000,00
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.670.636.664,00	Pasar/Pertokoan Galery di YIA	3.670.636.664,00
7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	19.203.000,00	Gedung Sekolah	19.203.000,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.812.524.600,00	Pembangunan Interior dan Eksterior Gedung PDIN (Sekretariat Disperindag DIY)	1.812.524.600,00
	Jumlah	55.347.344.220,00		55.347.344.220,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp244.169.472.141,00 Rp57.074.119.394,00

Saldo KDP per 31 Desember 2025 sebesar Rp244.169.472.141,00 terdapat dalam beberapa SKPD berikut ini:

Tabel 5. 94
Rincian KDP pada SKPD

No.	SKPD	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	336.290.714,00	376.084.714,00
2	Dinas Kesehatan	5.465.289.655,00	2.962.105.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	120.109.825.980,00	44.543.801.822,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	142.005.000,00	142.005.000,00
5	Dinas Sosial	206.463.500,00	230.230.820,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	187.574.600,00	179.014.600,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.746.216.979,00	2.728.512.450,00
8	Dinas Perhubungan	1.323.261.500,00	663.327.500,00
9	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	179.370.210,00	179.370.210,00
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	536.877.799,00	899.762.849,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.700.000,00	9.700.000,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.433.000,00	86.433.000,00
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	63.369.625,00	63.369.625,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	69.700.000,00	69.700.000,00
15	Sekretariat DPRD	111.895.403.679,00	2.208.063.922,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	143.455.700,00	143.455.700,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	401.317.200,00	1.248.065.182,00
18	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	74.200.000,00
19	Badan Pendidikan dan Pelatihan	266.917.000,00	266.917.000,00
	Jumlah	244.169.472.141,00	57.074.119.394,00

Rincian mutasi KDP adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 95
Rincian Mutasi KDP

Saldo awal per 31 Desember 2024	57.074.119.394,00
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2025	0,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Reklas dari Peralatan dan Mesin	5.632.115.134,00
Reklas dari Gedung dan Bangunan	162.390.868.222,00
Reklas dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi	227.826.859.206,00
Reklas dari Aset Lain-Lain	659.934.000,00
Reklas dari AT Lainnya - ATR	34.143.569.672,00
Reklas dari Beban Jasa Konsultansi	735.301.495,00
	431.388.647.729,00
Pengurangan:	
Reklas ke Peralatan dan Mesin	9.200.441.104,84
Reklas ke Gedung dan Bangunan	50.215.391.454,16
Reklas ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	184.030.714.441,00
Reklas ke Aset Lain-Lain - Usulan Penghapusan	846.747.982,00
	244.293.294.982,00
Saldo akhir per 31 Desember 2025	244.169.472.141,00

Saldo KDP per 31 Desember 2025 sebesar Rp244.169.472.141,00 termasuk di dalamnya berupa DED sebesar Rp27.284.568.369,00 dan KDP sebesar Rp216.884.903.772,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 96
Rincian DED dan KDP pada SKPD

No.	SKPD	DED (Rp)	KDP (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	232.447.947,00	103.842.767,00	336.290.714,00
2	Dinas Kesehatan	5.465.289.655,00	0,00	5.465.289.655,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	16.332.905.879,00	103.776.920.101,00	120.109.825.980,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	98.940.000,00	43.065.000,00	142.005.000,00
5	Dinas Sosial	41.937.500,00	164.526.000,00	206.463.500,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	179.014.600,00	8.560.000,00	187.574.600,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.261.077.579,00	485.139.400,00	2.746.216.979,00
8	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	149.900.210,00	29.470.000,00	179.370.210,00
9	Dinas Perhubungan	1.323.261.500,00	0,00	1.323.261.500,00
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	536.877.799,00	0,00	536.877.799,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.433.000,00	0,00	86.433.000,00
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	63.369.625,00	63.369.625,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	69.700.000,00	0,00	69.700.000,00
15	Sekretariat DPRD	0,00	111.895.403.679,00	111.895.403.679,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	143.455.700,00	0,00	143.455.700,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	96.410.000,00	304.907.200,00	401.317.200,00
18	Badan Pendidikan dan Pelatihan	266.917.000,00	0,00	266.917.000,00
	Jumlah	27.284.568.369,00	216.884.903.772,00	244.169.472.141,00

DED adalah dokumen perencanaan teknis rinci berupa gambar kerja, spesifikasi, dan RAB yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan untuk proyek konstruksi, seperti gedung, jalan dan jembatan. DED menjadi pedoman pelaksanaan fisik dan perbaikan bangunan. DED sebesar Rp27.242.630.869,00 merupakan bagian dari KDP yang direncanakan akan dilaksanakan pembangunan konstruksinya di tahun berikutnya.

KDP sebesar Rp216.926.841.272,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦏꦺꦴꦩꦺꦤ꧀ꦭꦶꦩꦺꦴꦏꦺꦴꦏꦠꦫ

- c. Perencanaan pembangunan ruang perawatan khusus/isolasi pada Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha tahun 2020 sebesar Rp11.286.000,00.
- d. Perencanaan pembuatan ruang bagi anak Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) khusus laki laki dan papan nama balai tahun 2020 sebesar Rp21.681.000,00.
- e. Perencanaan rehabilitasi asrama dan shelter pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja tahun 2020 sebesar Rp10.010.000,00.
- f. Perencanaan pembuatan gapuro gerbang praja dan papan balai.pada Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak tahun 2020 sebesar Rp7.161.000,00.
- g. Perencanaan rehabilitasi prasarana Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA) tahun 2020 sebesar Rp44.110.000,00.

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KDP pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp8.560.000,00 merupakan pengadaan tiang penerangan parkir kantor.

6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KDP pada DLHK sebesar Rp485.139.400,00 merupakan Grand Design Pengelolaan Tahura Bunder sebesar Rp466.262.500,00 dan perencanaan konstruksi jaringan air bersih/air minum sebesar Rp18.876.900,00.

7. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

KDP pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebesar Rp29.470.000,00 merupakan perencanaan rehab bangunan gedung Eks KONI.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KDP pada DPMPSTP sebesar Rp9.700.000,00 merupakan perencanaan rehabilitasi gedung kantor Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY.

9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KDP pada DPKP sebesar Rp63.369.625,00 merupakan perencanaan rehab Gedung A dan C.

10. Sekretariat DPRD

KDP pada Sekretariat DPRD sebesar Rp111.895.403.679,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pembayaran untuk pembangunan fisik gedung pada tahun 2022 sebesar Rp1.022.754.000,00 sebanyak tiga transaksi.
- b. Pembayaran pada tahun 2023 untuk belanja jasa konsultasi AMDAL LALIN sebesar Rp809.606.250,00 sebanyak tiga transaksi.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறுவாஉகழவாஉகழவாபுரிதாறுவாஉகழவா

- c. Pembayaran pada tahun 2024 untuk pembangunan fisik bangunan, jasa konsultasi dan belanja pendukung kegiatan pembangunan sebesar Rp375.703.672,00 sebanyak sembilan transaksi.
- d. Pembayaran pada tahun 2025 untuk pembangunan fisik bangunan, jasa konsultasi dan belanja pendukung kegiatan pembangunan sebesar Rp109.687.339.757,00 sebanyak 28 transaksi. Dua transaksi terbesar adalah pembayaran uang muka pekerjaan konstruksi bangunan sebesar Rp44.067.957.750,00 dan pembayaran pekerjaan konstruksi bangunan termin 1 sebesar Rp63.238.821.562,00, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Pernyataan Pekerjaan Nomor 001/BA.PP/BAIS-AB/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025 dengan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 30,16%.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemda DIY, KDP disajikan senilai realisasi pembayaran keuangannya. Berdasarkan Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi, terdapat tambahan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 18,82% dalam kurun waktu 27 Oktober s.d. 28 Desember 2025, sehingga total prestasi pekerjaan pembangunan gedung per 31 Desember 2025 menjadi 48,82% atau sebesar Rp129.740.851.706,09. Selanjutnya, setelah tanggal Neraca, yakni tanggal tanggal 25 Februari 2026 terdapat pembayaran termin II atas paket pekerjaan tersebut. Pembayaran dilakukan setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 55,002%, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Pernyataan Pekerjaan Nomor 002/BA.PP/BAIS-AB/II/2026 tanggal 9 Februari 2026 dengan nilai pembayaran sebesar Rp62.565.905.896,00. Dengan demikian, total nilai pembayaran untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD per 25 Februari 2026 (hingga termin II) adalah sebesar Rp169.872.685.208,00.

11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset

KDP pada BPKA sebesar Rp304.907.200,00 merupakan Penyusunan master plan gedung jalan Tamsis sebesar Rp186.775.000,00 dan Pengadaan Update master plan Gedung sebesar Rp118.132.200,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp244.169.472.141,00 terdiri dari :

1. KDP Tanah sebesar Rp5.945.219.999,00.
2. KDP Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,00.
3. KDP Gedung dan Bangunan sebesar Rp127.364.377.792,00.
4. KDP Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp110.859.874.350,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Ngayogyakarta

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Rp5.813.235.376.434,28 Rp5.459.039.671.383,66

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.813.235.376.434,28 merupakan pengakuan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 97
Rincian Akumulasi Penyusutan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.824.181.337.513,08
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.282.581.894.340,90
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.701.325.279.314,06
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.146.865.266,24
	Jumlah	5.813.235.376.434,28

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan pada SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 98
Rincian Akumulasi Penyusutan pada SKPD

No.	SKPD	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.087.966.399.712,43	951.196.582.203,87
2	Dinas Kesehatan	179.865.105.333,33	170.358.815.584,19
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.598.407.586.117,76	2.525.836.339.225,43
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	17.326.377.742,55	16.484.094.348,72
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.314.764.806,70	3.763.507.053,18
6	Satuan Polisi Pamong Praja	13.710.245.540,77	12.558.640.345,89
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.811.410.002,93	41.829.136.010,27
8	Dinas Sosial	66.840.717.405,41	62.915.387.381,46
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	52.213.937.150,23	50.678.078.211,71
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	13.590.604.902,18	12.533.979.695,46
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	112.234.497.582,30	81.025.476.253,93
12	Dinas Perhubungan	184.127.254.555,54	161.360.156.903,49
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	102.098.184.497,96	92.710.159.998,56
14	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	121.035.165.928,64	110.368.209.731,29
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	45.159.032.673,39	33.659.591.275,51
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.344.978.687,37	6.104.822.741,56
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	88.954.669.480,58	82.088.973.732,30
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	94.041.114.835,76	83.413.488.819,90
19	Dinas Pariwisata	21.322.650.996,45	23.522.480.548,47
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	77.996.224.088,72	71.776.734.747,66
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49.462.208.428,73	41.370.053.519,94
22	Sekretariat Daerah	78.194.846.039,69	78.172.068.837,10
23	Sekretariat DPRD	525.391.150.825,52	523.300.474.332,17
24	Badan Penghubung Daerah	10.552.445.556,85	9.942.439.041,96
25	Inspektorat	12.816.919.505,04	10.441.496.570,49
26	Paniradya Kaistimewan	9.329.873.269,30	7.589.661.835,28
27	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	13.900.104.433,53	14.076.669.272,82
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	151.638.888.148,09	146.436.344.207,30
29	Badan Kepegawaian Daerah	17.278.985.407,03	14.664.027.453,93
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	20.016.744.090,84	18.861.781.499,82
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.292.288.688,66	0,00
	Jumlah	5.813.235.376.434,28	5.459.039.671.383,66



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெய்து அரசு தலைநகர் மாவட்டம்

5.3.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp58.873.749.425,00 Rp51.551.011.285,00

Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp58.873.749.425,00 merupakan nilai tercatat Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5. 100
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

No.	SKPD	Sewa (Rp)	Kerja sama Pemanfaatan (Rp)	Total (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	40.017.859.425,00	7.427.190.000,00	47.445.049.425,00
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.428.700.000,00	0,00	11.428.700.000,00
	Jumlah	51.446.559.425,00	7.427.190.000,00	58.873.749.425,00

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi sewa dan kerja sama pemanfaatan dengan uraian sebagai berikut:

A. Sewa sebesar Rp51.446.559.425,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk sewa per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.446.559.425,00 merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan yang pemanfaatannya dalam bentuk sewa pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5. 101
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa

No.	SKPD	Nilai Aset (Rp)	Keterangan Aset
1	BPKA	40.017.859.425,00	Tanah, Peralatan Mesin dan Bangunan
2	DPKP	11.428.700.000,00	Tanah yang disewa masyarakat
	Jumlah	51.446.559.425,00	

Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa sewa pada BPKA sebesar Rp40.017.859.425,00 terdiri dari sewa tanah sebesar Rp36.586.518.400,00, sewa peralatan mesin sebesar Rp194.618.140,00 dan sewa gedung bangunan sebesar Rp3.236.722.885,00. Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa pada BPKA disajikan pada **Lampiran V**.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada DPKP sebesar Rp11.428.700.000,00 terdiri dari:

1. Sewa tanah oleh PT Taru Martani senilai Rp4.581.500.000,00 di Ngipiksari, Harjobinangun, Pakem, Sleman dengan Surat Perjanjian Kerjasama nomor 3/PERJ/SEKDA/II/2023.
2. Sewa tanah oleh Kelompok Tani Manunggal Sedyo senilai Rp10.000.000,00 di RW 07, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta dengan Surat Perjanjian Kerjasama nomor B/500.6.4/16374/D4.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

B. Kerja sama Pemanfaatan sebesar Rp7.427.190.000,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk kerja sama pemanfaatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.427.190.000,00 merupakan Kerja sama Pemanfaatan aset pada BPKA, berupa Peralatan Mesin dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 102
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga BPKA -Kerja sama Pemanfaatan

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)	NOMOR PERJANJIAN	HARGA SEWA (Rp)	LOKASI	PENYEWA	PERIODE	KETERANGAN
PERALATAN MESIN								
1	Kerja sama Pemanfaatan Peralatan dan Mesin	7.427.190.000,00	12/PERJ/GUB/IX/2025	7.650.000.000,00	Jalan Malioboro Nomor 52 - 58 Yogyakarta	PT Setia Mataram Tritunggal	13/09/2025 s.d 12/09/2026	Mall Malioboro dan Hotel IBIS Malioboro
	TOTAL	7.427.190.000,00						

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp58.873.749.425,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.551.011.285,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.322.738.140,00 karena adanya reklasifikasi dari Tanah sebesar Rp6.847.200.000,00 pada DPKP, reklasifikasi dari extracom sebesar Rp563.000.000,00 dan reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp87.461.860,00 pada BPKA.

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud Rp92.007.650.458,00 Rp86.600.451.350,00

Sesuai dengan Pergub Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah *goodwill*, lisensi dan *franchise*, hak cipta, hak paten, *software*, kajian yang memberikan manfaat jangka panjang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya, ATB dalam pengerjaan, dan ATB lainnya.

Saldo ATB per 31 Desember 2025 sebesar Rp92.007.650.458,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 103
Rincian Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Lisensi dan Franchise	4.307.858.400,00
2	Hak Cipta	785.000.000,00
3	Hak Paten	131.849.000,00
4	Software	2.482.983.087,00
5	Kajian	11.186.483.050,00
6	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	4.038.684.000,00
7	Aset Tidak Berwujud Lainnya	69.074.792.921,00
	Jumlah	92.007.650.458,00

Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

Pengurangan:	
Reklas ke ALL -Usulan penghapusan	2.858.020.680,00
Saldo akhir per 31 Desember 2025	92.007.650.458,00

5.3.1.5.3 Aset Lain-lain

Rp91.575.855.826,76

Rp991.224.697.506,18

Sesuai dengan Pergub DIY Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/yang akan dihapus dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dengan rincian pada SKPD sebagai berikut.

Tabel 5. 106
Rincian Nilai Aset Lain-lain pada SKPD

No.	SKPD	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	8.602.576.569,37	15.823.425.491,41
2	Dinas Kesehatan	1.616.596.393,00	8.970.807.941,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	843.920.301.774,00	929.057.628.427,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	54.850.000,00	111.007.200,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	3.760.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	385.350.210,00	362.850.210,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	540.507.128,00	1.590.987.081,00
8	Dinas Sosial	594.009.000,00	1.152.505.975,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	837.343.358,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.797.000,00	2.797.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.688.750.086,00	4.814.840.370,58
12	Dinas Perhubungan	17.551.387.904,00	3.601.476.121,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.728.273.323,00	8.031.012.475,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	810.967.601,28
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	221.236.799,58
16	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	1.214.262.761,00	702.886.279,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.576.269.601,50	4.946.673.133,50
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	862.612.485,50	1.696.652.635,83
19	Dinas Pariwisata	513.305,00	302.451.806,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.231.336.558,39	2.056.504.575,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	371.687.500,00
22	Sekretariat Daerah	98.423.370,00	937.617.307,00
23	Badan Penghubung Daerah	0,00	257.657.134,00
24	Sekretariat DPRD	15.505.000,00	1.286.566.933,00
25	Inspektorat	6.000.000,00	138.132.500,00
26	Paniradya Kaistimewan	0,00	210.868.270,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	535.740.500,00	862.047.500,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	4.266.010.192,00	1.231.753.806,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	526.398.676,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000,00	304.153.400,00
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79.782.666,00	0,00
	Jumlah	891.575.855.826,76	991.224.697.506,18

Rincian nilai buku Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦺꦝꦸꦏꦸꦭꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦶꦪꦏꦸꦫꦠ

Tabel 5. 107
Rincian Nilai Buku Aset Lain-Lain pada SKPD

No.	SKPD	Aset Lain-Lain (Rp)	Akum Penyusutan Aset Lain-Lain (Rusak + Tdk Digunakan) (Rp)	Nilai Buku Aset Lain-Lain (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	8.602.576.569,37	(6.310.564.572,24)	2.292.011.997,13
2	Dinas Kesehatan	1.616.596.393,00	(661.430.164,44)	955.166.228,56
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	843.920.301.774,00	(100.215.828.198,55)	743.704.473.575,45
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	54.850.000,00	(54.850.000,00)	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	385.350.210,00	(227.108.952,00)	158.241.258,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	540.507.128,00	(156.864.072,96)	383.643.055,04
7	Dinas Sosial	594.009.000,00	(332.940.000,00)	261.069.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.797.000,00	(1.818.050,00)	978.950,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.688.750.086,00	(713.854.094,24)	1.974.895.991,76
10	Dinas Perhubungan	17.551.387.904,00	(4.132.473.853,80)	13.418.914.050,20
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.728.273.323,00	(1.952.755.810,56)	775.517.512,44
12	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1.214.262.761,00	(694.781.883,72)	519.480.877,28
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.576.269.601,50	0,00	3.576.269.601,50
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	862.612.485,50	(326.329.473,38)	536.283.012,12
15	Dinas Pariwisata	513.305,00	0,00	513.305,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.231.336.558,39	(326.216.827,20)	1.905.119.731,19
17	Sekretariat Daerah	98.423.370,00	(60.786.370,00)	37.637.000,00
18	Sekretariat DPRD	15.505.000,00	(15.505.000,00)	0,00
19	Inspektorat	6.000.000,00	(6.000.000,00)	0,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	535.740.500,00	0,00	535.740.500,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	4.266.010.192,00	(1.033.258.571,47)	3.232.751.620,53
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79.782.666,00	(37.717.666,00)	42.065.000,00
	Jumlah	891.575.855.826,76	(117.261.083.560,56)	774.314.772.266,20

Saldo Aset Lain-Lain tahun 2025 sebesar Rp891.367.778.698,76 mengalami penurunan sebesar Rp99.648.841.679,42 atau 10,05% dibanding saldo Aset Lain-Lain tahun 2024 sebesar Rp991.224.697.506,18. Adapun mutasi dari Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 108
Rincian Mutasi Aset Lain-Lain

Saldo awal per 31 Desember 2025	991.224.697.506,18
Penambahan:	
Belanja Modal 2025	0,00
Usulan penghapusan	533.866.883.897,82



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Reklas dari Peralatan Mesin yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	208.077.128,00
	534.074.961.025,82
Pengurangan:	
Reklas ke Tanah	901.988.500,00
Reklas ke Peralatan dan Mesin	920.136.030,00
Reklas ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.947.789.886,00
Reklas ke Aset Tetap Lainnya	895.971.486,00
Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	659.934.000,00
Reklas ke Aset Tidak Berwujud	681.065.000,00
Penghapusan	622.716.917.803,07
	633.723.802.705,24
Saldo akhir per 31 Desember 2025	891.575.855.826,76

5.3.1.5.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp126.394.340.206,61 Rp153.639.527.223,33

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp126.394.340.206,61 merupakan pengakuan Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar Rp2.105.066.646,05, Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerja sama Pemanfaatan sebesar Rp7.028.190.000,00, Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain yang rusak sebesar Rp16.506.824.883,81 dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain yang tidak digunakan pada SKPD sebesar Rp100.754.258.676,75. Uraian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya disajikan pada **Lampiran VII**.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun 2025 sebesar Rp126.394.340.206,61 mengalami penurunan sebesar Rp27.245.187.016,72 atau 17,73% dibanding saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun 2024 sebesar Rp153.639.527.223,33.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut :

Tabel 5. 109
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo awal per 31 Desember 2024	153.639.527.223,33
Penambahan:	
Beban Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2025 (LO)	165.571.931,50
Usul Penghapusan - Akumulasi Penyusutan	238.696.767.963,45
Reklas dari Ekstracom	7.627.604,17
Koreksi reklas dari PM -Akum Penyusutan ALL	116.864.072,96
	238.986.831.572,08
Pengurangan:	
Penghapusan	259.510.948.351,64
Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan	21.403.209,84
Reklas ke Peralatan Mesin dari Kemitraan	87.461.860,00
Pembatalan Usulan Penghapusan Peralatan Mesin	6.612.205.167,32
	266.232.018.588,80
Saldo akhir per 31 Desember 2025	126.394.340.206,61



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

5.3.1.5.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya Rp19.548.771.153,94 Rp20.224.325.926,94

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.548.771.153,94 merupakan Uang Jaminan Kesungguhan sebesar Rp789.050.325,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp9.994.291.440,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp8.765.429.388,18 yang dikelola oleh DPUPESDM.

Jaminan tersebut dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. DPUPESDM yang terdapat di beberapa bank yaitu BPD DIY Cabang Utama, BNI Trikora, BRI Cik Ditiro, BPD Wates dan Bank Pasar. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian. Adapun rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebagai berikut.

Tabel 5. 110 Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Uang Jaminan)

URAIAN	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
JAMINAN KESUNGGUHAN			
BPD DIY Cabang Utama	637.617.000,00	99.179.036,00	736.796.036,00
BNI Trikora	52.254.289,00	0,00	52.254.289,00
	689.871.289,00	99.179.036,00	789.050.325,00
JAMINAN REKLAMASI			
Bank Pasar	539.600.000,00	517.962.214,00	1.057.562.214,00
BRI Cik Ditiro	4.207.753.147,76	0,00	4.207.753.147,76
BNI Trikora	4.728.976.079,00	0,00	4.728.976.079,00
	9.476.329.226,76	517.962.214,00	9.994.291.440,76
JAMINAN PASCA TAMBANG			
Bank Pasar	573.805.675,00	0,00	573.805.675,00
BNI Trikora	4.971.730.428,00	0,00	4.971.730.428,00
BRI Cik Ditiro	3.165.402.063,18	0,00	3.165.402.063,18
BPD Wates	40.100.000,00	14.391.222,00	54.491.222,00
	8.751.038.166,18	14.391.222,00	8.765.429.388,18
JUMLAH	18.917.238.681,94	631.532.472,00	19.548.771.153,94

5.3.1.5.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility Rp0,00 Rp171.809.000,00

Saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan dana DBH/DAU yang telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF yang dibatasi penggunaannya. Pencatatan ini berdasarkan pada Surat Edaran Nomor. 900.1.14.1/7481/Keuda tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Rekening TDF.

Saldo Dana Transfer TDF sebesar Rp0,00 karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum ada Keputusan Menteri Keuangan tentang besaran Dana Transfer TDF bagian Pemda DIY.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

5.3.1.6 Properti Investasi Rp132.304.042.221,16 Rp136.193.984.070,90

Sesuai PSAP Nomor 17 dijelaskan bahwa Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

- Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp132.304.042.221,16 meliputi Properti Investasi Tanah yang terdiri dari enam bidang Tanah senilai Rp58.988.583.440,00, Properti Investasi Bangunan Gedung yang terdiri dari empat unit Bangunan Gedung senilai Rp111.237.854.850,00 dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung senilai Rp37.922.396.068,84 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 111
Rincian Properti Investasi**

NO.	JENIS PROPERTI INVESTASI		NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Tanah	Tanah untuk Bangunan Mall	332.000.000,00	Kerja sama Pemanfaatan (Kemitraan)
		Tanah untuk Bangunan Toko	3.115.200.000,00	Kerja sama Pemanfaatan (Kemitraan)
		Tanah untuk Bangunan Mall	70.800.000,00	Kerja sama Pemanfaatan (Kemitraan)
		Tanah kawasan JEC Barat	20.414.200.000,00	Sewa (Kemitraan)
		Jalan tengah JEC	9.338.999.440,00	Sewa (Aset Tetap)
		Tanah Kawasan JEC Timur	25.717.384.000,00	Sewa (Aset Tetap)
		58.988.583.440,00		
2	Bangunan Gedung	Bangunan Plaza Malioboro	23.191.729.000,00	Kerja sama Pemanfaatan (Kemitraan)
		Bangunan Malyabhara Hotel	32.619.600.000,00	Kerja sama Pemanfaatan (Kemitraan)
		Bangunan gedung disewa PT AMI	1.033.385.000,00	Sewa (Kemitraan)
		Gedung Jogja Expo Center (JEC)	54.393.140.850,00	Sewa
		Jumlah	111.237.854.850,00	
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(37.922.396.068,84)		
	Total	132.304.042.221,16		

5.3.1.6.1 Properti Investasi Tanah Rp58.988.583.440,00 Rp58.988.583.440,00

Saldo Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp58.988.583.440,00 tidak ada perubahan dibandingkan saldo tahun 2024.

5.3.1.6.2 Properti Investasi Bangunan Gedung Rp111.237.854.850,00 Rp111.235.056.600,00

Saldo Properti Investasi Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 sebesar Rp111.237.854.850,00 mengalami kenaikan dibanding saldo tahun 2024 sebesar Rp2.798.250,00 karena reklasifikasi dari Aset Tetap Renovasi Gedung.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Wilayah Istimewa Yogyakarta

5.3.1.6.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Rp37.922.396.068,84 Rp34.029.655.969,10

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp37.922.396.068,84 merupakan pengakuan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan. Terdapat kenaikan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.892.740.099,74 atau 11,44% dibanding tahun 2024.

5.3.2 Kewajiban Rp31.246.132.162,66 Rp70.785.503.907,15

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp31.246.132.162,66 merupakan Kewajiban Jangka Pendek dengan penjelasan sebagai berikut.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp31.246.132.162,66 Rp70.785.503.907,15

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp31.246.132.162,66 merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp19.548.771.153,94, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp7.817.697.545,08, dan Utang Belanja sebesar Rp3.879.663.463,64 dengan rincian sebagai berikut.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Rp19.548.771.153,94 Rp20.224.325.926,94

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.548.771.153,94 merupakan Utang Jaminan pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM, terdiri dari Jaminan Kesungguhan sebesar Rp789.050.325,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp9.994.291.440,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp8.765.429.388,18.

Jaminan tersebut dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama perusahaan penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika perusahaan penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp675.554.773,00 dibandingkan saldo Utang PFK per 31 Desember 2024, karena adanya pencairan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp610.560.001,00, pencairan Jaminan Kesungguhan sebesar Rp34.590.895,00, pencairan Jaminan Reklamasi sebesar Rp827.029.892,00 dan kenaikan uang jaminan yang terkait dengan ijin pertambangan sebesar Rp796.626.015,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகர்தா

Kenaikan uang jaminan yang terkait dengan ijin pertambangan sebesar Rp796.626.015,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 112
Rincian Kenaikan Uang Jaminan

No.	Jenis Jaminan	Pembukaan Rekening Baru (Rp)	Bunga dan Administrasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	JAMPAS	258.540.000,00	201.123.617,00	459.663.617,00
2	JAMREK	58.340.000,00	267.500.207,00	325.840.207,00
3	JAMSUNG	5.000.000,00	6.122.191,00	11.122.191,00
	Jumlah	321.880.000,00	474.746.015,00	796.626.015,00

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka Rp7.817.697.545,08 Rp4.339.391.944,88

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.817.697.545,08 merupakan penerimaan pembayaran dari pihak lain kepada Pemda DIY terkait dengan pemakaian aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31 Desember 2025 belum dikonsumsi/dimanfaatkan.

Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5. 113
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada SKPD

No.	SKPD	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	86.969.790,52	177.555.962,80
2	Dinas Pariwisata	326.288.675,33	478.091.318,00
3	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	227.184.306,57	64.256.386,86
4	Dinas Kesehatan	23.959.458,05	22.721.311,48
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	650.000,00	250.000,00
6	Dinas Koperasi dan UKM	13.712.328,77	0,00
7	Dinas Komunikasi dan Informasi	188.222.465,76	0,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	6.659.258.645,33	3.596.516.965,74
9	Dinas Kebudayaan	284.328.587,08	0,00
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.123.287,67	0,00
	Jumlah	7.817.697.545,08	4.339.391.944,88

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.817.697.545,08 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka untuk Retribusi Daerah sebesar Rp932.241.897,69 dan Pendapatan Diterima Dimuka untuk Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp6.885.455.647,38 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 114
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka untuk Retribusi Daerah dan LLPAD yang Sah

No.	SKPD	PDD RETRIBUSI (Rp)	PDD LLPAD yang Sah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perhubungan	86.969.790,52	0,00	86.969.790,52
2	Dinas Pariwisata	326.288.675,33	0,00	326.288.675,33
3	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	227.184.306,57	0,00	227.184.306,57
4	Dinas Kesehatan	23.959.458,04	0,00	23.959.458,05
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	650.000,00	0,00	650.000,00
6	Dinas Koperasi dan UKM	13.712.328,77	0,00	13.712.328,77
7	Dinas Komunikasi dan Informasi	188.222.465,76	0,00	188.222.465,76



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Ngayogyakarta

No.	SKPD	PDD RETRIBUSI (Rp)	PDD LLPAD yang Sah (Rp)	Jumlah (Rp)
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	65.254.872,69	6.594.003.772,64	6.659.258.645,33
9	Dinas Kebudayaan	0,00	284.328.587,08	284.328.587,08
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	7.123.287,67	7.123.287,67
	Jumlah	932.241.897,69	6.885.455.647,38	7.817.697.545,08

1. Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perhubungan sebesar Rp86.969.790,52 merupakan penerimaan atas Sewa Kios Terminal Wates Kulon Progo, Sewa Koperasi, Sewa Kantin, Sewa Kios Terminal Jombor, Sewa Lahan Beskalan, dan Sewa Lahan Kawasan Ekonomi Park and Ride Bandara ADS, yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum menjadi hak Dinas Perhubungan. Untuk Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Lahan Kawasan Ekonomi Park and Ride Bandara ADS sesuai perjanjian harga sewa Objek Perjanjian adalah Rp1.000,00 per m2 per hari dengan ukuran 10,5 m2 yang dibayarkan per bulan.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perhubungan sebagai berikut.:

Tabel 5. 115
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perhubungan

Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
Sewa Koperasi Dinas Perhubungan			
09-09-2025 s.d 09-01-2026	1.000.000,00	01-01-2026 s.d 09-01-2026	73.170,73
Sewa Kantin Dinas Perhubungan			
22-12-2025 s.d 21-01-2026	150.000,00	01-01-2026 s.d 21-01-2026	101.612,90
Sewa Kios Terminal Wates			
01-12-2025 s.d 30-11-2026	92.988.000,00	01-01-2026 s.d 30-11-2026	85.090.389,02
01-12-2025 s.d 28-02-2026	567.000,00	01-01-2026 s.d 28-02-2026	371.700,00
Sewa Kios Terminal Jombor			
21-07-2025 s.d 20-01-2026	956.760,00	01-01-2026 s.d 20-01-2026	103.995,65
21-08-2025 s.d 20-01-2026	797.300,00	01-01-2026 s.d 20-01-2026	104.222,22
Sewa Lahan Beskalan			
14-03-2025 s.d 13-03-2026	4.051.500,00	01-01-2026 s.d 13-03-2026	799.200,00
Sewa Lahan Kawasan Ekonomi Park and Ride Bandara ADS			
01-01-2026 s.d 31-01-2026	0,00	01-01-2026 s.d 31-01-2026	325.500,00
Jumlah	100.510.560,00		86.969.790,52

2. Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Pariwisata sebesar Rp326.288.675,33 merupakan penerimaan sewa dari PT.TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko untuk sewa tanah di Kawasan Situs Ratu Boko, Prambanan dan dari PT IBS untuk sewa Tower BTS namun sampai dengan per 31 Desember 2025 belum menjadi hak Dinas Pariwisata DIY dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 5. 116

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Pariwisata

Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
19-02-2022 s.d 19-02-2026	60.000.000,00	01-01-2026 s.d 19 -02-2026	8.196.721,31
01-01-2024 s.d 31-12-2028	530.250.000,00	01-01-2026 s.d 31-12-2028	318.091.954,02
Jumlah	590.250.000,00		326.288.675,33

- Pendapatan Diterima Dimuka pada pada Sekretariat Daerah (Biro Umum) sebesar Rp227.184.306,57 merupakan sewa basement untuk server/penguat sinyal namun sampai dengan per 31 Desember 2025 belum menjadi hak Biro Umum. Sesuai perjanjian kerjasama, nilai sewa basement untuk server/penguat sinyal sebesar Rp238.500.000,00 dengan periode sewa dari tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan 9 November 2028.
- Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Kesehatan (RS Jiwa Grhasia) sebesar Rp23.959.458,05 merupakan penerimaan sewa Pemanfaatan Aset Gedung Layanan dan Penunjang, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 117

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Kesehatan

Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
24-10-2025 s.d 25-10-2026	28.000.000,00	01-01-2026 s.d 25-10-2026	22.797.814,21
01-08-2025 s.d. 31-07-2026	2.000.000,00	01-01-2026 s.d 31-07-2026	1.161.643,84
Jumlah	30.000.000,00		23.959.458,05

- Pendapatan Diterima Dimuka pada DLHK sebesar Rp650.000,00 merupakan penerimaan sewa kantin untuk masa sewa bulan Januari 2026 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa.
- Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp13.712.328,77 merupakan penerimaan sewa ruangan untuk ATM Bank Mandiri namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa. Nilai sewa ruangan untuk ATM Bank Mandiri sebesar Rp22.000.000,00 dengan periode sewa dari tanggal 1 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2027.
- Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp188.222.465,76 merupakan penerimaan sewa Metro Connection Kapasitas 1 Gbps namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 5. 118

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Komunikasi dan Informatika

Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
26 -07-2025 s.d 25 -07-2026	36.000.000,00	01-01-2026 s.d 25 -07-2026	20.317.808,22
27 -08- 2025 s.d. 26-08-2026	97.920.000,00	01-01-2026 s.d 26-08-2026	63.849.205,48
02 -10-2025 s.d. 01-10- 2026	18.000.000,00	01-01-2026 s.d 01-10- 2026	13.512.328,77
02 -10-2025 s.d. 01 -10-2026	34.800.000,00	01-01-2026 s.d. 01 -10-2026	26.123.835,62
17 -10-2025 s.d. 16 -10- 2026	81.360.000,00	01-01-2026 s.d 16 -10- 2026	64.419.287,67
Jumlah	268.080.000,00		188.222.465,76

8. Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKA sebesar Rp6.659.258.645,33 merupakan penerimaan sewa barang milik daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan, dan pemakaian ruangan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa. Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKA Induk sebesar Rp6.623.413.817,86 (Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah), KPPD Bantul sebesar Rp3.498.083,24 (Pendapatan Retribusi Daerah) dan KPPD Kulon Progo sebesar Rp32.346.744,23 (Pendapatan Retribusi Daerah). Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKA disajikan pada **Lampiran VIII**.
9. Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp284.328.587,08 merupakan penerimaan sewa barang milik daerah kepada Yayasan Nur Iman Mlangi berupa tanah milik daerah yang terletak di Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa. Nilai sewa tanah sebesar Rp296.000.000,00 dengan periode sewa lima tahun dari tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan 21 Oktober 2030.
10. Pendapatan Diterima Dimuka pada DPKP sebesar Rp7.123.287,67 merupakan penerimaan sewa barang milik daerah kepada Kelompok Tani Manunggal Sedyo berupa tanah milik daerah yang terletak di RW 07, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa. Nilai sewa tanah sebesar Rp10.000.000,00 dengan periode sewa dari tanggal 18 September 2025 sampai dengan 17 September 2026.

5.3.2.1.3 Utang Belanja Rp3.879.663.463,64 Rp46.221.786.035,33

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.879.663.463,64 merupakan beban Pemda DIY atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2025 tetapi belum dibayar oleh Pemda DIY terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp431.922.235,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.424.931.439,64 dan Utang Belanja Bagi Hasil sebesar Rp22.809.789,00. Rincian Utang Belanja pada SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦠ

Tabel 5. 119
Rincian Utang Belanja pada SKPD

No.	SKPD	Nilai Per 31-12-2025 (Rp)	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	801.940.197,00	295.370.631,00
2	Dinas Kesehatan	827.065.351,64	717.024.260,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	271.479.887,00	206.518.442,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	14.267.853,00	13.231.339,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.534.262,00	14.087.795,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	11.204.670,00	20.639.970,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44.606.618,00	39.266.057,00
8	Dinas Sosial	70.438.462,00	79.836.474,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59.606.729,00	54.017.662,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	24.325.895,00	25.288.650,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75.361.403,00	69.582.188,00
12	Dinas Perhubungan	47.285.365,00	48.858.627,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.751.810,00	19.484.838,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	211.281.538,00	137.292.359,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.566.503,00	6.972.122,00
16	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	206.338.065,00	215.108.011,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	165.221.889,00	150.946.084,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	111.923.311,00	107.884.423,00
19	Dinas Pariwisata	11.611.510,00	45.889.213,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	95.591.599,00	99.221.050,33
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	63.461.160,00	63.950.990,00
22	Sekretariat Daerah	246.084.044,00	247.475.118,00
23	Badan Penghubung Daerah	13.639.740,00	19.165.176,00
24	Sekretariat DPRD	80.648.983,00	82.623.813,00
25	Inspektorat	26.096.676,00	22.798.962,00
26	Paniradya Kaistimewan	0,00	0,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	386.419,00	402.085,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	238.404.042,00	43.349.261.333,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	52.294.371,00	37.279.641,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	44.395.111,00	32.308.722,00
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.850.000,00	0,00
Jumlah		3.879.663.463,64	46.221.786.035,33

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.879.663.463,64 dirinci menurut Obyek Utang belanja pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 120
Rincian Utang Belanja Menurut Objek Utang Belanja

No.	SKPD	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang Jasa (Rp)	Utang Belanja Bagi Hasil (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	801.940.197,00	0,00	734.004.885,00
2	Dinas Kesehatan	424.902.235,00	402.163.116,64	0,00	827.065.351,64
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	0,00	271.479.887,00	0,00	271.479.887,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0,00	14.267.853,00	0,00	14.267.853,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	11.534.262,00	0,00	11.534.262,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	11.204.670,00	0,00	11.204.670,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	44.606.618,00	0,00	44.606.618,00
8	Dinas Sosial	0,00	70.438.462,00	0,00	70.438.462,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	59.606.729,00	0,00	59.606.729,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta

No.	SKPD	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang Jasa (Rp)	Utang Belanja Bagi Hasil (Rp)	Jumlah (Rp)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	0,00	24.325.895,00	0,00	24.325.895,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	75.361.403,00	0,00	75.361.403,00
12	Dinas Perhubungan	0,00	47.285.365,00	0,00	47.285.365,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	19.751.810,00	0,00	19.751.810,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	211.281.538,00	0,00	211.281.538,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	7.566.503,00	0,00	7.566.503,00
16	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	0,00	206.338.065,00	0,00	206.338.065,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	165.221.889,00	0,00	165.221.889,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	111.923.311,00	0,00	111.923.311,00
19	Dinas Pariwisata	0,00	11.611.510,00	0,00	11.611.510,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	95.591.599,00	0,00	95.591.599,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	63.461.160,00	0,00	63.461.160,00
22	Sekretariat Daerah	0,00	246.084.044,00	0,00	246.084.044,00
23	Badan Penghubung Daerah	0,00	13.639.740,00	0,00	13.639.740,00
24	Sekretariat DPRD	0,00	80.648.983,00	0,00	80.648.983,00
25	Inspektorat	0,00	26.096.676,00	0,00	26.096.676,00
26	Paniradya Kaistimewan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	386.419,00	0,00	386.419,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	0,00	215.594.253,00	22.809.789,00	238.404.042,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	7.020.000,00	45.274.371,00	0,00	52.294.371,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	44.395.111,00	0,00	44.395.111,00
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	25.850.000,00	0,00	25.850.000,00
	Jumlah	431.922.235,00	3.424.931.439,64	22.809.789,00	3.879.663.463,64

A. Utang Belanja Pegawai

Saldo utang Belanja Pegawai sebesar Rp431.922.235,00 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp424.902.235,00 dan Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp7.020.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 121
Rincian Utang Belanja Pegawai Menurut Rincian Objek Utang Belanja

No	SKPD	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (Rp)	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.731.521,00	423.170.714,00	424.902.235,00
2	Badan Kepegawaian Daerah	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00
	Jumlah	8.751.521,00	423.170.714,00	431.922.235,00

1. Utang Belanja Pegawai pada Dinas Kesehatan sebesar Rp424.902.235,00 terdapat pada RS Jiwa Grhasia sebesar Rp423.170.714,00 yang merupakan utang jasa layanan bulan Desember yang perhitungannya baru selesai pada tanggal 31 Desember 2025 dan baru dibayarkan pada



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரஃ டிஸ்திமேவா யோக்யாகர்டா

bulan Januari 2026, dan pada RS Paru Respira sebesar Rp1.731.521,00 merupakan kekurangan pembayaran gaji kenaikan pangkat/golongan, dimana Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar (SPP/SPM) gaji sudah dibuat terlebih dahulu (paling lambat tanggal 15 untuk gaji bulan berikutnya) sedangkan Surat Keputusan (SK) terlambat turun.

2. Utang Belanja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp7.020.000,00 merupakan kekurangan pembayaran tunjangan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan Desember 2025 untuk tiga belas PNS karena pada saat SK pelantikan turun gaji bulan Desember sudah diajukan pencairannya ke BPKA.

B. Utang Belanja Barang Jasa

Saldo Utang Belanja Barang Jasa sebesar Rp3.424.931.439,64 terdiri dari:

1. Utang Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp172.754.482,64.
2. Utang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, Kesenian dan Kebudayaan sebesar Rp41.250.000,00.
3. Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah sebesar Rp1.561.059,00.
4. Utang Belanja Jasa Telepon sebesar Rp38.598.178,00.
5. Utang Belanja Jasa Air sebesar Rp92.363.266,00.
6. Utang Belanja Jasa Tagihan Listrik sebesar Rp2.934.913.867,00.
7. Utang Belanja Jasa Internet sebesar Rp32.566.029,00.
8. Utang Belanja Jasa *Medical Check Up* dan Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp21.789.246,00.
9. Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp67.935.312,00
10. Utang Belanja Sewa Peralatan Mesin sebesar Rp2.200.000,00.
11. Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.000.000,00.

Rincian Utang Belanja Barang Jasa pada masing-masing SKPD disajikan dalam **Lampiran IX**

C. Utang Belanja Bagi Hasil

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2025 sebesar Rp22.809.789,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah kabupaten/kota di DIY. Utang tersebut timbul sebagai konsekuensi adanya penerimaan Pajak Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Pencatatan Utang Belanja Bagi Hasil sesuai SK Gubernur DIY Nomor 26 Tahun 2026 tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar atas Kelebihan Penerimaan Pajak Daerah Pemda DIY Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota TA 2025.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 122
Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Uraian	Kab. Bantul (Rp)	Kab. Gunung Kidul (Rp)	Kab. Kulon Progo (Rp)	Kab. Sleman (Rp)	Kota Yogyakarta (Rp)	Total (Rp)
- PKB	1.320.146,00	848.675,00	481.007,00	1.060.503,00	1.485.458,00	5.195.789,00
- BBN-KB						
- PBB-KB						
- PAP	1.056.840,00	1.056.840,00	8.785.674,00	5.657.806,00	1.056.840,00	17.614.000,00
- Pajak Rokok	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.376.986,00	1.905.515,00	9.266.681,00	6.718.309,00	2.542.298,00	22.809.789,00

5.3.3 Ekuitas Rp14.665.758.626.150,70 Rp14.045.595.713.196,00

Saldo Ekuitas Pemda DIY sebesar Rp14.665.758.626.150,70 merupakan kekayaan bersih Pemda DIY yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemda DIY pada tanggal 31 Desember 2025. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus.defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.665.758.626.150,70 dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.045.595.713.196,00 mengalami kenaikan sebesar Rp620.162.912.954,67 atau 4,42%

5.4 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Struktur penyajian LO tahun 2025 dan 2024 secara prinsip mengikuti PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akan tetapi secara bagan akun standar juga mendasari pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. LO menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsinya dan beban yang timbul untuk menjalankan tugas dan fungsinya.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.1 Pendapatan – LO

Rp5.653.043.126.549,64

Rp6.072.732.381.987,25

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Realisasi Pendapatan - LO tahun 2025 sebesar Rp5.653.043.126.549,64 mengalami penurunan sebesar Rp419.689.255.437,61 atau sebesar 6,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian Pendapatan-LO disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 123

Rincian Pendapatan - LO

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	PAD-LO	1.973.909.771.172,26	2.426.318.805.662,52	(452.409.034.490,26)	(18,65)
2	PENDAPATAN TRANSFER- LO	3.022.127.853.161,00	3.508.682.988.702,00	(486.555.135.541,00)	(13,87)
3	LLPD YANG SAH-LO	657.005.502.216,38	137.730.587.622,73	519.274.914.593,65	377,02
	JUMLAH	5.653.043.126.549,64	6.072.732.381.987,25	(419.689.255.437,61)	(6,91)

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.1.1 PAD – LO

Rp1.973.909.771.172,26

Rp2.426.318.805.662,52

Realisasi PAD - LO tahun 2025 sebesar Rp1.973.909.771.172,26 mengalami penurunan sebesar Rp452.409.034.490,26 atau sebesar 18,65% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian PAD-LO disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 124

Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Pajak Daerah-LO	1.541.673.476.325,25	2.157.532.293.945,00	(615.858.817.619,75)	(28,54)
2	Retribusi Daerah- LO	73.168.120.578,22	75.672.674.116,21	(2.504.553.537,99)	(3,31)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO	274.150.105.850,78	66.372.413.217,67	207.777.692.633,11	313,05
4	LLPAD yang Sah- LO	84.918.068.418,01	126.741.424.383,64	(41.823.355.965,63)	(33,00)
	JUMLAH	1.973.909.771.172,26	2.426.318.805.662,52	(452.409.034.490,26)	(18,65)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO Rp1.541.673.476.325,25 Rp2.157.532.293.945,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2025 sebesar Rp1.541.673.476.325,25 mengalami penurunan sebesar Rp615.858.817.619,75 atau sebesar 28,54% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan Pajak Daerah – LO berada secara fungsional di BPKA. Selama tahun 2025, tidak terdapat piutang pajak tahun berkenaan sehingga penurunan Pendapatan Pajak Daerah – LO berasal dari realisasi anggaran tahun berkenaan. Penjelasan terkait penurunan realisasi tersebut terdapa pada pada CaLK nomor 5.1.1.1.1 – Pajak Daerah. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 125
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
1	PKB - LO	666.057.670.000,00	1.041.662.985.900,00	(375.605.315.900,00)	(36,06)
2	BBNKB - LO	201.880.407.600,00	453.957.069.400,00	(252.076.661.800,00)	(55,53)
3	PBBKB- LO	377.603.830.093,00	372.113.724.291,00	5.490.105.802,00	1,48
4	Pajak Air Permukaan - LO	922.269.636,00	806.104.996,00	116.164.640,00	14,41
5	Pajak Rokok - LO	294.042.213.023,00	288.962.709.258,00	5.079.503.765,00	1,76
6	Pajak Alat Berat-LO	58.256.600,00	29.700.100,00	28.556.500,00	96,15
7	Opsen Pajak MBLB-LO	1.108.829.373,25	0,00	1.108.829.373,25	-
	JUMLAH	1.541.673.476.325,25	2.157.532.293.945,00	(615.858.817.619,75)	(28,54)

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi PKB – LO tahun 2025 sebesar Rp666.057.670.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp375.605.315.900,00 atau sebesar 36,06% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 126
Rincian PKB – LO

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
1	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	23.394.277.800,00	38.683.847.600,00	(15.289.569.800,00)	(39,52)
2	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	44.908.666.700,00	69.952.909.100,00	(25.044.242.400,00)	(35,80)
3	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	327.076.247.775,00	513.718.294.350,00	(186.642.046.575,00)	(36,33)
4	PKB-Mobil Bus-Microbus-LO	4.869.044.600,00	6.652.048.100,00	(1.783.003.500,00)	(26,80)
5	PKB-Mobil Bus-Bus-LO	787.557.600,00	1.377.016.500,00	(589.458.900,00)	(42,81)
6	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	34.950.089.400,00	53.412.613.150,00	(18.462.523.750,00)	(34,57)
7	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	26.979.491.300,00	43.615.068.500,00	(16.635.577.200,00)	(38,14)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
8	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	203.092.294.825,00	314.251.188.600,00	(111.158.893.775,00)	(35,37)
	JUMLAH	666.057.670.000,00	1.041.662.985.900,00	(375.605.315.900,00)	(36,06)

2. Realisasi BBNKB – LO tahun 2025 sebesar Rp201.880.407.600,00 mengalami mengalami penurunan sebesar Rp252.076.661.800,00 atau sebesar 55,53% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian BBNKB – LO tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 127
Rincian BBNKB – LO

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO	1.891.782.400,00	6.037.989.000,00	(4.146.206.600,00)	(68,67)
2	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	10.050.474.300,00	27.524.065.000,00	(17.473.590.700,00)	(63,48)
3	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	85.829.525.200,00	219.318.554.600,00	(133.489.029.400,00)	(60,87)
4	BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO	4.197.923.400,00	6.545.601.300,00	(2.347.677.900,00)	(35,87)
5	BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO	660.570.100,00	2.138.120.000,00	(1.477.549.900,00)	(69,11)
6	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	10.084.673.600,00	17.769.035.900,00	(7.684.362.300,00)	(43,25)
7	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	5.473.181.000,00	12.003.918.600,00	(6.530.737.600,00)	(54,41)
8	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	83.692.277.600,00	162.619.785.000,00	(78.927.507.400,00)	(48,53)
	JUMLAH	201.880.407.600,00	453.957.069.400,00	(252.076.661.800,00)	(55,53)

3. Realisasi PBBKB- LO tahun 2025 sebesar Rp377.603.830.093,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.490.105.802,00 atau sebesar 1,48% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian PBBKB – LO tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. 128
Rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)- LO

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
1	PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	312.568.890.066,00	311.123.801.824,00	1.445.088.242,00	0,46
2	PBBKB Bahan Bakar Solar-LO	65.034.940.027,00	60.989.922.467,00	4.045.017.560,00	6,63
	JUMLAH	377.603.830.093,00	372.113.724.291,00	5.490.105.802,00	1,48



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

4. Realisasi Pajak Air Permukaan-LO tahun 2025 sebesar Rp922.269.636,00 mengalami kenaikan sebesar Rp116.164.640,00 atau sebesar 14,41% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5. 129
Pajak Air Permukaan -LO

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Pajak Air Permukaan-LO	922.269.636,00	806.104.996,00	116.164.640,00	14,41
	JUMLAH	922.269.636,00	806.104.996,00	116.164.640,00	14,41

5. Realisasi Pajak Rokok-LO tahun 2025 sebesar Rp294.042.213.023,00. Pajak Rokok-LO mengalami kenaikan sebesar Rp5.079.503.765,00 atau sebesar 1,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5. 130
Pajak Rokok -LO

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Pajak Rokok-LO	294.042.213.023,00	288.962.709.258,00	5.079.503.765,00	1,76
	JUMLAH	294.042.213.023,00	288.962.709.258,00	5.079.503.765,00	1,76

6. Realisasi Pajak Alat Berat-LO tahun 2025 sebesar Rp58.256.600,00. Pajak Pajak Alat Berat-LO mengalami kenaikan sebesar Rp28.556.500,00 atau sebesar 96,15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada objek pajak baru yang terdata dari hasil pendataan dan yang membayar pajaknya.

Tabel 5. 131
Pajak Alat Berat-LO

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Pajak Alat Berat-LO	58.256.600,00	29.700.100,00	28.556.500,00	96,15
	JUMLAH	58.256.600,00	29.700.100,00	28.556.500,00	96,15

7. Realisasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO tahun 2025 sebesar Rp.1.108.829.373,25. Komponen ini baru diselenggarakan pada tahun 2025 sesuai dengan amanat diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang mulai berlaku efektif 5 Januari 2025, beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur adanya opsen PKB dan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Ngayogyakarta

BBNKB yang disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota hingga 66% dari pajak terutang secara langsung.

Tabel 5. 132
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
1	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	1.108.829.373,25	0,00	1.108.829.373,25	-
	JUMLAH	1.108.829.373,25	0,00	1.108.829.373,25	-

Tabel 5. 133
Selisih Pajak Daerah

URAIAN	LO	LRA	SELISIH
Pajak Daerah	1.541.673.476.325,25	1.541.673.476.325,25	0,00

Tidak terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Rp73.168.120.578,22 Rp75.672.674.116,21

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp73.168.120.578,22 mengalami penurunan sebesar Rp2.504.553.537,99 atau sebesar 3,31% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 134
Pendapatan Retribusi Daerah-LO

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum - LO	44.207.346.568,25	47.383.445.640,00	(3.176.099.071,75)	(6,70)
2	Retribusi Jasa Usaha - LO	28.806.154.009,97	28.124.618.476,21	681.535.533,76	2,42
3	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	154.620.000,00	164.610.000,00	(9.990.000,00)	(6,07)
	JUMLAH	73.168.120.578,22	75.672.674.116,21	(2.504.553.537,99)	(3,31)

Penurunan Retribusi Daerah - LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 135
Pendapatan Retribusi Daerah - LO

NO	URAIAN	LRA TAHUN 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum - LO	45.722.829.575,25	102.455.733,00	1.617.938.740,00	44.207.346.568,25	47.383.445.640,00	(3.176.099.071,75)	(6,70)
2	Retribusi Jasa Usaha - LO	33.144.969.527,60	508.866.979,58	4.847.682.497,21	28.806.154.009,97	28.124.618.476,21	681.535.533,76	2,42



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Ngayogyakarta

NO	URAIAN	LRA TAHUN 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
3	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	154.620.000,00	0,00	0,00	154.620.000,00	164.610.000,00	(9.990.000,00)	(6,07)
	JUMLAH	79.022.419.102,85	611.322.712,58	6.465.621.237,21	73.168.120.578,22	75.672.674.116,21	(2.504.553.537,99)	(3,31)

Penurunan Retribusi Daerah - LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Mutasi Tambah sebesar Rp611.322.712,58
 - Penyesuaian piutang pada RSJ Grhasia sebesar Rp102.455.733,00
 - Penyesuaian pendapatan diterima dimuka pada DLHK, BPKA, Dishub, Biro UP, Dispar, Diskop, Diskominfo, RSJ Grhasia sebesar Rp376.443.339,58
 - Koreksi karena jasa layanan UPJ Mesin, UPJ Otomotif, dan UPJ Sifur per 31 Desember 2025 belum dibayar oleh pihak ketiga, pada BLPT-Disdikpora sebesar Rp126.388.640,00
 - Koreksi karena penjualan hasil kuliner kepada Hotel Satoria pada bulan Desember 2025 sebesar Rp5.435.000 dibayar pada tanggal 12 Februari 2026 dan Hotel Ibis sebesar Rp600.000 dibayar pada tanggal 22 Januari 2026, pada SMKN 1 Sewon-Dikpora
- Mutasi Kurang sebesar Rp6.465.621.237,21
 - Penyesuaian piutang dan penyisihan piutang pada RSP Respira sebesar Rp1.617.938.740,00
 - Penyesuaian pendapatan diterima dimuka pada Dispar, Biro UP, Diskop, BPKA, Diskominfo, DLHK, Dishub, RSJ Grhasia, sebesar Rp768.254.663,21
 - Penyesuaian harga pokok penjualan pada DPKP, DLHK, Disdikpora, Disperindag sebesar Rp4.079.427.834,00

Tabel 5. 136
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum-LO	44.207.346.568,25	47.383.445.640,00	(3.176.099.071,75)	(6,70)
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	39.933.049.188,25	42.295.818.116,00	(2.362.768.927,75)	(5,59)
	- Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	4.274.297.380,00	5.087.627.524,00	(813.330.144,00)	(15,99)
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	28.806.154.009,97	28.124.618.476,21	681.535.533,76	2,42
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	118.611.345,76	128.752.984,27	(10.141.638,51)	(7,88)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
	- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO	2.905.140.946,00	1.899.454.200,00	1.005.686.746,00	52,95
	- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	1.734.978.488,24	1.256.851.176,94	478.127.311,30	38,04
	- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	2.896.265.000,00	2.851.142.500,00	45.122.500,00	1,58
	- Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	164.340.800,00	150.641.400,00	13.699.400,00	9,09
	- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	8.004.134.500,00	8.524.013.200,00	(519.878.700,00)	(6,10)
	- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	6.731.878.512,60	6.942.336.964,00	(210.458.451,40)	(3,03)
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	6.250.804.417,37	6.371.426.051,00	(120.621.633,63)	(1,89)
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	154.620.000,00	164.610.000,00	(9.990.000,00)	(6,07)
	- Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	154.620.000,00	164.610.000,00	(9.990.000,00)	(6,07)
	JUMLAH	73.168.120.578,22	75.672.674.116,21	(2.504.553.537,99)	(3,31)

Tabel 5. 137
Selisih Retribusi Daerah

URAIAN	LO	LRA	SELISIH
Retribusi Daerah-LO	73.168.120.578,22	79.022.419.102,85	(5.854.298.524,63)

Terdapat perbedaan realisasi antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA sebesar (Rp5.854.298.524,63) dengan penjelasan sebagai berikut.

- Selisih Piutang Retribusi tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.699.736.228,00
- Selisih Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi tahun 2025 dan 2024 sebesar (Rp395.011.323,63)
- Penyesuaian HPP BLUD pada Disdikpora sebesar (Rp2.142.193.614,00)
- Reklasifikasi dari Piutang LLPAD yang Sah sebesar (Rp4.079.595.595,00)
- Penyesuaian HPP semen dan susu sapi pada DPKP sebesar (Rp1.300.897.000,00)
- Penyesuaian HPP minyak kayu putih pada DLHK sebesar (Rp628.837.220,00)
- Penyesuaian HPP barang tepat guna pada Disperindag sebesar (Rp7.500.000,00)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாறுவாஉகயவாஉகயவாசிபுரவாபுரவாபுரவா

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang **Rp274.150.105.850,78** **Rp66.372.413.217,67**

Dipisahkan – LO

Dipisahkan – LO

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2025 sebesar Rp274.150.105.850,78 mengalami kenaikan sebesar Rp207.777.692.633,11 atau 313,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan penerimaan deviden atas investasi dengan metode ekuitas. Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Tabel 5. 138
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	260.728.895.445,36	89.966.607.995,68	170.762.287.449,68	189,81
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	13.421.210.405,42	(23.594.194.778,01)	37.015.405.183,43	(156,88)
	JUMLAH	274.150.105.850,78	66.372.413.217,67	207.777.692.633,11	313,05



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கருவாடக வாகன கருவாடக விபரம்

Tabel 5. 139
Perhitungan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan-LO

No	Perusahaan Daerah	% Kepemilikan	Deviden Pemda DIY	Laba/Rugi BUMD	Laba/Rugi BUMD Tahun 2025 Bagian Pemda DIY	Penyesuaian Nilai Ekuitas	Investasi bernilai negatif	Piutang Deviden	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 6+7+8+9
	METODE EKUITAS								
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO								260.728.895.445,36
1	PT. BPD DIY	53,840%	121.074.128.133,00	338.331.848.504,00	182.157.867.234,55	63.676.887.653,26	0,00	0,00	245.834.754.887,81
2	BUKP	Per masing2 BUKP (dari 2013 tidak berubah)	3.447.849.913,91	875.981.062,00	1.134.195.655,43	(588.189.656,25)	14.189.956.079,15	158.178.479,21	14.894.140.557,54
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO								13.421.210.405,42
3	Perumda Air Bersih Tirtatama DIY	100,000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT AMI	99,970%	2.719.068.430,00	7.649.434.411,00	7.647.139.580,68	(1.979.193.133,11)	0,00	0,00	5.667.946.447,57
5	PT Taru Martani	99,990%	0,00	10.447.740.539,00	10.446.695.764,95	(1,00)	0,00	0,00	10.446.695.763,95
6	Perumda Air Bersih Tirtatama	100,000%	0,00	(2.693.431.806,09)	(2.693.431.806,09)	0,00	0,00	0,00	(2.693.431.806,09)
	JUMLAH		127.241.046.476,91	354.611.572.709,91	198.692.466.429,52	61.109.504.862,91	14.189.956.079,16	158.178.479,22	274.150.105.850,78



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிகளும்புளகாண்டகம்புளகாண்டகம்புளகாண்டகம்புளகாண்டகம்

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	45.374.513,00	36.788.726,00	8.585.787,00	23,34
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	348.191.800,00	0,00	348.191.800,00	-
11	Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.618.243.529,65	5.932.008.055,92	(2.313.764.526,27)	(39,00)
12	Pendapatan dari BLUD-LO	9.689.144.965,55	11.488.778.371,05	(1.799.633.405,50)	(15,66)
13	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	24.453.000,00	0,00	24.453.000,00	-
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	480.696.000,00	319.812.000,00	160.884.000,00	50,31
	JUMLAH	84.918.068.418,01	126.741.424.383,64	(41.823.355.965,63)	(33,00)

Penurunan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LO tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦤꦼꦢꦼꦫꦢꦤꦼꦫꦢꦶꦱꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦠ

Tabel 5. 142
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

NO	URAIAN	LRA TAHUN 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Lain-lain PAD yang Sah-LO	91.910.665.258,58	3.890.372.848,89	10.882.969.689,46	84.918.068.418,01	126.741.424.383,64	(41.823.355.965,63)	(33,00)

- Mutasi Tambah sebesar Rp3.890.372.848,89 berasal dari :
 - Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka pada :
 - ✓ BPKA sebesar Rp3.542.162.006,84
 - ✓ Dispar sebesar Rp159.999.842,05
 - ✓ Dishub sebesar Rp100.000.000,00
 - Penyesuaian Piutang LLPAD yang Sah pada RSJ Grhasia sebesar Rp88.211.000,00
- Mutasi Kurang sebesar Rp10.882.969.689,46 berasal dari :
 - Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka pada :
 - ✓ BPKA sebesar Rp6.594.003.772,64
 - ✓ Dispar sebesar Rp478,07
 - ✓ Disbud sebesar Rp284.328.587,08
 - ✓ DPKP sebesar Rp7.123.287,67
 - Penyesuaian Surplus/Defisit Penjualan Aset pada BPKA sebesar Rp2.719.973.024,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦼꦂꦠꦏꦼꦢꦼꦂꦏꦼꦠꦶꦩꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

- Penyesuaian HPP BLUD pada Disdikpora sebesar Rp1.056.415.54,00
- Penyesuaian Piutang pada RSJ Grhasia sebesar Rp211.013.000,00 dan RSP Respira sebesar Rp4.312.000,00
- Penyesuaian Piutang dan Penyisihan Piutang TGR pada BPKA sebesar Rp1.000.000,00
- Penyesuaian Dana Bergulir pada BPKA sebesar Rp4.800.000,00

Tabel 5. 143
Selisih Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

NO	URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Lain-lain PAD yang Sah-LO	84.918.068.418,01	91.910.665.258,58	(6.992.596.840,57)

Terdapat perbedaan realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LO dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA sebesar (Rp6.992.596.840,57) dengan penjelasan sebagai berikut

- Selisih Piutang LLPAD yang Sah-LO tahun 2025 dengan 2024 sebesar (Rp4.246.601.595,00)
- Selisih PDD LLPAD yang Sah-LO tahun 2025 dengan 2024 sebesar (Rp3.083.294.276,57)
- Penyesuaian HPP BLUD pada Disdikpora sebesar (Rp1.056.415.540,00)
- Penyesuaian Piutang dan Penyisihan Piutang pada Dinkes sebesar Rp4.079.595.595,00
- Penyesuaian Surplus/Defisit penjualan aset pada BPKA sebesar (Rp2.719.973.024,00)
- Penyesuaian saldo awal denda dana bergulir pada BPKA sebesar Rp15.000.000,00
- Penyesuaian piutang pajak dan penyisihan piutang pajak pada BPKA sebesar Rp19.092.000,00

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO Rp3.022.127.853.161,00 Rp3.508.682.988.702,00

Realisasi Pendapatan Transfer - LO tahun 2025 sebesar Rp3.022.127.853.161,00, mengalami penurunan sebesar Rp486.555.135.541,00 atau 13,87% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦠ

Tabel 5. 144
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

NO	URAIAN	LRA TAHUN 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	3.021.318.735.530,00	0,00	171.809.000,00	3.021.146.926.530,00	3.507.699.183.472,00	(486.552.256.942,00)	(13,87)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	980.926.631,00	0,00	0,00	980.926.631,00	983.805.230,00	(2.878.599,00)	(0,29)
	JUMLAH	3.022.299.662.161,00	0,00	171.809.000,00	3.022.127.853.161,00	3.508.682.988.702,00	(486.555.135.541,00)	(13,87)

Penurunan Realisasi Pendapatan Transfer – LO tahun 2025 berasal dari realisasi Transfer Non Tunai melalui skema *Treasury Deposit Facility* (TDF) TA 2024 yang baru masuk ke RKUD TA 2025



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

വികസിതമാക്കാനും നവീകരിക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Rp3.021.146.926.530,00 Rp3.507.699.183.472,00

Pusat – LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tahun 2025 sebesar Rp3.021.146.926.530,00, mengalami penurunan sebesar Rp486.552.256.942,00 atau sebesar 13,87% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 145
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	2.036.560.290.164,00	2.099.451.814.040,00	(62.891.523.876,00)	(3,00)
	Dana Perimbangan-LO	0,00	2.099.451.814.040,00	(2.099.451.814.040,00)	(100,00)
	DBH-LO	104.287.042.600,00	0,00	104.287.042.600,00	-
	DAU-LO	1.345.942.438.538,00	0,00	1.345.942.438.538,00	-
	DAK-LO	586.330.809.026,00	0,00	586.330.809.026,00	-
2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	984.586.636.366,00	1.408.247.369.432,00	(423.660.733.066,00)	(30,08)
	- Dana Keistimewaan- LO	976.134.243.366,00	1.396.157.452.432,00	(420.023.209.066,00)	(30,08)
	- Insentif Fiskal-LO	8.452.393.000,00	12.089.917.000,00	(3.637.524.000,00)	(30,09)
	JUMLAH	3.021.146.926.530,00	3.507.699.183.472,00	(486.552.256.942,00)	(13,87)

Tabel 5. 146
Selisih Pendapatan Transfer-LO

NO	URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	3.021.146.926.530,00	3.021.318.735.530,00	(171.809.000,00)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	980.926.631,00	980.926.631,00	0,00
	JUMLAH	3.022.127.853.161,00	3.022.299.662.161,00	(171.809.000,00)

Terdapat perbedaan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA sebesar (Rp171.809.000,00) dengan penjelasan sebagai berikut.

Selisih tersebut berasal dari realisasi Transfer Non Tunai melalui skema *Treasury Deposit Facility* (TDF) TA 2024 yang baru masuk ke RKUD TA 2025. Secara akrual, nilai tersebut tidak lagi diakui sebagai pendapatan dalam LO tahun ini karena telah dicatat sebagai pendapatan pada periode sebelumnya saat hak atas dana tersebut terbentuk. Sebaliknya,



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமகூலா உருவா உருவா மூலா உருவா உருவா உருவா

pada LRA yang berbasis kas, nilai tersebut tetap dilaporkan sebagai pendapatan karena arus kasnya baru secara nyata diterima di kas daerah pada tahun anggaran berjalan. Hal ini mencerminkan perbedaan waktu pengakuan antara pendapatan secara akrual dengan realisasi penerimaan secara kas.

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Rp980.926.631,00 Rp983.805.230,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp980.926.631,00., mengalami penurunan sebesar Rp2.878.599,00 atau sebesar 0,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan BKK dari pemerintah kabupaten/kota. Bantuan Keuangan tersebut berasal dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta dengan peruntukan *sharing* Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemda DIY, Pemkab Bantul, Pemkab Sleman, dan Pemkot Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan Nomor 12/PK/Bt/2020 dan Nomor 30/PK.KDH/a/2020 dan Nomor 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat. Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan sesuai berita acara kontribusi (*sharing*) biaya pengelolaan air limbah (IPAL) terpusat TA 2025 sebesar Rp980.926.631,00 terdiri dari bantuan keuangan dari Pemkab Bantul sebesar Rp121.360.717,00, Pemkab Sleman sebesar Rp140.717.534,00, dan Pemkot Yogyakarta sebesar Rp718.848.380,00.

**Tabel 5. 147
Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO**

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
1	Bantuan Keuangan	980.926.631,00	983.805.230,00	(2.878.599,00)	(0,29)
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	980.926.631,00	983.805.230,00	(2.878.599,00)	(0,29)
	- Kota Yogyakarta	718.848.380,00	718.832.590,00	15.790,00	0,00
	- Kab. Sleman	140.717.534,00	144.625.610,00	(3.908.076,00)	(2,70)
	- Kab. Bantul	121.360.717,00	120.347.030,00	1.013.687,00	0,84

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO Rp657.005.502.216,38 Rp137.730.587.622,73

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO tahun 2025 sebesar Rp657.005.502.216,38 mengalami kenaikan sebesar Rp519.274.914.593,65 atau sebesar 377,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Istimewa yang berkeadilan sosial, mempunyai pusat pemerintahan di Yogyakarta

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO Rp657.005.502.216,38 Rp137.730.587.622,73

Realiasi Pendapatan Hibah - LO tahun 2025 sebesar Rp657.005.502.216,38 mengalami kenaikan sebesar Rp519.274.914.593,65 atau sebesar 377,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 148
Rincian Pendapatan Hibah-LO**

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	561.881.437.720,00	48.741.503.411,93	513.139.934.308,07	1.052,78
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	466.274.905,00	95.000.000,00	371.274.905,00	390,82
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	6.776.557.269,80	29.347.072.846,80	(22.570.515.577,00)	(76,91)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	87.803.932.321,58	59.545.721.364,00	28.258.210.957,58	47,46
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	77.300.000,00	1.290.000,00	76.010.000,00	5.892,25
	JUMLAH	657.005.502.216,38	137.730.587.622,73	519.274.914.593,65	377,02

Penjelasan Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barang disampaikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp561.881.437.720,00 melalui :
 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (*block grant*) sebesar Rp3.230.603.000,00 kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar
 - Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi sebesar Rp792.750.000,00
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp911.766.041,00
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.720.758.000,00 berupa Blanko KTP dari Kementerian Dalam Negeri RI
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp10.569.757.703,00 yang berasal dari :
 - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II DIY berupa :
 - ✓ *Area Traffic Control System (ATCS)* sebesar Rp 9.863.614.000,00
 - ✓ *Water Barrier, Traffic Cone* sebesar Rp 48.550.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாதுவாஉருவாஉருவாதுவாஉருவாஉருவாஉருவா

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp50.454.737.147,75 merupakan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO
- Dinas Kesehatan sebesar Rp13.298.887.843,83 merupakan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO
- Rumah Sakit Jiwa Grhasia sebesar Rp15.450.000,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.107.790.700,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya (Perahu dan Mesin, Tenda Pengungsi, Tenda Keluarga, Paket Sembako, Makanan Siap Saji, Hyegene Kit, Velbed, Terpal Biru 4x6, Matras, Selimut, Kasur Lipat, Light Tower, Pompa Alkon, Chainsaw, Geobag, Tenda Dome)
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp85.019.678,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO berasal dari :
 - BPD DIY berupa *Transport And Storage Equipment For Liquid*, Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air, Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya, Dan Jaringan Listrik Lainnya sebesar Rp60.000.000,00
 - PT Mega Perkakas Abadi berupa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Fondasi sebesar Rp25.019.678,00
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebesar Rp150.000.000,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO dari BPD DIY berupa :
 - Meja Tennis sebesar Rp2.050.000,00
 - Soundsystem sebesar Rp13.400.000,00
 - Kursi Besi/Metal sebesar Rp7.529.954,00
 - Rehabilitasi GOR sebesar Rp124.020.046.000,00
 - Perlengkapan Olahraga sebesar Rp3.000.000,00
- Biro Umum Dan Protokol sebesar Rp2.095.345.000,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO berupa pergola, taman dan bangunan tempat sampah dari BPD DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦫꦶꦠꦏꦠꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦶꦩꦺꦮꦠꦤ꧀ꦚꦺꦒꦪꦏꦂꦠ

- Sekretariat DPRD sebesar Rp17.250.000,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO berupa 4 unit radio sebesar Rp11.400.000,00 dan 2 unit radio sebesar Rp5.850.000,00 dari Radio Republik Indonesia
- Badan Pengelola Keuangan Dan Aset sebesar Rp18.579.451.952,00 yang terdiri dari :
 - Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO sebesar Rp11.276.152.952,00
 - Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO sebesar Rp7.303.299.000,00

Pendapatan Hibah-LO terdiri dari 2 bentuk hibah yaitu :

- Pendapatan Hibah Barang sebesar Rp649.547.603.216,38 yang tersebar di SKPD di lingkungan Pemda DIY
 - Pendapatan Hibah Uang sebesar Rp7.380.599.000 yang ada pada BPKA dengan informasi sebagai berikut :
 - Pendapatan Hibah dari Dealer Otomotif sebesar Rp3.033.651.000,00
 - Pendapatan Hibah dari Main Dealer sebesar Rp21.900.000,00
 - Pendapatan Hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp4.247.748.000,00
 - Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis – LO sebesar Rp77.300.000,00
- Akun Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO digunakan untuk mencatat pembayaran piutang dan pengurangan penyisihan piutang tuntutan ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 ; penerimaan kembali dana bergulir Rp71.500.000,00 dan penerimaan pembayaran bunga dan denda dana bergulir sebesar Rp4.800.000,00

Tabel 5. 149
Selisih Pendapatan Hibah - LO

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Pendapatan Hibah	656.999.166.216,38	7.303.299.000,00	649.695.867.216,38

Terdapat perbedaan realisasi Pendapatan Hibah - LO dengan Pendapatan Hibah - LRA sebesar Rp649.695.867.216,38 dengan penjelasan sebagai berikut.

Selisih tersebut berasal dari pendapatan hibah dalam bentuk uang sebesar Rp7.303.299.000,00 ; Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis – LO sebesar Rp77.300.000,00 (digunakan untuk mencatat pembayaran piutang dan pengurangan penyisihan piutang



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦏ꧀ꦢꦺꦴꦫꦃꦶꦠꦺꦩꦮꦏꦺꦴꦏꦂꦠ

tuntutan ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00; penerimaan kembali dana bergulir Rp71.500.000,00 dan penerimaan pembayaran bunga dan denda dana bergulir sebesar Rp4.800.000,00); dan pendapatan hibah dalam bentuk barang sebesar Rp649.547.603.216,38

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.2 Beban

Rp4.569.155.215.450,23

Rp5.610.813.380.933,16

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak. Realisasi Beban tahun 2025 sebesar Rp4.569.155.215.450,23 mengalami penurunan sebesar Rp1.041.658.165.482,93 atau sebesar 18,57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 150
Rincian Beban

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
BEBAN OPERASI	3.268.374.609.229,80	3.682.388.239.499,54	(414.013.630.269,74)	(11,24)
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	476.736.491.988,09	455.508.600.416,80	21.227.891.571,29	4,66
BEBAN TRANSFER	820.638.737.232,34	1.472.896.541.016,82	(652.257.803.784,48)	(44,28)
BEBAN TIDAK TERDUGA	3.405.377.000,00	20.000.000,00	3.385.377.000,00	16.926,89
JUMLAH	4.569.155.215.450,23	5.610.813.380.933,16	(1.041.658.165.482,93)	(18,57)

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.2.1 Beban Operasi

Rp3.268.374.609.229,80

Rp3.682.388.239.499,54

Beban Operasi meliputi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban penyisihan piutang. Beban Operasi tahun 2025 terealisasi sebesar Rp3.268.374.609.229,80 mengalami penurunan sebesar Rp414.013.630.269,74 atau 11,24% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 151
Rincian Beban Operasi – LO

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Pegawai	1.647.571.498.307,00	1.650.498.776.567,00	(2.927.278.260,00)	(0,18)
2	Beban Barang dan Jasa	1.093.715.162.434,06	1.273.341.369.470,21	(179.626.207.036,15)	(14,11)
3	Beban Subsidi	95.355.621.534,00	75.368.890.530,00	19.986.731.004,00	26,52
4	Beban Hibah	401.433.078.442,80	652.312.293.535,00	(250.879.215.092,20)	(38,46)
5	Beban Bantuan Sosial	30.275.654.958,00	29.662.372.000,00	613.282.958,00	2,07
6	Beban Penyisihan Piutang	23.593.553,94	1.204.537.397,33	(1.180.943.843,39)	(98,04)
	JUMLAH	3.268.374.609.229,80	3.682.388.239.499,54	(414.013.630.269,74)	(11,24)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦠ

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Rp1.647.571.498.307,00

Rp1.650.498.776.567,00

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Beban Pegawai tahun 2025 sebesar Rp1.647.571.498.307,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.927.278.260,00 atau 0,18% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 152
Rincian Beban Pegawai

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	849.904.072.225,00	855.264.789.188,00	(5.360.716.963,00)	(0,63)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	738.610.699.622,00	438.639.253.066,00	299.971.446.556,00	68,39
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.657.757.705,00	309.386.282.906,00	(297.728.525.201,00)	(96,23)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	44.200.930.070,00	42.122.865.113,00	2.078.064.957,00	4,93
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	238.353.685,00	236.039.583,00	2.314.102,00	0,98
7	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.959.685.000,00	3.317.000.000,00	(357.315.000,00)	(10,77)
8	Beban Pegawai BLUD	0,00	1.532.546.711,00	(1.532.546.711,00)	(100,00)
	JUMLAH	1.647.571.498.307,00	1.650.498.776.567,00	(2.927.278.260,00)	(0,18)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦸꦥꦺꦃꦠꦺꦫꦢꦶꦱꦠꦺꦩꦪꦮꦴꦲꦔꦏꦂꦠꦏ

Rincian Penurunan Beban Pegawai disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 5. 153
Penurunan Beban Pegawai

URAIAN	LRA TAHUN 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
2	3	4	5	6	7	8	9
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	849.832.901.716,00	74.464.561,00	3.294.052,00	849.904.072.225,00	855.264.789.188,00	(5.360.716.963,00)	(0,63)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	738.318.613.137,00	1.383.599.324,00	1.091.512.839,00	738.610.699.622,00	438.639.253.066,00	299.971.446.556,00	68,39
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	11.664.462.705,00	6.705.000,00	11.657.757.705,00	309.386.282.906,00	(297.728.525.201,00)	(96,23)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	44.200.930.070,00	0,00	0,00	44.200.930.070,00	42.122.865.113,00	2.078.064.957,00	4,93
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	238.353.685,00	0,00	0,00	238.353.685,00	236.039.583,00	2.314.102,00	0,98
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.959.685.000,00	0,00	0,00	2.959.685.000,00	3.317.000.000,00	(357.315.000,00)	(10,77)
Beban Pegawai BLUD	12.043.508.001,00	0,00	12.043.508.001,00	0,00	1.532.546.711,00	(1.532.546.711,00)	(100,00)
JUMLAH	1.647.593.991.609,00	13.122.526.590,00	13.145.019.892,00	1.647.571.498.307,00	1.650.498.776.567,00	(2.927.278.260,00)	(0,18)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமகதுடிவக கதுவக கதுவக கதுவக கதுவக கதுவக

Realisasi Beban Pegawai sebesar Rp1.647.571.498.307,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah sebesar Rp13.122.526.590,00 berasal dari

- Reklasifikasi beban BLUD pada Dinkes sebesar Rp65.713.040,00
- Pengakuan utang belanja pegawai pada RSP Respira sebesar Rp1.731.521,00 dan BKD sebesar Rp7.020.000,00
- Reklasifikasi Beban Tambahan Penghasilan pada Dinkes sebesar Rp13.048.062.029,00

Mutasi Kurang sebesar Rp13.145.019.892,00 berasal dari

- Pembayaran utang belanja pegawai RSP Respira sebesar Rp3.294.052,00
- Reklasifikasi Beban Tambahan Penghasilan pada Disdikpora sebesar Rp1.091.512.839,00
- Reklasifikasi Beban Pegawai BLUD pada Dinkes sebesar Rp12.043.508.001,00

Tabel 5. 154
Selisih Realisasi Pegawai pada LO dengan LRA

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Pegawai	1.647.571.498.307,00	1.647.593.991.609,00	(22.493.302,00)

Terdapat perbedaan realisasi antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai sebesar (Rp22.493.302,00) sebagaimana tabel berikut.

Perbedaan realisasi sebagaimana tabel di atas disajikan sebagai berikut.

- Dinas Kesehatan sebesar (Rp29.513.302,00) merupakan
 - Selisih utang belanja pegawai akhir tahun dengan awal tahun sebesar Rp36.713.302,00
 - Pembayaran utang belanja pegawai tahun sebelumnya (Rp7.200.000,00)
- Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp7.020.000,00 merupakan kekurangan tunjangan fungsional PNS bulan Desember 2025 sebanyak 13 orang yang tidak bisa dibayarkan pada tahun 2025 karena pada saat SK pelantikan turun, gaji bulan Desember sudah diajukan pencairannya kepada BPKA sehingga tidak memungkinkan untuk mencairkan tunjangan fungsional tersebut.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦧꦶꦲꦶꦏꦸꦁꦮꦏꦸꦁꦏꦸꦁꦠꦶꦩꦼꦮꦶꦪꦏꦿꦠꦶ

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp1.093.715.162.434,06 Rp1.273.341.369.470,21

Beban Barang dan Jasa merupakan merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode tahun berkenaan yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset, dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Beban Barang dan Jasa terdiri dari : Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BOSP dan Beban Barang dan Jasa BLUD. Realisasi Beban Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp1.093.715.162.434,06 mengalami penurunan sebesar Rp179.626.207.036,15 atau sebesar 14,11% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 155
Rincian Beban Barang dan Jasa**

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Barang	278.119.382.661,71	410.368.913.089,59	(132.249.530.427,88)	(32,23)
2	Beban Jasa	549.216.997.769,32	593.628.529.673,00	(44.411.531.903,68)	(7,48)
3	Beban Pemeliharaan	81.466.348.541,03	61.893.619.043,66	19.572.729.497,37	31,62
4	Beban Perjalanan Dinas	49.396.042.512,00	107.968.945.722,00	(58.572.903.210,00)	(54,25)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	79.270.656.335,00	40.882.754.829,00	38.387.901.506,00	93,90
6	Beban Barang dan Jasa BOS	55.121.004.174,00	0,00	55.121.004.174,00	-
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	0,00	58.598.607.112,96	(58.598.607.112,96)	(100,00)
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	1.124.730.441,00	0,00	1.124.730.441,00	-
	JUMLAH	1.093.715.162.434,06	1.273.341.369.470,21	(179.626.207.036,15)	(14,11)

Rincian Beban Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban Barang tahun 2025 sebesar Rp275.367.635.045,57 mengalami penurunan sebesar Rp132.249.530.427,88 atau 32,23% dengan rincian sebagai berikut



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

بإسناد الله عز وجل

Tabel 5. 156
Rincian Beban Barang

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Barang Pakai Habis	276.562.677.092,69	409.036.092.192,29	(132.473.415.099,60)	(32,39)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	106.033.012,00	33.269.648,00	72.763.364,00	218,71
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.450.672.557,02	1.299.551.249,30	151.121.307,72	11,63
	JUMLAH	278.119.382.661,71	410.368.913.089,59	(132.249.530.427,88)	(32,23)

2. Beban Jasa tahun 2025 terealisasi sebesar Rp549.216.997.769,32 mengalami penurunan sebesar (Rp44.411.531.903,68) atau (7,48%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 157
Rincian Beban Jasa

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	432.567.256.009,85	469.103.875.315,87	(36.536.619.306,02)	(7,79)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	45.507.766.430,08	44.948.910.395,71	558.856.034,37	1,24
3	Beban Sewa Tanah	2.710.252.223,07	2.643.157.922,24	67.094.300,83	2,54
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	23.127.055.141,00	26.594.270.275,00	(3.467.215.134,00)	(13,04)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	13.128.211.713,32	16.381.821.924,18	(3.253.610.210,86)	(19,86)
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	194.960.400,00	(194.960.400,00)	(100,00)
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	2.697.260.542,00	4.031.796.300,00	(1.334.535.758,00)	(33,10)
8	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	1.536.000,00	(1.536.000,00)	(100,00)
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	6.934.225.615,00	8.398.058.368,00	(1.463.832.753,00)	(17,43)
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	17.433.018.680,00	16.911.927.970,00	521.090.710,00	3,08
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	8.053.500,00	(8.053.500,00)	(100,00)
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	521.125.000,00	365.750.000,00	155.375.000,00	42,48
13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.590.826.415,00	4.044.411.302,00	546.415.113,00	13,51
	JUMLAH	549.216.997.769,32	593.628.529.673,00	(44.411.531.903,68)	(7,48)

3. Beban Pemeliharaan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp81.466.348.541,03 mengalami kenaikan sebesar Rp19.572.729.497,37 atau 31,62% dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாணுமட மூடம் மூடம் மூடம் மூடம் மூடம் மூடம்

Tabel 5. 158
Rincian Beban Pemeliharaan

NO	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	1.830.538.428,00	668.464.273,00	1.162.074.155,00	173,84
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.176.081.485,00	17.051.693.581,59	1.124.387.903,41	6,59
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.186.942.499,03	4.907.102.707,37	13.279.839.791,66	270,62
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.166.952.774,00	38.070.764.658,70	4.096.188.115,30	10,76
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	957.489.225,00	1.195.593.823,00	(238.104.598,00)	(19,92)
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	148.344.130,00	0,00	148.344.130,00	-
	JUMLAH	81.466.348.541,03	61.893.619.043,66	19.572.729.497,37	31,62

4. Beban Perjalanan Dinas tahun 2025 terealisasi sebesar Rp49.396.042.512,00 mengalami penurunan sebesar Rp58.572.903.210,00 atau 54,25% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 159
Rincian Beban Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.278.141.912,00	97.478.432.831,00	(48.200.290.919,00)	(49,45)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	117.900.600,00	10.490.512.891,00	(10.372.612.291,00)	(98,88)
	JUMLAH	49.396.042.512,00	107.968.945.722,00	(58.572.903.210,00)	(54,25)

5. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 terealisasi sebesar Rp79.270.656.335,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.387.901.506,00 atau 93,90% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 160
Rincian Beban Barang

NO	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	78.982.020.000,00	40.519.363.400,00	38.462.656.600,00	94,92
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	288.636.335,00	363.391.429,00	(74.755.094,00)	(20,57)
	JUMLAH	79.270.656.335,00	40.882.754.829,00	38.387.901.506,00	93,90

6. Beban Barang dan Jasa BOS tahun 2025 terealisasi sebesar Rp55.121.004.174,00 merupakan Beban Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦺꦁꦠꦤ꧀ꦢꦶꦫꦺꦤꦶꦠꦼꦩꦠꦶꦪꦮꦪꦏꦿꦠꦂ

7. Beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.124.730.441,00 merupakan Beban Barang dan Jasa BLUD pada Balai Latihan Pendidikan Teknik sebesar Rp1.123.268.441,00 dan SMKN 2 Depok sebesar Rp1.462.000,000

**Tabel 5. 161
Selisih Barang dan Jasa**

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Barang dan Jasa	1.093.715.162.434,06	1.078.988.412.794,18	14.726.749.639,88

Terdapat perbedaan realisasi antara Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp14.726.749.639,88 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 162
Selisih Barang dan Jasa per SKPD**

NO	NAMA SKPD	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	383.503.975.507,61	380.453.102.835,00	3.050.872.672,61
2	Dinas Kesehatan	122.920.361.724,14	102.958.971.947,13	19.961.389.777,01
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	72.004.585.371,99	72.223.163.388,00	(218.578.016,01)
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	8.561.476.980,00	15.245.729.508,00	(6.684.252.528,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13.119.673.518,05	13.127.016.957,00	(7.343.438,95)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.549.679.640,41	4.980.575.338,00	1.569.104.302,41
7	Dinas Sosial	36.169.262.019,75	37.252.981.376,00	(1.083.719.356,25)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.770.874.587,71	14.295.029.322,00	(524.154.734,29)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	6.054.326.056,00	6.092.802.014,00	(38.475.958,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.665.455.387,71	17.210.845.849,45	(1.545.390.461,74)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.469.967.675,27	4.969.394.155,00	500.573.520,27
12	Dinas Perhubungan	21.288.693.855,90	21.348.522.314,00	(59.828.458,10)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.261.739.661,31	21.070.346.792,00	191.392.869,31
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	36.014.510.936,75	35.156.406.899,00	858.104.037,75
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.518.025.607,58	2.532.346.405,00	(14.320.797,42)
16	Dinas Kebudayaan	76.219.825.739,53	76.876.328.314,00	(656.502.574,47)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	9.865.941.391,05	9.915.299.425,00	(49.358.033,95)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.618.759.627,90	12.567.304.898,00	1.051.454.729,90
19	Dinas Pariwisata	14.220.011.083,18	14.285.464.811,00	(65.453.727,82)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	18.917.286.483,71	19.351.321.040,00	(434.034.556,29)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.742.682.061,29	16.756.568.458,00	(13.886.396,71)
22	Sekretariat Daerah	32.282.924.846,24	32.459.470.840,00	(176.545.993,76)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

NO	NAMA SKPD	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
23	Paniradya Kaistimewan	16.078.266.374,00	16.207.854.614,00	(129.588.240,00)
24	Sekretariat DPRD	62.608.121.190,00	62.767.761.808,00	(159.640.618,00)
25	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	4.403.510.929,16	4.401.864.205,60	1.646.723,56
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	24.240.997.820,38	24.664.316.835,00	(423.319.014,62)
27	Badan Kepegawaian Daerah	5.446.886.551,89	5.438.592.209,00	8.294.342,89
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	11.200.769.048,00	11.179.555.221,00	21.213.827,00
29	Badan Penghubung Daerah	5.262.161.323,13	5.305.473.860,00	(43.312.536,87)
30	Inspektorat	9.303.487.808,00	9.421.107.307,00	(117.619.499,00)
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.430.921.626,42	8.472.893.849,00	(41.972.222,58)
	JUMLAH	1.093.715.162.434,06	1.078.988.412.794,18	14.726.749.639,88

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.050.872.672,61 berasal dari :

- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp506.569.566,00)
- Selisih Beban Dibayar Dimuka tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp182.565.652,88
- Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp3.884.116.586,43
- Penyesuaian Hasil Inventarisasi Persediaan sebesar (Rp915.972,00)
- Penyesuaian Hibah sebesar (Rp715.240.053,00)
- Penyesuaian Hasil Pokok Produksi (Rp21.844.617,00)
- Penyesuaian Penjualan BLUD sebesar Rp2.290.962.719,66
- Koreksi Aset BLUD sebesar Rp2,00
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar (Rp8.797.829.615,56)
- Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel sebesar (Rp1.174.450.792,23)
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.502.070.001,21
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp162.607.071,00
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp143.655.910,00

2. Dinas Kesehatan sebesar Rp19.961.389.777,01 berasal dari :

- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp146.754.393,64)
- Selisih Beban Dibayar Dimuka tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp38.559.611,27



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦫꦺꦴꦩꦶꦠꦺꦤ꧀ꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

- Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp7.859.653.461,05)
 - Hibah dari Pusat sebesar (Rp8.199.601.076,82)
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp485.518,305,00
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar (Rp49.175.477,00)
 - Hibah dari Pemda lain sebesar (Rp6.108.885.624,01)
 - Reklasifikasi dari beban pegawai sebesar (Rp6.705.000,00)
 - Reklasifikasi ke beban pegawai sebesar Rp13.905.000,00
 - Kapitalisasi sebesar Rp134.082.708,00
 - Penyesuaian persediaan obat *expired date* yang masih dicatat sebesar Rp1.737.319.631,24
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar (Rp218.578.016,01) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp64.961.445,00)
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.502.598.249,99)
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar (Rp74.054.338,00)
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp236.407.828,00
 - Reklasifikasi ke beban hibah sebesar Rp2.623.784.221,00
4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar (Rp6.684.252.528,00) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.036.514,00)
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp19.297.717,00
 - Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp88.220.125,00
 - Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp6.577.771.200,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar (Rp7.343.438,95) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp9.435.300,00
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.433.138,95



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

- Ekstrakomptabel sebesar (Rp3.525.000,00)
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.569.104.302,41 berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp5.340.561,00)
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.500.274.458,59
 - Hibah dari BNNP sebesar (Rp3.107.790.700,00)
 - Mutasi Persediaan dari BTT sebesar (Rp323.857.500,00)
 - Mutasi Persediaan ke SKPD lain sebesar Rp367.610.000,00
7. Dinas Sosial sebesar (Rp1.083.719.356,25) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp9.398.012,00
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp154.492.180,25
 - Kapitalisasi sebesar Rp782.914.162,00
 - Reklasifikasi dari Persediaan ke Aset sebesar Rp137.939.910,00
 - Ekstrakomptabel sebesar (Rp1.024.908,00)
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar (Rp524.154.734,29) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp5.589.067,00)
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp11.051.182,71)
 - Ekstrakomptabel sebesar (Rp1.200.000,00)
 - Reklas ke Aset Tetap sebesar Rp345.405.380,00
 - Reklasifikasi ke Persediaan sebesar (Rp820.289.554,00)
 - Hibah sebesar Rp1.031.083.054,00
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar (Rp14.203.896,00)
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar (Rp38.475.958,00) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp962.755,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

- Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp22.146.330,00
 - Reklasifikasi Aset Tetap ke Persediaan sebesar (Rp10.166.127,00)
 - Ekstrakomptabel sebesar (Rp1.016.000,00)
 - Reklasifikasi Persediaan ke Aset Tetap sebesar Rp28.249.000,00
 - Mutasi persediaan dari BPBD sebesar (Rp1.700.000,00)
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar (Rp1.545.390.461,74) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp5.779.215,00)
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.142.717.007,42
 - Mutasi Bahan/Bibit Tanaman sebesar (Rp96.492.815,20)
 - HPP sebesar (Rp33.110.125,00)
 - Mutasi dari BPKA sebesar (Rp11.155.000,00)
 - Ekstrakomptabel sebesar (Rp9.100.000,00)
 - Penyesuaian Saldo Awal sebesar (Rp60.000,00)
 - Penyesuaian Saldo Awal sebesar Rp24,04
 - Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp88.066.549,00
 - Penyesuaian penjualan MKP karena HPP sebesar Rp470.304.036,48
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp500.573.520,27 berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp25.850.000,00)
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp175.846.927,98
 - Hibah dari Kemendagri sebesar (Rp1.720.758.000,00)
 - Mutasi dari BPBD sebesar (Rp298.604.500.000,00)
 - Mutasi dari Sekretariat Daerah sebesar (Rp56.226.166,25)
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar (Rp14.575.400,00)
 - Ekstrakomptabel sebesar (Rp6.576.882,00)
 - Hibah Perlengkapan Olahraga dari Bank Pembangunan Daerah DIY sebesar (Rp3.000.000,00)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமகாபுரம் காவலகம் காவலகம் காவலகம் காவலகம் காவலகம்

- Hibah Bahan Cetak (Spanduk) ke Kabupaten/Kota sebesar Rp298.604.500,00
 - Hibah sebesar Rp371.643.000,00
 - Hibah Blanko ke Kab/Kota sebesar Rp778.923.000,00
12. Dinas Perhubungan sebesar (Rp59.828.458,10) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.573.262,00
 - Selisih Beban Dibayar Dimuka tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp18.479.748,22)
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp48.240.954,32
 - Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp35.500.020,00
 - Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp42.778.290,00
 - Hibah dari Kementerian Perhubungan sebesar (Rp48.550.000,00)
 - Ekstrakomptabel sebesar (Rp1.234.320,00)
13. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp191.392.869,31 berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp266.972,00)
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp35.283.097,31)
 - Reklasifikasi ke Peralatan Jaringan ke Persediaan Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi sebesar (Rp152.326.800,00)
 - Ekstrakomptabel sebesar (Rp3.516.000,00)
14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp858.104.037,75 berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp73.989.179,00)
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp174.961.048,75)
 - Ekstrakomptabel sebesar (Rp9.783.900,00)
 - Reklasifikasi ke KDP sebesar Rp49.780.000,00
 - Reklasifikasi dari JIJ sebesar (Rp680.479.910,00)
 - Reklasifikasi dari Ekstrakomptabel sebesar (Rp1.680.000,00)
 - Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp33.010.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமகிழ்வுவகை கழுவகை கழுவகிழ்வுவகைபகிழ்வுவகை

- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp34.277.703,00
- Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp27.069.024,82
- Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp4.107.000,00

20.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar (Rp434.034.556,29) berasal dari :

- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp3.629.451,33
- Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp791.318.642,72
- Penyesuaian saldo akhir persediaan cadangan pangan karena stockopname minimal 25% sebesar (Rp20.324.531,25)
- Penyesuaian saldo awal persediaan pangan atas transaksi tahun sebelumnya sebesar Rp1.257.187,50
- Penyesuaian pendapatan atas persediaan yang dihitung HPP sebesar Rp1.701.993.796,54
- Penyesuaian pendapatan atas persediaan yang dihitung HPP sebesar (Rp1.101.694.136,80)
- Mutasi dari BPBD sebesar (Rp37.896.000,00)
- Hibah dari swasta sebesar (Rp600.000,00)
- Ekstrakomptabel sebesar (Rp5.000.000,00)
- Hibah dari Pusat sebesar (Rp514.605.000,00)
- Penyesuaian kurang catat bibit tanaman dan persediaan beras sebesar Rp384.044.853,75

21.Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar (Rp13.886.396,71) berasal dari :

- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp489.830,00
- Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp119.197.266,79)
- Penyesuaian Pendapatan karena HPP sebesar Rp7.259.185,00
- Reklasifikasi Persediaan ke Aset Tetap sebesar Rp176.866.648,50
- Reklasifikasi Persediaan dari Aset Tetap sebesar (Rp6.042.000,00)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦧꦼꦩꦫꦶꦠꦫꦏ꧀ꦢꦠꦫꦶꦠꦫꦏꦤ꧀ꦠꦩꦼꦮꦏꦺꦴꦗꦶꦏꦂꦠꦏꦺ

- Reklasifikasi Persediaan dari Aset Tetap sebesar (Rp45.490.000,00)
22. Sekretariat Daerah sebesar (Rp176.545.993,76) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.391.074,00
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp145.223.719,33
 - Reklasifikasi Aset Tetap ke Persediaan sebesar (Rp22.846.126,00)
 - Ekstrakomptabel sebesar (Rp3.111.400,00)
 - Penyesuaian Saldo Awal Persediaan sebesar Rp0,18
 - Mutasi Persediaan ke DPMK2PS sebesar Rp55.888.726,25
23. Paniradya Kaistimewan sebesar (Rp129.588.240,00) merupakan selisih persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya
24. Sekretariat DPRD sebesar (Rp159.640.618,00) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.974.830,00
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp157.665.788,00
25. Badan Perencanaan Pembangunan Riser dan Inovasi Daerah sebesar Rp1.646.723,56 berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp15.666,00
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.662.389,56)
26. Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar (Rp423.319.014,62) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp14.337.440,00)
 - Selisih Beban Dibayar Dimuka tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp50.148.806,60
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp312.522.259,46
 - Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp66.474.000,00
 - Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp20.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦺꦝꦏꦼꦩꦼꦂꦠꦺꦤ꧀ꦭꦶꦩꦼꦮꦏꦿꦶꦗꦏꦂꦠ

- Ekstrakomptabel sebesar (Rp6.300.000,00)
 - Mutasi Persediaan sebesar Rp11.155.000,00
 - Penyesuaian Saldo Awal Persediaan sebesar (Rp16.343.611,44)
- 27.Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp8.294.342,89 berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp7.994.730,00)
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp7.202.887,11
 - Ekstrakomptabel sebesar (Rp8.602.500,00)
 - Reklasifikasi Persediaan ke Aset Tetap sebesar Rp1.100.000,00
- 28.Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp21.213.827,00 berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp12.086.389,00)
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp22.723.560,00)
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar (Rp41.250.000,00)
 - Pengembalian Persediaan dari Peserta Diklat sebesar (Rp179.820,00)
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp4.650.000,00
 - Kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp50.375.942,00
- 29.Badan Penghubung Daerah sebesar (Rp43.312.536,87) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp5.525.436,00
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp37.787.100,87
- 30.Inspektorat sebesar (Rp117.619.499,00) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp3.297.714,00)
 - Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp41.402.213,00
 - Ekstrakomptabel sebesar (Rp8.175.000,00)
 - Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp87.690.000,00
- 31.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar (Rp41.972.222,58) berasal dari :



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦧꦺꦩꦶꦩꦺꦤ꧀ꦝꦸꦁꦥꦺꦥꦏꦏꦤ꧀ꦧꦸꦩꦢ

- Selisih Utang Barang dan Jasa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.553.533,00
- Selisih Persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp5.293.361,58
- Mutasi Persediaan BBM dari BPBD sebesar (Rp25.253.000,00)
- Kapitalisasi Aset Tetap – Instalasi Air Bersih/Air Baku Tw II sebesar Rp59.378.328,00

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.2.1.3 Beban Subsidi

Rp95.355.621.534,00

Rp75.368.890.530,00

Realisasi Beban Subsidi tahun 2025 sebesar Rp95.355.621.534,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.986.731.004,00 atau sebesar 26,52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 5. 163
Beban Subsidi

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4 = 2-3	5 = (4/3)*100
Beban Subsidi kepada BUMD	95.355.621.534,00	75.368.890.530,00	19.986.731.004,00	26,52

Realisasi Beban Subsidi tahun 2025 berasal dari Beban Subsidi kepada BUMD dengan penjelasan sebagai berikut :

- DPUPESDM memberi subsidi sebesar Rp8.852.807.000,00 kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama sebagai bantuan biaya operasional dalam mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat di DIY dengan berpedoman pada Pergub DIY Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi pada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dishub memberi subsidi sebesar Rp86.502.814.534 kepada PT. AMI sebagai bantuan biaya operasional dalam Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja berdasarkan Pergub DIY Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service*

Penjelasan terkait kenaikan realiasi subsidi sebesar Rp19.986.731.004,00 atau sebesar 26,62% ada pada CaLK nomor 5.1.2.1.3 – Belanja Subsidi.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦸꦗꦸꦫꦩꦠꦠꦫꦶꦥꦸꦒꦶꦲꦏꦂꦠ

Tabel 5. 165
Penurunan Beban Hibah

URAIAN	LRA TAHUN 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 2+3-4	6	7 = 5-6	8 = (7/6)*100
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.449.170.500,00	0,00	1.449.170.500,00	16.371.213.210,00	(14.922.042.710,00)	(91,15)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	284.963.848.943,00	6.364.003.320,80	11.536.971.201,00	279.790.881.062,80	534.467.905.880,00	(254.677.024.817,20)	(47,65)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	10.810.025.000,00	0,00	0,00	10.810.025.000,00	10.493.725.000,00	316.300.000,00	3,01
Beban Hibah Dana BOSP	109.383.001.880,00	0,00	0,00	109.383.001.880,00	107.350.662.655,00	2.032.339.225,00	1,89
JUMLAH	405.156.875.823,00	7.813.173.820,80	11.536.971.201,00	401.433.078.442,80	668.683.506.745,00	(267.250.428.302,20)	(39,97)

Penurunan Beban Hibah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Mutasi Tambah
 - Penyerahan Hibah dari Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada SKPD berikut ini :
 - ✓ DPMK2PS sebesar Rp1.449.170.500,00 dalam bentuk blanko KTP, spanduk ke kabupaten/kota di DIY
 - ✓ Disbud sebesar Rp770.631.450,00
 - ✓ Satpol PP sebesar Rp494.077.800,00
 - ✓ Disperindag sebesar Rp313.038.870,00
 - ✓ Disnakertrans sebesar Rp1.031.083.054,00
 - ✓ DLHK sebesar Rp91.012.551,80
 - ✓ DPUPESDM sebesar Rp3.664.159.595,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய மூலம் நடைமுறை செய்து கொடுக்கிறது

- Mutasi Kurang
 - Reklasifikasi dari Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada SKPD berikut ini :
 - ✓ Satpol PP sebesar Rp494.077.800,00
 - ✓ Disperindag sebesar Rp313.038.870,00
 - ✓ Disbud sebesar Rp200.644.730,00
 - ✓ DPUPESDM sebesar Rp1.040.375.374,00
 - ✓ Disnakertrans sebesar Rp820.289.554,00
 - ✓ Disdikpora sebesar Rp8.668.544.873,00

Beban Hibah tahun 2025 terdiri dari :

1. Beban Hibah Barang sebesar Rp20.352.174.700,80
2. Beban Hibah Uang sebesar Rp381.080.903.742,00

Terdapat perbedaan realiasi antara Beban Hibah dengan Belanja Hibah sebesar (Rp3.723.797.380,20) dengan rincian sebagai berikut

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar (Rp8.668.544.873,00) terdiri dari :
 - Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp150.149.980,00
 - Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp8.518.394.893,00
2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp2.623.784.221,00 merupakan Reklasifikasi dari Persediaan
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp210.793.500,00 terdiri dari :
 - Hibah Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp1.031.083.054,00
 - Reklasifikasi ke Persediaan sebesar (Rp820.289.554,00)
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp91.012.551,80 merupakan Penyesuaian Produksi Bahan/Bibit Tanaman
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.449.170.500,00 terdiri dari :
 - Penyerahan Hibah Bahan Cetak (Spanduk) ke Kabupaten/Kota sebesar (Rp298.604.500,00)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦤ꧀ ꦢꦤꦺꦫꦤ ꦢꦤꦺꦫꦤ ꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦿ ꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦤ꧀

- Penyerahan Hibah ke instansi lain sebesar (Rp371.643.000,00)
 - Penyerahan Hibah blanko KTP ke Kab/Kota sebesar (Rp778.923.000,00)
6. Dinas Kebudayaan sebesar Rp569.986.720,00 merupakan :
- Penyerahan Hibah kepada Masyarakat sebesar (Rp770.631.450,00)
 - Reklasifikasi ke persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya sebesar Rp200.644.730

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial Rp30.275.654.958,00 Rp29.662.372.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2025 sebesar Rp30.275.654.958,00 mengalami kenaikan sebesar Rp613.282.958,00 atau sebesar 2,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 166
Rincian Beban Bantuan Sosial**

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	2.103.054.765,00	29.206.800.000,00	(27.103.745.235,00)	-
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	0,00	15.765.000,00	(15.765.000,00)	(100,00)
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	28.111.500.000,00	380.000.000,00	27.731.500.000,00	7.297,76
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	61.100.193,00	59.807.000,00	1.293.193,00	2,16
	JUMLAH	30.275.654.958,00	29.662.372.000,00	613.282.958,00	2,07

Penjelasan terkait kenaikan realiasi bantuan sosial sebesar Rp30.275.654.958,00 atau sebesar 2,07% ada pada CaLK nomor 5.2.1.1.5 – Belanja Bantuan Sosial.

Beban Bantuan Sosial tahun 2025 sebesar Rp30.275.654.958,00 merupakan beban bantuan sosial yang sudah diserahkan (dikonsumsi) kepada masyarakat yang berada pada SKPD :

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp827.654.765,00 berupa Bantuan Sosial Konstruksi - Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Terintegrasi kepada masyarakat di Kalirejo, Kokap, Kulon Progo
2. Dinas Sosial sebesar Rp29.448.000.193,00 kepada :
 - LKS – PA Darma Putra, Kracaan, Semin, Gunungkidul sebesar Rp12.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦺꦴꦩꦶꦠꦺꦤ꧀ꦪꦺꦴꦏꦺꦴꦏꦂꦠ

- LKSA – Sang Timur, Jatisarono, Nanggulan Kulon Progo sebesar Rp9.000.000,00
- Perorangan – Lanjut Usia sebesar Rp28.111.500.000,00 untuk Penyediaan Kebutuhan Sehari-hari
- LKSA – Amanah Al’Maun Jl. Imogiri Timur KM12, Bendungan, Trimulyo, Bantul sebesar Rp13.502.000,00
- PA Yatim Putra Islam An Nur, Bantul sebesar Rp13.096.193,00
- PA Bina Putra Jl. Pramuka, Bantul sebesar Rp13.502.000,00
- PT Yogyakarta Tembakau Indonesia sebesar Rp463.400.000,00 untuk penyediaan kebutuhan sehari-hari
- PT Cahaya Mulia Persada Nusa sebesar Rp572.600.000,00 untuk penyediaan kebutuhan sehari-hari
- PT Mitra Adi Jaya sebesar Rp239.400.000,00 untuk penyediaan kebutuhan sehari-hari

Tidak terdapat perbedaan realisasi antara Beban Subsidi dengan Belanja Subsidi.

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Rp23.593.553,94

Rp.1.204.537.397,33

Realisasi Beban Penyisihan Piutang tahun 2025 sebesar Rp23.593.553,94 mengalami penurunan sebesar Rp1.180.943.843,39 atau sebesar 98,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan sebagai berikut

**Tabel 5. 167
Beban Penyisihan Piutang**

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.046.250,00	609.750,00	436.500,00	71,59
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	9.482.453,94	0,00	9.482.453,94	-
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	17.589.885,83	(17.589.885,83)	(100,00)
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	13.064.850,00	1.186.337.761,50	(1.173.272.911,50)	(98,90)
	JUMLAH	23.593.553,94	1.204.537.397,33	(1.180.943.843,39)	(98,04)

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp1.046.250,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset berupa Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp9.482.453,94 pada “



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

- Rumah Sakit Jiwa Grhasia yang terdiri dari :
 - Beban penyisihan piutang retribusi jasa umum berupa beban penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebesar Rp8.288.010,74
 - Beban penyisihan piutang retribusi jasa usaha berupa beban penyisihan piutang retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp16.000,00
 - Disdikpora sebesar Rp1.178.443,20 merupakan beban penyisihan piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah
3. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp13.064.850,00 meliputi :
- Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp564.850,00
 - Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp12.500.000,00

Tabel 5. 168
Beban Penyisihan Piutang

NO	URAIAN	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG LO	SELISIH PENYISIHAN PIUTANG (2025-2024)	SELISIH (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.178.443,20	1.178.443,20	0,00
2	Dinas Kesehatan	8.304.010,74	(159.468.185,84)	167.772.196,58
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	14.111.100,00	(107.070.349,99)	121.181.449,99
	JUMLAH	23.593.553,94	(265.360.092,63)	288.953.646,57

Terdapat perbedaan Beban Penyisihan Piutang dengan Selisih Penyisihan Piutang Pemda DIY Tahun 2025 (2025-2024) sebesar Rp288.953.646,57 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp167.772.196,58 berasal dari :
 - Pembayaran atas penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis pada RSJ Grhasia sebesar Rp87.135.926,95
 - Pembayaran atas penyisihan piutang pendapatan BLUD pada RSJ Ghrasia sebesar Rp72.263.740,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரியபுத்தூர் காவலகம் காவலகம் காவலகம் காவலகம் காவலகம்

- Pembayaran atas penyisihan piutang pendapatan BLUD pada RSP Respira sebesar Rp21.560,00
 - Pembayaran atas penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis pada RSP Respira sebesar Rp8.089.693,70
 - Penyesuaian atas penyisihan piutang klaim BPJS yang belum diverifikasi tapi dicatat pada RSP Respira sebesar Rp261.275,93
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp121.181.449,99 berasal dari :
- Penghapusan Penyisihan Piutang Pajak KPPD Bantul dan KPPD Sleman sesuai dengan SK Gubernur DIY No. 122 Tahun 2025 sebesar Rp96.926.600,00
 - Penghapusan Piutang Pajak yang masih menjadi *NPV* menggunakan beban penyisihan piutang karena belum terdapat rekening beban penghapusan piutang pajak sebesar (Rp1.611.100,00)
 - Pembebanan penyisihan pokok dana bergulir, tetapi dana bergulir disajikan dengan *NPV* (pada neraca tidak masuk pada rekening penyisihan) sebesar Rp12.500.000,00
 - Penyisihan bunga dan denda dana bergulir terbayar sebesar Rp4.800.000,00
 - Koreksi saldo awal penyisihan denda dan bunga dana bergulir sebesar Rp4.343.750,00
 - Pengurangan penyisihan piutang TGR Terbayar sebesar Rp1.000.000,00
 - Penyesuaian saldo awal penyisihan piutang deviden BUKP sebesar Rp0,01

	<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp476.736.491.988,09	Rp455.508.600.416,80

Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Beban Amortisasi adalah beban untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tidak Berwujud. Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 sebesar Rp476.736.491.988,09 mengalami kenaikan sebesar Rp21.227.891.571,29 atau 4,66% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦃꦠꦤ꧀ꦢꦶꦫꦺꦤ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦶꦪꦏꦿꦠ

Tabel 5. 169
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	219.273.135.598,82	201.095.932.536,43	18.177.203.062,39	9,04
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	62.235.223.156,89	58.786.305.419,80	3.448.917.737,09	5,87
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	190.232.842.601,95	191.145.467.967,46	(912.625.365,51)	(0,48)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	936.978.599,19	212.099.743,62	724.878.855,57	341,76
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	165.571.931,50	4.268.794.749,49	(4.103.222.817,99)	(96,12)
6	Beban Penyusutan Properti Investasi	3.892.740.099,74	0,00	3.892.740.099,74	-
	JUMLAH	476.736.491.988,09	455.508.600.416,80	21.227.891.571,29	4,66

Tabel 5. 170
Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD

NO	SKPD	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	133.301.869.807,09	124.137.889.091,03	9.163.980.716,06	7,38
2	Dinas Kesehatan	16.655.325.601,34	14.074.353.583,21	2.580.972.018,13	18,34
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	163.442.697.628,81	175.931.082.889,27	(12.488.385.260,46)	(7,10)
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	897.133.393,83	1.001.563.577,32	(104.430.183,49)	(10,43)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.413.639.588,25	1.416.888.834,96	(3.249.246,71)	(0,23)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.228.901.431,89	3.409.874.831,53	(1.180.973.399,64)	(34,63)
7	Dinas Sosial	5.384.189.098,54	4.032.420.378,66	1.351.768.719,88	33,52
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.830.316.870,80	3.319.829.616,95	510.487.253,85	15,38
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	990.304.724,94	1.117.923.997,32	(127.619.272,38)	(11,42)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.711.474.688,91	5.968.665.322,66	5.742.809.366,25	96,22
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	524.323.870,76	0,00	524.323.870,76	-
12	Dinas Perhubungan	27.600.989.800,44	17.360.673.019,02	10.240.316.781,42	58,99
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.765.811.500,08	12.922.361.364,21	(1.156.549.864,13)	(8,95)
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11.662.609.634,63	7.773.316.925,00	3.889.292.709,63	50,03
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	356.148.945,81	482.887.860,92	(126.738.915,11)	(26,25)
16	Dinas Kebudayaan	11.321.846.615,51	12.704.174.260,54	(1.382.327.645,03)	(10,88)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	6.853.117.708,28	7.868.671.754,13	(1.015.554.045,85)	(12,91)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦤ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦢꦺꦴꦩꦫꦺꦴꦏꦿꦶꦠꦼꦩꦠꦸꦥꦤ꧀ꦢꦺꦴꦫꦏꦂꦠ

NO	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	182.491.186,80	164.826.382,30	17.664.804,50	10,72
12	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	22.166.245,00	9.493.995,00	12.672.250,00	133,48
13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	31.652.358,92	27.174.931,30	4.477.427,62	16,48
14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	2.601.437,50	1.887.000,00	714.437,50	37,86
15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	739.942.166,81	1.045.155.137,51	(305.212.970,70)	(29,20)
16	Beban Penyusutan Alat Peraga	93.279.852,69	55.462.102,74	37.817.749,95	68,19
17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	555.932.786,31	525.765.667,53	30.167.118,78	5,74
18	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	15.296.600.481,42	6.148.621.842,75	9.147.978.638,67	148,78
19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	496.896.795,54	491.821.331,70	5.075.463,84	1,03
	JUMLAH	219.273.135.598,82	201.095.932.536,43	18.177.203.062,39	9,04

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.2.2.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Rp62.235.223.156,89 Rp58.786.305.419,80

Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp62.235.223.156,89 mengalami kenaikan sebesar Rp3.448.917.737,09 atau 5,87% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 172
Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	60.701.603.555,14	57.734.615.360,69	2.966.988.194,45	5,14
2	Beban Penyusutan Monumen	276.105.780,94	310.898.220,04	(34.792.439,10)	(11,19)
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	14.799.640,00	16.336.330,00	(1.536.690,00)	(9,41)
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.242.714.180,81	724.455.509,07	518.258.671,74	71,54
	JUMLAH	62.235.275.693,95	58.786.305.419,80	3.448.970.274,15	5,87

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.2.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Rp190.232.842.601,95 Rp191.145.467.967,46

Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 sebesar Rp190.232.842.601,95 mengalami penurunan sebesar Rp912.625.365,51 atau 0,48% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிகாஸாநகரநகராஸ்திரமேவா யோக்யாகர்டா

Tabel 5. 173
Rincian Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	145.591.405.258,30	155.258.216.196,84	(9.666.810.938,54)	(6,23)
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	23.755.300.384,37	18.404.428.170,82	5.350.872.213,55	29,07
3	Beban Penyusutan Instalasi	15.437.072.400,48	14.536.555.954,60	900.516.445,88	6,19
4	Beban Penyusutan Jaringan	5.449.064.558,80	2.946.267.645,20	2.502.796.913,60	84,95
	JUMLAH	190.232.842.601,95	191.145.467.967,46	(912.625.365,51)	(0,48)

	<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
5.4.2.2.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp936.978.599,19	Rp212.099.743,62

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebesar Rp936.978.599,19 mengalami kenaikan sebesar Rp724.878.855,57 atau 341,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemda DIY Tahun 2025 merupakan Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik pada :

- Dinas Pendidikan sebesar Rp927.265.140,83
- RSJ Grhasia sebesar Rp808.140,00
- Dinas Sosial sebesar Rp6.918.651,73
- Dinas Kebudayaan sebesar Rp1.986.666,63

	<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
5.4.2.2.5 Beban Penyusutan Aset Lainnya -Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp165.571.931,50	Rp4.268.794.749,49

Realisasi Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga tahun 2025 sebesar Rp165.571.931,50 mengalami penurunan sebesar Rp4.103.222.817,99 atau 96,12% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

- Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar Rp72.029.074,40
- Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp93.542.857,10

	<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
5.4.2.2.6 Beban Penyusutan Properti Investasi	Rp3.892.740.099,74	Rp0,00

Realisasi Beban Penyusutan Properti Investasi tahun 2025 sebesar Rp3.892.740.099,74. Beban Penyusutan Properti Investasi baru diakui pada tahun 2025 dan mempunyai akun yang terpisah. Beban Penyusutan Properti Investasi Pemda DIY Tahun 2025 merupakan Beban



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாறுவாஉருவாஉருவாஊறுபாறுபாறுபாறு

Penyusutan yang hanya ada pada BPKA selaku Pengelola Barang Daerah (PBD). Beban Penyusutan Properti Investasi tahun 2025 merupakan Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung.

Tabel 5. 174
Selisih Beban Penyusutan dan Selisih Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	ASET TETAP	BEBAN PENYUSUTAN (Rp)	SELISIH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP (Rp)	SELISIH (Rp)
1	PERALATAN DAN MESIN	219.280.439.603,38	166.163.189.648,59	53.117.249.954,79
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	62.235.275.693,95	75.888.998.258,62	(13.653.722.564,67)
3	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	190.232.842.601,95	111.345.835.158,81	78.887.007.443,14
4	ASET TETAP LAINNYA	936.978.599,19	921.902.599,19	15.076.000,00
	JUMLAH	472.685.536.498,47	354.319.925.665,21	118.365.610.833,26

Tabel 5. 175
Beban Penyusutan dan Selisih Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN (Rp)	SELISIH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	133.301.869.807,09	136.769.817.508,56	(3.467.947.701,47)
2	Dinas Kesehatan	16.655.325.601,34	9.506.289.749,14	7.149.035.852,20
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	163.442.697.628,81	72.571.246.892,34	90.871.450.736,47
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	897.133.393,83	842.283.393,83	54.850.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.413.639.588,25	1.151.605.194,88	262.034.393,37
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.236.205.436,45	(7.893.557.929,82)	10.129.763.366,27
7	Dinas Sosial	5.384.189.098,54	3.925.330.023,95	1.458.859.074,59
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.830.316.870,80	1.535.858.938,52	2.294.457.932,28
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	990.304.724,94	1.056.625.206,72	(66.320.481,78)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.711.474.688,91	31.209.021.328,37	(19.497.546.639,46)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	524.323.870,76	3.292.288.688,66	(2.767.964.817,90)
12	Dinas Perhubungan	27.600.989.800,44	22.767.097.652,05	4.833.892.148,39
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.765.811.500,08	9.388.024.499,40	2.377.787.000,68
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11.662.662.171,69	11.499.493.934,94	163.168.236,75
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	356.148.945,81	240.155.945,81	115.993.000,00
16	Dinas Kebudayaan	11.321.846.615,51	10.666.956.197,35	654.890.418,16
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	6.853.117.708,28	6.865.695.748,28	(12.578.040,00)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.105.416.274,69	10.627.626.015,86	477.790.258,83
19	Dinas Pariwisata	2.802.753.488,94	(2.199.829.552,02)	5.002.583.040,96
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.602.505.704,86	6.219.489.341,06	383.016.363,80
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.563.662.437,46	8.092.154.908,79	471.507.528,67
22	Sekretariat Daerah	4.162.474.271,36	22.777.202,59	4.139.697.068,77
23	Paniradya Kaistimewan	1.899.731.645,35	1.740.211.434,02	159.520.211,33
24	Sekretariat DPRD	6.182.781.783,77	2.090.676.493,35	4.092.105.290,42
25	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	388.276.127,37	(176.564.839,29)	564.840.966,66
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	13.829.084.684,15	5.202.543.940,79	8.626.540.743,36



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi
DIY
Daerah Istimewa
Yogyakarta

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN (Rp)	SELISIH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP (Rp)	SELISIH (Rp)
27	Badan Kepegawaian Daerah	3.044.990.183,10	2.614.957.953,10	430.032.230,00
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.039.848.591,02	1.154.962.591,02	(115.114.000,00)
29	Badan Penghubung Daerah	583.076.514,89	610.006.514,89	(26.930.000,00)
30	Inspektorat	2.374.658.786,46	2.375.422.934,55	(764.148,09)
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	158.218.553,52	551.257.753,52	(393.039.200,00)
	JUMLAH	472.685.536.498,47	354.319.925.665,21	118.365.610.833,26

Terdapat perbedaan realisasi beban penyusutan aset tetap dengan selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp118.365.610.833,26 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Reklasifikasi dari aset lain-lain – pembatalan usulan penghapusan sebesar Rp6.874.705.207,32
- Koreksi kode barang sebesar Rp10.853.037.622,49
- Reklasifikasi dari ekstrakomptabel sebesar Rp46.157.800,00
- Reklasifikasi ke estrakomptabel sebesar (Rp81.086.250,00)
- Reklasifikasi dari persediaan sebesar Rp46.742.095,22
- Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset lainnya (kemitraan) sebesar Rp87.461.860,00
- Reklasifikasi ke aset lainnya – ATR sebesar (Rp360.785.140,00)
- Reklasifikasi dari aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin (akumulasi penyusutan) sebesar Rp2.209.000,00
- Reklasifikasi ke persediaan sebesar (Rp307.150,00)
- Reklas ke aset lain-lain -usulan penghapusan sebesar (Rp224.368.209.407,38)
- Hibah aset dari pemerintah pusat sebesar Rp215.980.000,00
- Pecah aset sebesar Rp70.748.795.338,14
- Gabung aset sebesar Rp16.596.921.240,20
- Penyesuaian saldo awal penyusutan aset sebesar Rp57.989.344,96
- Verifikasi aset sebesar Rp943.074.113,82
- Reklasifikasi ke jalan, irigasi dan jaringan sebesar (Rp82.369.250,34)
- Jurnal pembentukan HPP sebesar Rp54.954.742,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦺꦠꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦪꦺꦴꦏꦸꦫꦠꦫꦠ

Tahun 2025

Tahun 2024

5.4.2.3.2 Beban Bantuan Keuangan

Rp322.491.800.904,34

Rp561.053.968,452,82

Realisasi Beban Bantuan Keuangan tahun 2025 sebesar Rp322.491.800.904,34 mengalami penurunan sebesar Rp238.562.167.548,48 dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 178
Rincian Beban Bantuan Keuangan

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	-
2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	180.781.170.273,84	428.964.512.711,77	(248.183.342.437,93)	(57,86)
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	138.710.630.630,50	132.089.455.741,05	6.621.174.889,45	5,01
	JUMLAH	322.491.800.904,34	561.053.968.452,82	(238.562.167.548,48)	(42,52)

Tabel 5. 179
Transfer

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Transfer	820.638.737.232,34	863.763.931.963,34	(43.125.194.731,00)

Terdapat perbedaan realisasi Beban Transfer dengan Belanja Transfer sebesar (Rp43.125.194.731,00) berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset berupa selisih pembayaran utang belanja bagi hasil tahun 2024 sebesar Rp 43.148.004.520,00 dengan pengakuan utang belanja bagi hasil pajak tahun 2024 sebesar (Rp22.809.789,00). Perbedaan ini disebabkan oleh penyesuaian atas pengakuan transaksi akrual terkait pembayaran Utang Belanja Bagi Hasil tahun sebelumnya sebesar Rp.43.148.004.520,00 yang secara kas mempengaruhi LRA namun tidak diakui sebagai beban tahun berjalan pada Laporan Operasional. Sebaliknya, terdapat pengakuan beban baru yang belum dibayarkan berupa Utang Belanja Bagi Hasil senilai (Rp 22.809.789,00) yang diakui sebagai beban pada periode berjalan karena kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan bagi hasil telah timbul, meskipun secara teknis belum dilakukan pembayaran kas hingga tanggal pelaporan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெயர்முனை நகரம் நகரம் நகரம் நகரம் நகரம் நகரம்

Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO.

- Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya–LO sebesar Rp229.911.114,22. Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya–LO mengalami kenaikan sebesar Rp48.087.242,60 atau sebesar Rp26,45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya–LO terdiri dari :
 - Surplus Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO sebesar Rp158.533.183,52 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nilai tersebut merupakan hasil dari surplus penjualan minyak kayu putih dengan total biaya pengelolaan minyak kayu putih dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp1.852.878.254,96. Produksi yang dihasilkan sebanyak 20.008 liter dengan biaya produksi per liter sebesar Rp92.606,87. Total pendapatan dari penjualan minyak kayu putih pada tahun 2025 adalah sebesar Rp628.837.220,00 sedangkan persediaan yang terjual adalah senilai Rp470.304.036,48 sehingga terdapat selisih pendapatan atas penjualan minyak kayu putih dikurangi dengan total persediaan yang terjual dan menjadi surplus penjualan minyak kayu putih sebesar Rp158.533.183,52
 - BPKA sebesar Rp71.377.930,70 berupa Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya–LO yang terdiri dari :
 - ✓ Surplus Penjualan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO sebesar Rp64.252.930,70
 - ✓ Surplus Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO sebesar Rp7.125.000,00

	<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
5.4.4.2 Defisit Non Operasional	Rp361.943.652.308,75	Rp43.026.704.657,71

Defisit Non Operasional tahun 2025 sebesar Rp361.943.652.308,75 mengalami kenaikan sebesar Rp318.916.947.651,04 atau 742,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Defisit Non Operasional Pemda DIY Tahun 2025 merupakan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு

- Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO sebesar Rp326.512.031.254,77 Munculnya angka minus sebesar merupakan akun kontrapos pada pos penjualan, dimana pendapatan dari pelepasan aset digunakan untuk mengompensasi beban penghapusan nilai buku. Dengan adanya realisasi penjualan ini, defisit yang timbul dari penghapusan aset oleh BPKA tidak diakui sebesar nilai bukunya saja, melainkan telah dikurangi dengan nilai ekonomi yang berhasil diperoleh kembali melalui penjualan tersebut. Oleh karena itu, meskipun terdapat unsur pengurang dari hasil penjualan, posisi akhir laporan tetap menunjukkan nilai defisit neto yang secara akurat merepresentasikan beban pelepasan aset pemerintah daerah pada tahun berjalan.

Tabel 5. 180
Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar per SKPD

NO	SKPD	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	9.122.239.746,42	11.292.182.227,99	(2.169.942.481,57)	(19,22)
2	Dinas Kesehatan	4.774.570.835,17	1.016.002.666,25	3.758.568.168,92	369,94
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	327.172.476.656,37	97.249.787,12	327.075.226.869,25	336.324,88
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja	24.007.842,91	0,00	24.007.842,91	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	528.299.170,77	35.889.203,80	492.409.966,97	1.372,03
7	Dinas Sosial	57.466.907,54	24.965.981,36	32.500.926,18	130,18
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	74.249.043,64	1.023.487.020,00	(949.237.976,36)	(92,75)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	8.866.375,00	75.150.000,00	(66.283.625,00)	(88,20)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.414.687.245,47	4.448.340.489,80	(3.033.653.244,33)	(68,20)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	-
12	Dinas Perhubungan	230.247.620,75	9.634.564.168,15	(9.404.316.547,40)	(97,61)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	565.798.482,50	0,00	565.798.482,50	-
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	565.771.483,25	1.382.576.739,88	(816.805.256,63)	(59,08)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	-
16	Dinas Kebudayaan	96.846.517,40	51.097.461,18	45.749.056,22	89,53



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கருவல் கருவல் கருவல் கருவல் கருவல் கருவல்

NO	SKPD	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	953.442.122,00	14.545.472,01	938.896.649,99	6.454,91
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	42.601.734,05	18.821.521,53	23.780.212,52	126,35
19	Dinas Pariwisata	215.022.096,33	1.812.696.050,00	(1.597.673.953,67)	(88,14)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	525.875.839,87	1.102.120.327,82	(576.244.487,95)	(52,29)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	170.319.500,00	132.303.571,00	38.015.929,00	28,73
22	Sekretariat Daerah	473.904.392,05	1.208.373,50	472.696.018,55	39.118,37
23	Paniradya Kaistimewan	47.097.910,00	0,00	47.097.910,00	-
24	Sekretariat DPRD	634.365.347,40	41.340.030,00	593.025.317,40	1.434,51
25	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	22.005.000,00	3.744.531,25	18.260.468,75	487,66
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	13.766.044.539,86	10.698.132.412,97	3.067.912.126,89	28,68
27	Badan Kepegawaian Daerah	141.719.900,00	58.873.767,00	82.846.133,00	140,72
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	149.778.500,00	2.514.755,10	147.263.744,90	5.855,99
29	Badan Penghubung Daerah	24.055.000,00	58.898.100,00	(34.843.100,00)	(59,16)
30	Inspektorat	138.132.500,00	0,00	138.132.500,00	-
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	-
	JUMLAH	361.943.652.308,75	43.026.704.657,71	318.916.947.651,04	741,21

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp9.112.239.746,42 merupakan Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp4.774.570.835,17 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp327.172.476.656,37 meliputi :
 - Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO sebesar Rp660.445.401,60
 - Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO sebesar Rp 326.512.031.254,77
4. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp 24.007.842,91 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp528.299.170,77 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
6. Dinas Sosial sebesar Rp57.466.907,54 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦧꦶꦩꦠꦺꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦪꦺꦴꦏꦿꦠ

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp74.249.043,64 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp8.866.375,00 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.414.687.245,47 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
10. Dinas Perhubungan sebesar Rp230.247.620,75 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
11. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp565.798.482,50 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp565.771.483,25 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
13. Dinas Kebudayaan sebesar Rp968.46.517,40 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
14. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp953.442.122,00 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
15. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp42.601.734,05 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
16. Dinas Pariwisata sebesar Rp215.022.096,33 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp525.875.839,87 berasal dari :
 - Defisit Penjualan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO sebesar Rp116.004.640,62
 - Defisit Penjualan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO sebesar Rp170.425.093,92
 - Defisit Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO sebesar Rp114.667.062,00
 - Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO sebesar Rp124.779.043,33
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp170.319.500,00 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
19. Paniradya Kaistimewan sebesar Rp47.097.910,00 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு

20. Sekretariat Daerah sebesar Rp473.904.392,05 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
21. Sekretariat DPRD sebesar Rp634.365.347,40 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp22.005.000,00 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp13.766.044.539,86 berasal dari :
- Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO sebesar (Rp557.647.818,50)
 - Defisit Penjualan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO sebesar (Rp148.947.068,30)
 - Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO sebesar Rp14.881.202.926,66
- Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset merupakan hasil penggabungan antara beban penghapusan aset dengan beban defisit atas penjualan Barang Milik Daerah. Secara total, angka ini tetap bernilai positif karena besarnya nilai buku aset yang dihapuskan oleh BPKA, khususnya pada pos penghapusan Aset Lain-Lain mencapai Rp14.881.202.926,66. Munculnya angka minus sebesar (Rp1.115.158.386,80) merupakan akun kontrapos pada pos penjualan, dimana pendapatan dari pelepasan aset digunakan untuk mengompensasi beban penghapusan nilai buku. Dengan adanya realisasi penjualan ini, defisit yang timbul dari penghapusan aset oleh BPKA tidak diakui sebesar nilai bukunya saja, melainkan telah dikurangi dengan nilai ekonomi yang berhasil diperoleh kembali melalui penjualan tersebut. Oleh karena itu, meskipun terdapat unsur pengurang dari hasil penjualan, posisi akhir laporan tetap menunjukkan nilai defisit neto yang secara akurat merepresentasikan beban pelepasan aset pemerintah daerah pada tahun berjalan.
24. Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp141.719.000,00 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
25. Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp149.778.500,00 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
26. Badan Penghubung Daerah sebesar Rp 24.055.000,00 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

No	SKPD	SP2D UP/GU/TU/LS (Rp)	SPJ UP/GU/TU/LS (Rp)	Pengembalian UP/TU/GU/LS (Rp)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	360.516.502.428,00	360.165.888.064,00	350.614.364,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	25.029.916.088,00	24.786.086.835,00	243.829.253,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.511.058.554,00	26.671.603.961,00	839.454.593,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	26.978.119.312,00	26.929.010.423,00	49.108.889,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.468.281.332,00	16.319.483.297,00	148.798.035,00
8	Dinas Sosial	109.319.230.970,00	108.226.622.842,00	1.092.608.128,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	42.179.760.700,00	41.868.303.317,00	311.457.383,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	18.009.285.428,00	17.980.453.458,00	28.831.970,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	66.375.784.208,00	65.730.348.108,45	645.436.099,55
12	Dinas Perhubungan	133.603.836.950,00	133.346.473.969,00	257.362.981,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.162.230.174,00	39.991.167.412,00	171.062.762,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	46.231.661.960,00	46.011.303.392,00	220.358.568,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.235.764.817,00	11.211.786.538,00	23.978.279,00
16	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	313.532.764.137,00	312.783.193.053,00	749.571.084,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	25.145.766.925,00	25.022.566.369,00	123.200.556,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.816.620.786,00	33.684.880.278,00	131.740.508,00
19	Dinas Pariwisata	25.102.744.056,00	24.943.796.426,00	158.947.630,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.030.414.770,00	60.699.253.121,00	331.161.649,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	33.301.199.280,00	32.919.613.390,00	381.585.890,00
22	Sekretariat Daerah	92.332.859.573,00	91.368.899.057,00	963.960.516,00
23	Paniradya Kaistimewan	24.527.173.335,00	24.392.118.065,00	135.055.270,00
24	Badan Penghubung Daerah	10.797.678.891,00	10.723.427.331,00	74.251.560,00
25	Sekretariat DPRD	234.279.610.182,00	228.481.153.926,00	5.798.456.256,00
26	Inspektorat	26.326.672.073,00	26.273.427.909,00	53.244.164,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	20.358.569.422,60	20.051.233.682,60	307.335.740,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	964.972.747.235,00	956.961.359.821,34	8.011.387.413,66
29	Badan Kepegawaian Daerah	23.648.857.109,00	23.450.314.863,00	198.542.246,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	22.055.666.675,00	21.986.369.228,00	69.297.447,00
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.490.716.619,00	18.396.399.406,00	94.317.213,00
	JUMLAH	4.172.670.088.770,60	4.142.849.062.292,39	29.821.026.478,21



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦪꦲꦏꦂꦠ

Tahun 2025

Tahun 2024

5.5.4.2 Arus Keluar Kas Rp4.392.089.992.068,60 Rp5.617.470.433.226,00

Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris dalam TA 2025 adalah sebesar Rp4.392.089.992.068,60. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 193

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	219.419.903.298,00	231.395.383.099,00
2	Penerbitan SP2D UP/GU/TU	4.172.670.088.770,60	5.386.075.050.127,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	4.392.089.992.068,60	5.617.470.433.226,00

Tahun 2025

Tahun 2024

5.5.4.3 Arus Kas Bersih Rp0,00 Rp0,00

Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris dalam TA 2025 adalah sebesar Rp0,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 194

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Arus Kas Masuk	4.392.089.992.068,60	5.617.470.433.226,00
2	Arus Kas Keluar	4.392.089.992.068,60	(5.617.470.433.226,00)
	Jumlah Arus Kas Bersih	0,00	0,00

Tahun 2025

Tahun 2024

5.5.5 Kenaikan Penurunan Kas Rp(18.584.054.460,93) Rp142.435.758.963,96

Penurunan Bersih Kas milik Pemda DIY TA 2025 sebesar Rp(18.584.054.460,93) berasal dari:

Tabel 5. 195

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	742.190.729.619,07	1.000.610.542.388,91
2	Aktivitas Investasi	(760.774.784.080,00)	(858.174.783.424,95)
3	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
	Jumlah	(18.584.054.460,93)	142.435.758.963,96

Tahun 2025

Tahun 2024

5.5.6 Saldo Akhir Kas Rp419.112.174.823,51 Rp437.696.229.284,44

Sisa Kasda milik Pemda DIY per 31 Desember 2025 sebesar Rp419.112.174.823,51 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp437.696.229.284,44 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 196

Rincian Kas Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Kas di BUD	385.633.412.458,69	401.871.389.579,29
2	Kas di Bendahara Penerimaan	51.572.265,00	37.854.231,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Ngayogyakarta Ngayogyakarta Ngayogyakarta Ngayogyakarta

No	SKPD (BLUD)	GIRO BPD 31 DESEMBER 2025 (Rp)	JASA GIRO BPD BULAN DESEMBER 2025 (Rp)	PENDAPATAN DISETOR BULAN JANUARI 2026 (Rp)	JASA GIRO BTN 31 DESEMBER 2025 (Rp)	JUMLAH (Rp)
14	SMKN 4 Yogyakarta	48.657,00	48.141.264,00	0,00	0,00	48.189.921,00
15	SMKN 1 Pandak Bantul	18,00	59.402,00	0,00	0,00	59.420,00
16	SMKN 1 Pundong Bantul	13.269,00	22.430.754,00	0,00	0,00	22.444.023,00
17	SMKN 2 Kasihan Bantul	125.832,00	108.665.642,00	0,00	0,00	108.791.474,00
18	SMKN 1 Wonosari GK	5.593,00	4.474.824,00	0,00	0,00	4.480.417,00
19	SMKN 1 Gedangsari GK	8.815,00	7.652.712,00	0,00	0,00	7.661.527,00
20	SMKN 1 Nanggulan - KP	9.083,00	8.005.712,00	0,00	0,00	8.014.795,00
21	SMKN 1 Seyegan Sleman	4.906.315,00	482,00	0,00	0,00	4.906.797,00
22	SMKN 1 Godean Sleman	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
23	SMKN 2 Godean Sleman	895.886,00	619,00	0,00	0,00	896.505,00
	JUMLAH	23.999.141.549,07	7.421.917.103,00	3.480.784,00	719.762.773,75	32.144.302.209,82

Kas Dana BOS sebesar Rp1.282.887.890,00 merupakan sisa dana BOS di rekening sekolah yang terdiri dari sisa BOS Reguler sebesar Rp804.163.438,00 dan sisa BOS Kinerja sebesar Rp478.724.452,00.

5.6 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas, yang antara lain merupakan dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. LPE tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 198
Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4 = 2-3	5 = (4/3)*100
EKUITAS AWAL	14.045.595.713.196,00	13.170.046.237.337,80	875.549.475.858,16	6,65
Surplus/Defisit - LO	719.445.668.753,84	420.321.555.723,02	299.124.113.030,82	71,17
RK PPKD	0,00	0,00	0,00	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(102.659.852.455,72)	455.227.920.135,14	(557.887.772.590,86)	(122,55)
Koreksi Nilai Persediaan	216.501.043,22	20.453.573,00	196.047.470,22	958,50
Lain-lain	(102.876.353.498,94)	455.207.466.562,14	(558.083.820.061,08)	(122,60)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	14.662.381.529.494,10	14.045.595.713.196,00	616.785.816.298,12	4,39



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Ngayogyakarta

Tahun 2025

Tahun 2024

5.6.1 Ekuitas Awal

Rp14.045.595.713.196,00 Rp13.170.046.237.337,80

Saldo Ekuitas Awal tahun 2025 sebesar Rp14.045.595.713.196 merupakan saldo Ekuitas Akhir tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar Rp875.549.475.858,16 atau 6,65% bila dibandingkan dengan Ekuitas Awal Tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 199
Ekuitas Awal per SKPD

NO	SKPD	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.838.252.790.358,79	1.726.249.365.085,80	112.003.425.272,99	6,49
2	Dinas Kesehatan	367.615.511.317,57	323.170.785.199,53	44.444.726.118,04	13,75
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	5.111.697.774.120,71	4.681.472.779.828,78	430.224.994.291,93	9,19
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	100.795.914.950,69	111.157.366.779,67	(10.361.451.828,98)	(9,32)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	12.432.014.848,11	12.602.628.876,07	(170.614.027,96)	(1,35)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.302.346.704,03	23.511.492.399,31	(1.209.145.695,28)	(5,14)
7	Dinas Sosial	90.068.198.873,98	104.911.713.561,38	(14.843.514.687,40)	(14,15)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	40.056.760.546,10	43.659.602.545,45	(3.602.841.999,35)	(8,25)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	22.545.999.388,54	23.596.663.603,86	(1.050.664.215,32)	(4,45)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	132.495.107.320,64	143.514.924.296,60	(11.019.816.975,96)	(7,68)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	-
12	Dinas Perhubungan	160.064.774.951,48	169.908.857.255,52	(9.844.082.304,04)	(5,79)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	61.017.799.879,40	50.108.521.010,61	10.909.278.868,79	21,77
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	449.059.701.470,91	308.843.200.715,42	140.216.500.755,49	45,40
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.167.051.197,39	5.436.065.465,48	(269.014.268,09)	(4,95)
16	Dinas Kebudayaan	470.572.624.375,00	615.257.289.110,87	(144.684.664.735,87)	(23,52)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	152.142.282.830,17	158.910.989.079,74	(6.768.706.249,57)	(4,26)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	317.462.494.620,03	321.396.276.484,47	(3.933.781.864,44)	(1,22)
19	Dinas Pariwisata	134.527.032.513,55	136.660.436.669,59	(2.133.404.156,04)	(1,56)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	256.205.173.766,74	252.486.368.497,02	3.718.805.269,72	1,47
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	92.195.330.788,29	69.549.330.721,62	22.646.000.066,67	32,56
22	Sekretariat Daerah	243.538.841.080,59	243.201.393.709,65	337.447.370,94	0,14
23	Paniradya Kaistimewan	13.974.756.698,33	12.664.580.399,38	1.310.176.298,95	10,35



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦫꦠ

NO	SKPD	PENDAPATAN - LO (Rp)	BEBAN (Rp)	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (Rp)	SURPLUS NON OPERASIONAL (Rp)	DEFISIT NON OPERASIONAL (Rp)	SURPLUS/DEFISIT LO (Rp)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.228.839.601,00	31.521.454.051,33	(30.292.614.450,33)	0,00	953.442.122,00	(31.246.056.572,33)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.182.860.072,00	41.854.170.207,59	(39.671.310.135,59)	0,00	42.601.734,05	(39.713.911.869,64)
19	Dinas Pariwisata	211.802.642,67	26.964.018.407,12	(26.752.215.764,45)	0,00	215.022.096,33	(26.967.237.860,78)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.221.510.975,13	66.605.195.227,57	(63.383.684.252,44)	0,00	525.875.839,87	(63.909.560.092,31)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	303.358.335,00	40.096.635.463,75	(39.793.277.128,75)	240.815,00	170.319.500,00	(39.963.355.813,75)
22	Sekretariat Daerah	2.443.637.321,29	94.319.867.291,60	(91.876.229.970,31)	0,00	473.904.392,05	(92.350.134.362,36)
23	Paniradya Kaistimewan	0,00	26.018.581.853,35	(26.018.581.853,35)	0,00	47.097.910,00	(26.065.679.763,35)
24	Sekretariat DPRD	17.250.000,00	122.739.332.407,77	(122.722.082.407,77)	0,00	634.365.347,40	(123.356.447.755,17)
25	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	19.832.127.995,53	(19.832.127.995,53)	0,00	22.005.000,00	(19.854.132.995,53)
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.462.376.081.271,48	930.403.480.684,11	4.531.972.600.587,37	1.604.814.637,20	13.766.044.539,86	4.519.811.370.684,71
27	Badan Kepegawaian Daerah	258.520.000,00	23.348.843.773,99	(23.090.323.773,99)	0,00	141.719.900,00	(23.232.043.673,99)
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	6.775.043.600,00	22.849.891.310,02	(16.074.847.710,02)	0,00	149.778.500,00	(16.224.626.210,02)
29	Badan Penghubung Daerah	586.290.000,00	11.245.500.309,02	(10.659.210.309,02)	0,00	24.055.000,00	(10.683.265.309,02)
30	Inspektorat	0,00	28.079.081.195,46	(28.079.081.195,46)	0,00	138.132.500,00	(28.217.213.695,46)
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	25.765.635.992,94	(25.765.635.992,94)	0,00	3.760.000,00	(25.769.395.992,94)
	JUMLAH	5.653.043.126.549,64	4.569.155.215.450,23	1.083.887.911.099,41	2.671.235.070,06	361.943.652.308,75	724.615.493.860,72



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கருவாடக கருவாடக கருவாடக கருவாடக கருவாடக

NO	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
	- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	-
	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.214.975,96	15.760.000,00	(4.545.024,04)	(28,84)
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Pencatatan Sipil	354.493.226,25	0,00	354.493.226,25	-
	- Dinas Perhubungan	0,00	1.146.993,00	(1.146.993,00)	(100,00)
	- Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	-
	- Dinas Kebudayaan	1.798.500,00	12.740.000,00	(10.941.500,00)	(85,88)
	- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.414.000,00	23.340.000,00	(20.926.000,00)	(89,66)
	- Dinas Pariwisata	0,00	426.738,75	(426.738,75)	(100,00)
	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	36.638.812,50	10.808.000,00	25.830.812,50	239,00
	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(125.334.648,50)	(426.738,75)	(124.907.909,75)	29.270,35
	- Sekretariat Daerah	(55.888.726,43)	18.871.000,00	(74.759.726,43)	(396,16)
	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.188.611,44	2.436.080,00	2.752.531,44	112,99
	- Badan Pendidikan dan Pelatihan	179.820,00	34.600.000,00	(34.420.180,00)	(99,48)
	- Inspektorat	0,00	6.720.000,00	(6.720.000,00)	(100,00)
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.253.000,00	0,00	25.253.000,00	-
	JUMLAH	(1.520.818.588,02)	20.453.573,00	(1.541.272.161,02)	(7.535,47)

- Penjelasan Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (Koreksi Nilai Persediaan) sebesar (Rp1.520.818.588,02) berasal dari :

- Penyesuaian Saldo Awal sebesar (Rp1.257.211,72) pada DPKP sebesar (Rp1.257.187,50) dan Setda sebesar (Rp0,18)
- Koreksi Persediaan sebesar (Rp1.844.334.84,30) pada :
 - ✓ Instalasi Farmasi Dinkes sebesar Rp1.724.793.381,84 karena obat *expired date* sebelum tahun 2025
 - ✓ Kelebihan mencatat obat pada RSJ Grhasia sebesar Rp12.526.249,40
 - ✓ Reklasifikasi dari temuan BPK pada Semester I pada DLHK sebesar Rp60.000,00
 - ✓ Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin pada Diskop sebesar Rp1.680.000,00
 - ✓ Reklasifikasi dari temuan Inspektorat pada Disbud sebesar Rp56.000,00
 - ✓ Pembebanan Persediaan tahun sebelumnya pada BPKA sebesar Rp16.343.611,44
 - ✓ Pengembalian persediaan dari peserta diklat pada Bandiklat sebesar Rp179.820,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦠꦫꦠ

- ✓ Disperindag sebesar (Rp125.334.648,50)
 - Inventarisasi Persediaan sebesar Rp915.972,00 pada Disdikpora
 - Persediaan dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp323.857.500,00 pada BPBD
- Penjelasan Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (Lain-Lain) sebesar (Rp104.452.580.906,03) berasal dari :
 - Koreksi Piutang Retribusi Daerah sebesar (Rp52.255.186,00) merupakan klaim BPJS Kesehatan yang belum diverifikasi dicatat sebagai piutang pada Dinkes – RSP Respira
 - Koreksi Piutang Lainnya sebesar (Rp3.771.562,50) merupakan penyisihan piutang pendapatan retribusi daerah pada Dinkes – RSP Respira
 - Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp157.115.946,57 pada Dinkes sebesar Rp167.772.196,68 dan BPKA sebesar (Rp10.656.250,01)
 - Koreksi Penyertaan Modal sebesar Rp2.379.623.117,68 di BPKA
 - Koreksi Aset Tetap sebesar Rp9.039.056.450,24 dan Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp14.451.531.084,00) tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 203
Rincian Koreksi Aset dan Akumulasi Penyusutan
pada Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	TAHUN 2025	TAHUN 2024
		(Rp)	(Rp)
a.	Koreksi Aset	9.039.056.450,24	553.156.781.993,17
1	Tanah	0,00	543.116.602.658,12
2	Peralatan dan Mesin	3.459.578.347,37	2.454.656.428,06
3	Gedung dan Bangunan	2.121.963.694,87	6.990.318.584,50
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(198.944.792,00)	2.486.813.757,89
5	Aset Tetap Lainnya	3.066.574.240,00	228.229.900,60
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	(1.522.317.500,00)
7	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	563.000.000,00	(2.116.589.336,00)
8	Aset Tidak Berwujud	289.385.000,00	1.519.067.500,00
9	Aset Lain-lain	(262.500.040,00)	0,00
b.	Akumulasi Penyusutan	(114.451.531.084,00)	(40.432.968.349,64)
1	Peralatan dan Mesin	13.789.502.276,59	(79.026.980,60)
2	Gedung dan Bangunan	(18.401.670.411,45)	(38.524.858.928,15)
3	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(94.839.036.131,15)	(1.990.124.291,81)
4	Aset Tetap Lainnya	75.000,00	0,00
5	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(7.627.604,17)	165.041.850,92
6	Aset Lain-lain	(14.992.774.213,82)	(4.000.000,00)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2025

Tahun 2024

5.6.4 Ekuitas Akhir

Rp14.665.758.626.150,70

Rp14.045.595.713.196,00

Saldo Ekuitas Akhir tahun 2025 sebesar Rp14.665.758.626.150,70 mengalami kenaikan sebesar Rp620.162.912.954,65 atau 4,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 31 SKPD yang ada pada Pemda DIY, sebanyak 13 SKPD atau sebesar 42% mengalami kenaikan ekuitas , sedangkan sisanya sebanyak 18 SKPD atau sebesar 58% mengalami penurunan ekuitas.

Tabel 5. 204
Ekuitas Akhir

NO	SKPD	EKUITAS AKHIR TAHUN 2025 (Rp)	EKUITAS AKHIR TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.884.881.329.504,18	1.838.252.790.358,79	46.628.539.145,39	2,54
2	Dinas Kesehatan	393.354.316.309,54	367.615.511.317,57	25.738.804.991,97	7,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	5.159.673.436.058,79	5.111.697.774.120,71	47.975.661.938,08	0,94
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	106.613.064.083,86	100.795.914.950,69	5.817.149.133,17	5,77
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.710.292.465,18	12.432.014.848,11	(721.722.382,93)	(5,81)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.168.510.539,20	22.302.346.704,03	(1.133.836.164,83)	(5,08)
7	Dinas Sosial	89.652.948.763,74	90.068.198.873,98	(415.250.110,24)	(0,46)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	37.613.513.738,36	40.056.760.546,10	(2.443.246.807,74)	(6,10)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	24.665.479.471,82	22.545.999.388,54	2.119.480.083,28	9,40
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	251.384.124.367,92	132.495.107.320,64	118.889.017.047,28	89,73
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47.589.504.493,82	0,00	47.589.504.493,82	-
12	Dinas Perhubungan	158.029.901.899,72	160.064.774.951,48	(2.034.873.051,76)	(1,27)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	56.004.390.974,43	61.017.799.879,40	(5.013.408.904,97)	(8,22)
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	442.768.283.370,51	449.059.701.470,91	(6.291.418.100,40)	(1,40)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.195.705.966,00	5.167.051.197,39	28.654.768,61	0,55
16	Dinas Kebudayaan	465.702.472.026,92	470.572.624.375,00	(4.870.152.348,08)	(1,03)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	145.005.887.025,84	152.142.282.830,17	(7.136.395.804,33)	(4,69)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	310.178.201.715,66	317.462.494.620,03	(7.284.292.904,37)	(2,29)
19	Dinas Pariwisata	68.970.907.177,05	134.527.032.513,55	(65.556.125.336,50)	(48,73)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	249.629.269.683,23	256.205.173.766,74	(6.575.904.083,51)	(2,57)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	87.381.195.518,21	92.195.330.788,29	(4.814.135.270,08)	(5,22)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ပိယိကိယုယာကုယာကုယုယုယုယုယုယုယုယုယု

NO	SKPD	EKUITAS AKHIR TAHUN 2025 (Rp)	EKUITAS AKHIR TAHUN 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
22	Sekretariat Daerah	240.777.014.582,07	243.538.841.080,59	(2.761.826.498,52)	(1,13)
23	Paniradya Kaistimewan	12.630.299.714,33	13.974.756.698,33	(1.344.456.984,00)	(9,62)
24	Sekretariat DPRD	188.916.960.416,76	83.940.799.245,93	104.976.161.170,83	125,06
25	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	12.215.277.282,41	12.018.176.595,34	197.100.687,07	1,64
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	4.034.761.470.834,36	3.694.315.916.388,01	340.445.554.446,35	9,22
27	Badan Kepegawaian Daerah	78.837.693.611,47	78.487.256.662,46	350.436.949,01	0,45
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	24.499.031.000,56	25.140.925.662,58	(641.894.662,02)	(2,55)
29	Badan Penghubung Daerah	23.588.850.827,30	24.134.978.805,32	(546.127.978,02)	(2,26)
30	Inspektorat	30.300.348.361,86	32.235.893.837,79	(1.935.545.475,93)	(6,00)
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.058.944.365,52	1.131.483.397,46	927.460.968,06	81,97
	JUMLAH	14.665.758.626.150,70	14.045.595.713.196,00	620.162.912.954,69	4,42

